RPJMD KAUR

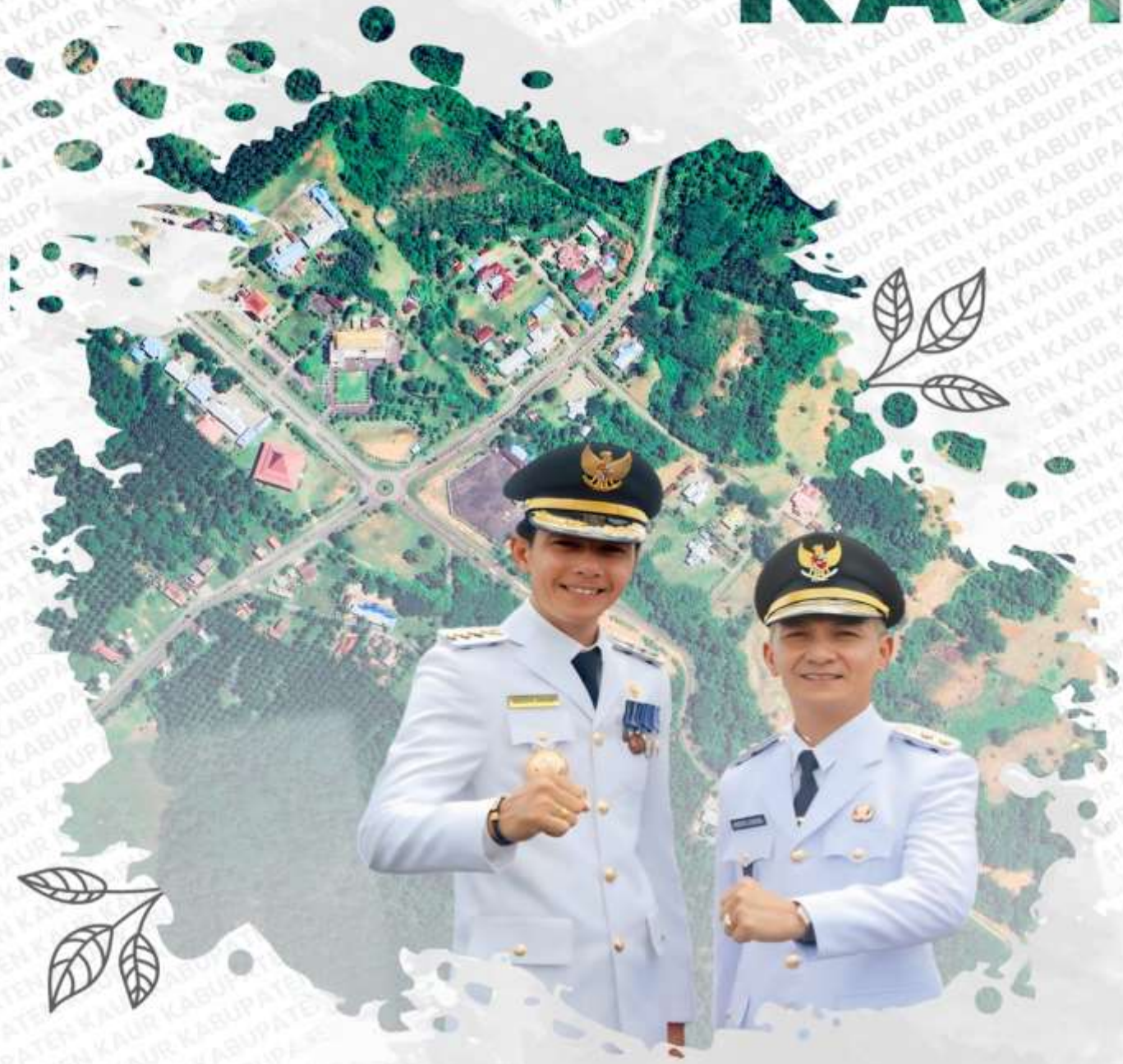

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KAUR

2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
TAHUN 2025

BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KAUR TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 02 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 279, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 23);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR
dan
BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Perangkat Derah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri daeri sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kaur yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.

6. Recana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Perangkat Daerah.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada akhir periode perencanaan sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah.
12. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.
15. Program adalah penjabaran kebijaakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan suber daya yang disediakan untuk mencapai hasill yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II
RPJMD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:
a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
b. penyusunan RKPD.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan visi, misi, dan program pembangunan Bupati.

Bagian Kedua
Sistematika

Pasal 3

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUAN DAERAH
BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB V : PENUTUP

(2) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terhadap implementasi program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.
(3) Tindak lanjut atas pengendalian dan evaluasi implementasi RPJMD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
(4) Tindak lanjut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. Perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan/atau
b. Penyusunan RPJMD periode berikutnya berdasarkan hasil evaluasi RPJMD.

(5) Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Dalam hal masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum ditetapkan, maka untuk kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD tahun berkenaan, Pemerintah Daerah tetap menyusun Rancangan RKPD tahun berkenaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan mempedomani RPJMD berdasarkan Peraturan Daerah ini, serta memperhatikan RPJPD, rencana tata ruang wilayah dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
(2) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini maka penyebutan Perangkat Daerah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 283), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 27 Oktober 2025

BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 27 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

HIFTHARIO SYAHPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2025 NOMOR 309
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR,
PROVINSI BENGKULU 3/44/2025

BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KAUR TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap daerah termasuk Kabupaten Kaur diwajibkan menyusun rencana pembangunan di daerahnya untuk kurun waktu 5 tahun ke depan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen perencanaan ini diharapkan akan mengarahkan setiap daerah untuk dapat mencapai tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Kaur merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Kaur, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa Lima tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 hingga tahun 2029 .

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan perspektif masa depan daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui visi ***"Kabupaten Kaur Maju, Sejahtera dan Bahagia"***

Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara terencana, terarah, dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka disusunlah RPJMD Tahun 2025-2029 . Adapun maksud dari penyusunan dokumen Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah pembangunan daerah selama 5 tahun dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR 30

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029 dapat disusun sebagai pedoman arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Penyusunan RPJMD ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa setiap daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang berlandaskan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Kauruntuk mengelola sumber daya dan kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, dengan tetap menjaga sinergi dengan kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

RPJMD Kabupaten Kaur 2025–2029 disusun berpedoman pada visi Kepala Daerah terpilih, yaitu: "Menuju Kabupaten Kaur yang Maju, Sejahtera, dan Bahagia." Visi ini menjadi dasar dalam perumusan misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan yang akan diimplementasikan selama lima tahun ke depan. RPJMD ini juga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kaur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta berbagai kebijakan strategis lainnya.

Dokumen ini memuat arah pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sebagai dokumen perencanaan, RPJMD ini disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta bottom-up dan top-down, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk

pemerintah daerah, DPRD, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Pendekatan ini dilakukan guna memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan, tantangan, dan aspirasi masyarakat Kabupaten Kaur. RPJMD ini juga mengakomodasi strategi pembangunan yang berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian daerah, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, serta pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah daerah semata, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, sinergi, kolaborasi, dan inovasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan Kabupaten Kaur yang Maju, Sejahtera, dan Bahagia. Dengan adanya RPJMD ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat menjadikannya sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran, guna menciptakan kemajuan yang berkelanjutan bagi Kabupaten Kaur.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kaur 2025–2029 ini. Semoga dokumen ini menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan Kabupaten Kaur yang lebih maju, sejahtera, dan bahagia, serta memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Kaur, 27 Oktober 2025

Bupati,

Gusril Pausi, S.Sos, M.A.P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR xii

BAB I. PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-8
1.4. Maksud dan Tujuan I-15
1.5. Sistematika Penulisan I-18

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-3
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-53
2.3. Aspek Daya Saing Daerah II-103
2.4. Aspek Pelayanan Umum II-132
2.5. Gambaran Keuangan Daerah II-184
2.6. Permasalahan dan Isu Strategis II-199
2.6.1. Permasalan Kabupaten Kaur II-199
2.6.2. Isu Lingkungan Dinamis II-207
2.6.2.1. Isu KLHS RPJMD Kabupaten Kaur 2025-2029 ..... II-208
2.6.2.2. Isu Global II-215
2.6.2.3. Isu Startegis Nasional II-220
2.6.2.4. Isu Strategis Wilayah Sumatera II-231
2.6.2.5. Isu Strategis Provinsi Bengkulu II-232
2.6.2.6. Isu Strategis Kabupaten Kaur II-235

BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran III-1
3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah III-15

BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....IV-1

4.1. Program Perangkat Daerah IVIII-1

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IVIII-15

BAB V. PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel II-1. Nama dan Luasan Kecamatan di Kabupaten Kaur II-1
Tabel II-2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Penyediaan Pangan di Kabupaten Kaur II-10
Tabel II-3. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024 ..... II-12
Tabel II-4. Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kaur II-14
Tabel II-5. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 ..... II-17
Tabel II-6. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 ..... II-18
Tabel II-7. Daya Dukung Air Kabupaten Kaur II-19
Tabel II-8. Persentase Rumah Tangga dengan Penerangan Listrik PLN Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023 ..... II-22
Tabel II-9. Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023 ..... II-24
Tabel II-10. Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023 ..... II-26
Tabel II-11. Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024 ..... II-28
Tabel II-12. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2020-2024 ..... II-31
Tabel II-13. Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kaur 2022-2024 .... II-33
Tabel II-14. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Kaur Tahun 2022-2024 (Jiwa) II-34
Tabel II-15. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2021-2024 ..... II-37

Tabel II-16. Rasio Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2015-2024 .. II-39
Tabel II-17. Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2020-2024 ..... II-42
Tabel II-18. Proyeksi Penduduk Kabupaten KaurTahun 2025–2030 ..... II-44
Tabel II-19. Proyeksi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kaur Tahun 2025-2030 ..... II-45
Tabel II-20. Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kabupaten Kaur Tahun 2024-2030 ..... II-48
Tabel II-21. Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Kaur Tahun 2024-2030 ..... II-49
Tabel II-22. Proyeksi Bonus Demografi Kabupaten Kaur Tahun 2024-2030 ..... II-51
Tabel II-23. Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Kaur Tahun 2024-2030 ..... II-52
Tabel II-24. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota (Persen) dan Provinsi Bengkulu 2014-2024 ..... II-54
Tabel II-25. Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2024 ..... II-57
Tabel II-26. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi Bengkulu 2019-2024 (Juta Rupiah) II-59
Tabel II-27. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2017-2024 ..... II-62
Tabel II-28. Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2014-2024 ..... II-64
Tabel II-29. Indeks Pembangunan Manusia (UHH Hasil LF SP2020) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 ..... II-66
Tabel II-30. Umur Harapan hidup (Hasil LF SP2020) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 ..... II-69
Tabel II-31. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2023 ..... II-71
Tabel II-32. Prevelansi Stunting Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2023 ..... II-73

Tabel II-33. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024 ..... II-75
Tabel II-34. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024 ..... II-78
Tabel II-35. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2024 ..... II-80
Tabel II-36. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Bengkulu 2018-2023 ... II-83
Tabel II-37. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023. ..... II-87
Tabel II-38. Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2023 ..... II-90
Tabel II-39. Indeks Ketimpangan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2019-2024 ..... II-93
Tabel II-40. Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2018-2024 ..... II-96
Tabel II-41. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2018-2024 ..... II-98
Tabel II-42. Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Bengkulu 2016-2023 ..... II-100
Tabel II-43. Angka Ketergantungan Kabupaten Kaur Tahun 2022-2024 ..... II-104
Tabel II-44. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kaur Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah) II-106
Tabel II-45. Rasio Kewirausahaan Kabupaten Kaur Tahun 2024 ..... II-109
Tabel II-46. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2024 ..... II-110
Tabel II-47. Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2021-2024 ..... II-112
Tabel II-48. Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2022-2024 ..... II-116
Tabel II-49. Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kaur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) II-119
Tabel II-50. Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kaur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) II-120

Tabel II-51. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Kaur (km) Tahun 2020-2024 ..... II-122
Tabel II-52. Jumlah dan Luas Area Jaringan Irigasi Kabupaten Kaur II-122
Tabel II-53. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Provinsi Bengkulu 2020-2024(Persen) II-123
Tabel II-54. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024..... II-125
Tabel II-55. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020–2024..... II-127
Tabel II-56. Inflasi Kota Bengkulu tahun 2018-2023 ..... II-131
Tabel II-57. Indeks Reformasi Hukum 2024 ..... II-132
Tabel II-58. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2021-2024 .....II-134
Tabel II-59. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten/Kota di Provinsi Bangkulu Tahun 2021-2024.....II-136
Tabel II-60. Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024 .....II-139
Tabel II-61. Indeks Birokrasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024..... II-141
Tabel II-62 Jumlah Keseluruhan Perda/Perkada Yang Memuat Sanksi Yang Yang Di Tegakan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024 .....II-143
Tabel II-63 Tabel Capaian Rata-rata Aksi HAM Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bengkulu 2024.....II-143
Tabel II-64 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Kaur Tahun 2022-2023.....II-144
Tabel II-65. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bengkulu tahun 2021-2023 ..II-145
Tabel II-66. Skor IDSD Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2022.....II-150
Tabel II-67. Skor IDSD Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2023.....II-150

Tabel II-68. Skor IDSD Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2024 ..... II-150
Tabel II-69 Target dan Realisasi IKD Tahun 2021-2024 ..... II-161
Tabel II-70. Realisasi APBD Kabupaten Kaur 2020-2024 ..... II-184
Tabel II-71. Tabel Neraca Kabupaten Kaur Tahun 2020-2024 ..... II-192
Tabel II-72. Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2026-2030 ..... II-194
Tabel II-73 Isu Strategis Transformasi Sosial Nasional II-222
Tabel II-74 Isu Strategis Transformasi Ekonomi Nasional II-224
Tabel II-75. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola Pemerintahan II-227
Tabel II-76. Isu Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia... II-229
Tabel II-77. Isu Ketahanan Sosial dan Politik II-230
Tabel II-78 Isu Stratgeis Daerah II-236
Tabel III-1. Keselarasan Misi Pada RPJPD Kabupaten Kaur dengan RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029 ..... III-4
Tabel III-2. Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029 dengan Asta Cita III-9
Tabel III-3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah III-11
Tabel III-4. Perencanaan Pembangunan Daerah III-23
Tabel III-5. Kondisi Kinerja Saat Ini Terhadap Misi 1 ..... III-26
Tabel III-6. Kondisi Kinerja Saat Ini Terhadap Misi 2 ..... III-27
Tabel III-7. Kondisi Kinerja Saat Ini Terhadap Misi 3 ..... III-29
Tabel III-8. Kondisi Kinerja Saat Ini Terhadap Misi 4 ..... III-31
Tabel III-9. Penahapan Pembangunan RPJMD III-34
Tabel III-10. Perumusan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kaur III-39
Tabel III-11 Arah Kebijakan dan Program Prioritas Rekomendasi KLHS III-43
Tabel III-12 Kaur Sebagai Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana III-51
Tabel III-13 Hasil Analisis LQ (*Location Quotient*) dan SS (*Shift Sharel*) III-55
Tabel III-14 Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Kaur III-57

Tabel III-15. Program Prioritas Kepala Daerah III-59
Tabel III-16 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dan Nasional III-63
Tabel III-17 Keselarasan Program Unggulan/Prioritas Kabupaten Kaur dengan Provinsi dan Nasional III-64
Tabel III-18. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Kaur (Target 2025-2030) III-70
Tabel IV-1. Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah IV-3
Tabel IV-2 Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2025-2030 ..... IV-111
Tabel IV-3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) IV-114

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya I-9

Gambar II-1. Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024 ..... II-13

Gambar II-2 Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kaur II-15

Gambar II-3. Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Kaur II-21

Gambar II-4. Perbandingan Persentase Rumah Tangga dengan Penerangan Listrik PLN Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2023 ..... II-23

Gambar II-5. Perbandingan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2023 ..... II-29

Gambar II-6 Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2020–2024 ..... II-32

Gambar II-7. Piramida Penduduk Tahun 2024 ..... II-36

Gambar II-8. Perbandingan Rasio Penduduk Laki-Laki terhadap Perempuan Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2015–2024 ..... II-41

Gambar II-9. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2018–2024 ..... II-55

Gambar II-10.Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2018–2024 ..... II-58

Gambar II-11. Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024 ..... II-60

Gambar II-12. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2017–2024 ..... II-63

Gambar II-13. Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2018–2024 ..... II-65

Gambar II-14. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2020–2024 ..... II-67

Gambar II-15. Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2020–2024 ..... II-70
Gambar II-16. Perbandingan Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Kaur dan Provinsi Bengkulu Tahun 2018–2023 ..... II-72
Gambar II-17. Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024 ..... II-76
Gambar II-18. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024 ..... II-79
Gambar II-19 Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024 ..... II-95
Gambar II-20. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2018–2024 ..... II-97
Gambar II-21. Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024 ..... II-99
Gambar II-22. Indeks Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kaur Tahun 2022-2024 ..... II-112
Gambar II-23. Permasalahan Kabupaten Kaur II-200
Gambar II-24. Isu Strategis Nasional II-221
Gambar II-25. Isu Strategis Wilayah Sumatera II-231
Gambar II-26. Isu Strategis Provinsi Bengkulu II-232
Gambar III-1. Logic Model III-16
Gambar III-2. Strategi Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Kaur III-17
Gambar III-3 Tahapan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaen Kaur Tahun 2025-2045 ..... III-33
Gambar III-4 Tema Pembangunan Kabupaten Kaur III-37
Gambar III-5 Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Bengkulu III-50
Gambar III-6 Peta Pengaturan dan Perlindungan dari Bencana (R3) III-53
Gambar III-7 Peta Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas III-53

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten KaurTahun 2025–2029 merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada bagian kedua tentang perencanaan pembangunan daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap daerah, sesuai dengan kewenangannya, wajib menyusun rencana pembangunan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, RPJMD disusun sebagai dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, RPJMD disusun berdasarkan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur bahwa RPJPD disusun dengan kurun waktu yang sama dengan RPJPN, sementara RPJMD disusun setiap lima tahun sebagai tahapan implementatif dari RPJPD. Dengan demikian, penyusunan RPJMD Kabupaten Kaur2025–2029 bertujuan untuk merumuskan arah pembangunan jangka menengah dengan mempertimbangkan dinamika lokal serta arah kebijakan nasional dan provinsi.

Lebih lanjut, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyesuaikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dengan regulasi terbaru. Instruksi ini menekankan pentingnya:

1. Konsistensi antara visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dengan dokumen RPJMD.
2. Integrasi prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
3. Penekanan pada pencapaian program prioritas Presiden, program prioritas Gubernur, serta isu-isu strategis daerah.
4. Peningkatan kualitas perencanaan yang berbasis pada data, evaluasi kinerja periode sebelumnya, dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, keberadaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 menjadi pedoman operasional yang memperkuat landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029 agar lebih responsif terhadap kebutuhan daerah sekaligus selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, penyusunan RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029 juga mengacu pada prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah menjadi komitmen global. TPB/SDGs terdiri dari 17 tujuan utama yang mencakup berbagai aspek pembangunan mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengelolaan lingkungan yang lestari, hingga pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dengan mengintegrasikan TPB/SDGs sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Kaur berupaya memastikan bahwa arah kebijakan dan program pembangunan daerah selaras dengan target-target pembangunan berkelanjutan yang bersifat global dan nasional.

Integrasi TPB/SDGs dalam RPJMD menjadi landasan penting agar setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat memberikan dampak positif yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi masyarakat, lingkungan, dan ekonomi daerah. Hal ini juga menjadi wujud komitmen Kabupaten Kaur untuk berkontribusi pada pencapaian target-target pembangunan nasional dan internasional serta meningkatkan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Kaur 2025–2029 tidak hanya berfokus pada pembangunan jangka menengah yang efektif dan efisien, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu sesuai dengan semangat pembangunan berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Kaur2025–2029 juga disusun sebagai tindak lanjut dari hasil pemilihan kepala daerah yang telah dilaksanakan secara demokratis. RPJMD ini menjadi instrumen utama dalam menerjemahkan visi, misi, dan program kerja kepala daerah terpilih ke dalam kebijakan dan arah pembangunan. Dalam prosesnya, penyusunan RPJMD tetap memperhatikan konsistensi dan integrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJPD, RTRW, dan KLHS, guna memastikan keberlanjutan dan sinergi kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten.

Kabupaten Kaurmemiliki berbagai potensi pembangunan yang dapat dioptimalkan dalam periode RPJMD ini, khususnya di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan pariwisata berbasis alam dan budaya. Sektor-sektor tersebut merupakan penggerak utama ekonomi lokal dan memiliki prospek pengembangan yang menjanjikan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi juga cukup kompleks, antara lain masih tingginya ketergantungan terhadap sektor primer, kesenjangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, serta permasalahan lingkungan dan dampak perubahan iklim yang perlu dikelola secara bijak.

Periode RPJMD 2025–2029 merupakan fase strategis dalam rangka meletakkan fondasi transformasi pembangunan menuju Kabupaten Kauryang Maju, Sejahtera, dan Bahagia. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi ini akan menjadi dasar untuk menciptakan perubahan yang berdampak nyata, serta mempersiapkan Kabupaten Kaurdalam menghadapi tantangan pembangunan jangka panjang.

Penyusunan RPJMD ini juga mempertimbangkan berbagai dinamika global, nasional, dan regional, seperti perkembangan teknologi, transformasi digital, isu ketahanan pangan, transisi energi, serta pembangunan rendah karbon. Respons terhadap isu-isu tersebut sangat penting agar Kabupaten Kaurtidak hanya adaptif, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing di tingkat regional dan nasional.

Akhirnya, RPJMD Kabupaten Kaur2025–2029 diharapkan menjadi dokumen strategis dan operasional dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dengan landasan data yang kuat dan dukungan partisipatif dari seluruh pemangku kepentingan, RPJMD ini akan menjadi acuan utama dalam mewujudkan Kabupaten Kauryang Maju, Sejahtera, dan Bahagia, serta menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku untuk memastikan kepastian hukum, konsistensi dengan dokumen perencanaan lain seperti RPJPD, RPJMN, dan RTRW, serta menjaga efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah. Kepatuhan terhadap regulasi juga menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan kepentingan publik, sehingga kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan serta selaras

dengan kebutuhan masyarakat. Adapun dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur

(Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024 Nomor 301);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 02 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 279, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 23); dan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 29);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta ketentuan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah mengenai RPJPD dan RPJMD, perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, adil secara sosial, ekonomi, dan ekologis.

Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kaur tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, melestarikan nilai-nilai budaya lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks ini, pembangunan berkelanjutan menjadi arah strategis Pemerintah Kabupaten Kaur

dalam mendorong transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif, tangguh, serta mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan global dan nasional.

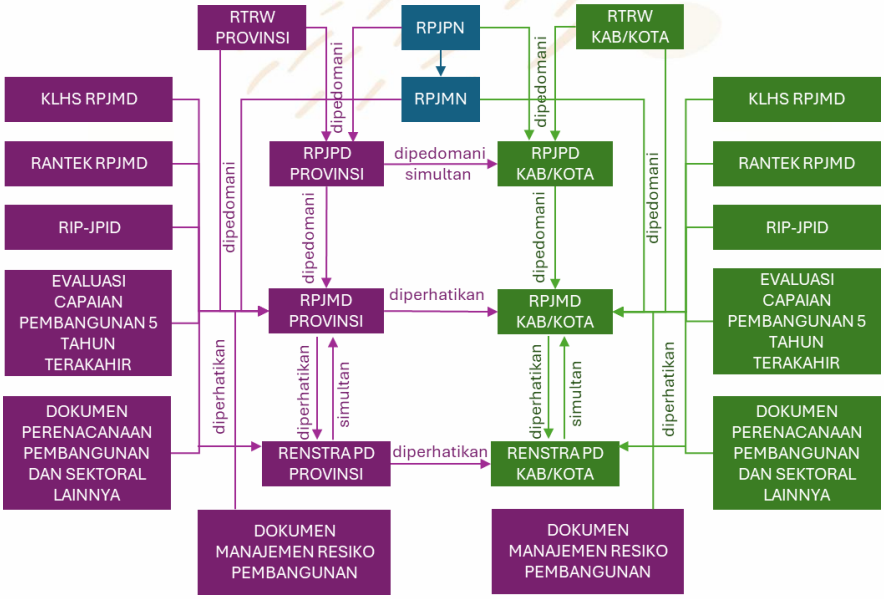

Gambar I-1. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

Upaya tersebut diarahkan untuk mencapai empat sasaran utama pembangunan daerah:

1. Meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan miskin;
2. Memperluas kesempatan kerja dan berusaha melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif serta penguatan sektor UMKM;
3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar; serta
4. Memperkuat daya saing daerah melalui inovasi, transformasi digital, dan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kaur menyusun RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah lima tahunan yang memiliki keterkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dari

dokumen perencanaan pembangunan lainnya di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kaur mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan nasional, yaitu:

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan harus selaras dengan RPJPD Kabupaten Kaur, RPJMD Provinsi Bengkulu, serta RPJMN;
2. Dilaksanakan secara partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah, DPRD, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas;
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan perencanaan pembangunan daerah agar pembangunan sejalan dengan kapasitas dan fungsi ruang yang tersedia;
4. Disusun berdasarkan analisis kondisi aktual, potensi unggulan daerah, serta dinamika pembangunan yang berkembang, dengan landasan data dan hasil evaluasi pembangunan sebelumnya.

A. Hubungan RPJMD Kabupaten Kaur dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang memiliki peran sentral dalam pembangunan daerah. Dokumen ini bukan sekadar penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, tetapi juga menjadi bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang saling terhubung secara vertikal maupun horizontal. Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dan memperhatikan keterpaduan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

RPJMD Kabupaten Kaur memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen-dokumen strategis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui tahapan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun). Adapun keterkaitan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

   RPJPN merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional selama 20 tahun yang menjadi penjabaran dari tujuan pembentukan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen ini memuat visi, misi, dan arah pembangunan nasional, yang menjadi landasan strategis bagi seluruh dokumen perencanaan pembangunan di tingkat daerah, termasuk RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kaur.

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

   RPJPD Kabupaten Kaur 2025–2045 disusun dengan mengacu pada RPJPN dan merupakan acuan utama dalam penyusunan RPJMD. RPJPD memuat visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun dan menjadi fondasi dalam merancang pembangunan daerah secara berkelanjutan.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

   RPJMD Kabupaten Kaur disusun untuk periode lima tahun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Dalam penyusunannya, RPJMD berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kaur, memperhatikan RPJMD Provinsi Bengkulu, serta RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). RPJMD juga harus berpedoman pada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Kaur untuk menjamin kesesuaian antara rencana pembangunan dan struktur tata ruang wilayah.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan RPJMD dan mengacu pada RKPD Provinsi Bengkulu serta RKP Nasional. RKPD menjadi dokumen operasional yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan tahunan, rencana kerja dan pembiayaan yang akan diimplementasikan melalui mekanisme penganggaran.

5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)

Kabupaten Kaur sebagai dokumen perencanaan menengah di tingkat perangkat daerah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program kerja sektoral.

6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Kabupaten Kaur sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPD.

B. Dokumen Teknis Pendukung Penyusunan RPJMD

Selain merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan utama di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, penyusunan RPJMD Kabupaten Kaur juga dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai dokumen teknis dan pendukung substantif. Tujuannya adalah untuk memperkuat kualitas perencanaan dan ketepatan kebijakan pembangunan yang akan dirumuskan selama periode lima tahun ke depan. Dokumen-dokumen pendukung ini berfungsi sebagai landasan ilmiah, normatif, dan operasional dalam memastikan RPJMD menjadi instrumen pembangunan yang relevan, kontekstual, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan.

Dokumen-dokumen tersebut antara lain:

a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD)

KLHS menjadi instrumen utama dalam menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan—baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan hidup—terintegrasi dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Dokumen ini mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Kabupaten Kaur secara sistematis dan terukur.

b. Rancangan Teknokratik RPJMD

Dokumen ini disusun secara objektif dan berbasis data oleh perangkat daerah dengan pendekatan teknokratik, guna menyediakan dasar awal dalam merumuskan kebijakan, strategi, serta program pembangunan yang rasional dan akuntabel. Rancangan teknokratik memperkuat aspek logis, efisien, dan evidence-based dalam proses perencanaan.

c. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIP-JPID)

RIP-JPID digunakan sebagai acuan untuk mendorong pembangunan berbasis pengetahuan melalui penguatan riset, inovasi, dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Bagi Kabupaten Kaur, dokumen ini sangat penting dalam mempercepat transformasi ekonomi lokal, meningkatkan produktivitas daerah, serta membangun ekosistem inovasi lintas sektor, khususnya di sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM.

d. Evaluasi Capaian Pembangunan Lima Tahun Terakhir

Evaluasi ini menjadi bahan reflektif yang penting untuk mengukur keberhasilan, efektivitas, dan hambatan dalam pelaksanaan RPJMD sebelumnya. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam merumuskan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Kaur, sekaligus memperkuat kontinuitas kebijakan yang berdampak positif terhadap masyarakat.

e. Dokumen Perencanaan Sektoral dan Tematik Lainnya

RPJMD Kabupaten Kaur juga mengintegrasikan berbagai dokumen sektoral (seperti rencana pembangunan bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur) serta dokumen tematik lintas sektor (seperti mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan). Integrasi ini penting agar arah pembangunan lintas sektor dapat berjalan harmonis, tidak tumpang tindih, dan saling memperkuat.

Keterpaduan dan konsistensi RPJMD dengan seluruh dokumen perencanaan tersebut merupakan prasyarat penting agar pembangunan di Kabupaten Kaur dapat berlangsung secara sistematis, inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan formal lima tahunan, tetapi juga sebagai roadmap pembangunan daerah yang berbasis data, partisipatif, dan berorientasi pada hasil (result-based planning).

Lebih jauh, RPJMD juga menjadi referensi utama dalam penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Pembangunan Daerah. Dengan dokumen ini, Pemerintah Kabupaten Kaur diharapkan dapat mengidentifikasi potensi risiko pembangunan sejak dini, menyusun strategi mitigasi yang efektif, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap ketidakpastian sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin terjadi selama periode perencanaan.

1.4. Maksud dan Tujuan

A. Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Kaur 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029 bertujuan untuk menjadi pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang selaras dengan visi Bupati Kaur Tahun 2025–2029, yaitu "Menuju Kabupaten Kaur yang Maju, Sejahtera, dan Bahagia." Dokumen ini disusun sebagai langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mempercepat pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kaur.

RPJMD ini diharapkan menjadi dasar dalam merancang kebijakan dan program yang terarah guna menciptakan Kabupaten Kaur yang Maju, melalui penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan daya saing daerah; Sejahtera, melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; serta Bahagia, dengan terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan berkeadilan sosial. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat—termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas lokal—RPJMD ini disusun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat Kaur.

Lebih dari sekadar dokumen perencanaan, RPJMD ini merupakan panduan strategis kepala daerah dalam mewujudkan visi dan misi melalui kebijakan dan program yang berdampak nyata. Dengan sinergi lintas sektor dan pendekatan berbasis data, RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjadi landasan kuat dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan rakyat, demi terwujudnya masyarakat Kaur yang benar-benar maju, sejahtera, dan bahagia.

B. Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Kaur 2025-2029

Tujuan dari disusunnya RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah

   RPJMD ini bertujuan untuk menguraikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kaur terpilih ke dalam arah pembangunan yang konkret dan terukur, selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan keterkaitan dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi.

2. Menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

   RPJMD menjadi instrumen utama dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kaur yang responsif terhadap isu-isu strategis, tantangan lokal, dan kebutuhan riil masyarakat, guna menjamin tercapainya pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

3. Mengintegrasikan dan Menyelaraskan Program

   RPJMD disusun untuk mendorong sinergi antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi, serta memastikan keterpaduan antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan berbasis potensi dan kearifan lokal.

4. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya

   RPJMD bertujuan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya daerah, termasuk anggaran, secara efektif dan efisien agar dapat memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah.

5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

   Dokumen ini dirancang untuk menyusun strategi dan program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat melalui pengembangan sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur secara berkelanjutan dan merata.

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

   RPJMD menjadi landasan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pembangunan daerah, serta meningkatkan kapasitas dan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada hasil.

7. Meningkatkan Daya Saing Daerah

   RPJMD diarahkan untuk mengembangkan potensi unggulan Kabupaten Kaur, seperti sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, guna meningkatkan daya saing ekonomi dan kemandirian daerah dalam menghadapi dinamika global, regional, dan nasional.

8. Menanggulangi Permasalahan Strategis Daerah

   RPJMD disusun untuk merumuskan solusi terhadap berbagai tantangan daerah seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan antarwilayah, rendahnya kualitas SDM, serta isu-isu lingkungan hidup yang berpotensi menghambat pembangunan.

9. Menjamin Keberlanjutan Pembangunan

   Salah satu tujuan utama dari RPJMD ini adalah merancang pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta kehidupan sosial dan budaya masyarakat Kaur.

Dengan adanya RPJMD ini, diharapkan Kabupaten Kaur dapat berkembang menjadi daerah yang Maju, Sejahtera, dan Bahagia, sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. RPJMD ini menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam

membangun Kabupaten Kaur yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

   Bab I paling sedikit memuat:

   a. Latar belakang;

      Merumuskan latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD serta tanggal pelantikan dan masa bakti/periodesasi kepala daerah.

   b. Dasar hukum penyusunan;

      Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

   c. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;

      Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

(RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJPD, Rencana Sektoral) dan disertai dengan gambar keterkaitannya.

d. Maksud dan tujuan; dan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.

e. Sistematika penulisan.

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

2. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

a. Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah paling sedikit memuat:

i. Aspek geografi dan demografi;

ii. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;

iii. Aspek Daya Saing Daerah;

iv. Aspek Pelayanan Umum.

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

i. Standar Pelayanan Minimal;

ii. Kerjasama daerah;

iii. Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD provinsi di kabupaten/kota; dan

iv. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda.

b. Subbab Gambaran Keuangan Daerah paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.

c. Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis paling sedikit memuat:

i. a. Permasalahan pembangunan daerah; dan

ii. b. Isu strategis daerah.

3. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

a. Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran paling sedikit memuat:

i. a. Visi dan Misi; dan

ii. b. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

b. Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah paling sedikit memuat:

i. a. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan

ii. b. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

4. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

a. Subbab Program Perangkat Daerah paling sedikit memuat:

i. a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan

ii. b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

b. Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:

i. a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan

ii. b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

5. BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kabupaten Kaur memiliki luas wilayah 2.365 km2 dengan panjang garis pantai 89,17 km2 dan luas wilayah laut seluas 660,59 km2. Kabupaten Kaur juga memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lahat
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaen Pesisir Barat
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu

Secara administratif, Kabupaten Kaur terbagi ke dalam 15 (lima belas) kecamatan, 3 (tiga) kelurahan, dan 192 desa. Berikut adalah rincian data administrasi wilayah Kabupaten Kaur:

Tabel II-1. Nama dan Luasan Kecamatan di Kabupaten Kaur

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Wilayah	
				(km2)	(%)
Nasal	Merpas		17	519,92	21,98
Maje	Linau		19	361,04	15,27
Kaur Selatan	Bintuhan	1	18	92,75	3,92
Tetap	Tetap		12	87,92	3,72
Kaur Tengah	Tanjung Iman	1	8	26,40	1,12
Luas	Bernua ratu		12	124,88	5,28
Muara Sahung	Ulak Lebar		7	256,00	10,82
Kinal	Tanjung Baru		14	154,03	6,51
Semidang Gumay	Mentiring		13	64,91	2,74
Tanjung Kemuning	Tanjung Kemuning		20	72,91	3,08
Kelam Tengah	Rigangan		13	35,84	1,52
Kaur Utara	Simpang Tiga	1	10	49,80	2,11
Padang Guji Hilir	Gunung Kayu		9	115,96	4,90
Lungkang Kule	Sukananti		9	32,00	1,35
Padang Guji Hulu	Bungin Tambun		11	370,64	15,67
Total Luas Wilayah		3	192	2.365,00	100%

Sumber : Kabupaten Kaur Dalam Angka Tahun 2024

Kabupaten Kaur memiliki letak geografis pada posisi lintang 4015'8,21"-4055'27,27" Lintang Selatan dan 10304'8,76"-103046'50,12" Bujur Timur. Kabupaten Kaur terletak di pesisr pantai barat pulau Sumatera dan terletak di sebelah Barat Pegunungan Bukit Barisan, serta termasuk dalam wilayah administrasi paling selatan Provinsi Bengkulu sekitar 250 km dari ibukota Provinsi Bengkulu. Kabupaten Kaur terletak antara Kabupaten Bengkulu Selatan di bagian Utara, sebelah Selatan dengan Provinsi Lampung, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan bagian Barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kaur berada pada jalur Bukit Range dengan ketinggian 100-1.000mdpl. Wilayah jalur Bukit Range mencapai 61% dari luas wilayah Kabupaten Kaur. Jalur dataran rendah dengan ketinggian 0-100 mdpl mencapai 9% dari luas wilayah Kabupaten Kaur yang terdiri dari Kecamatan Tanjung Kemuning, Semidang Gumay, Kaur Utara, Tetap, Kaur Selatan, Maje dan Nasal. Semenatara itu, 30% wilayah Kabupaten Kaur berada di wilayah jalur pegunungan dengan ketinggian >1.000mdpl yang termasuk ke dalam jalur kawasan bukit barisan.

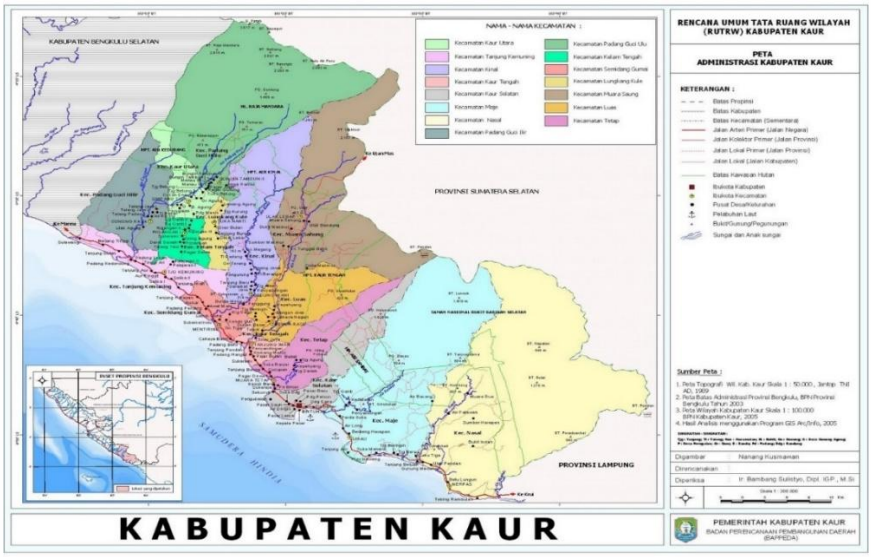

Gambar II. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kaur

Sumber: Rencana UmumTata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaur

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan dua faktor utama yang berperan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Aspek geografi mencakup letak, luas wilayah, topografi, iklim, dan potensi sumber daya alam yang dimiliki suatu wilayah. Sementara itu, aspek demografi berkaitan dengan karakteristik penduduk, seperti jumlah, distribusi, kepadatan, komposisi usia, tingkat pertumbuhan penduduk, serta struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Kedua aspek ini saling terkait dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, termasuk dalam dokumen perencanaan jangka menengah seperti RPJMD Kabupaten Kaur.

Dalam konteks Kabupaten Kaur, aspek geografi menentukan potensi dan tantangan pembangunan wilayah. Kabupaten Kaur terletak di bagian selatan Provinsi Bengkulu dan memiliki posisi strategis yang berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung dan Samudera Hindia. Luas wilayah yang cukup besar dengan topografi yang bervariasi—mulai dari kawasan pesisir hingga perbukitan—menjadi faktor penting dalam pengembangan infrastruktur, pemerataan akses layanan publik, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata bahari.

Sementara itu, dari aspek demografi, jumlah penduduk Kabupaten Kaur yang terus bertambah memberikan tantangan dalam penyediaan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, serta lapangan pekerjaan yang memadai. Komposisi usia produktif yang cukup besar menjadi potensi demografis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah apabila dikelola secara optimal. Di sisi lain, distribusi penduduk yang tersebar di wilayah pedesaan juga memerlukan strategi khusus dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup.

Dalam RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029, aspek geografi dan demografi menjadi landasan dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan

daerah, baik dari sisi pemerataan infrastruktur, penguatan layanan publik, pengelolaan lingkungan, hingga pengembangan sektor unggulan berbasis potensi lokal. Pemahaman mendalam terhadap karakteristik geografis dan demografis ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Kaur berlangsung secara efektif, inklusif, berkelanjutan, serta mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat secara menyeluruh.

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Kaur, sebagai bagian integral dari wilayah selatan Provinsi Bengkulu, memainkan peran strategis dalam mendorong pembangunan regional dan nasional. Dengan luas wilayah mencapai 2.365 km² atau sekitar 11,89% dari total luas Provinsi Bengkulu, dan garis pantai sepanjang 98,17 km, Kabupaten Kaur memiliki posisi geografis yang sangat potensial, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, konektivitas, maupun sosial budaya. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sebelah barat dan Provinsi Lampung di selatan, menjadikan Kabupaten Kaur sebagai gerbang lintas provinsi sekaligus simpul konektivitas antarwilayah di barat Pulau Sumatera.

Posisi strategis tersebut diperkuat oleh keberadaan Jalan Lintas Barat Sumatra, bagian dari jaringan jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Lampung dan provinsi-provinsi lain di Sumatera. Jalur ini memfasilitasi arus logistik dan mobilitas penduduk antarwilayah, sekaligus membuka peluang investasi di sektor perdagangan, jasa, dan industri pengolahan. Dalam konteks perencanaan spasial, Kabupaten Kaur berpotensi tumbuh sebagai pusat pertumbuhan penyangga (*secondary growth center*) bagi kawasan selatan Bengkulu, yang mendukung kota-kota utama seperti Manna dan Bintuhan sebagai pusat distribusi dan perdagangan regional.

Dari sisi ekonomi, Kabupaten Kaur merupakan salah satu lumbung komoditas unggulan Bengkulu, terutama di sektor pertanian dan perikanan. Di bidang lingkungan hidup, Kabupaten Kaur memiliki kontribusi besar dalam

menjaga kelestarian alam melalui Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Sebagian wilayah Kaur masuk dalam kawasan konservasi prioritas nasional seluas 355.511 hektare, yang menjadi habitat bagi satwa langka seperti gajah Sumatra, harimau Sumatra, dan badak Sumatra. Peran ini sangat penting dalam penyediaan jasa ekosistem vital seperti penyimpanan karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penyangga perubahan iklim. Kabupaten Kaur dengan demikian menjadi bagian dari sistem ekologis regional yang menjaga keseimbangan lingkungan hidup di sepanjang Pegunungan Bukit Barisan.

Dari sisi sosial budaya, Kabupaten Kaur memiliki kekayaan kultural yang mencerminkan identitas lokal Provinsi Bengkulu. Tradisi Bimbang Gedang, upacara adat pernikahan yang masih dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat Serawai dan Pekal, menjadi bukti bahwa Kabupaten Kaur merupakan penjaga tradisi dan kearifan lokal yang masih kuat di tengah arus modernisasi. Nilai-nilai budaya ini berpotensi besar dikembangkan menjadi daya tarik wisata berbasis budaya yang mendukung ekonomi kreatif dan memperkuat karakter masyarakat.

Dengan segala potensi dan kontribusinya, Kabupaten Kaur memiliki peran penting tidak hanya bagi Provinsi Bengkulu, tetapi juga dalam konteks pembangunan kawasan barat Sumatera. Kaur berperan sebagai lumbung pangan dan hasil laut, koridor logistik antarprovinsi, penyangga konservasi ekologi, dan penjaga identitas budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan pusat untuk memperkuat peran strategis ini melalui pengembangan kawasan industri berbasis potensi lokal, perencanaan wilayah yang inklusif, serta perlindungan terhadap ekosistem dan warisan budaya. Dengan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis data, Kabupaten Kaur dapat tumbuh menjadi aktor utama pembangunan regional yang inklusif, resilien, dan berdaya saing di wilayah Sumatera bagian barat.

B. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Kaur merupakan wilayah yang dikaruniai sumber daya alam yang kaya dan beragam, baik di wilayah daratan maupun perairan, yang menjadi modal utama dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal. Keberagaman lanskap alam dan kekayaan hayati yang dimiliki Kabupaten Kaur menjadikannya sebagai salah satu daerah dengan prospek pembangunan berkelanjutan yang kuat di Provinsi Bengkulu.

1. Potensi Pertanian dan Hortikultura: Pilar Ketahanan Pangan Daerah

   Kabupaten Kaur memiliki wilayah daratan yang subur dan iklim tropis yang mendukung budidaya berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura. Potensi ini menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan. Produksi padi sawah sebesar 47.148 ton per tahun menunjukkan bahwa Kaur mampu menopang kebutuhan beras tidak hanya untuk konsumsi lokal, tetapi juga memiliki potensi distribusi antarwilayah. Komoditas jagung dan ubi kayu menjadi sumber pangan alternatif sekaligus bahan baku industri pakan dan makanan olahan.

   Tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, pisang, durian, jeruk, dan sayuran lainnya tersebar luas di kawasan dataran tinggi dan perbukitan. Potensi ini sangat mendukung pengembangan kawasan hortikultura terpadu berbasis desa, yang tidak hanya memperkuat ketahanan pangan lokal, tetapi juga membuka peluang pasar baru ke kota-kota di Bengkulu dan Lampung. Penguatan kelembagaan petani dan peningkatan akses ke teknologi pertanian modern menjadi langkah penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor ini.

2. Keanekaragaman Hayati dan Konservasi: Pilar Ekologis Sumatera Barat Daya

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kaur berbatasan langsung dengan kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), yang memiliki luas lebih dari 355.000 hektare. Kawasan ini adalah salah satu hutan hujan tropis penting di Sumatera yang menjadi habitat bagi spesies endemik dan dilindungi, seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan rangkong.

Fungsi ekologis dari kawasan ini sangat vital, karena berperan sebagai penyerap karbon, penyedia air tanah, serta penyangga dari perubahan iklim dan bencana alam seperti banjir dan longsor. Kabupaten Kaur sebagai bagian dari zona penyangga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Potensi ini sangat mendukung pengembangan ekowisata konservasi, program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, serta proyek hijau berbasis partisipatif seperti agroforestry dan ekowisata hutan.

3. Wisata Alam dan Ekowisata: Alternatif Wisata Masa Depan

Topografi Kabupaten Kaur yang kaya akan perbukitan, sungai, dan air terjun menciptakan potensi besar bagi sektor ekowisata dan wisata petualangan. Air Terjun Lembah Pelangi dan Air Terjun Kemuning Bukit tidak hanya indah secara visual, tetapi juga menjadi simbol kekayaan alam yang belum banyak dijamah. Pengembangan wisata alam ini, jika dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan lestari, dapat menjadi alternatif ekonomi hijau bagi masyarakat sekitar. Wisata alam juga dapat terintegrasi dengan kegiatan edukasi, konservasi, dan pengembangan desa wisata. Konsep geowisata dan wisata berbasis edukasi lingkungan dapat menjadi andalan Kaur dalam membangun wisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

4. Kelautan dan Perikanan: Basis Ekonomi Maritim Masyarakat Pesisir

Kabupaten Kaur memiliki garis pantai yang panjang dengan potensi hasil laut yang melimpah. Produksi perikanan tangkap mencapai 7.677 ton (2022), menjadikan sektor ini sebagai andalan bagi ribuan nelayan di Kecamatan Maje, Nasal, dan Kaur Selatan. Komoditas seperti ikan pelagis (tongkol, tuna), serta gurita tidak hanya dikonsumsi lokal, tetapi juga telah dikembangkan dalam bentuk olahan seperti kerupuk gurita, yang menjadi ikon kuliner khas daerah. Potensi perikanan juga mencakup pengembangan budidaya air payau dan perikanan darat seperti kolam ikan air tawar, yang cocok untuk wilayah pedalaman. Dengan pendekatan hilirisasi dan dukungan infrastruktur seperti cold storage, sentra pengolahan ikan, serta pelatihan nelayan modern, sektor ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi pesisir yang inklusif.

5. Wisata Bahari dan Sejarah: Aset Pariwisata yang Perlu Dioptimalkan

Pantai-pantai di Kabupaten Kaur menyimpan keindahan yang belum sepenuhnya tergarap optimal. Pantai Way Hawang, Pantai Linau, dan Pantai Pasar Lama memiliki keunikan tersendiri baik dari sisi bentang alam maupun sejarah. Pantai Linau, misalnya, dikenal sebagai pelabuhan penting pada masa kolonial Belanda dan memiliki potensi dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah maritim. Potensi wisata bahari ini dapat mendukung penciptaan lapangan kerja baru di sektor informal, seperti pemandu wisata, homestay, kuliner pantai, dan penyewaan peralatan wisata air. Dengan pengembangan branding dan promosi digital yang kuat, kawasan pesisir Kaur berpeluang menjadi destinasi unggulan baru di Bengkulu selatan.

6. Kerajinan dan Industri Kreatif: Warisan Budaya yang Bernilai Ekonomi

Masyarakat Kaur memiliki tradisi kerajinan tangan yang diwariskan secara turun-temurun. Produk seperti lukisan relief semen, ukiran kayu,

anyaman bambu, dan batik lokal merupakan bentuk ekspresi budaya yang dapat dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif bernilai tinggi. Dengan dukungan pelatihan desain, akses pasar digital, dan fasilitasi pameran, pelaku UMKM lokal dapat meningkat daya saingnya di pasar regional dan nasional. Pengembangan sentra kerajinan di desa-desa potensial juga bisa menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru berbasis ekonomi kreatif, khususnya bagi perempuan dan generasi muda.

7. Budaya dan Identitas Suku Kaur: Pilar Kultural yang Kuat

   Suku Kaur merupakan kelompok etnis yang memiliki nilai-nilai sosial dan budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Tradisi seperti upacara adat, struktur kekerabatan, tarian daerah, dan bahasa lokal menjadi aset yang sangat berharga dalam membangun pariwisata budaya dan pendidikan karakter lokal. Identitas ini juga penting dalam menjaga kohesi sosial dan membangun kebanggaan daerah.

   Pelestarian dan dokumentasi budaya Kaur perlu menjadi bagian dari program pembangunan sosial daerah, serta menjadi bahan promosi kebudayaan yang dapat menguatkan posisi Kaur dalam peta budaya Bengkulu dan Sumatera.

Dengan keragaman dan kekayaan sumber daya yang dimiliki, Kabupaten Kaur memiliki keunggulan komparatif yang dapat dikembangkan menjadi keunggulan kompetitif. Pengelolaan potensi ini secara terpadu dan berkelanjutan akan membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing daerah. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan strategis dan sinergi lintas sektor dalam mengoptimalkan kekuatan Kaur sebagai daerah agraris-maritim, ekologis, kreatif, dan berbudaya di kawasan selatan Provinsi Bengkulu.

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Penyediaan Pangan di Kabupaten Kaur mengacu pada kemampuan lingkungan untuk mendukung aktivitas pertanian dan ketahanan pangan tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Kabupaten Kaur memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar untuk sektor pertanian dan perikanan, yang menjadi tulang punggung penyediaan pangan di wilayah tersebut. Namun, untuk menjaga keberlanjutan, perlu adanya pengelolaan yang tepat agar lahan pertanian, sumber daya air, dan lingkungan tidak mengalami degradasi.

Pengelolaan daya dukung lingkungan ini meliputi pemanfaatan lahan secara optimal sesuai dengan kapasitasnya, serta penerapan praktik pertanian ramah lingkungan untuk mencegah kerusakan tanah dan deforestasi. Selain itu, daya tampung lingkungan juga mencakup kemampuan wilayah untuk menampung aktivitas produksi pangan yang meningkat seiring pertumbuhan penduduk, tanpa menurunkan kualitas lingkungan. Upaya seperti pengelolaan air yang baik, perlindungan kawasan hutan, dan diversifikasi sumber pangan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan penyediaan pangan di Kabupaten Kaur. Tabel berikut ini merupakan data Daya Dukung dan Tampung Lingkungan Hidup Penyediaan Pangan di Kabupaten kaur.

Tabel II-2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Penyediaan Pangan di Kabupaten Kaur

Kecamatan	Luas DDDTLH (Ha)					Jumlah
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Kaur Selatan	468,4	337,7	4.025,40	4.120,20	2.456,60	11.408,40
Kaur Tengah	220,4	636,7	1.114,20	149,4	248,8	2.369,60
Kaur Utara	232,6	12,4	608,1	171,1	557,6	1.581,80
Kelam Tengah	349	65,8	1.614,70	-	1.576,00	3.605,50
Kinal	186,4	309,1	5.472,10	2.893,80	7.211,40	16.072,70
Luas	285,1	39,3	8.890,60	1.339,70	3.201,30	13.756,00
Lungkang Kule	-	97,2	0,1	815,1	2.886,30	3.798,60
Maje	309,6	399,8	32.439,40	4.288,70	12.366,70	49.804,30

Kecamatan	Luas DDDTLH (Ha)					Jumlah
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Muara Sahung	-	82,1	21.277,90	1.374,50	6.297,40	29.031,80
Nasal	154	176,6	37.595,00	4.289,30	11.722,90	53.937,80
Padang Guci Ilir	228,6	35,6	3.365,70	853,4	3.201,00	7.684,40
Padang Guci Ulu	71,4	269,8	25.742,50	10.246,50	7.746,40	44.076,50
Semidang Gumay	398,2	78,2	3.516,30	301	1.326,60	5.620,30
Tanjung Kemuning	738,2	169,7	4.909,30	480,6	2.232,80	8.530,70
Tetap	222,2	570,3	4.214,20	1.060,40	2.523,60	8.590,70
KAB. KAUR	3.864	3.280	154.786	32.384	65.556	259.869
PERSENTASE (%)	1,5	1,3	59,6	12,5	25,2	100

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kaur 2025-2045

D. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketahanan terhadap energi, air, dan pangan merupakan fondasi utama bagi terciptanya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan tahan terhadap berbagai tekanan eksternal, termasuk perubahan iklim, gejolak ekonomi, dan dinamika global. Kabupaten Kaur sebagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam serta potensi sektor pertanian dan kelautan yang besar, dituntut untuk mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara efisien dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan ketahanan energi melalui pemanfaatan energi terbarukan, konservasi sumber daya air, serta peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, dan peternakan menjadi agenda strategis dalam lima tahun ke depan. Upaya ini juga sejalan dengan tujuan nasional dalam mewujudkan kemandirian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sistem pangan lokal yang tangguh dan berdaya saing.

1. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabitas pasokan dan harga pangan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Tabel II-3. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	72,4	74,54	72,3	73,67	74,63	74,91
Bengkulu Tengah	73	67,24	68,63	62,12	61,54	62,14
Bengkulu Utara	66,9	68,15	68,21	58,31	70,74	72,62
Kaur	70,1	70,68	72,12	71,51	73,9	74,75
Kepahiang	72,4	68,99	68,68	67,14	69,41	72,43
Kota Bengkulu	66,5	67,24	67,82	65,29	75,68	78,72
Lebong	72,2	76,09	74,38	74,86	75,84	77,06
Mukomuko	70,8	71,46	76,17	71,78	76,63	76,57
Rejang Lebong	70,9	70,64	67,54	66,68	72,67	73,11
Seluma	67,6	67,72	67,29	68,54	71,64	71,61

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	61,8	70,28	70,32	67,99	72,27	73.39

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, 2025

Selama periode 2019–2024, Kabupaten Kaur menunjukkan tren positif dalam Indeks Ketahanan Pangan, meningkat dari angka 70,1 pada tahun 2019 menjadi 74,75 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan. Dibandingkan dengan capaian provinsi secara keseluruhan, Kabupaten Kaur secara konsisten mencatat skor yang lebih tinggi dari Provinsi Bengkulu setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020, ketika nilai indeks provinsi naik signifikan. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kaur memiliki ketahanan pangan yang relatif lebih baik dan stabil dibandingkan rata-rata provinsi.

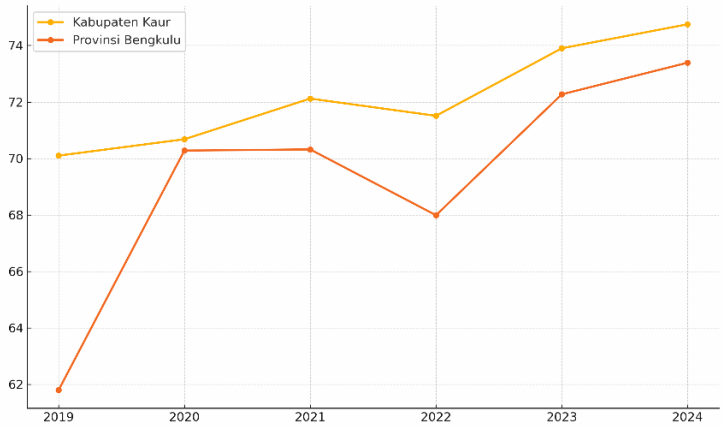

Gambar II-1. Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bengkulu, posisi Kabupaten Kaur tergolong kuat. Pada tahun 2024, indeks Kaur (74,75) hanya sedikit di bawah Kabupaten Lebong (77,06), Kota Bengkulu (78,72), dan Kabupaten Mukomuko (76,57), serta lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Bengkulu Tengah (62,14) dan Seluma (71,61). Capaian ini menunjukkan bahwa strategi ketahanan pangan di Kabupaten Kaur selama lima tahun terakhir telah berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, untuk menjaga dan meningkatkan capaian ini, perlu penguatan program perlindungan kelompok rentan pangan,

peningkatan diversifikasi pangan lokal, dan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian dan perikanan.

Tabel II-4. Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kaur

KECAMATAN	BPS_2023 (Jiwa)	JUMLAH PENDUDUK SISTEM GRID (Jiwa) (150x150m)	JUMLAH KEBUTUHAN BAHAN PANGAN (Kg/Th)	JUMLAH KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN (Kg/Th)	AMBANG BATAS PENDUDUK (Jiwa)	NILAI AMBANG BATAS PENDUDUK	NILAI STATUS KEBUTUHAN BAHAN PANGAN	STATUS DAYA DUKUNG PANGAN
Kaur Selatan	17,425	17,425	1,208,423.75	3,131,100	45,149	27,724	2.59	Belum Terlampaui
Kaur Tengah	5,213	5,213	361,521.55	1,107,400	15,968	10,755	3.06	Belum Terlampaui
Kaur Utara	7,911	7,911	548,627.85	2,631,300	37,942	30,031	4.80	Belum Terlampaui
Kelam Tengah	7,414	7,414	514,160.90	2,344,650	33,809	26,395	4.56	Belum Terlampaui
Kinal	4,973	4,973	344,877.55	2,239,300	32,290	27,317	6.49	Belum Terlampaui
Luas	5,825	5,825	403,963.75	3,773,000	54,405	48,580	9.34	Belum Terlampaui
Lungkang Kule	3,518	3,518	243,973.30	607,600	8,761	5,243	2.49	Belum Terlampaui
Maje	14,753	14,753	1,023,120.55	2,463,720	35,526	20,773	2.41	Belum Terlampaui
Muara Sahung	7,019	7,019	486,767.65	1,249,500	18,017	10,998	2.57	Belum Terlampaui
Nasal	16,891	16,891	1,171,390.85	749,600	10,809	-6,082	0.64	Belum Terlampaui
Padang Guci Ilir	3,874	3,874	268,661.90	3,704,400	53,416	49,542	13.79	Belum Terlampaui
Padang Guci Ulu	8,031	8,031	556,949.85	5,538,960	79,870	71,839	9.95	Belum Terlampaui
Semidang Gumay	6,828	6,828	473,521.80	1,886,500	27,203	20,375	3.98	Belum Terlampaui
Tanjung Kemuning	14,228	14,228	986,711.80	5,840,800	84,222	69,994	5.92	Belum Terlampaui
Tetap	7,160	7,160	496,546.00	1,950,200	28,121	20,961	3.93	Belum Terlampaui
KABUPATEN KAUR	17,425	131,063	9,089,219.05	39,218,030	565,509	434,446	4.31	Belum Terlampaui

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kaur 2025-2045

Tabel diatas menggambarkan status daya dukung pangan di Kabupaten Kaur berdasarkan perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan di tiap kecamatan. Secara umum, Kabupaten Kaur berada dalam kondisi yang cukup aman dengan nilai status kebutuhan bahan pangan sebesar 4,31, yang menunjukkan bahwa secara agregat ketersediaan pangan masih jauh melebihi kebutuhan. Hal ini tercermin dari mayoritas kecamatan yang berada dalam status "belum terlampaui ambang batas", dengan nilai rasio ketersediaan terhadap kebutuhan di atas 1. Beberapa kecamatan bahkan menunjukkan surplus pangan yang tinggi, seperti Padang Guci Ilir dengan nilai 13,79 dan Padang Guci Ulu sebesar 9,95. Kecamatan-kecamatan ini berpotensi menjadi pusat lumbung pangan lokal yang dapat menopang kecamatan lain.

Ketimpangan distribusi pangan masih menjadi tantangan utama. Hal ini terlihat pada Kecamatan Nasal yang memiliki nilai status hanya 0,64, jauh di bawah ambang batas ideal. Dengan jumlah penduduk 16.891 jiwa dan ketersediaan

pangan yang lebih rendah dari kebutuhannya, Nasal telah memasuki kategori rawan dan defisit pangan. Nilai ambang batas penduduknya yang negatif (-6.082 jiwa) menegaskan bahwa wilayah ini sangat membutuhkan perhatian khusus, baik dalam bentuk peningkatan produksi, distribusi pangan antarwilayah, maupun cadangan logistik.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun Kabupaten Kaur secara keseluruhan memiliki daya dukung pangan yang memadai, ketimpangan spasial antar kecamatan masih menjadi isu penting. Kebijakan pembangunan pangan ke depan perlu diarahkan untuk memperkuat wilayah-wilayah defisit seperti Nasal, sekaligus mengoptimalkan peran wilayah surplus sebagai penyangga pangan kabupaten. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan serta sistem pemantauan berbasis spasial yang terintegrasi dalam perencanaan jangka. Menengah dan panjang daerah sangat dibutuhkan.

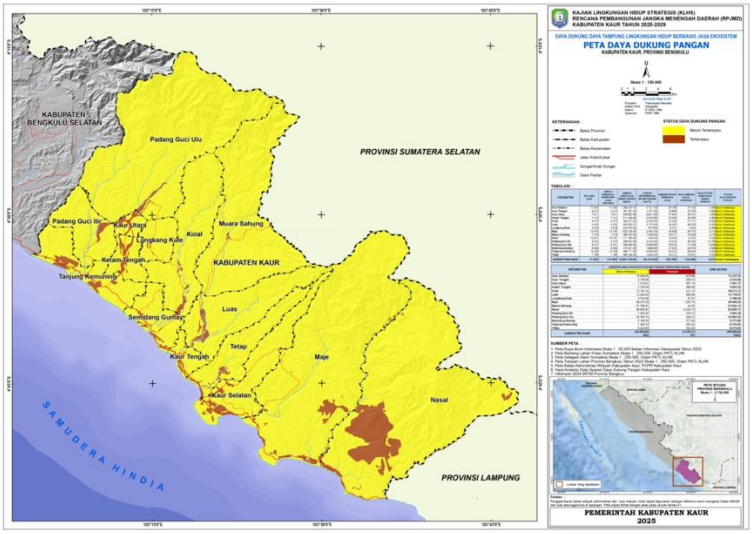

Gambar II-2 Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kaur

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kaur 2025-2045

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Akses terhadap air minum yang

aman dan terjamin tidak hanya berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan efisiensi waktu, terutama bagi kelompok rumah tangga di wilayah pedesaan. Sumber air minum yang layak, seperti air leding, sumur bor terlindung, dan mata air terlindung, harus memenuhi standar kelayakan kesehatan dan keberlanjutan untuk mencegah penyakit berbasis air serta menjamin keberlangsungan layanan dasar yang esensial bagi kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029, indikator ini memiliki hubungan erat dengan arah pembangunan bidang kesehatan, lingkungan hidup, dan infrastruktur dasar. Pemerintah daerah perlu menjadikan peningkatan akses air minum layak sebagai prioritas strategis guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya tujuan nomor 6 tentang air bersih dan sanitasi. Melalui program pembangunan jaringan air bersih, revitalisasi sarana air minum di wilayah yang tertinggal, serta penguatan kapasitas layanan PDAM atau sistem penyediaan air berbasis masyarakat, RPJMD diharapkan mampu menjawab tantangan ketimpangan akses dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Kaur.

2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Salah satu indikator utama yang mencerminkan tingkat ketahanan pangan masyarakat adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, yaitu persentase penduduk yang asupan energinya belum memenuhi kebutuhan minimum harian untuk hidup sehat dan produktif. Indikator ini menunjukkan tingkat kerentanan penduduk terhadap kelaparan tersembunyi yang bersifat kronis akibat kekurangan konsumsi energi pangan. Di Kabupaten Kaur, isu ketidakcukupan konsumsi pangan menjadi perhatian strategis dalam pembangunan daerah, mengingat peran sektor pertanian yang besar dalam struktur PDRB namun belum sepenuhnya mampu memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan secara

merata di seluruh wilayah. Faktor geografis, pola konsumsi, dan keterbatasan daya beli masyarakat menjadi elemen yang saling memengaruhi dalam membentuk kondisi ketahanan pangan daerah. Oleh karena itu, upaya untuk memantau dan menurunkan tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan perlu menjadi bagian integral dari strategi pembangunan Kabupaten Kaur yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel II-5. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	8,09	8,25	10,38	9,16	9,42
Rejang Lebong	11,62	11,27	16,55	11,66	12,54
Bengkulu Utara	6,56	6,68	9,91	7,49	9,7
Kaur	6,33	7,01	9,54	9,52	12,36
Seluma	7,38	7,97	8,63	9,06	11,05
Mukomuko	3,64	5	5,94	4,86	5,56
Lebong	8,03	9,51	12,66	9,94	12,38
Kepahiang	10,99	11,3	15,4	13,17	13,7
Bengkulu Tengah	5,67	6	9,3	7,89	9,48
Kota Bengkulu	8,2	11,11	14,61	9,81	6,43
Provinsi Bengkulu	7,72	8,64	11,66	9,25	9,86

Sumber: BPS Indonesia

Berdasarkan data Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2020–2024, Kabupaten Kaur menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kaur berada pada angka 6,33 persen, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 12,36 persen pada tahun 2024. Ini merupakan angka tertinggi kedua di Provinsi Bengkulu setelah Kabupaten Kepahiang (13,7 persen), dan bahkan melebihi rata-rata provinsi yang sebesar 9,86 persen pada tahun yang sama.

Peningkatan tajam ini menunjukkan kerentanan ketahanan pangan yang makin serius di Kabupaten Kaur, meskipun wilayah ini memiliki potensi pertanian yang besar. Fakta ini mengindikasikan adanya masalah dalam distribusi, aksesibilitas, dan pola konsumsi masyarakat, yang tidak cukup hanya ditopang oleh ketersediaan produksi. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang terarah

sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk meningkatkan produksi pangan lokal, tetapi juga untuk memperbaiki sistem distribusi, penguatan daya beli masyarakat, serta edukasi gizi dan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).

3. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak

Akses terhadap sumber air minum layak merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat. Air minum yang layak, baik dari segi kualitas maupun kontinuitas pasokan, berperan krusial dalam mencegah penyakit, menunjang produktivitas, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing. Di Kabupaten Kaur, upaya peningkatan cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak menjadi bagian dari agenda pembangunan infrastruktur dasar yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar warga. Tantangan geografis, keterbatasan sarana penyediaan air bersih, serta ketergantungan pada sumber air permukaan dan air hujan masih menjadi hambatan dalam mencapai target layanan air minum yang merata. Oleh karena itu, penguatan intervensi melalui pembangunan sarana air bersih, penyediaan sistem air minum perpipaan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air menjadi langkah strategis untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar air minum yang aman dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Kaur.

Tabel II-6. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	45,78	58,22	65	62,72	68,26
Rejang Lebong	45,24	65,07	57,25	56,37	55,6
Bengkulu Utara	56,24	53,11	82,64	84,11	80,4
Kaur	79,4	80,95	83,94	84,18	79,79
Seluma	37,54	47,04	71,59	70,93	73,02
Mukomuko	79,41	75,99	75,73	75,45	75,82
Lebong	61,16	53,77	54,85	59,7	57,41
Kepahiang	63,18	62,65	68,61	62,14	64,82
Bengkulu Tengah	49,32	63,06	61,08	56,8	50,46

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Bengkulu	88,77	92,21	94,51	93,88	92,21
Provinsi Bengkulu	62,47	67,39	73,07	73,08	72,1

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Bengkulu,2025

Kabupaten Kaur secara konsisten menunjukkan kinerja yang baik dalam hal akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga yang memiliki akses mencapai 79,4%, dan terus meningkat hingga mencapai 84,18% pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 79,79% pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan di tahun terakhir, capaian ini tetap menempatkan Kabupaten Kaur di atas rata-rata Provinsi Bengkulu yang berada pada angka 72,1% pada tahun 2024.

Capaian tinggi ini menunjukkan bahwa infrastruktur dasar penyediaan air minum di Kabupaten Kaur relatif sudah terbangun dengan baik dibandingkan sebagian besar kabupaten lain di Provinsi Bengkulu. Namun, fluktuasi capaian dalam dua tahun terakhir menjadi indikasi perlunya upaya perbaikan dan pemeliharaan sistem distribusi air bersih, serta pemerataan layanan di wilayah yang masih sulit dijangkau. Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan akses air minum layak yang aman dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Kaur.

Tabel II-7. Daya Dukung Air Kabupaten Kaur

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK SISTEM GRID (900x900m)	KETERSEDIAAN AIR (M3/Th)	KEBUTUHAN AIR UNTUK KEGIATAN EKONOMI BERBASIS LAHAN (M3/Th)	KEBUTUHAN AIR DOMESTIK (M3/Th)	KEBUTUHAN AIR TOTAL (M3/Th)	AMBANG BATAS PENDUDUK SISTEM GRID (900x900m)	SELISIH KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN AIR	STATUS DAYA DUKUNG AIR
Kaur Selatan	11,844	216,880,209.13	25,311,669.52	1,023,321.60	26,334,991.12	250,025.52	190,545,218.01	Belum Terlampaui
Kaur Tengah	3,924	46,381,980.47	17,390,732.95	339,033.60	17,729,766.55	39,739.27	28,652,213.92	Belum Terlampaui
Kaur Utara	3,518	40,201,702.05	16,666,285.30	303,955.20	16,970,240.50	32,557.33	23,231,461.55	Belum Terlampaui
Kelam Tengah	5,896	75,792,432.55	29,439,413.78	509,414.40	29,948,828.18	63,200.51	45,843,604.37	Belum Terlampaui
Kinal	13,033	266,770,888.26	88,651,253.32	1,126,051.20	89,777,304.52	234,274.98	176,993,583.74	Belum Terlampaui
Luas	8,348	271,096,580.70	47,576,069.05	721,267.20	48,297,336.25	286,847.06	222,799,244.46	Belum Terlampaui
Lungkang Kule	5,241	72,404,679.02	29,111,907.54	452,822.40	29,564,729.94	58,790.94	42,839,949.08	Belum Terlampaui
Maje	18,615	808,738,147.91	103,152,801.49	1,608,336.00	104,761,137.49	898,586.26	703,977,010.42	Belum Terlampaui
Muara Sahung	17,231	475,102,550.61	93,784,947.98	1,488,758.40	95,273,706.38	492,017.06	379,828,844.23	Belum Terlampaui
Nasal	25,688	891,051,369.63	91,492,605.82	2,219,443.20	93,712,049.02	1,022,362.15	797,339,320.61	Belum Terlampaui
Padang Guci Ilir	7,371	143,878,928.14	27,838,605.03	636,854.40	28,475,459.43	151,625.34	115,403,468.71	Belum Terlampaui
Padang Guci Ulu	11,244	766,726,540.88	53,196,802.85	971,481.60	54,168,284.45	901,941.82	712,558,256.42	Belum Terlampaui
Semidang Gumay	6,600	97,518,168.59	31,598,196.71	570,240.00	32,168,436.71	88,287.16	65,349,731.88	Belum Terlampaui

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK SISTEM GRID (900x900m)	KETERSEDIAAN AIR (M3/Th)	KEBUTUHAN AIR UNTUK KEGIATAN EKONOMI BERBASIS LAHAN (M3/Th)	KEBUTUHAN AIR DOMESTIK (M3/Th)	KEBUTUHAN AIR TOTAL (M3/Th)	AMBANG BATAS PENDUDUK SISTEM GRID (900x900m)	SELISIH KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN AIR	STATUS DAYA DUKUNG AIR
Tanjung Kemuning	11,117	147,725,610.19	48,266,214.13	960,508.80	49,226,722.93	134,240.61	98,498,887.26	Belum Terlampaui
Tetap	5,858	173,385,509.25	21,575,936.71	506,131.20	22,082,067.91	194,987.30	151,303,441.34	Belum Terlampaui
KABUPATEN KAUR	**155,528**	**4,493,655,297.40**	**725,053,442.19**	**13,437,619.20**	**738,491,061.39**	**4,849,483.30**	**3,755,164,236.01**	**Belum Terlampaui**

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kaur 2025-2045

Kabupaten Kaur memiliki daya dukung air yang sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan penduduk maupun kegiatan ekonomi berbasis lahan. Berdasarkan data pada Tabel II.6, total ketersediaan air di wilayah ini mencapai sekitar 4,49 miliar meter kubik per tahun, sementara total kebutuhan air, baik untuk keperluan domestik maupun ekonomi, hanya sebesar 738 juta meter kubik per tahun. Artinya, masih terdapat surplus air lebih dari 3,75 miliar meter kubik per tahun. Seluruh kecamatan di Kabupaten Kaur berada dalam status "belum terlampaui", yang berarti kebutuhan airnya belum melampaui ambang batas daya dukung wilayah masing-masing.

Kecamatan-kecamatan seperti Maje, Nasal, dan Padang Guci Ulu memiliki surplus air yang sangat tinggi, mencerminkan potensi besar untuk pengembangan sektor-sektor berbasis air seperti pertanian irigasi, budidaya perikanan, maupun pariwisata air. Meskipun demikian, analisis juga menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan air justru berasal dari sektor ekonomi berbasis lahan, bukan dari konsumsi domestik. Oleh karena itu, perlu disiapkan strategi pemanfaatan dan konservasi sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan, terutama untuk menjamin keberlangsungan pasokan air di tengah dinamika perubahan iklim dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Kondisi daya dukung air di Kabupaten Kaur berada dalam kategori sangat aman, namun tantangan ke depan terletak pada pengelolaan yang efisien, adil, dan berkelanjutan agar potensi sumber daya air yang melimpah ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah di berbagai sektor.

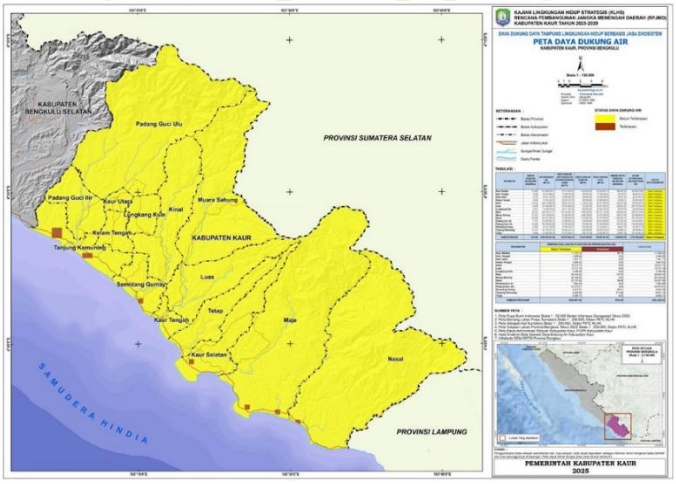

Gambar II-3. Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Kaur

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kaur 2025-2045

4. Rumah Tangga dengan Penerangan Listrik PLN

Persentase Rumah Tangga dengan Penerangan Listrik PLN merupakan indikator yang menggambarkan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap layanan listrik yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Indikator ini mencerminkan sejauh mana rumah tangga di suatu wilayah menikmati manfaat dari energi listrik yang andal dan berkelanjutan. Akses terhadap penerangan listrik PLN tidak hanya mendukung kebutuhan dasar rumah tangga, tetapi juga menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, akses informasi, dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029, indikator ini memiliki hubungan strategis dengan arah pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akses listrik merupakan bagian dari pelayanan dasar publik yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup. Oleh karena itu, peningkatan cakupan penerangan listrik PLN perlu menjadi bagian dari kebijakan prioritas daerah, terutama di wilayah-wilayah pedesaan, terpencil, dan perbukitan yang masih mengalami keterbatasan pasokan listrik. Selain itu, pencapaian indikator ini juga mendukung implementasi Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya SDG 7 tentang "energi bersih dan terjangkau." Melalui RPJMD, Pemerintah Kabupaten Kaur dapat menetapkan sasaran peningkatan akses listrik, mendorong perluasan jaringan PLN, serta mengintegrasikan penggunaan energi terbarukan sebagai alternatif bagi daerah yang belum terjangkau jaringan utama.

Tabel II-8. Persentase Rumah Tangga dengan Penerangan Listrik PLN Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi Bengkulu	97,21	97,36	98,97	99,21	99,45
Bengkulu Selatan	99,62	96,25	99,87	99,84	99,35
Rejang Lebong	97,72	97,08	99,05	98,26	99,01
Bengkulu Utara	96,13	96,53	98,55	99,07	100
Kaur	94,31	95,54	99,44	99,33	98,36
Seluma	95,23	97,54	98,54	99	99,13
Mukomuko	96,33	94,28	97,74	99,44	99,52
Lebong	97,06	99,01	99,42	99,44	99,96
Kepahiang	97,19	95,76	97,47	98,35	98,82
Bengkulu Tengah	96,32	99,37	99,01	99,72	99,49
Kota Bengkulu	99,38	100	99,95	99,84	99,95

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2024

Selama periode 2019 hingga 2023, Kabupaten Kaur menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam persentase rumah tangga yang memperoleh penerangan listrik dari PLN. Pada tahun 2019, angka cakupan berada di 94,31 persen dan mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar 99,44 persen. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 98,36 persen, angka ini tetap mencerminkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Kaur telah menikmati akses listrik PLN. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu yang berada di angka 99,45 persen pada tahun 2023, capaian Kaur hanya terpaut tipis, dan menunjukkan keberhasilan program elektrifikasi yang telah menjangkau mayoritas wilayah, termasuk daerah-daerah pedesaan.

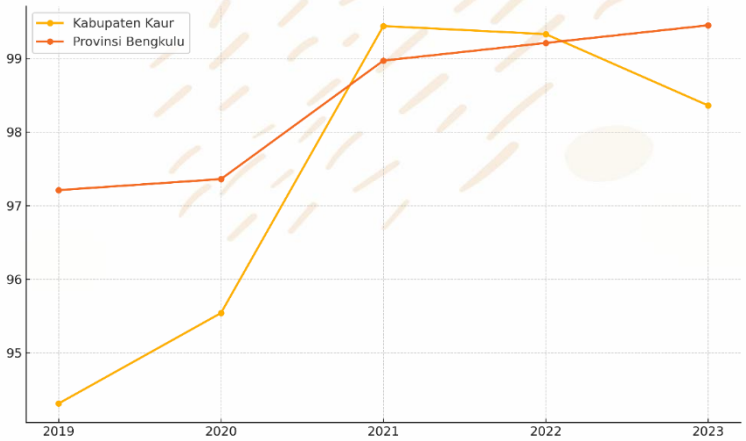

Gambar II-4. Perbandingan Persentase Rumah Tangga dengan Penerangan Listrik PLN Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2023

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, capaian Kabupaten Kaur tergolong sangat baik, meskipun masih sedikit di bawah Kabupaten Bengkulu Utara dan Lebong yang telah mencapai 100 persen dan 99,96 persen pada tahun 2023. Sementara beberapa kabupaten lain seperti Kepahiang dan Mukomuko menunjukkan pencapaian yang sebanding. Hal ini menandakan bahwa pembangunan infrastruktur kelistrikan di Kabupaten Kaur sudah berada pada jalur yang tepat. Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kaur 2025–2029, capaian ini dapat dijadikan pijakan untuk menetapkan sasaran yang lebih progresif, seperti peningkatan keandalan pasokan listrik, perluasan akses ke wilayah terpencil yang tersisa, serta pengembangan energi alternatif dan terbarukan sebagai bagian dari transisi energi berkelanjutan.

E. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup berkualitas merupakan kondisi lingkungan yang mampu mendukung kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya secara sehat, aman, dan berkelanjutan, serta bebas dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam konteks pembangunan daerah, lingkungan hidup yang berkualitas menjadi salah satu pilar utama untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, menjaga daya dukung dan daya tampung ekosistem, serta menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Bagi Kabupaten Kaur, yang memiliki kekayaan alam

berupa kawasan hutan, pesisir, dan ekosistem laut, menjaga kualitas lingkungan hidup menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, terutama dalam RPJMD 2025–2029 yang menekankan arah pembangunan berkelanjutan, tangguh terhadap perubahan iklim, dan berbasis pada pengelolaan sumber daya alam secara lestari.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai tujuan, antara lain melindungi lingkungan dari pencemaran dan kerusakan, menjamin keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, menjaga kelestarian fungsi lingkungan, mencapai keseimbangan ekosistem, dan menjamin keadilan bagi generasi masa kini dan masa depan. Selain itu, undang-undang ini juga mengharuskan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta mengantisipasi isu-isu lingkungan global. Di Kabupaten Kaur, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk mencapai tujuan ini, seperti pengelolaan sampah, pengendalian kerusakan lingkungan, penegakan hukum dalam menyelesaikan masalah lingkungan, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Keberhasilan dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai instrumen evaluasi.

Tabel II-9. Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (IKA)			Indeks Kualitas Udara (IKU)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kaur	N/A	36,67	N/A	95,09	95,08	94,39
Provinsi Bengkulu	49,81	46,18	48,98	90,81	91,27	92,49

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2024

Berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2024, kondisi kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kaur dalam kurun waktu 2021–2023 menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Pada aspek Indeks Kualitas Air (IKA), data Kabupaten Kaur masih relatif terbatas. Tahun 2021 dan 2023 tidak tersedia data, sementara pada tahun 2022 tercatat 36,67. Nilai ini berada di bawah rata-rata provinsi sebesar 46,18, serta termasuk dalam kategori kualitas air yang rendah. Fakta ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Kaur menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas sumber daya air, baik dari aspek pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah domestik maupun aktivitas ekonomi, serta keterbatasan pemantauan kualitas air secara berkelanjutan.

Sebaliknya, pada aspek Indeks Kualitas Udara (IKU), Kabupaten Kaur menunjukkan capaian yang sangat baik. Pada tahun 2021, nilai IKU mencapai 95,09, tahun 2022 sebesar 95,08, dan tahun 2023 sebesar 94,39. Angka ini berada jauh di atas rata-rata provinsi (91,27 pada 2022 dan 92,49 pada 2023), serta konsisten menjadi salah satu yang tertinggi di Provinsi Bengkulu. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa udara di Kabupaten Kaur relatif bersih, minim pencemaran, dan sangat layak bagi kesehatan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik wilayah Kaur yang masih didominasi oleh kawasan hutan, pesisir, dan pedesaan dengan aktivitas industri yang terbatas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kaur memiliki kekuatan pada kualitas udara yang sangat baik, namun masih menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan kualitas air. Ke depan, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan pengendalian pencemaran air, meningkatkan infrastruktur pengelolaan limbah, serta memperluas sistem pemantauan kualitas air secara reguler. Sementara itu, kualitas udara yang tinggi harus tetap dijaga melalui pengendalian alih fungsi lahan, pelestarian hutan, dan pengembangan pariwisata serta ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.

Tabel II-10. Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023

Kabupaten/ Kota	Indeks Kualitas Lahan (IKL)			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024
Kaur	66,36	66,36	66,42	53,04 (Sedang)	67,83 (Sedang)	52,77 (Sedang)	78,30 (Baik)
Provinsi Bengkulu	55,52	55,19	55,80	71,46 (Baik)	70,82 (Baik)	72,10 (Baik)	73,45

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2024

Berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2024, Kabupaten Kaur menunjukkan capaian yang konsisten baik pada aspek kualitas lahan, serta tren yang fluktuatif namun membaik pada kualitas lingkungan hidup.

Dari sisi Indeks Kualitas Lahan (IKL), Kabupaten Kaur berada pada posisi yang relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Nilai IKL Kaur pada tahun 2021 dan 2022 tercatat 66,36, kemudian sedikit meningkat menjadi 66,42 pada 2023. Angka ini jauh di atas rata-rata Provinsi Bengkulu yang hanya mencapai 55,80 pada 2023. Kondisi ini menggambarkan bahwa daya dukung lahan di Kabupaten Kaur masih terjaga dengan baik, didukung oleh keberadaan kawasan hutan, lahan pertanian, dan wilayah pesisir yang berfungsi sebagai penopang utama ekosistem daerah. Stabilitas IKL ini juga menunjukkan adanya potensi besar bagi pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis alam secara berkelanjutan.

Sementara itu, pada aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Kabupaten Kaur mengalami dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, IKLH Kaur hanya 53,04 (kategori sedang), kemudian meningkat tajam pada 2022 menjadi 67,83 (kategori sedang). Namun, capaian ini menurun drastis pada 2023 hingga 52,77 (kategori sedang), jauh di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu (72,10). Fluktuasi ini menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pengelolaan kualitas lingkungan, terutama terkait pencemaran air, udara, dan pengendalian limbah.

Perkembangan yang menggembirakan terjadi pada tahun 2024, di mana nilai IKLH Kabupaten Kaur melonjak signifikan menjadi 78,30 (kategori baik), melampaui capaian Provinsi Bengkulu yang sebesar 73,45. Peningkatan tajam ini mengindikasikan adanya perbaikan nyata dalam tata kelola lingkungan hidup di Kabupaten Kaur, baik melalui upaya rehabilitasi ekosistem, pengendalian pencemaran, peningkatan kesadaran masyarakat, maupun intervensi kebijakan lingkungan yang lebih efektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kaur memiliki keunggulan pada kualitas lahan yang konsisten tinggi, serta keberhasilan memperbaiki kualitas lingkungan hidup pada tahun 2024 hingga melampaui rata-rata provinsi. Ke depan, tantangan yang dihadapi adalah menjaga konsistensi capaian IKLH agar tetap berada pada kategori baik, sekaligus memastikan pemanfaatan lahan yang produktif tidak mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Integrasi kebijakan pembangunan berkelanjutan menjadi kunci agar Kabupaten Kaur dapat mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

2. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan alat ukur penting untuk menilai tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap berbagai jenis bencana, seperti banjir, longsor, dan gempa bumi. IRB disusun berdasarkan tiga komponen utama, yaitu potensi bahaya (hazard), tingkat kerentanan (vulnerability), dan kapasitas penanggulangan (capacity). Bahaya mengukur potensi kejadian bencana di suatu wilayah, kerentanan menggambarkan seberapa besar dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat dan infrastruktur, sedangkan kapasitas mencerminkan kemampuan daerah dalam merespons serta mengurangi risiko tersebut. Dalam konteks Kabupaten Kaur, pemahaman terhadap IRB sangat penting untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang berbasis mitigasi

risiko, terutama karena wilayah ini termasuk dalam kawasan yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kaur 2025–2029, IRB menjadi dasar strategis dalam menentukan arah pembangunan yang tangguh terhadap bencana. Letak geografis Kabupaten Kaur yang berada di sepanjang pantai barat Pulau Sumatra menjadikannya bagian dari zona seismik aktif yang rentan terhadap gempa bumi dan tsunami, sebagaimana juga dialami oleh wilayah lain di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ke depan perlu mengintegrasikan aspek pengurangan risiko bencana secara menyeluruh, termasuk penguatan tata ruang yang aman, pembangunan infrastruktur tahan bencana, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman. Dengan mempertimbangkan IRB secara serius dalam perencanaan, diharapkan pembangunan di Kabupaten Kaur dapat berjalan secara berkelanjutan, resilien, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan dan iklim.

Tabel II-11. Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Utara	205,60	205,60	186,25	189,19	189,19	186,92
Kaur	203,20	203,20	196,86	182,55	192,16	192,16
Seluma	191,20	191,20	165,74	172,23	163,04	165,81
Bengkulu Selatan	186,40	186,40	186,40	186,40	165,18	149,84
Bengkulu Tengah	173,20	173,20	167,80	167,80	163,99	152,34
Muko Muko	166,02	166,02	172,29	172,29	164,32	164,32
Kota Bengkulu	137,68	137,68	147,50	143,88	143,88	128,25
Kepahiang	138,00	138,00	138,00	117,49	101,31	89,52
Rejang Lebong	100,71	100,71	92,58	108,60	97,92	112,35
Lebong	118,00	118,00	118,00	113,09	106,49	99,33

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, BNPB, Tahun 2023

Selama periode 2019 hingga 2024, Kabupaten Kaur mencatat angka Indeks Risiko Bencana (IRB) yang tergolong tinggi dibandingkan mayoritas wilayah lain di Provinsi Bengkulu. Dengan skor mencapai 203,20 pada tahun 2019 dan 2020, Kaur berada dalam kelompok risiko tinggi bersama Bengkulu Utara. Meskipun terjadi penurunan menjadi 182,55 pada tahun 2022, angka tersebut kembali meningkat

menjadi 192,16 pada tahun 2023, menandakan bahwa risiko bencana di Kabupaten Kaur masih signifikan dan fluktuatif. Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu, posisi Kaur secara konsisten berada di atas rata-rata, mencerminkan kerentanan wilayah ini terhadap ancaman bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Kaur berada dalam kategori dengan risiko tertinggi kedua setelah Bengkulu Utara, dan di atas wilayah-wilayah seperti Bengkulu Tengah, Mukomuko, dan Bengkulu Selatan. Daerah-daerah seperti Rejang Lebong, Lebong, dan Kepahiang justru mencatat IRB jauh lebih rendah, bahkan turun di bawah angka 110 pada tahun 2023. Ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat penurunan IRB di Kaur selama beberapa tahun terakhir, risiko bencana masih menjadi isu besar yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya dalam penyusunan RPJMD 2025–2029.

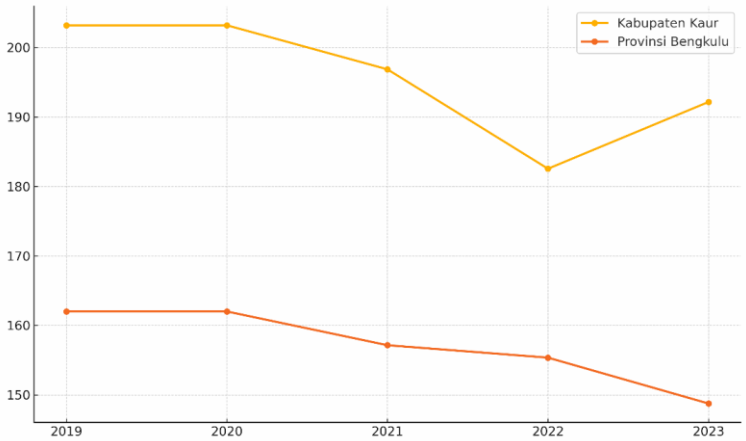

Gambar II-5. Perbandingan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2023

Kondisi ini menuntut adanya integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah secara sistematis. Pemerintah Kabupaten Kaur perlu memperkuat sistem peringatan dini, memastikan tata ruang berbasis risiko bencana, dan membangun infrastruktur yang tahan terhadap gempa dan banjir. Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan

lokal dalam mitigasi bencana harus menjadi prioritas pembangunan agar ketahanan daerah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, arah pembangunan dalam RPJMD tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keselamatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat di tengah ancaman bencana yang terus ada.

F. Demografi

Demografi suatu daerah mencerminkan karakteristik statistik penduduk, mencakup jumlah, kepadatan, komposisi umur, tingkat kelahiran dan kematian, pola migrasi, serta struktur sosial dan ekonomi yang memengaruhi dinamika populasi. Informasi demografi menjadi elemen penting dalam proses perencanaan pembangunan, karena memberikan dasar bagi pengambilan keputusan terkait penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lapangan pekerjaan. Di tingkat daerah, analisis demografi berfungsi sebagai acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan agar program-program pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat.

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Kaur, aspek demografi sangat berkaitan erat dengan berbagai sektor pembangunan, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus terjadi mendorong perlunya penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang memadai guna menjaga kualitas hidup masyarakat. Selain itu, struktur usia penduduk juga memengaruhi arah kebijakan pembangunan ekonomi. Komposisi penduduk usia produktif yang besar dapat menjadi potensi pembangunan daerah jika diiringi dengan kebijakan yang tepat, seperti peningkatan keterampilan sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika demografi menjadi pijakan strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang responsif, efektif, dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaur.

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk suatu daerah merupakan indikator demografi yang menunjukkan banyaknya individu yang tinggal dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Data jumlah penduduk mencerminkan dinamika pertumbuhan populasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Informasi mengenai jumlah penduduk sangat penting dalam perencanaan pembangunan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, perumahan, serta infrastruktur transportasi dan energi. Selain itu, jumlah penduduk juga menentukan potensi tenaga kerja dan konsumsi dalam suatu wilayah, yang menjadi faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Kaur, jumlah penduduk menjadi salah satu variabel kunci dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Dengan mengetahui jumlah penduduk serta struktur demografinya, pemerintah daerah dapat merumuskan program pembangunan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, jika jumlah penduduk usia produktif tinggi, maka kebijakan dapat difokuskan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Sebaliknya, jika jumlah penduduk lanjut usia meningkat, maka pemerintah perlu memastikan sistem jaminan sosial dan layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap perencanaan anggaran daerah, di mana alokasi sumber daya harus disesuaikan dengan jumlah dan karakteristik populasi guna mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel II-12. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	2.005.045	2.032.384	2.059.373	2.086.006	2.112.235
Bengkulu Selatan	165.725	167.685	169.591	171.463	173.315
Rejang Lebong	276.005	279.280	282.519	285.710	288.832
Bengkulu Utara	295.825	299.479	303.111	306.659	310.125
Kaur	**126.125**	**127.816**	**129.449**	**131.063**	**132.659**
Seluma	207.314	209.961	212.544	215.063	217.507

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Mukomuko	189.833	192.863	195.854	198.794	201.700
Lebong	105.947	107.447	108.902	110.347	111.750
Kepahiang	149.298	151.130	152.912	154.651	156.353
Bengkulu Tengah	116.344	117.986	119.571	121.139	122.673
Kota Bengkulu	372.629	378.737	384.920	391.117	397.321

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Jumlah penduduk Kabupaten Kaur menunjukkan pertumbuhan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah penduduk tercatat sebanyak 126.125 jiwa dan meningkat menjadi 132.659 jiwa pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Dibandingkan dengan total penduduk Provinsi Bengkulu yang mencapai 2,11 juta jiwa pada tahun 2024, kontribusi penduduk Kabupaten Kaur hanya sekitar 6,3 persen, yang menempatkannya sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit di provinsi ini.

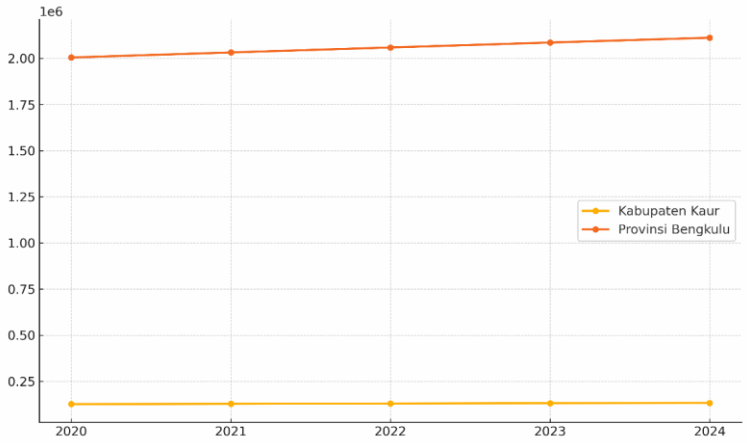

Gambar II-6 Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2020–2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, posisi Kabupaten Kaur berada di kelompok bawah dalam hal jumlah penduduk, lebih tinggi dari Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Tengah, tetapi jauh di bawah kabupaten besar seperti Bengkulu Utara dan Kota Bengkulu. Wilayah seperti Rejang Lebong dan Seluma juga memiliki jumlah penduduk yang hampir dua kali lipat lebih besar dari Kabupaten Kaur. Kondisi ini menunjukkan bahwa

secara demografis, Kabupaten Kaur menghadapi tantangan dalam mengembangkan potensi ekonomi berbasis populasi, terutama dalam aspek pasar lokal, tenaga kerja, dan permintaan domestik.

Berdasarkan tren tersebut, penting bagi Pemerintah Kabupaten Kaur untuk menyusun strategi pembangunan yang menyesuaikan dengan skala populasi daerah. Dengan jumlah penduduk yang relatif kecil, strategi pembangunan harus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, serta pengembangan sektor-sektor unggulan yang tidak terlalu bergantung pada jumlah penduduk besar, seperti pariwisata alam, pertanian organik, dan perikanan lestari. Pembangunan berbasis inklusi dan efisiensi sumber daya perlu menjadi fondasi dalam RPJMD Kabupaten Kaur 2025–2029 guna menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Tabel II-13. Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kaur 2022-2024

Kecamatan	2022	2023	2024
Nasal	16.782	18434	16984
Maje	14.988	14708	14954
Kaur Selatan	15.850	16898	17662
Tetap	6.508	7137	7249
Kaur Tengah	4.465	4781	5269
Luas	4.932	6701	5893
Muara Sahung	5.550	6881	7135
Kinal	4.366	5899	5017
Semidang Gumay	5.522	5817	6931
Tanjung Kemuning	11.090	14122	14511
Kelam Tengah	6.321	7200	7495
Kaur Utara	6.575	7918	8015
Padang Guci Hilir	3.688	4313	3687
Lungkang Kule	3.392	5473	3831
Padang Guci Hulu	6.953	8572	8126

Sumber : Kabupaten Kaur Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Kaur tahun 2022 hingga 2024, terlihat adanya dinamika yang cukup beragam di masing-masing wilayah. Kecamatan Kaur Selatan secara konsisten menjadi kecamatan dengan

jumlah penduduk terbanyak, meningkat dari 15.850 jiwa pada tahun 2022 menjadi 17.662 jiwa pada tahun 2024. Disusul oleh Nasal dan Maje, meskipun pada tahun 2024, jumlah penduduk Kecamatan Nasal justru mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, beberapa kecamatan lain seperti Tetap, Muara Sahung, dan Tanjung Kemuning juga menunjukkan pertumbuhan penduduk yang stabil, mencerminkan konsentrasi populasi di wilayah-wilayah yang memiliki akses lebih baik terhadap infrastruktur dan layanan dasar.

Di sisi lain, sejumlah kecamatan mengalami fluktuasi dan bahkan penurunan jumlah penduduk. Misalnya, Padang Guci Hilir, Lungkang Kule, dan Kinal mencatatkan jumlah penduduk yang menurun secara konsisten dari tahun ke tahun. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perpindahan penduduk ke wilayah lain, keterbatasan akses ekonomi dan layanan publik, atau kondisi geografis yang kurang mendukung perkembangan wilayah. Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil, seperti Padang Guci Hilir dan Kaur Tengah, menghadapi tantangan tersendiri dalam pengembangan wilayah, khususnya dalam hal pemerataan pelayanan publik dan efisiensi pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kaur perlu memperhatikan ketimpangan demografis antarkecamatan sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan pembangunan. Kecamatan-kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tinggi perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas layanan dasar dan infrastruktur, sementara wilayah-wilayah dengan penurunan penduduk perlu mendapatkan perhatian khusus melalui program revitalisasi ekonomi lokal, peningkatan konektivitas, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini akan memastikan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Kaur.

Tabel II-14. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Kaur Tahun 2022-2024 (Jiwa)

Kelompok Umur	2022	2023	2024
0 - 4	10.265	11.083	11.458

5 - 9	10.949	10.609	10.463
10 - 14	11.476	11.187	11.068
15 - 19	11.488	11.639	11.602
20 - 24	10.509	11.145	11.357
25 - 29	10.120	10.064	10.147
30 - 34	10.236	9.953	9.873
35 - 39	10.036	10.013	10.034
40 - 44	9.599	9.685	9.726
45 - 49	8.674	9.026	9.168
50 - 54	7.055	7.672	7.954
55 - 59	5.910	6.160	6.343
60 - 64	4.608	4.981	5.153
65 - 69	3.058	3.526	3.753
70 - 74	2.223	2.183	2.296
75+	3.455	2.137	2.264
Total	129.661	131.063	132.659

Sumber : Kabupaten Kaur Dalam Angka, 2025

Data jumlah penduduk Kabupaten Kaur tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil, dengan peningkatan total penduduk dari 129.661 jiwa pada tahun 2022 menjadi 131.063 jiwa pada 2023, dan mencapai 132.659 jiwa pada 2024. Kelompok umur 0–4 tahun mengalami peningkatan cukup signifikan, dari 10.265 jiwa menjadi 11.458 jiwa dalam tiga tahun terakhir, mengindikasikan peningkatan angka kelahiran. Sebaliknya, kelompok umur 5–14 tahun cenderung menurun, menunjukkan adanya kemungkinan penurunan jumlah anak usia sekolah dasar dan menengah pertama. Kelompok usia produktif (15–64 tahun) tetap menjadi mayoritas dengan distribusi yang relatif stabil, sementara kelompok lansia (65 tahun ke atas) menunjukkan sedikit fluktuasi namun secara umum cenderung meningkat.

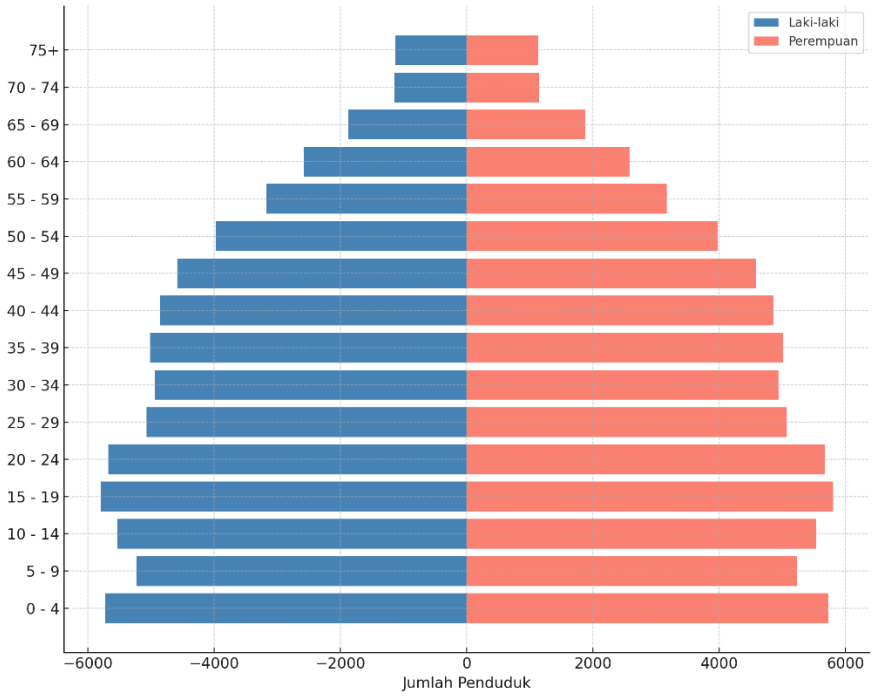

Gambar II-7. Piramida Penduduk Tahun 2024

Distribusi penduduk pada masing-masing kelompok umur tidak menunjukkan perubahan drastis, mencerminkan struktur penduduk yang seimbang dalam jangka pendek. Kelompok umur 20–39 tahun tetap stabil dan cukup besar jumlahnya, mengindikasikan potensi tenaga kerja yang kuat dalam beberapa tahun ke depan. Sementara itu, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) meningkat dari 8.736 jiwa pada tahun 2022 menjadi 8.313 jiwa pada 2024, meskipun mengalami sedikit penurunan pada 2023. Pola ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kaur berada pada fase transisi demografi awal, di mana jumlah penduduk usia muda dan produktif masih dominan, tetapi kelompok lansia mulai menunjukkan peningkatan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pelayanan sosial dan kesehatan.

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator demografis yang mencerminkan tingkat perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, yang dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian, serta mobilitas

penduduk masuk dan keluar. Indikator ini sangat penting dalam perencanaan pembangunan karena berpengaruh langsung terhadap kebutuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lapangan kerja, serta terhadap tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Dalam konteks Kabupaten Kaur, pemahaman terhadap dinamika pertumbuhan penduduk menjadi hal yang krusial dalam penyusunan RPJMD 2025–2029, karena berperan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah yang responsif dan berkelanjutan. Pertumbuhan penduduk yang stabil dan terkelola dapat menjadi modal sosial dan ekonomi dalam mendorong pertumbuhan sektor produktif, meningkatkan konsumsi domestik, dan memperkuat struktur ekonomi lokal. Namun, jika tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta pengelolaan lingkungan yang baik, maka pertumbuhan penduduk justru dapat menimbulkan tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan di Kabupaten Kaur perlu didasarkan pada analisis laju pertumbuhan penduduk agar setiap kebijakan dan program dapat menyesuaikan kebutuhan aktual masyarakat secara tepat, adil, dan berkelanjutan.

Tabel II-15. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2021-2024

Wilayah	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	1,48	1,4	1,13	1,12
Bengkulu Selatan	1,4	1,31	1,18	1,16
Rejang Lebong	1,04	0,95	1,23	1,20
Bengkulu Utara	1,29	1,21	1,28	1,26
Kaur	1,48	1,4	1,24	1,21
Seluma	1,69	1,61	1,56	1,54
Mukomuko	1,89	1,81	1,37	1,34
Lebong	0,6	0,51	1,18	1,16
Kepahiang	1,7	1,62	1,36	1,34
Bengkulu Tengah	1,6	1,51	1,68	1,66
Kota Bengkulu	1,79	1,71	1,35	1,32

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kaur dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan secara bertahap. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan berada pada angka 1,48 persen, setara dengan rata-rata Provinsi Bengkulu saat itu. Namun, dalam tiga tahun berikutnya, angka ini terus menurun hingga mencapai 1,21 persen pada tahun 2024. Meskipun tren ini mencerminkan perlambatan laju pertumbuhan, Kabupaten Kaur tetap menunjukkan nilai yang sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi, yang pada tahun 2024 berada di angka 1,12 persen. Hal ini menandakan bahwa dinamika demografis di Kabupaten Kaur masih relatif aktif dan tumbuh secara alami.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, posisi Kabupaten Kaur dalam hal laju pertumbuhan penduduk tergolong sedang. Kabupaten seperti Mukomuko, Kota Bengkulu, dan Bengkulu Tengah mencatatkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dalam beberapa tahun, sedangkan daerah seperti Lebong dan Rejang Lebong mencatat angka yang lebih rendah, bahkan sempat di bawah 1 persen. Dalam konteks ini, pertumbuhan penduduk Kaur dapat dikatakan stabil namun tidak terlalu agresif, yang dapat menjadi peluang dalam menjaga keseimbangan antara kapasitas wilayah dan beban layanan publik, terutama dalam perencanaan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Melihat tren ini, Pemerintah Kabupaten Kaur perlu mengantisipasi perubahan dinamika demografis ke depan. Meskipun laju pertumbuhan tergolong moderat, tetap diperlukan perencanaan yang matang dalam distribusi layanan publik, penyerapan tenaga kerja, serta pengembangan kawasan permukiman baru. Dalam penyusunan RPJMD 2025–2029, isu kependudukan ini dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kualitas, dengan menekankan pada peningkatan kapasitas SDM, penguatan ekonomi lokal, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.

3. Rasio Penduduk

Rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin merupakan indikator demografis yang menggambarkan perbandingan jumlah laki-laki terhadap perempuan di suatu wilayah, biasanya dinyatakan dalam jumlah laki-laki per 100 perempuan. Nilai rasio di atas 100 menunjukkan dominasi laki-laki, sementara nilai di bawah 100 menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak. Rasio ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kelahiran, kematian, migrasi, serta kondisi sosial ekonomi di suatu daerah. Perubahan pada struktur rasio jenis kelamin dapat memberikan informasi penting terkait potensi tenaga kerja, distribusi peran gender dalam masyarakat, dan kebutuhan layanan sosial di wilayah tersebut.

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Kaur 2025–2029, rasio jenis kelamin memiliki peran strategis dalam merancang kebijakan pembangunan yang adil dan responsif terhadap dinamika sosial. Ketimpangan yang signifikan dalam rasio ini dapat memengaruhi arah kebijakan ketenagakerjaan, program pemberdayaan ekonomi berbasis gender, dan pengembangan infrastruktur layanan publik. Jika proporsi perempuan lebih tinggi, misalnya, maka kebijakan yang mendukung akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial bagi perempuan perlu diperkuat. Sementara jika laki-laki lebih dominan, maka strategi penyerapan tenaga kerja di sektor yang relevan seperti pertanian dan perikanan harus diperhatikan. Pemanfaatan data rasio jenis kelamin per kecamatan juga memungkinkan perencanaan pembangunan yang lebih merata, adil, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat di setiap wilayah.

Tabel II-16. Rasio Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2015-2024

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	104	104	104	104	104	104,72	104,6	104,51	104,38
Bengkulu Selatan	101	101	101	101	101	103,95	103,83	103,72	103,6
Rejang Lebong	103	103	103	102	102	104,34	104,21	104,02	103,86
Bengkulu Utara	105	105	105	105	105	104,87	104,74	104,52	104,36
Kaur	107	107	107	107	107	106,27	106,14	105,83	105,64
Seluma	106	106	106	105	105	106,38	106,25	106,24	106,15

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024
Mukomuko	108	108	109	108	108	106,89	106,76	106,61	106,47
Lebong	104	104	104	104	104	104,68	104,55	104,58	104,48
Kepahiang	105	105	104	104	104	106,46	106,33	106	105,78
Bengkulu Tengah	105	105	105	105	105	105,44	105,31	105,11	104,96
Kota Bengkulu	101	101	101	101	101	101,86	101,74	101,99	101,97

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Rasio penduduk Kabupaten Kaur berdasarkan jenis kelamin dari tahun 2015 hingga 2024 menunjukkan konsistensi pada angka yang cukup tinggi. Sepanjang periode 2015 hingga 2019, rasio penduduk Kaur tercatat stabil pada angka 107, menunjukkan bahwa terdapat 107 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Setelah tahun 2021, rasio tersebut mulai mengalami sedikit penurunan, meskipun masih berada di atas angka 105. Pada tahun 2024, rasio tercatat sebesar 105,64, yang tetap mencerminkan bahwa laki-laki masih lebih banyak dibanding perempuan. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu yang mencapai 104,38 di tahun 2024, rasio Kabupaten Kaur tergolong tinggi dan konsisten berada di atas rata-rata provinsi selama sembilan tahun terakhir.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur termasuk dalam kelompok wilayah dengan rasio jenis kelamin tertinggi. Hanya Kabupaten Mukomuko yang menunjukkan angka lebih tinggi pada awal periode, dan Kabupaten Seluma serta Kepahiang yang berada pada level yang sebanding. Sementara itu, daerah seperti Kota Bengkulu dan Bengkulu Selatan cenderung memiliki rasio yang lebih rendah, bahkan mendekati angka 101. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur penduduk Kaur didominasi oleh laki-laki, yang dapat mencerminkan karakteristik wilayah dengan orientasi ekonomi di sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan yang umumnya melibatkan lebih banyak tenaga kerja laki-laki.

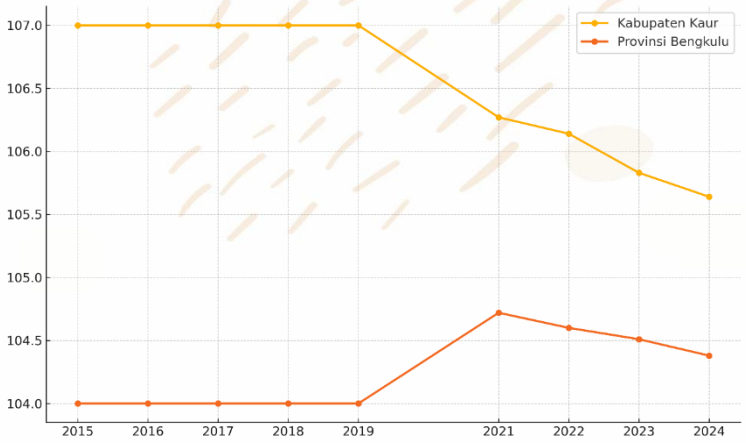

Gambar II-8. Perbandingan Rasio Penduduk Laki-Laki terhadap Perempuan Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2015–2024

Melihat struktur ini, Pemerintah Kabupaten Kaur perlu mempertimbangkan implikasi dari ketimpangan rasio jenis kelamin dalam perencanaan pembangunan. Strategi kebijakan yang berbasis gender harus diperkuat, termasuk peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, keterampilan kerja, dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, layanan kesehatan reproduksi, perlindungan perempuan, serta perencanaan sosial berbasis demografi harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik wilayah. Dengan pendekatan yang inklusif dan responsif gender, RPJMD Kabupaten Kaur 2025–2029 dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan indikator penting yang mencerminkan jumlah penduduk yang tinggal dalam satuan luas wilayah tertentu, biasanya dinyatakan dalam jiwa per kilometer persegi. Indikator ini memberikan gambaran mengenai distribusi penduduk di suatu daerah serta dampaknya terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Daerah dengan kepadatan tinggi umumnya menunjukkan aktivitas ekonomi yang lebih intensif dan akses layanan publik yang lebih baik, sebagaimana lazim ditemukan di kawasan perkotaan. Sebaliknya, wilayah dengan kepadatan rendah seperti daerah pedesaan dan

pesisir cenderung memiliki lahan luas namun menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur, aksesibilitas, dan pelayanan dasar yang memadai.

Dalam konteks Kabupaten Kaur, yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan pesisir dan perbukitan, kepadatan penduduk tergolong rendah bila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Bengkulu. Pemahaman terhadap kondisi ini menjadi krusial dalam penyusunan RPJMD 2025–2029, agar kebijakan pembangunan dapat disesuaikan secara proporsional dengan karakteristik wilayah. Kecamatan dengan kepadatan tinggi seperti Kaur Selatan dan Maje perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan tata ruang, pemukiman, dan infrastruktur agar pertumbuhan tidak menimbulkan beban lingkungan dan sosial. Sementara itu, kecamatan yang berpenduduk jarang perlu didorong melalui pengembangan pusat layanan baru, peningkatan konektivitas antarwilayah, dan pemerataan pembangunan agar setiap warga memiliki akses setara terhadap peluang dan layanan dasar. Pendekatan ini akan memastikan arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Kaur.

Tabel II-17. Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	99,88	102,6	102,34	103,63	104,93
Bengkulu Selatan	136,25	141,63	139,4	140,52	142,04
Rejang Lebong	178,6	170	181,59	184,45	186,46
Bengkulu Utara	66,16	69,23	67,57	68,42	69,19
Kaur	48,51	54,01	49,7	50,24	50,85
Seluma	85,45	87,69	87,86	88,4	89,41
Mukomuko	46,03	47,86	47,5	48,03	48,74
Lebong	63,78	55,56	64,35	66,21	67,05
Kepahiang	199,81	228,03	205,49	206,37	208,64
Bengkulu Tengah	103,07	96,49	105,81	106,98	108,34
Kota Bengkulu	2.485,47	2.495,74	2.560,32	2.602,07	2.643,34

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Kepadatan penduduk Kabupaten Kaur selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan angka yang relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk Kaur tercatat sebesar 48,51 jiwa

per kilometer persegi dan meningkat menjadi 50,85 jiwa/km² pada tahun 2024. Walaupun sempat naik cukup signifikan pada tahun 2021, angka ini kembali menurun di tahun 2022, dan perlahan mengalami peningkatan kembali hingga 2024. Jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi yang mencapai 104,93 jiwa/km² pada tahun 2024, maka Kaur memiliki kepadatan kurang dari setengah rata-rata provinsi, menegaskan karakter geografis dan penyebaran penduduk yang lebih jarang di wilayah ini.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, posisi Kaur termasuk dalam tiga wilayah dengan kepadatan terendah, bersama Mukomuko dan Bengkulu Utara. Sementara Kota Bengkulu mencatat angka kepadatan yang sangat tinggi (di atas 2.600 jiwa/km²), kabupaten seperti Kepahiang dan Rejang Lebong menunjukkan kepadatan yang lebih padat dari rata-rata provinsi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kaur didominasi oleh wilayah pedesaan dengan sebaran penduduk yang relatif merata namun tidak terkonsentrasi. Wilayah ini memiliki potensi ruang yang luas namun menghadapi tantangan dalam hal pelayanan dasar dan infrastruktur akibat jauhnya antarpermukiman.

Melihat pola ini, penting bagi Pemerintah Kabupaten Kaur untuk merancang strategi pembangunan yang responsif terhadap karakter kepadatan penduduk yang rendah. Penguatan konektivitas antarkecamatan, pengembangan pusat layanan di wilayah-wilayah yang jarang penduduk, serta penyediaan infrastruktur dasar yang menjangkau wilayah terpencil perlu menjadi prioritas dalam RPJMD 2025–2029. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Kaur dapat berjalan lebih merata dan adil, serta memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

5. Proyeksi jumlah dan kepadatan penduduk

Pada tahun 2023 Pemerintah Pusat yang diantaranta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan, Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), United

Nations Population Fund (UNFPA) serta melalui pembahasan yang melibatkan instansi terkait seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan, dan para pakar kependudukan merilis Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020. Dengan melakukan pendekatan pertumbuhan yang sama pada Provinsi Bengkulu, maka didapatakan Proyeksi Penduduk Kabupaten Kaur Tahun 2025–2030 sebagai berikut:

Tabel II-18. Proyeksi Penduduk Kabupaten KaurTahun 2025–2030

Kelompok Umur	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0–4	11.458	11.575	11.556	11.531	11.499	11.463	11.422
5–9	10.463	10.470	10.597	10.720	10.839	10.954	11.066
10–14	11.068	11.094	11.117	11.138	11.157	11.172	11.179
15–19	11.602	11.617	11.635	11.658	11.684	11.710	11.737
20–24	11.357	11.317	11.293	11.284	11.287	11.298	11.313
25–29	10.147	10.150	10.129	10.089	10.040	9.993	9.958
30–34	9.873	9.903	9.942	9.985	10.024	10.049	10.053
35–39	10.034	10.116	10.175	10.216	10.244	10.271	10.304
40–44	9.726	9.833	9.947	10.066	10.190	10.300	10.371
45–49	9.168	9.331	9.473	9.594	9.702	9.806	9.915
50–54	7.954	8.172	8.385	8.591	8.786	8.966	9.127
55–59	6.343	6.547	6.756	6.968	7.180	7.390	7.595
60–64	5.153	5.365	5.570	5.769	5.966	6.163	6.365
65–69	3.753	3.933	4.123	4.323	4.526	4.727	4.927
70–74	2.296	2.451	2.595	2.734	2.869	3.010	3.158
75+	2.264	2.435	2.629	2.844	3.073	3.314	3.562
Total	132.659	134.279	135.868	137.421	138.936	140.414	141.851

Secara umum, jumlah penduduk di setiap kelompok umur mengalami peningkatan bertahap dari tahun ke tahun, mencerminkan tren pertumbuhan populasi yang stabil dan moderat. Misalnya, pada kelompok usia 0–4 tahun, jumlah penduduk diproyeksikan sedikit menurun dari 11.575 jiwa di tahun 2025 menjadi 11.422 jiwa di tahun 2030. Penurunan ini mengindikasikan kemungkinan penurunan angka kelahiran, yang perlu diperhatikan dalam proyeksi layanan pendidikan anak usia dini dan kesehatan ibu dan anak.

Sebaliknya, kelompok usia 5–9 tahun dan 10–14 tahun menunjukkan tren peningkatan jumlah secara bertahap, dari masing-masing 10.470 jiwa dan 11.094

jiwa di tahun 2025 menjadi 11.066 jiwa dan 11.179 jiwa di tahun 2030. Peningkatan ini menandakan akan adanya peningkatan kebutuhan terhadap layanan pendidikan dasar dan infrastruktur penunjangnya.

Pada kelompok usia produktif awal (15–24 tahun), data menunjukkan jumlah penduduk yang relatif stabil. Misalnya, kelompok usia 20–24 tahun hanya berubah sedikit dari 11.317 jiwa di 2025 menjadi 11.313 jiwa di 2030. Kelompok ini penting karena mencerminkan calon tenaga kerja baru, yang memerlukan perhatian dalam hal penyediaan lapangan kerja, pelatihan vokasi, dan akses terhadap pendidikan tinggi.

Sementara itu, kelompok usia dewasa dan prapensiun (25–49 tahun) seperti 30–34 tahun, 35–39 tahun, dan seterusnya menunjukkan tren yang meningkat, mencerminkan konsistensi dominasi penduduk usia kerja dalam struktur penduduk Kabupaten Kaur. Kelompok 40–44 tahun, misalnya, diproyeksikan meningkat dari 9.833 jiwa di 2025 menjadi 10.371 jiwa pada 2030, yang berarti kebutuhan terhadap jaminan sosial, perumahan, dan layanan kesehatan kerja perlu direncanakan secara matang.

Untuk kelompok usia 50–59 tahun, yang mendekati usia pensiun, juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Jumlah penduduk usia 50–54 tahun akan meningkat dari 8.172 jiwa di tahun 2025 menjadi 9.127 jiwa pada 2030, dan kelompok 55–59 tahun dari 6.547 jiwa menjadi 7.595 jiwa. Hal ini menandakan perlunya antisipasi terhadap peningkatan permintaan layanan kesehatan usia lanjut, jaminan pensiun, serta program pemberdayaan lansia aktif.

Tabel II-19. Proyeksi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kaur Tahun 2025-2030

Tahun	Keterangan	Jumlah
2024	Jumlah Penduduk	132.659
	Kepadatan/km2	56,09
2025	Jumlah Penduduk	134.279
	Kepadatan/km2	56,78
2026	Jumlah Penduduk	135.868
	Kepadatan/km2	57,45

Tahun	Keterangan	Jumlah
2027	Jumlah Penduduk	137.421
	Kepadatan/km2	58,11
2028	Jumlah Penduduk	138.936
	Kepadatan/km2	58,75
2029	Jumlah Penduduk	140.414
	Kepadatan/km2	59,37
2029	Jumlah Penduduk	141.851
	Kepadatan/km2	59,98

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Kaur tercatat sebanyak 132.659 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 56,09 jiwa per kilometer persegi. Angka ini diproyeksikan mengalami peningkatan secara konsisten selama enam tahun ke depan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk diperkirakan naik menjadi 134.279 jiwa, dengan kepadatan 56,78 jiwa/km², lalu meningkat lagi menjadi 135.868 jiwa pada tahun 2026, dan 137.421 jiwa pada tahun 2027, yang berarti rata-rata penambahan penduduk sekitar 1.500 jiwa setiap tahunnya. Peningkatan ini berdampak langsung terhadap kepadatan wilayah, yang ikut naik menjadi 57,45 jiwa/km² di tahun 2026 dan 58,11 jiwa/km² pada 2027.

Tren pertumbuhan berlanjut di tahun 2028 dengan proyeksi jumlah penduduk sebesar 138.936 jiwa dan kepadatan 58,75 jiwa/km², lalu mencapai 140.414 jiwa di tahun 2029 dengan kepadatan 59,37 jiwa/km². Di akhir periode proyeksi, yakni tahun 2030, jumlah penduduk Kabupaten Kaur diperkirakan menyentuh angka 141.851 jiwa, dengan tingkat kepadatan hampir 60 jiwa/km² atau tepatnya 59,98 jiwa/km². Ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, terjadi peningkatan kepadatan sekitar 0,65 jiwa/km² per tahun selama periode 2024–2030.

Meski kepadatan ini masih relatif rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu—terutama wilayah perkotaan yang mencapai ratusan hingga ribuan jiwa per kilometer persegi—namun tren kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan populasi yang stabil dan berkelanjutan, sekaligus

menandakan adanya penambahan permukiman, aktivitas ekonomi, dan konsentrasi penduduk di titik-titik tertentu di wilayah Kaur. Peningkatan ini memberikan peluang strategis bagi Pemerintah Kabupaten Kaur untuk mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis kependudukan, terutama dalam sektor-sektor padat karya seperti pertanian, perikanan, dan jasa.

Namun, pertumbuhan ini juga membawa tantangan struktural yang harus diantisipasi, seperti peningkatan kebutuhan terhadap infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih), layanan pendidikan dan kesehatan, serta sistem sanitasi dan tata kelola lingkungan yang lebih baik. Terutama bagi wilayah-wilayah yang kini masih tergolong memiliki kepadatan rendah dan akses terbatas, pertumbuhan populasi dapat memperbesar kesenjangan apabila tidak diikuti oleh pemerataan pembangunan.

Dalam kerangka perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025–2029, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan berbasis data kepadatan penduduk ini untuk memastikan bahwa pertumbuhan jumlah jiwa di Kabupaten Kaur benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan, bukan justru menjadi beban layanan publik. Pendekatan spasial berbasis data demografi akan sangat penting dalam mengarahkan distribusi investasi pembangunan secara lebih merata dan efektif.

6. Proyeksi penduduk usia produktif

Proyeksi penduduk usia produktif Kabupaten Kaur tahun 2024–2030 menunjukkan tren peningkatan absolut jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) yang berlangsung secara konsisten dari tahun ke tahun, mencerminkan dinamika demografi yang berpotensi besar bagi penguatan ekonomi daerah. Pada tahun 2024, jumlah penduduk usia produktif diperkirakan mencapai 91.357 jiwa, atau sebesar 68,87% dari total populasi. Jumlah ini terus mengalami pertumbuhan, menjadi 92.351 jiwa pada 2025, 93.305 jiwa pada 2026, dan mencapai 94.220 jiwa di

tahun 2027. Tren kenaikan ini masih berlanjut, dengan angka mencapai 95.103 jiwa pada 2028 dan 95.946 jiwa pada 2029, hingga menyentuh 96.738 jiwa pada tahun 2030.

Tabel II-20. Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kabupaten Kaur Tahun 2024-2030

Tahun	Total Usia Produktif	Total Penduduk	Persentase Usia Produktif (%)
2024	91.357	132.659	68,87
2025	92.351	134.309	68,76
2026	93.305	135.922	68,65
2027	94.220	137.510	68,52
2028	95.103	139.066	68,39
2029	95.946	140.586	68,25
2030	96.738	142.052	68,1

Meskipun secara jumlah meningkat, persentase penduduk usia produktif terhadap total populasi justru menunjukkan penurunan bertahap, dari 68,87% di tahun 2024 menjadi 68,10% di tahun 2030. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan kelompok usia non-produktif (anak-anak dan lansia) berlangsung lebih cepat dibandingkan kelompok usia produktif. Fenomena ini merupakan indikasi awal pergeseran struktur demografi yang patut menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang.

Dengan dominasi penduduk usia produktif yang masih tinggi hingga 2030, Kabupaten Kaur berada dalam fase awal bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk usia kerja lebih besar dibandingkan penduduk usia tanggungan. Situasi ini merupakan peluang strategis yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, keberhasilan memanfaatkan bonus demografi sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam menyediakan lapangan kerja, akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, layanan kesehatan produktif, serta pemberdayaan ekonomi lokal.

Di sisi lain, penurunan persentase usia produktif juga menjadi sinyal awal bahwa Kabupaten Kaur perlu mulai mempersiapkan sistem perlindungan sosial dan pelayanan publik yang responsif terhadap peningkatan jumlah penduduk lansia dan kelompok usia muda. Upaya seperti penguatan sistem jaminan sosial, perbaikan kualitas layanan kesehatan lansia, serta investasi pada pendidikan anak usia dini menjadi langkah preventif untuk mengantisipasi beban demografis di masa mendatang.

Dengan kata lain, data ini menjadi dasar penting untuk merumuskan kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang adaptif, berkelanjutan, dan inklusif dalam dokumen RPJMD 2025–2029. Strategi pembangunan berbasis demografi perlu dirancang tidak hanya untuk mengoptimalkan potensi penduduk usia produktif saat ini, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antar generasi dan menciptakan struktur sosial-ekonomi yang tangguh di masa depan.

7. Proyeksi angka ketergantungan

Proyeksi penduduk Kabupaten Kaur untuk periode 2025-2029 menunjukkan pola yang signifikan dalam memahami angka ketergantungan, yaitu rasio antara populasi non-produktif (anak-anak berusia 0-14 tahun serta lansia berusia 65 tahun ke atas) terhadap populasi usia produktif (15-64 tahun).

Tabel II-21. Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Kaur Tahun 2024-2030

Tahun	0–14	15–64	65+	Angka Ketergantungan (%)
2024	32.989	91.357	8.313	45,21
2025	33.139	92.351	8.819	45,43
2026	33.270	93.305	9.347	45,67
2027	33.389	94.220	9.901	45,95
2028	33.495	95.103	10.468	46,23
2029	33.589	95.946	11.051	46,53
2030	33.667	96.738	11.647	46,84

Proyeksi angka ketergantungan Kabupaten Kaur tahun 2024 hingga 2030 menunjukkan tren peningkatan secara bertahap dalam beban tanggungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif. Angka

ketergantungan dihitung dari jumlah penduduk usia 0–14 tahun dan usia 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15–64 tahun. Pada tahun 2024, angka ketergantungan tercatat sebesar 45,21%, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 45 penduduk usia non-produktif. Angka ini terus meningkat menjadi 45,43% di tahun 2025, 45,67% pada 2026, dan mencapai 45,95% di tahun 2027.

Tren tersebut berlanjut pada tahun 2028 dengan angka 46,23%, kemudian meningkat menjadi 46,53% pada 2029, dan mencapai 46,84% di tahun 2030. Meskipun peningkatan ini berlangsung secara moderat, tren tersebut menandakan bahwa beban penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif semakin besar setiap tahunnya, baik karena meningkatnya jumlah anak-anak maupun karena bertambahnya penduduk lanjut usia.

Peningkatan angka ketergantungan ini menjadi sinyal penting bagi Pemerintah Kabupaten Kaur dalam merumuskan kebijakan sosial dan ekonomi ke depan. Di satu sisi, jumlah anak-anak yang besar menuntut penyediaan layanan pendidikan dan gizi yang berkualitas, sedangkan peningkatan jumlah lansia memerlukan penguatan sistem kesehatan, perlindungan sosial, serta fasilitas lansia yang memadai. Di sisi lain, meningkatnya beban penduduk usia produktif juga memerlukan kebijakan ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi yang mampu mengoptimalkan potensi angkatan kerja produktif agar tetap mampu menopang kelompok usia yang menjadi tanggungan. Dengan perencanaan yang tepat, tren ini juga bisa menjadi peluang untuk mendorong investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal berbasis demografi.

8. Proyeksi bonus demografi

Proyeksi bonus demografi Kabupaten Kaur tahun 2024–2030 menunjukkan tren demografis yang penting bagi arah pembangunan daerah ke depan. Selama periode ini, jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) terus meningkat, dari 91.357 jiwa pada tahun 2024 menjadi 96.738 jiwa pada tahun 2030. Kenaikan ini

menggambarkan bahwa Kabupaten Kaur akan mengalami masa bonus demografi, yaitu kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan kelompok usia non-produktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas).

Tabel II-22. Proyeksi Bonus Demografi Kabupaten Kaur Tahun 2024-2030

Tahun	0–14	15–64	65+	Total	Rasio Ketergantungan	% Usia Produktif
2024	32.989	91.357	8.313	132.659	0,45	68,87
2025	33.139	92.351	8.819	134.279	0,45	68,78
2026	33.270	93.305	9.347	135.868	0,46	68,67
2027	33.389	94.220	9.901	137.421	0,46	68,56
2028	33.495	95.103	10.468	138.936	0,46	68,45
2029	33.589	95.946	11.051	140.414	0,47	68,33
2030	33.667	96.738	11.647	141.851	0,47	68,2

Meskipun jumlah penduduk usia muda (0–14 tahun) juga meningkat, dari 32.989 jiwa pada 2024 menjadi 33.667 jiwa pada 2030, peningkatannya cenderung stabil. Sementara itu, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) mengalami pertumbuhan yang lebih cepat, dari 8.313 jiwa menjadi 11.647 jiwa dalam kurun waktu yang sama. Akibatnya, rasio ketergantungan – yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif dengan usia produktif – juga menunjukkan tren kenaikan ringan, dari 0,45 pada 2024 menjadi 0,47 pada 2030. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun penduduk usia produktif masih dominan, beban tanggungan terhadap mereka juga mulai meningkat.

Persentase penduduk usia produktif terhadap total populasi Kabupaten Kaur menunjukkan penurunan bertahap dari 68,87% pada tahun 2024 menjadi 68,20% pada tahun 2030. Walaupun penurunannya tidak signifikan, hal ini mencerminkan bahwa puncak bonus demografi kemungkinan akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan, dan kemudian akan mulai menurun seiring meningkatnya jumlah penduduk lansia.

Dengan kondisi ini, Kabupaten Kaur memiliki peluang besar untuk memanfaatkan momentum bonus demografi melalui kebijakan yang mendorong

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fokus kebijakan sebaiknya diarahkan pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja yang inklusif, penguatan ekonomi lokal, serta investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pada saat yang sama, antisipasi terhadap peningkatan jumlah lansia juga penting dilakukan melalui penguatan sistem perlindungan sosial dan layanan kesehatan lansia. Jika dikelola dengan baik, momentum ini akan menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

9. Proyeksi penduduk usia lanjut

proyeksi penduduk usia lanjut di Kabupaten Kaur tahun 2024 hingga 2030 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas. Pada tahun 2024, jumlah total penduduk usia lanjut yang terdiri dari kelompok umur 60–64 tahun, 65–69 tahun, 70–74 tahun, dan 75 tahun ke atas tercatat sebanyak 13.466 jiwa. Jumlah ini diproyeksikan meningkat setiap tahunnya, menjadi 14.184 jiwa pada tahun 2025, dan terus naik hingga mencapai 18.012 jiwa pada tahun 2030.

Tabel II-23. Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Kaur Tahun 2024-2030

Tahun	60–64	65–69	70–74	75+	Total Usia Lanjut
2024	5.153	3.753	2.296	2.264	13.466
2025	5.365	3.933	2.451	2.435	14.184
2026	5.570	4.123	2.595	2.629	14.917
2027	5.769	4.323	2.734	2.844	15.670
2028	5.966	4.526	2.869	3.073	16.434
2029	6.163	4.727	3.010	3.314	17.214
2030	6.365	4.927	3.158	3.562	18.012

Jika dirinci, seluruh kelompok umur lansia mengalami pertumbuhan. Misalnya, kelompok umur 60–64 tahun meningkat dari 5.153 jiwa pada tahun 2024 menjadi 6.365 jiwa di tahun 2030. Kelompok umur tertua, yaitu usia 75 tahun ke atas, meningkat signifikan dari 2.264 jiwa menjadi 3.562 jiwa pada periode yang

sama, menunjukkan adanya perbaikan dalam angka harapan hidup di Kabupaten Kaur.

Kenaikan populasi lansia ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Kaur sedang memasuki fase awal penuaan penduduk (aging population), yang memiliki implikasi penting dalam perencanaan pembangunan. Peningkatan jumlah lansia menjadi tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, hal ini akan meningkatkan kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan geriatrik, sistem jaminan sosial, infrastruktur ramah lansia, serta program perlindungan sosial yang inklusif. Di sisi lain, lansia yang sehat dan produktif juga dapat menjadi aset sosial dan ekonomi, terutama jika diberdayakan dalam sektor informal dan kegiatan komunitas.

Dengan proyeksi peningkatan populasi lansia yang cukup signifikan, Pemerintah Kabupaten Kaur perlu menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok usia lanjut, termasuk melalui pengembangan layanan kesehatan berbasis komunitas, penyediaan fasilitas publik yang aksesibel, serta pelibatan lansia dalam program sosial dan ekonomi produktif. Integrasi isu penuaan penduduk ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah seperti RPJMD 2025–2029 menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh kelompok umur di Kabupaten Kaur.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator utama yang mencerminkan tingkat perkembangan ekonomi suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, yang umumnya dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Indikator ini menggambarkan sejauh mana kegiatan ekonomi suatu daerah mengalami peningkatan dalam memproduksi barang dan jasa, serta seberapa besar kontribusinya terhadap

peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan kapasitas fiskal daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabil, dan berkelanjutan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan Kabupaten Kaur, LPE menjadi indikator strategis untuk menilai efektivitas berbagai kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi mencerminkan keberhasilan program-program prioritas seperti penguatan sektor pertanian dan perikanan sebagai basis ekonomi rakyat, pengembangan pariwisata pesisir dan agrowisata, perluasan investasi berbasis potensi lokal, serta peningkatan infrastruktur wilayah yang mendorong konektivitas antar kecamatan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang terjaga juga menjadi fondasi penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), memperluas layanan publik, serta mendorong daya saing daerah di tingkat provinsi maupun nasional.

Tabel II-24. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota (Persen) dan Provinsi Bengkulu 2014-2024

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	4,97	4,94	-0,02	3,27	4,31	4,28	4,62
Bengkulu Selatan	4,95	4,97	0,26	3,25	3,45	3,18	4,37
Rejang Lebong	4,96	4,96	0,07	3,14	4,3	4,05	4,29
Bengkulu Utara	4,81	4,92	0,23	4,01	3,14	4,18	4,43
Kaur	4,98	4,98	0,12	3,08	3,78	3,4	4,15
Seluma	4,8	4,93	-0,01	2,18	2,92	2,61	4,06
Mukomuko	5,01	5,03	0,06	3,35	4,33	3,69	4,05
Lebong	5,01	4,97	0,1	3,08	2,98	2,84	4,3
Kepahiang	5	4,89	0,06	3,16	4,19	4,01	4,28
Bengkulu Tengah	4,97	4,97	-0,06	2,29	3,03	3,82	3,97
Kota Bengkulu	5,48	5,41	-0,25	3,47	5,69	5,53	5,39

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kaur dalam periode 2018 hingga 2024 menunjukkan pola yang cukup dinamis dan mencerminkan kondisi ekonomi nasional serta regional yang turut terdampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2018

dan 2019, Kaur mencatat pertumbuhan stabil di angka 4,98 persen, setara bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Bengkulu. Namun pada tahun 2020, laju pertumbuhan Kaur menurun tajam menjadi 0,12 persen akibat pandemi, meskipun masih berada di atas angka provinsi yang mengalami kontraksi -0,02 persen. Tahun-tahun berikutnya menunjukkan pemulihan bertahap, dengan pertumbuhan sebesar 3,08 persen pada 2021 dan meningkat menjadi 3,78 persen pada 2022.

Meskipun ada perbaikan, capaian Kabupaten Kaur masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada tahun-tahun pemulihan. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kaur tercatat sebesar 3,4 persen, sedangkan provinsi mencapai 4,28 persen. Sementara pada proyeksi tahun 2024, Kaur diperkirakan tumbuh sebesar 4,15 persen, masih di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 4,62 persen. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, Kaur berada di kelompok menengah bawah dalam hal kinerja pertumbuhan ekonomi. Kabupaten seperti Kota Bengkulu dan Mukomuko menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat dan konsisten, sementara daerah seperti Seluma dan Bengkulu Tengah berada pada kisaran yang lebih rendah.

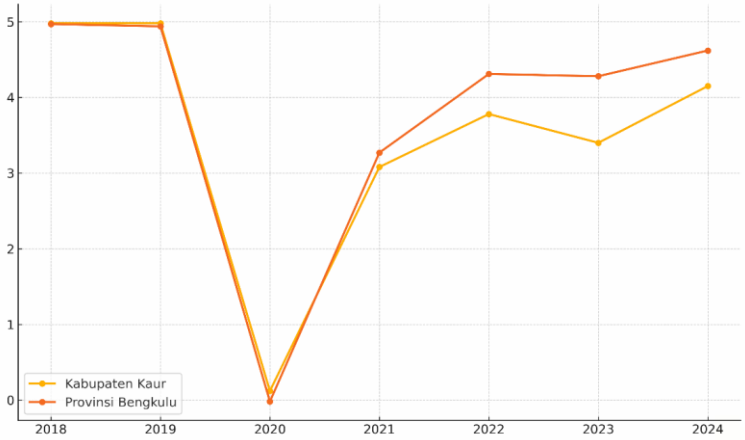

Gambar II-9. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2018–2024

Melihat tren ini, Pemerintah Kabupaten Kaur perlu mengidentifikasi sektor-sektor prioritas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih

signifikan dan berkelanjutan. Potensi unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis alam perlu digerakkan melalui investasi produktif, pelatihan SDM lokal, dan dukungan infrastruktur. Perencanaan dalam RPJMD 2025–2029 harus diarahkan pada penciptaan nilai tambah ekonomi, pemberdayaan UMKM, dan perluasan pasar lokal serta regional. Dengan strategi yang terfokus dan partisipatif, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kaur dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan inklusif.

2. Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan indikator kunci yang menunjukkan proporsi penduduk Kabupaten Kaur yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu standar minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Indikator ini menjadi barometer kesejahteraan masyarakat sekaligus mencerminkan sejauh mana kebijakan pembangunan daerah berhasil meningkatkan taraf hidup warga. Di Kabupaten Kaur, angka kemiskinan tidak hanya mencerminkan kondisi sosial ekonomi, tetapi juga menjadi referensi utama dalam merancang strategi pembangunan yang menekankan pengentasan kemiskinan secara menyeluruh dan peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Kaur 2025–2029, angka kemiskinan diposisikan sebagai indikator kinerja utama yang berkaitan erat dengan berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, perumahan, dan pengembangan ekonomi lokal. Angka kemiskinan yang tinggi umumnya menunjukkan keterbatasan akses masyarakat terhadap pekerjaan, modal usaha, layanan publik, dan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara lintas sektor dan lintas wilayah, dengan pendekatan yang terintegrasi. Pemerintah daerah perlu menggunakan data kemiskinan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kelompok rentan, menyusun intervensi yang tepat sasaran, serta merancang program

prioritas yang mampu menjangkau masyarakat miskin secara efektif. Dengan penguatan kolaborasi antarprogram sosial, ekonomi, dan infrastruktur, pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Kaur diharapkan dapat dicapai secara signifikan dan berkelanjutan.

Tabel II-25. Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2024

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	15,43	15,23	15,03	15,22	14,62	14,04	13,56
Bengkulu Selatan	18,65	18,54	17,82	18,16	17,86	17,51	17,1
Rejang Lebong	16,23	15,95	15,85	15,85	15,65	14,79	14,65
Bengkulu Utara	11,81	11,65	11,67	11,61	11,48	11,29	10,96
Kaur	19,40	18,89	18,47	18,62	18,10	17,83	17,12
Seluma	19,60	19,10	18,56	18,72	18,36	18,00	17,23
Mukomuko	11,40	11,70	11,72	11,93	11,44	10,76	10,76
Lebong	11,59	11,77	11,85	12,00	12,03	11,15	10,45
Kepahiang	14,42	14,74	14,69	14,83	14,53	14,12	12,9
Bengkulu Tengah	8,20	8,80	9,30	9,68	9,76	9,40	10,14
Kota Bengkulu	18,82	18,09	17,65	17,89	15,73	14,71	13,76

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Angka kemiskinan di Kabupaten Kaur terus menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Dari yang semula 19,40 persen pada 2018, jumlah penduduk miskin berhasil ditekan menjadi 17,12 persen di tahun 2024. Meskipun sempat sedikit naik pada 2021, tren keseluruhan tetap mengarah pada perbaikan. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu yang telah turun hingga 13,56 persen, posisi Kaur masih tertinggal. Ini menunjukkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan di daerah ini masih cukup besar, terutama dalam menjangkau masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar.

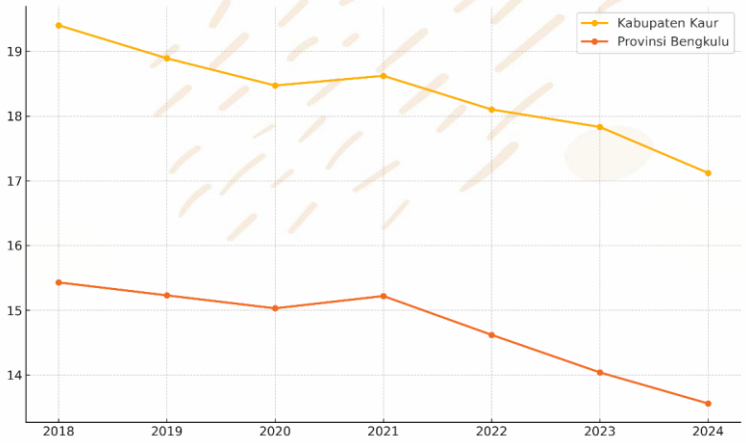

Gambar II-10.Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2018–2024

Dibandingkan kabupaten/kota lain di provinsi ini, Kaur berada di jajaran dengan tingkat kemiskinan tertinggi, bersanding dengan Seluma dan Bengkulu Selatan. Sebaliknya, kabupaten seperti Mukomuko, Bengkulu Tengah, dan Lebong sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan mereka di bawah 11 persen. Perbedaan ini mencerminkan adanya ketimpangan antarwilayah, baik dari sisi peluang ekonomi maupun jangkauan layanan publik. Kaur yang sebagian besar wilayahnya adalah pesisir dan perbukitan mungkin menghadapi kendala struktural yang lebih kompleks dalam proses penanggulangan kemiskinan.

Melihat kondisi tersebut, sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Kaur memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan yang bersifat lintas sektor dan berbasis pada potensi lokal. Penguatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, dukungan terhadap ekonomi produktif, serta peningkatan konektivitas antarwilayah perlu diutamakan dalam perencanaan RPJMD 2025–2029. Dengan strategi yang tepat sasaran dan berkelanjutan, pengurangan angka kemiskinan dapat dipercepat secara signifikan, sekaligus menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan merata.

3. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator ekonomi yang mencerminkan rata-rata nilai tambah bruto yang dihasilkan setiap

individu dalam satu wilayah selama satu tahun. Perhitungan ini diperoleh dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk, sehingga memberikan gambaran yang lebih proporsional tentang tingkat kesejahteraan dan produktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai alat ukur utama kinerja ekonomi daerah, PDRB per kapita juga berperan penting dalam mengevaluasi kemampuan daya beli, distribusi pendapatan, dan kapasitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam kerangka penyusunan RPJMD Kabupaten Kaur 2025–2029, PDRB per kapita menjadi indikator strategis untuk menilai efektivitas pembangunan ekonomi yang telah dilakukan. Nilai yang tinggi mencerminkan pertumbuhan sektor ekonomi yang kuat dan peningkatan pendapatan masyarakat, sementara nilai yang rendah menunjukkan adanya hambatan dalam produktivitas, kesenjangan akses terhadap peluang ekonomi, dan kurangnya pengembangan sektor potensial. Untuk itu, peningkatan PDRB per kapita perlu ditempuh melalui penguatan sektor-sektor andalan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata; hilirisasi hasil produksi lokal; serta penciptaan lapangan kerja berkualitas. Di sisi lain, upaya pemerataan pembangunan dan penguatan akses pendidikan serta pelatihan keterampilan harus menjadi bagian integral dari strategi, agar pertumbuhan ekonomi juga berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Kaur.

Tabel II-26. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota dan Provinsi Bengkulu 2019-2024 (Juta Rupiah)

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	36,57	36,55	39,17	43,76	46,29	49,23
Bengkulu Selatan	34,05	35,09	36,95	39,58	42	45,38
Rejang Lebong	34,9	34,53	36,13	38,91	41,65	45,24
Bengkulu Utara	27,42	28,44	32,91	40,64	40,73	41,21
Kaur	29,05	28,62	30,52	32,65	34,7	37,42
Seluma	23,72	22,83	24,07	25,58	26,82	29,17
Mukomuko	27,81	27,75	29,52	31,74	34,2	37,51

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lebong	29,25	32,01	33,76	35,71	37,69	40,99
Kepahiang	31,13	29,54	31,42	33,75	36,31	40,07
Bengkulu Tengah	40,82	40,15	46,33	54,73	55,02	55,28
Kota Bengkulu	63,13	63,11	65,94	72,98	78,78	83,43

Sumber: Bengkulu Dalam Angka 2025

Peningkatan PDRB per kapita di Kabupaten Kaur dalam beberapa tahun terakhir berjalan cukup stabil, meski masih berada di bawah rata-rata provinsi. Nilainya berada di kisaran Rp29,05 juta pada 2019 dan terus naik menjadi Rp37,42 juta pada 2024. Penurunan sempat terjadi pada 2020, kemungkinan besar akibat tekanan ekonomi pandemi, namun pemulihan kembali terjadi secara bertahap hingga tahun terkini. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Bengkulu yang telah mencapai Rp49,23 juta, kontribusi nilai tambah ekonomi per penduduk Kaur masih tergolong rendah dan membutuhkan penguatan dari sisi produktivitas maupun sektor-sektor unggulan.

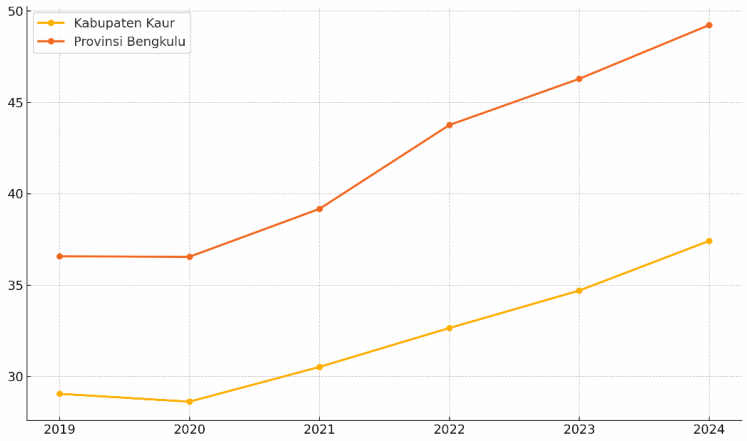

Gambar II-11. Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024

Dalam konteks regional, Kaur menempati posisi menengah ke bawah. Kabupaten/kota seperti Bengkulu Tengah, Lebong, dan bahkan Mukomuko telah mencatatkan angka yang lebih tinggi. Kota Bengkulu secara konsisten mencatat PDRB per kapita tertinggi di provinsi, mencerminkan dominasi sektor jasa dan perdagangan modern. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas produktivitas

antarwilayah yang perlu direspons oleh pemerintah daerah, khususnya melalui pengembangan ekonomi lokal yang terfokus pada potensi khas wilayah Kaur.

Ke depan, peningkatan PDRB per kapita harus menjadi prioritas dalam strategi pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Kaur perlu memperkuat sektor-sektor bernilai tambah tinggi, mendorong hilirisasi hasil pertanian dan perikanan, serta membuka ruang investasi yang lebih luas untuk industri kecil dan menengah. Selain itu, penting pula mempercepat akses masyarakat terhadap pendidikan keterampilan dan memperkuat infrastruktur ekonomi yang menopang aktivitas produktif masyarakat. Dengan strategi yang terarah, indikator ini tidak hanya naik secara angka, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencerminkan seberapa besar proporsi angkatan kerja di Kabupaten Kaur yang masih aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan kesempatan kerja dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana kapasitas perekonomian daerah dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai. Tingginya TPT bisa mengindikasikan kurang efektifnya sistem ketenagakerjaan, ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan penyediaan kerja, serta rendahnya relevansi keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Oleh sebab itu, dinamika TPT memberikan gambaran awal mengenai tantangan pembangunan ekonomi dan sosial yang perlu dijawab secara serius.

Dalam rangka menyusun arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kaur 2025–2029, TPT menjadi indikator kunci untuk merumuskan strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan produktivitas daerah. Ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia perlu diatasi melalui pendekatan multi-sektor, seperti mendorong pertumbuhan sektor-sektor

produktif, meningkatkan kualitas pelatihan kerja berbasis keterampilan lokal, serta memfasilitasi pengembangan wirausaha. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan pasar kerja yang inklusif dan dinamis, sehingga pengangguran dapat ditekan secara berkelanjutan dan kontribusi ekonomi masyarakat dapat meningkat secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Kaur.

Tabel II-27. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2017-2024

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	2,6	3,09	2,36	3,52	2,55	3,51	3,56	3,25
Rejang Lebong	3	1,69	2,84	3,7	2,45	2,28	2,94	2,43
Bengkulu Utara	3,89	2,72	4,14	3,82	3,51	4,16	3,33	2,89
Kaur	1,9	2,85	2,4	2,73	3,45	3,83	3,81	3,71
Seluma	3,22	2,95	2,23	3,04	3,44	1,74	2,68	2,38
Mukomuko	3,53	4,9	3,93	3,59	3,68	3,07	3,14	2,41
Lebong	3,57	6,34	4,01	3,92	3,18	3,16	2,72	2,55
Kepahiang	2,94	3,08	2,27	2,52	1,89	2,92	2,41	2,37
Bengkulu Tengah	2,72	3,48	4,63	4,45	4,07	2,48	3,20	2,56
Kota Bengkulu	6,61	5	4,29	6,82	6,35	6,15	5,04	5
Provinsi Bengkulu	3,74	3,51	3,39	4,07	3,65	3,59	3,42	3,11

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Selama periode 2017 hingga 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kaur menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017, TPT di Kaur tercatat sebesar 1,9 persen dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 menjadi 3,83 persen, sebelum sedikit menurun ke angka 3,71 persen pada tahun 2024. Angka ini menjadikan Kaur sebagai salah satu kabupaten dengan TPT yang lebih tinggi dibandingkan beberapa wilayah lain di Provinsi Bengkulu, seperti Kepahiang (2,37%) dan Seluma (2,38%) pada tahun 2024. Meski begitu, Kaur masih berada di bawah Kota Bengkulu yang secara konsisten memiliki TPT tertinggi di provinsi ini, yakni 5,0 persen pada tahun 2024.

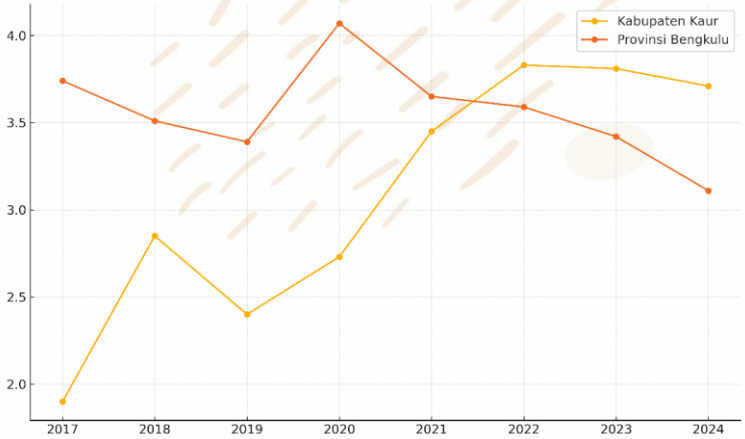

Gambar II-12. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2017–2024

Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu, Kaur mencatat TPT yang relatif mendekati atau bahkan melampaui angka provinsi sejak tahun 2021. Misalnya, pada tahun 2023 dan 2024, TPT Kaur masing-masing berada di angka 3,81 persen dan 3,71 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Bengkulu yang hanya sebesar 3,42 persen dan 3,11 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Kabupaten Kaur merupakan wilayah yang didominasi oleh sektor primer, tantangan dalam menyerap tenaga kerja tetap signifikan, kemungkinan disebabkan oleh terbatasnya diversifikasi ekonomi lokal serta belum optimalnya pengembangan sektor padat karya.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengangguran di Kabupaten Kaur masih menjadi isu pembangunan yang perlu mendapat perhatian serius dalam RPJMD 2025–2029. Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat program pengembangan keterampilan, pendidikan vokasi, serta menciptakan iklim investasi yang mendorong munculnya lapangan kerja baru, khususnya di sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis lokal. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan TPT di Kaur dapat ditekan secara bertahap seiring peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan sektor ekonomi daerah.

5. Indeks Gini

Indeks Gini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menilai sejauh mana distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu daerah berlangsung secara merata. Skala indeks ini berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 0 berarti seluruh pendapatan dibagi secara sama rata oleh semua individu, sedangkan nilai mendekati 1 mencerminkan adanya ketimpangan ekstrem, di mana sebagian besar kekayaan hanya dimiliki oleh segelintir orang. Dalam konteks ekonomi dan sosial, nilai Indeks Gini memberikan gambaran tentang tingkat kesenjangan yang terjadi di tengah masyarakat dan seberapa adil manfaat pembangunan tersebar di seluruh lapisan penduduk.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kaur 2025–2029, pemantauan terhadap Indeks Gini memiliki peran penting sebagai tolok ukur keberhasilan kebijakan yang mendorong keadilan sosial dan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi menjadi sinyal adanya ketidaksetaraan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan fasilitas publik lainnya. Karena itu, upaya menekan Indeks Gini harus diintegrasikan dalam strategi pembangunan, melalui penguatan program pemberdayaan ekonomi rakyat, perluasan akses layanan dasar bagi kelompok rentan, serta distribusi hasil pembangunan yang lebih merata. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan lebih adil dan menyeluruh oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kaur.

Tabel II-28. Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2014-2024

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	0,36	0,32	0,31	0,30	0,30	0,35	0,3
Rejang Lebong	0,33	0,30	0,29	0,35	0,30	0,30	0,28
Bengkulu Utara	0,35	0,30	0,28	0,31	0,28	0,30	0,28
Kaur	0,31	0,29	0,32	0,28	0,28	0,29	0,3
Seluma	0,31	0,30	0,29	0,25	0,29	0,29	0,28
Mukomuko	0,32	0,29	0,25	0,26	0,26	0,29	0,28
Lebong	0,29	0,31	0,28	0,27	0,27	0,29	0,29
Kepahiang	0,30	0,27	0,31	0,28	0,30	0,33	0,31

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Tengah	0,29	0,26	0,26	0,25	0,24	0,27	0,27
Kota Bengkulu	0,39	0,36	0,37	0,38	0,37	0,38	0,44
Provinsi Bengkulu	0,36	0,34	0,33	0,33	0,32	0,33	0,342

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, Tahun 2025

Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kaur tergolong relatif stabil. Data menunjukkan bahwa nilai Gini Ratio di wilayah ini cenderung berada di kisaran 0,28 hingga 0,32. Meskipun sempat naik pada tahun 2020, angkanya kembali menurun dan bertahan di level yang cukup moderat. Ketimpangan di Kaur tidak termasuk yang paling rendah, namun juga tidak menempatkan wilayah ini pada kategori dengan kesenjangan tertinggi di Provinsi Bengkulu.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, Kota Bengkulu secara konsisten mencatatkan tingkat ketimpangan paling tinggi, bahkan mencapai angka 0,44 pada tahun 2024. Sebaliknya, beberapa kabupaten seperti Bengkulu Tengah dan Seluma menunjukkan angka yang lebih rendah dari Kaur. Hal ini menandakan bahwa meskipun kondisi distribusi pendapatan di Kaur relatif baik, masih terdapat ruang untuk perbaikan.

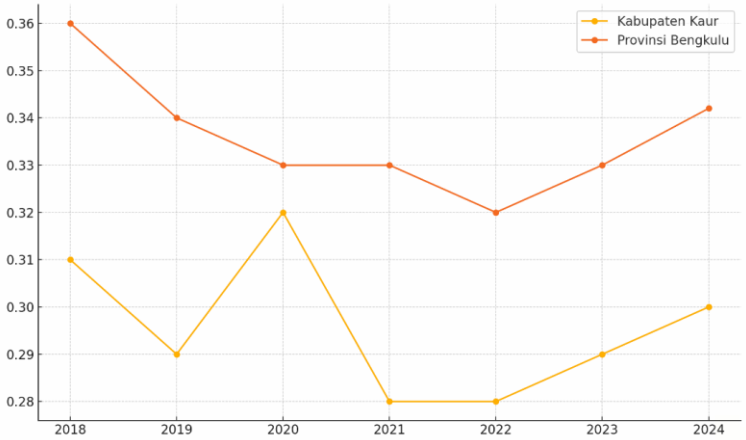

Gambar II-13. Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2018–2024

Melihat kecenderungan tersebut, pemerintah daerah perlu terus menjaga keseimbangan ini dengan mendorong program-program yang memperluas akses

ekonomi masyarakat lapisan bawah. Pengembangan sektor ekonomi lokal yang inklusif, serta pemberdayaan kelompok rentan, akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kaur benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur komprehensif yang menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan manusia melalui tiga aspek utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Diukur melalui indikator seperti usia harapan hidup, rata-rata dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan, IPM menjadi representasi dari seberapa besar masyarakat dapat menikmati akses terhadap layanan dasar yang memadai. Dalam kerangka pembangunan daerah, IPM digunakan sebagai dasar dalam menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Bagi Kabupaten Kaur, peningkatan IPM menjadi fokus utama dalam RPJMD 2025–2029. Hal ini mencerminkan komitmen daerah untuk menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, dan produktif. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, penguatan sektor pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui sektor-sektor unggulan seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata menjadi strategi yang perlu dioptimalkan. Dengan pendekatan lintas sektor dan kolaboratif, target peningkatan IPM diharapkan dapat diwujudkan tidak hanya dalam angka statistik, tetapi juga dalam bentuk nyata berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tabel II-29. Indeks Pembangunan Manusia (UHH Hasil LF SP2020) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	72,93	73,16	73,68	74,3	74,91
Bengkulu Selatan	72,81	72,93	73,58	74,06	74,53
Rejang Lebong	72,51	72,85	73,54	74,43	75,04

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Utara	70,81	71,28	71,76	72,27	73,1
Kaur	69,52	69,71	70,3	70,92	71,53
Seluma	68,87	69	69,74	70,27	70,98
Mukomuko	71,47	71,67	72,15	73	73,65
Lebong	71,2	71,67	72,35	72,95	73,54
Kepahiang	69,91	70,38	70,85	71,38	72,05
Bengkulu Tengah	69,42	69,78	70,29	70,81	71,67
Kota Bengkulu	82,31	82,49	82,93	83,38	83,95

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Kaur menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil, yakni dari angka 69,52 pada tahun 2020 menjadi 71,53 pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam tiga dimensi utama IPM: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Namun, jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Bengkulu, yang pada tahun 2024 mencapai 74,91, maka posisi Kaur masih berada di bawah rata-rata provinsi. Bahkan, dibandingkan dengan sebagian besar kabupaten/kota lain, seperti Rejang Lebong (75,04) dan Mukomuko (73,65), capaian IPM Kaur masih tergolong rendah.

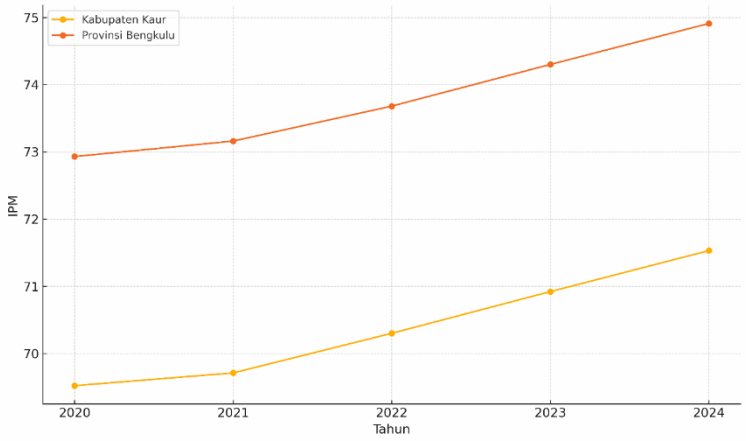

Gambar II-14. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2020–2024

Lebih lanjut, beberapa kabupaten/kota seperti Kota Bengkulu (83,95) menunjukkan capaian IPM yang jauh lebih tinggi, yang menandakan disparitas

pembangunan manusia antarwilayah di Provinsi Bengkulu masih cukup lebar. Kabupaten Kaur berada di level menengah bawah bersama kabupaten seperti Seluma (70,98) dan Bengkulu Tengah (71,67). Kondisi ini menggambarkan masih perlunya peningkatan layanan dasar di Kaur, baik dalam aspek pendidikan maupun kesehatan serta peningkatan pengeluaran per kapita sebagai komponen standar hidup layak.

Sebagai kesimpulan, meskipun IPM Kabupaten Kaur terus meningkat setiap tahunnya, upaya peningkatan kualitas SDM masih perlu ditingkatkan agar kesenjangan antarwilayah dapat ditekan. Strategi pembangunan yang diarahkan pada penguatan kualitas pendidikan, akses layanan kesehatan yang merata, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal perlu diintegrasikan secara lintas sektor dalam RPJMD 2025–2029. Upaya ini penting agar pembangunan di Kabupaten Kaur menjadi lebih inklusif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

B. Kesehatan untuk Semua

1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penting yang mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat dan efektivitas layanan kesehatan yang tersedia di suatu wilayah. Angka ini menunjukkan rata-rata umur yang diperkirakan akan dicapai oleh seseorang sejak lahir, dengan memperhitungkan pola kematian yang ada. UHH yang tinggi mengindikasikan akses yang baik terhadap layanan kesehatan, lingkungan yang mendukung, kecukupan gizi, dan pola hidup sehat di masyarakat. Sebaliknya, rendahnya UHH dapat menjadi sinyal adanya tantangan dalam penyediaan layanan kesehatan dasar, pola konsumsi, serta faktor lingkungan dan sosial lainnya.

Dalam konteks pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Kaur, UHH berperan sebagai salah satu dimensi utama dalam penyusunan RPJMD karena turut menentukan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan

UHH mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, intervensi di sektor kesehatan, seperti perluasan layanan primer, peningkatan kualitas gizi, edukasi hidup sehat, dan perhatian pada populasi lansia harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tabel II-30. Umur Harapan hidup (Hasil LF SP2020) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	72,59	72,65	72,9	73,11	73,31
Bengkulu Selatan	72,47	72,49	72,67	72,87	73,05
Rejang Lebong	72,99	73,17	73,44	73,67	73,87
Bengkulu Utara	72,49	72,57	72,81	73,03	73,23
Kaur	72,12	72,22	72,49	72,74	72,97
Seluma	72,1	72,25	72,49	72,71	72,9
Mukomuko	73,11	73,19	73,44	73,71	73,95
Lebong	71,93	72,04	72,34	72,59	72,81
Kepahiang	71,73	71,87	72,07	72,26	72,41
Bengkulu Tengah	72,17	72,17	72,33	72,46	72,56
Kota Bengkulu	73,88	73,94	74,18	74,43	74,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2025

Berdasarkan data Umur Harapan Hidup (UHH) hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020), Kabupaten Kaur menunjukkan tren peningkatan UHH yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, UHH Kabupaten Kaur tercatat sebesar 72,12 tahun, kemudian meningkat secara bertahap menjadi 72,97 tahun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek kesehatan, gizi, dan pelayanan publik yang mendukung kualitas hidup masyarakat.

Namun demikian, angka UHH Kabupaten Kaur masih berada di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu, yang mencapai 73,31 tahun pada 2024. Selama lima tahun

terakhir, kesenjangan UHH antara Kaur dan provinsi berkisar antara 0,4 hingga 0,7 tahun, dan selisih ini tetap bertahan meskipun keduanya mengalami peningkatan. Posisi Kaur juga masih berada di kelompok menengah bawah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu; misalnya, Kota Bengkulu dan Kabupaten Mukomuko mencatat UHH tertinggi masing-masing 74,69 tahun dan 73,95 tahun pada tahun 2024.

Dengan demikian, meskipun peningkatan UHH di Kabupaten Kaur merupakan sinyal positif, upaya perbaikan kesehatan masyarakat, penguatan layanan dasar, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup tetap perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Intervensi yang terfokus pada perbaikan gizi, pengendalian penyakit tidak menular, serta perluasan akses terhadap layanan kesehatan primer akan menjadi kunci untuk mendekatkan capaian UHH Kabupaten Kaur ke rata-rata provinsi dan memperkuat kualitas pembangunan manusia di wilayah ini.

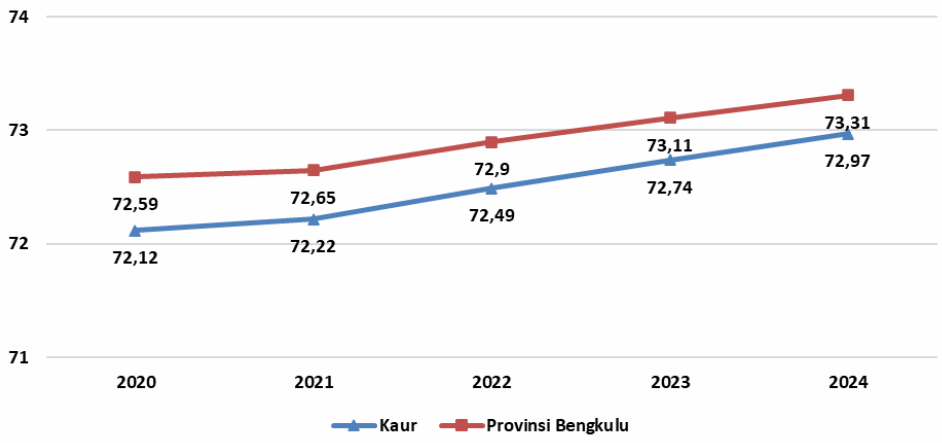

Gambar II-15. Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2020–2024

2. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) menjadi alat ukur komprehensif dalam menilai kualitas kesehatan masyarakat di tingkat rumah tangga melalui berbagai indikator seperti cakupan imunisasi, akses air bersih dan sanitasi layak, gizi balita, hingga perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Dalam konteks pembangunan Kabupaten

Kaur, IKS berperan penting sebagai fondasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Angka IKS yang rendah biasanya menunjukkan masih adanya kesenjangan layanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil yang mengalami keterbatasan infrastruktur, tenaga medis, dan edukasi kesehatan. Oleh sebab itu, penguatan sistem kesehatan keluarga menjadi langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berdaya.

Sebagai bagian dari perencanaan RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Kaur perlu memprioritaskan peningkatan IKS secara sistematis dan menyeluruh. Ini dapat dilakukan melalui penguatan layanan kesehatan primer berbasis puskesmas dan posyandu, pelatihan kader kesehatan, serta penyuluhan kesehatan keluarga berbasis komunitas. Selain itu, integrasi kebijakan lintas sektor — seperti penyediaan sanitasi, peningkatan akses gizi, serta upaya preventif penyakit menular dan tidak menular — menjadi kunci dalam mempercepat peningkatan IKS. Dengan memperbaiki indikator-indikator tersebut, Kaur tidak hanya memperbaiki derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan manusia dan kesejahteraan jangka panjang.

Tabel II-31. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2023

Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rejang Lebong	0,123	0,134	0,147	0,159	0,198	0,209
Kota Bengkulu	0,274	0,299	0,294	0,304	0,307	0,291
Bengkulu Utara	0,133	0,146	0,168	0,181	0,207	0,261
Lebong	0,081	0,073	0,08	0,081	0,118	0,135
Kepahiang	0,156	0,128	0,142	0,166	0,207	0,242
Bengkulu Tengah	0,156	0,128	0,136	0,165	0,186	0,256
Mukomuko	0,099	0,109	0,141	0,143	0,157	0,16
Seluma	0,13	0,115	0,149	0,166	0,178	0,187
Bengkulu Selatan	0,162	0,148	0,156	0,183	0,187	0,206
Kaur	0,098	0,083	0,085	0,085	0,127	0,134
Provinsi Bengkulu	0,164	0,161	0,171	0,183	0,205	0,224

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Selama periode 2018 hingga 2023, Kabupaten Kaur menunjukkan peningkatan IKS dari 0,098 menjadi 0,134. Meskipun mengalami tren kenaikan, capaian ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu yang meningkat dari 0,164 menjadi 0,224 pada periode yang sama. Kabupaten Kaur juga tertinggal dari sebagian besar kabupaten/kota lain, seperti Kota Bengkulu (0,291), Bengkulu Utara (0,261), dan Kepahiang (0,242) pada tahun 2023. Bahkan dibandingkan kabupaten dengan tantangan geografis yang relatif serupa seperti Mukomuko dan Lebong, posisi Kaur masih belum kompetitif.

Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya fondasi kesehatan keluarga di Kabupaten Kaur. Faktor-faktor seperti akses terhadap layanan kesehatan dasar, cakupan imunisasi, status gizi balita, PHBS, dan infrastruktur sanitasi yang belum optimal kemungkinan besar menjadi penyebab rendahnya indeks ini. Hal ini menjadi tantangan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, mengingat kesehatan keluarga merupakan fondasi dari ketahanan sosial dan produktivitas ekonomi masyarakat.

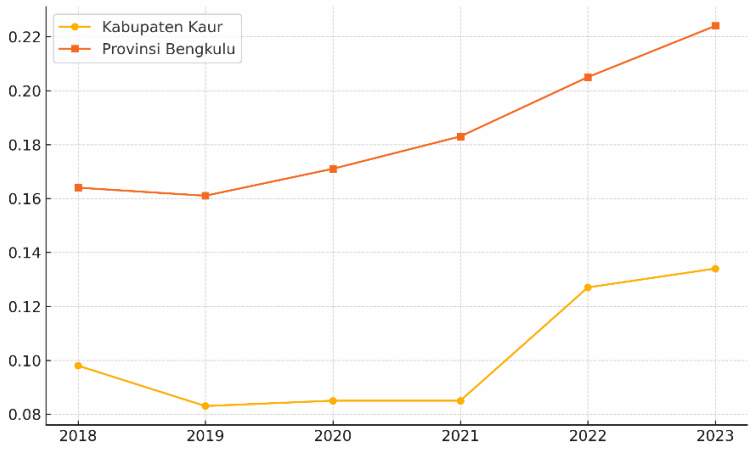

Gambar II-16. Perbandingan Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Kaur dan Provinsi Bengkulu Tahun 2018–2023

Sebagai akademisi yang terlibat dalam penyusunan RPJMD, kami merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Kaur secara serius menjadikan peningkatan IKS sebagai salah satu indikator prioritas dalam kebijakan pembangunan 2025–2029. Diperlukan intervensi lintas sektor yang fokus pada

penguatan layanan kesehatan primer di tingkat desa, peningkatan edukasi dan PHBS keluarga, serta penyediaan sarana sanitasi yang layak secara merata. Sinergi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat akan menjadi kunci dalam mempercepat kemajuan IKS di Kabupaten Kaur.

3. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting adalah indikator yang menunjukkan persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar usianya, yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, kekebalan tubuh, serta potensi produktivitas di masa depan. Oleh karena itu, stunting merupakan tantangan multidimensional yang mencerminkan ketidakcukupan pada berbagai aspek seperti pelayanan kesehatan, pola pengasuhan, sanitasi lingkungan, ketahanan pangan, serta kondisi sosial ekonomi keluarga.

Di Kabupaten Kaur, penurunan angka stunting menjadi prioritas penting dalam perencanaan pembangunan, terutama dalam RPJMD 2025–2029. Stunting dipandang sebagai isu strategis karena menyangkut kualitas generasi mendatang yang akan menentukan arah pembangunan daerah. Untuk itu, pendekatan penanganan stunting di Kaur perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu melalui penguatan posyandu, peningkatan layanan gizi, perbaikan akses air bersih dan sanitasi, serta edukasi intensif kepada ibu dan keluarga. Dengan intervensi lintas sektor yang konsisten dan berbasis data, Pemerintah Kabupaten Kaur dapat mempercepat perbaikan kualitas hidup anak-anak dan menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan unggul.

Tabel II-32. Prevelansi Stunting Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2023

KABUPATEN/KOTA	2022	2023
Bengkulu Selatan	2,9	2,9
Rejang Lebong	2,1	2,1

KABUPATEN/KOTA	2022	2023
Bengkulu Utara	9,0	9,0
Kaur	4,9	4,9
Seluma	4,0	4,0
Mukomuko	4,5	4,5
Lebong	4,5	4,5
Kepahiang	4,3	4,3
Bengkulu Tengah	4,6	4,6
Kota Bengkulu	0,7	0,7
Provinsi Bengkulu	4,5	4,5

Berdasarkan data prevalensi stunting tahun 2022 dan 2023, Kabupaten Kaur mencatat angka sebesar 4,9% yang konsisten dalam dua tahun terakhir. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Bengkulu yang berada pada angka 4,5% untuk periode yang sama. Meskipun demikian, capaian Kaur masih tergolong baik apabila dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain seperti Bengkulu Utara (9,0%) dan Bengkulu Tengah (4,6%), namun masih di bawah Kota Bengkulu yang mencatat prevalensi terendah di provinsi ini, yakni hanya 0,7%.

Dibandingkan kabupaten/kota lainnya, posisi Kabupaten Kaur berada di kelompok tengah—lebih baik dari kabupaten seperti Bengkulu Utara dan Mukomuko, tetapi masih memiliki ruang perbaikan jika ingin menyamai atau melampaui capaian Rejang Lebong (2,1%) maupun Bengkulu Selatan (2,9%). Stabilitas angka 4,9% ini patut diapresiasi sebagai hasil dari upaya pemerintah daerah dalam intervensi gizi dan kesehatan masyarakat. Namun, stagnasi tersebut juga mengindikasikan perlunya pendekatan baru atau penguatan program yang ada agar tren penurunan bisa lebih signifikan.

Sebagai kesimpulan, Kabupaten Kaur telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam menekan prevalensi stunting, meskipun belum mampu menurunkannya lebih lanjut dalam dua tahun terakhir. Pemerintah daerah disarankan untuk memperluas cakupan intervensi spesifik seperti peningkatan kualitas posyandu, penyuluhan gizi, perbaikan sanitasi, serta pemberdayaan

keluarga berisiko tinggi terhadap stunting. Konsistensi dan integrasi lintas sektor menjadi kunci untuk mencapai target yang lebih ambisius di masa mendatang.

C. Pendidikan Berkualitas yang Merata

1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencerminkan jumlah rata-rata tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, dan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pendidikan suatu daerah. Indikator ini tidak hanya menggambarkan pencapaian pendidikan secara kuantitatif, tetapi juga memberikan gambaran mengenai aksesibilitas dan keberlanjutan sistem pendidikan yang tersedia bagi masyarakat. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), RLS berperan penting dalam menilai kontribusi sektor pendidikan terhadap pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan.

Dalam konteks Kabupaten Kaur, peningkatan RLS merupakan langkah strategis dalam membentuk masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan sosial dan ekonomi. Semakin tinggi RLS, semakin besar peluang masyarakat untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dapat mendorong hal ini melalui penyediaan akses pendidikan yang lebih merata, peningkatan kualitas guru dan fasilitas belajar, serta penguatan program pendidikan alternatif bagi warga yang tidak menyelesaikan pendidikan formal. Dengan begitu, RLS tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur statistik, tetapi juga sebagai cerminan keberhasilan Kabupaten Kaur dalam menciptakan masyarakat yang lebih cakap dan berdaya saing tinggi.

Tabel II-33. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	8,73	8,84	8,87	8,91	9,03	9,04
Bengkulu Selatan	9,02	9,26	9,27	9,39	9,41	9,42
Rejang Lebong	8,26	8,28	8,33	8,55	8,8	8,81

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Utara	7,86	7,87	8,09	8,1	8,11	8,32
Kaur	8,25	8,37	8,38	8,39	8,41	8,47
Seluma	7,91	7,99	8	8,09	8,13	8,14
Mukomuko	7,99	8,29	8,3	8,31	8,56	8,57
Lebong	7,9	7,99	8,18	8,24	8,26	8,41
Kepahiang	7,93	8,24	8,29	8,3	8,36	8,37
Bengkulu Tengah	7,22	7,47	7,48	7,49	7,51	7,71
Kota Bengkulu	11,78	11,79	11,8	11,82	11,83	11,84

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kaur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2019 hingga 2024, yakni dari 8,25 tahun menjadi 8,47 tahun. Angka ini mencerminkan adanya kemajuan dalam akses dan partisipasi pendidikan formal masyarakat usia 25 tahun ke atas di wilayah ini. Meskipun demikian, peningkatan yang terjadi tergolong lambat jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Bengkulu yang telah mencapai 9,04 tahun pada tahun 2024. Kota Bengkulu berada jauh di atas daerah lain dengan RLS yang konsisten di atas 11 tahun, menunjukkan kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan kabupaten lainnya.

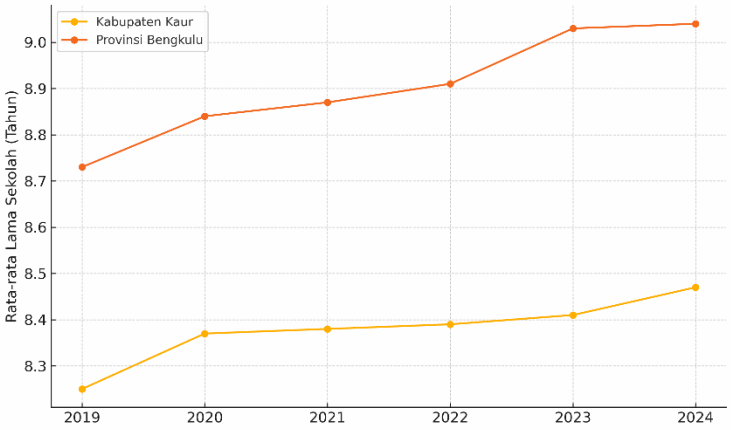

Gambar II-17. Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024

Dibandingkan dengan kabupaten lain, posisi Kabupaten Kaur berada di kelompok menengah. Kabupaten Bengkulu Selatan misalnya, telah mencapai angka 9,42 tahun pada tahun 2024, sementara Kabupaten Mukomuko dan

Kepahiang juga berhasil mencatat RLS di atas 8,5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kaur masih memiliki pekerjaan rumah dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pendidikan, terutama di daerah terpencil atau pesisir yang mungkin menghadapi tantangan akses terhadap layanan pendidikan.

Sebagai kesimpulan, peningkatan RLS di Kabupaten Kaur merupakan sinyal positif, tetapi belum cukup untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu. Pemerintah daerah perlu memperkuat program pendidikan formal dan nonformal, meningkatkan mutu guru dan sarana pendidikan, serta memberi perhatian lebih pada penduduk dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Langkah-langkah ini penting untuk membentuk masyarakat yang berpengetahuan, produktif, dan siap bersaing dalam pembangunan jangka panjang.

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang memperkirakan jumlah tahun pendidikan formal yang dapat dijalani oleh seorang anak berusia 7 tahun, jika sistem pendidikan saat ini tetap berlaku di masa mendatang. Berbeda dengan Rata-rata Lama Sekolah yang mencerminkan pencapaian pendidikan saat ini, HLS menunjukkan potensi akses pendidikan masa depan yang tersedia bagi generasi muda. Tingginya HLS menandakan adanya peluang pendidikan yang luas dan dukungan sistemik terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak, sementara rendahnya HLS bisa mengindikasikan keterbatasan fasilitas, rendahnya partisipasi sekolah, atau tekanan sosial-ekonomi yang menghambat kelanjutan pendidikan.

Bagi Kabupaten Kaur, meningkatkan angka HLS merupakan langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, sebagai pondasi penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan jangka panjang. HLS yang tinggi berarti anak-anak Kaur berpeluang menempuh pendidikan lebih lama, membuka akses terhadap pekerjaan yang lebih baik, serta membentuk masyarakat yang lebih adaptif dan produktif di tengah perubahan

zaman. Oleh karena itu, peningkatan HLS harus menjadi bagian integral dari agenda pembangunan daerah, melalui perluasan layanan pendidikan berkualitas, dukungan sosial bagi keluarga tidak mampu, serta perlindungan terhadap anak-anak dari risiko putus sekolah atau pernikahan dini.

Tabel II-34. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	13,59	13,61	13,67	13,68	13,74	13,75
Bengkulu Selatan	13,6	13,61	13,62	13,63	13,65	13,66
Rejang Lebong	13,68	13,83	13,93	14,01	14,19	14,2
Bengkulu Utara	12,86	12,87	12,88	12,89	12,91	12,92
Kaur	12,98	12,99	13,06	13,07	13,14	13,15
Seluma	13,27	13,28	13,29	13,3	13,32	13,33
Mukomuko	12,72	12,73	12,74	12,76	12,86	12,87
Lebong	12,56	12,57	12,58	12,75	12,9	12,91
Kepahiang	12,89	12,9	13,12	13,13	13,14	13,16
Bengkulu Tengah	13,02	13,03	13,28	13,45	13,46	13,47
Kota Bengkulu	16,01	16,02	16,03	16,04	16,06	16,07

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Berdasarkan data Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2019–2024, terlihat bahwa capaian Kabupaten Kaur mengalami peningkatan dari 12,98 tahun pada 2019 menjadi 13,15 tahun pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan tren positif dalam akses dan partisipasi pendidikan di daerah tersebut. Meski demikian, angka HLS Kabupaten Kaur masih berada di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu yang mencapai 13,75 tahun pada 2024. Jika dibandingkan dengan daerah seperti Kota Bengkulu (16,07 tahun) dan Rejang Lebong (14,20 tahun), gap tersebut menunjukkan adanya kesenjangan harapan pendidikan antardaerah yang masih perlu diatasi.

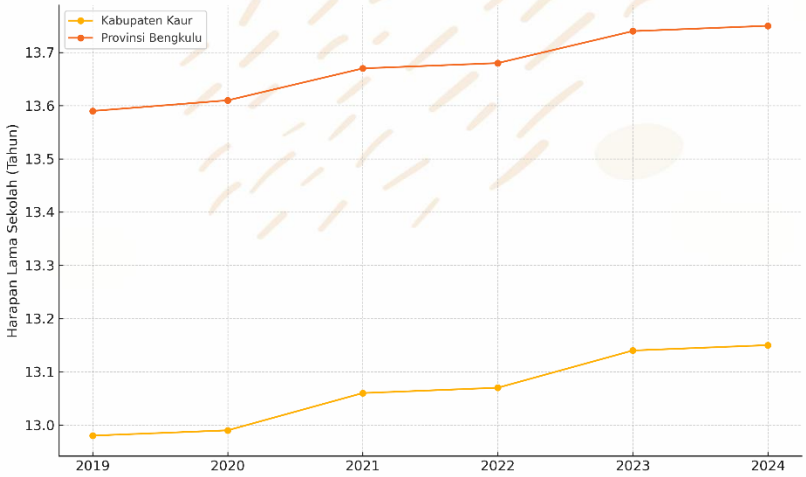

Gambar II-18. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024

Posisi Kabupaten Kaur dalam hal HLS juga berada di tingkat menengah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi ini. Daerah seperti Mukomuko, Lebong, dan Bengkulu Utara masih mencatatkan HLS yang lebih rendah, namun beberapa kabupaten seperti Kepahiang dan Bengkulu Tengah kini mulai menyusul dan melampaui capaian Kaur. Artinya, meskipun ada kemajuan, kompetisi antarwilayah dalam peningkatan mutu dan akses pendidikan menuntut Kaur untuk lebih agresif dalam menjalankan strategi pembangunan pendidikan.

Sebagai kesimpulan, Kabupaten Kaur telah menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan harapan lama sekolah, tetapi masih perlu mempercepat upaya dalam perluasan akses pendidikan berkualitas terutama di wilayah terpencil dan masyarakat rentan. Investasi pada infrastruktur pendidikan, peningkatan kompetensi guru, dan penguatan program beasiswa atau insentif untuk keberlanjutan pendidikan anak-anak Kaur menjadi langkah strategis dalam mengejar ketertinggalan. Dengan pendekatan holistik ini, Kaur berpeluang besar mengejar dan menyamai capaian daerah lain di masa mendatang.

3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) disusun dari tujuh unsur utama yang saling terkait dalam membentuk ekosistem literasi yang kuat. Unsur

tersebut mencakup pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi bahan bacaan, rasio tenaga perpustakaan yang memadai, serta intensitas kunjungan masyarakat per hari. Di samping itu, keberadaan perpustakaan yang telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi literasi, dan jumlah anggota aktif perpustakaan juga menjadi bagian penting dalam menilai kemajuan literasi suatu wilayah. Masing-masing unsur ini mencerminkan baik sisi ketersediaan maupun pemanfaatan layanan literasi oleh masyarakat secara nyata.

Dalam konteks Kabupaten Kaur, pembangunan literasi masyarakat yang diukur melalui IPLM perlu menjadi salah satu fokus dalam RPJMD 2025–2029 sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia dan pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketersediaan fasilitas perpustakaan saja tidak cukup, jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan dan keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, strategi pembangunan perlu diarahkan untuk memperluas akses layanan perpustakaan hingga ke wilayah terpencil, meningkatkan kapasitas pustakawan, serta mendorong kegiatan literasi yang berbasis komunitas. Dengan memperkuat seluruh unsur penyusun IPLM, Kabupaten Kaur dapat menciptakan budaya literasi yang tumbuh dari akar masyarakat, sekaligus membangun fondasi yang kuat bagi transformasi sosial dan peningkatan daya saing daerah.

Tabel II-35. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2024

Kabupaten/Kota	Tahun	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Pemerataan Layanan Perpustakaan	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari	Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	Jumlah Anggota Perpustakaan
Bengkulu Selatan	2023	50,01	0,6667	0,2878	0,147	0,0464	0,3526	1	1
Rejang Lebong		60,77	0,7576	0,2165	0,2311	0,0487	1	1	1
Bengkulu Utara		60,72	0,6102	0,423	0,1569	0,0606	1	1	1
Kaur		70,34	0,5548	0,6684	0,6363	0,064	1	1	1
Seluma		54,45	0,4154	0,2122	0,152	0,032	1	1	1
Mukomuko		57,68	0,488	0,4989		0,0506	1	1	1
Lebong		48,86	0,6076	0,1104		0,0133	0,6891	1	1
Kepahiang		46,88	0,5893	0,0949	0,2922	0,0302	1	1	0,2747
Bengkulu Tengah		60,38	0,4263	0,0975	1	0,0288	0,6742	1	1

Kabupaten/Kota	Tahun	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Pemerataan Layanan Perpustakaan	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari	Perpustakaan yang dibina sesuai SNP	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	Jumlah Anggota Perpustakaan
Kota Bengkulu		60,53	0,7368	0,1349	0,3313	0,0339	1	1	1
Provinsi Bengkulu		59,83	0,5833	0,2664	0,2952	0,0429	1	1	1
Bengkulu Selatan	2024	62,41	0,7363	0,4059	0,1604	0,0665	1	1	1
Rejang Lebong		62,12	0,7485	0,2506	0,2975	0,052	1	1	1
Bengkulu Utara		31,25	0,6034	0,1983	0,1549	0,1374	1	0,0509	0,0427
Kaur		61,02	0,5307	0,3183	1	0,3741	1	0,0481	1
Seluma		28,18	0,4511	0,0169	0,1511	0,1132	1	0,1999	0,0405
Mukomuko		64,29	0,5558	0,5769	0,3647	1	1	1	0,0028
Lebong		65,27	0,7301	0,4232		0,7153	1	0,6999	1
Kepahiang		51,21	0,6006	0,1808	0,3717	0,0562	1	1	0,3756
Bengkulu Tengah		45,8	0,4463	0,471	1	0,0363	1	0,0797	0,173
Kota Bengkulu		55,33	0,7619	0,1658	0,4794	0,1777	1	1	0,2882
Provinsi Bengkulu		65,96	0,6097	0,2859	0,4734	0,2481	1	1	1

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Kaur mengalami penurunan dari 70,34 pada tahun 2023 menjadi 61,02 pada tahun 2024. Meskipun angka tersebut masih berada di atas rata-rata Provinsi Bengkulu yang tercatat sebesar 65,96 pada 2024, penurunan ini patut menjadi perhatian serius, mengingat pada tahun sebelumnya Kaur sempat menjadi yang tertinggi di provinsi. Dari sisi komponen penyusun, Kaur mencatat skor sempurna (nilai 1) untuk rasio ketercukupan tenaga perpustakaan, perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP), dan jumlah anggota perpustakaan. Namun, skor untuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan turun drastis menjadi 0,0481 dari nilai sempurna di tahun sebelumnya, yang menjadi faktor dominan penyebab penurunan IPLM secara keseluruhan.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, capaian Kaur masih cukup kompetitif. Kaur unggul dari Bengkulu Selatan (62,41), Kepahiang (51,21), dan Bengkulu Tengah (45,8), serta jauh di atas Seluma yang hanya mencapai 28,18 pada 2024. Namun, posisi Kaur mulai disalip oleh kabupaten lain seperti Mukomuko (64,29) dan Lebong (65,27), yang menunjukkan peningkatan signifikan berkat tingginya partisipasi masyarakat dan skor maksimal pada hampir semua indikator. Selain itu, indikator ketercukupan koleksi perpustakaan dan pemerataan layanan di Kaur juga mengalami penurunan,

masing-masing berada pada skor 0,3183 dan 0,5307 pada 2024, menandakan bahwa penguatan infrastruktur dan distribusi bahan bacaan perlu menjadi fokus.

Secara keseluruhan, meskipun Kabupaten Kaur masih berada di atas rata-rata provinsi dalam hal indeks literasi, tren penurunannya menunjukkan bahwa keberhasilan literasi masyarakat tidak bisa hanya bergantung pada infrastruktur dan tenaga pustakawan, tetapi sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat dan keberagaman kegiatan literasi. Pemerintah Kabupaten Kaur perlu segera mengevaluasi strategi promosi literasi dan memperkuat program sosialiasi perpustakaan yang inklusif dan berkelanjutan, agar prestasi yang telah diraih pada 2023 tidak menjadi puncak sesaat, tetapi dapat dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.

D. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan kebudayaan suatu daerah berdasarkan berbagai aspek yang mencerminkan keberagaman budaya, literasi, pendidikan, ketahanan sosial, serta partisipasi masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal. IPK menjadi alat ukur penting dalam menilai efektivitas kebijakan pembangunan kebudayaan, sekaligus menjadi acuan dalam merancang strategi untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat.

Dalam RPJMD Kabupaten Kaur 2025-2029, IPK memiliki peran strategis dalam mengarahkan kebijakan pembangunan kebudayaan yang berkelanjutan. Kebudayaan tidak hanya berfungsi sebagai identitas dan warisan daerah, tetapi juga menjadi faktor pendorong dalam pembangunan ekonomi kreatif, pariwisata, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Peningkatan nilai IPK mencerminkan kemajuan dalam berbagai dimensi, seperti pendidikan berbasis budaya lokal, partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni dan tradisi, peningkatan literasi, serta

penguatan ketahanan sosial melalui praktik budaya gotong royong dan pelestarian warisan budaya.

Tabel II-36. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Bengkulu 2018-2023

Tahun	Nasional	Bengkulu
2018	53.74	59.95
2019	55.91	61.13
2020	54.65	56.59
2021	51.90	54.56
2022	55.13	57.28
2023	57.13	61.45

Sumber: https://ipk.kemdikbud.go.id/

Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Bengkulu mencapai skor 61,45, mengalami peningkatan sebesar 7,28% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan skor 57,28. Kenaikan ini terjadi berkat pertumbuhan di seluruh dimensi yang membentuk IPK. Dimensi Pendidikan mencatatkan skor tertinggi, yakni 79,35, sedangkan Dimensi Ekspresi Budaya memiliki skor terendah dengan angka 27,69. Dengan pencapaian tersebut, Provinsi Bengkulu menempati peringkat ketiga dari 34 provinsi di Indonesia, naik empat peringkat dari tahun 2022. Selain itu, Bengkulu masuk dalam Cluster 2, di mana dimensi-dimensi inti menunjukkan tren positif, sementara dimensi yang termasuk faktor pendukung masih memerlukan perhatian lebih.

IPK Provinsi Bengkulu tahun 2024 diproyeksikan mencapai 66,58 poin. Sejak baseline tahun 2018, hingga 2023, capaian IPK Provinsi Bengkulu telah mencapai 22,51% dari target tahun 2024. Agar proyeksi ini dapat terealisasi, diperlukan peningkatan sebesar 5,14 poin dalam tahun mendatang. Sementara itu, untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, IPK nasional ditargetkan mencapai 68,15 poin, dengan Provinsi Bengkulu diproyeksikan mencapai 71,29 poin. Untuk mencapai target tersebut, Bengkulu perlu meningkatkan IPK sebesar 16,02% dari capaian tahun 2023. Strategi yang efektif dalam memperkuat budaya lokal,

meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong peran aktif pemerintah dan sektor swasta sangat dibutuhkan guna merealisasikan peningkatan ini.

a. Dimensi Pendidikan

Dimensi Pendidikan dalam IPK Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan sebesar 6,59% pada tahun 2023, dari 74,44 menjadi 79,35. Salah satu indikator yang mengalami peningkatan signifikan adalah persentase satuan pendidikan yang memiliki guru pengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian, yang meningkat sebesar 13,80%, dari 30,95 pada tahun 2022 menjadi 35,22 pada tahun 2023. Selain itu, jumlah guru master yang mendapatkan pelatihan metode pengajaran bahasa daerah juga mengalami peningkatan, dari 252 orang menjadi 260 peserta pelatihan.

Dimensi Pendidikan IPK Provinsi Bengkulu tahun 2024 diproyeksikan mencapai 77,60 poin. Berdasarkan baseline tahun 2018, capaian dimensi ini telah melampaui target tahun 2024 dengan pencapaian sebesar 131,30%. Meskipun demikian, peningkatan kualitas pendidikan tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan. Pada tahun 2023, Bengkulu menjadi salah satu dari 22 provinsi yang mendapatkan program revitalisasi bahasa daerah dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Program ini mencakup pelatihan bagi guru bahasa daerah, kepala sekolah, pengawas, siswa, serta komunitas penutur bahasa daerah. Program revitalisasi ini berfokus pada tiga bahasa lokal, yaitu Enggano, Rejang, dan Bengkulu dialek Serawai. Pelatihan yang diberikan kepada guru master diharapkan dapat diteruskan kepada guru lain dan diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah di tingkat kabupaten/kota.

b. Dimensi Budaya Literasi

Dimensi Budaya Literasi juga mengalami pertumbuhan sebesar 7,49% pada tahun 2023, dengan skor meningkat dari 57,60 menjadi 61,91. Indikator yang mengalami peningkatan terbesar adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan atau memanfaatkan taman bacaan

masyarakat dalam tiga bulan terakhir, yang meningkat sebesar 29,21%, dari 5,34 pada tahun 2022 menjadi 6,90 pada tahun 2023. Jumlah pengunjung perpustakaan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 mencapai 29 ribu orang, melampaui target 25 ribu pengunjung. Tren ini terus meningkat pada tahun 2023, dengan jumlah pengunjung mencapai 36 ribu orang, mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi.

Dimensi Budaya Literasi IPK Provinsi Bengkulu tahun 2024 diproyeksikan mencapai 66,06 poin. Hingga tahun 2023, capaian dimensi ini telah mencapai 68,26% dari target 2024. Untuk mencapai proyeksi tahun 2024, diperlukan peningkatan skor sebesar 4,15 poin. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2019 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap desa/kelurahan di Provinsi Bengkulu memiliki satu perpustakaan berbasis inklusi sosial. Program ini diimplementasikan melalui Gerakan Satu Desa Satu Perpustakaan. Selain itu, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan budaya literasi, termasuk penyediaan bahan bacaan "Pojok Raflesia Kantor Bahasa" di Perpustakaan Bank Indonesia, pojok baca di lobi perpustakaan daerah, serta kegiatan Jambore Literasi.

c. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya

Dimensi Ketahanan Sosial Budaya IPK Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan sebesar 1,49% pada tahun 2023, dengan skor meningkat dari 75,77 menjadi 76,90. Indikator yang mengalami peningkatan terbesar adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan gotong royong, yang naik sebesar 8,83%, dari 29,45 pada tahun 2022 menjadi 32,05 pada tahun 2023. Pemerintah Kota Bengkulu, melalui Rencana Strategis Kecamatan Kampung Melayu 2019-2023, terus mendorong semangat gotong royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan melalui program Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat.

Dimensi Ketahanan Sosial Budaya IPK Provinsi Bengkulu tahun 2024 diproyeksikan mencapai 81,07 poin. Hingga tahun 2023, capaian dimensi ini masih berada 17,72% di bawah target 2024. Untuk memenuhi target tersebut, skor IPK harus meningkat sebesar 4,17 poin dalam tahun mendatang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong praktik gotong royong secara berkelanjutan di tengah masyarakat. Gotong royong tidak hanya memperkuat ketahanan sosial budaya, tetapi juga meningkatkan solidaritas dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi.

Tradisi gotong royong tetap dijaga oleh masyarakat Bengkulu, seperti yang terlihat dalam berbagai praktik budaya lokal. Suku Rejang di Bengkulu Utara masih menjalankan tradisi "Bekejai" dalam upacara pernikahan adat kejai, yang bertujuan untuk melestarikan nilai tradisional sekaligus memperkuat persatuan. Sementara itu, di Kabupaten Seluma, Suku Serawai melestarikan tradisi "Ngidak Gelamai" saat menyambut Idul Fitri. Dalam tradisi ini, masyarakat bersama-sama membuat dodol atau gelamai, yang menjadi simbol kebersamaan dan gotong royong.

Dengan berbagai strategi yang telah diimplementasikan, Provinsi Bengkulu memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan IPK dalam berbagai dimensi. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta untuk memastikan bahwa pertumbuhan di setiap dimensi berjalan secara berkelanjutan, guna mencapai target pembangunan kebudayaan baik dalam jangka menengah maupun menuju visi Indonesia Emas 2045.

E. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) menjadi alat ukur penting dalam menilai sejauh mana hak-hak anak terpenuhi di Kabupaten Kaur, termasuk hak atas identitas hukum, pendidikan, kesehatan, pengasuhan yang layak, dan perlindungan dari kekerasan serta eksploitasi. Indeks ini terbagi ke dalam lima

dimensi utama, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus bagi anak-anak dalam situasi rentan. Masing-masing dimensi memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas perlindungan yang diberikan kepada anak-anak, yang pada akhirnya mencerminkan keberpihakan kebijakan daerah terhadap generasi muda.

Dalam RPJMD Kabupaten Kaur 2025–2029, peningkatan IPA harus menjadi bagian integral dari arah pembangunan sosial yang berkelanjutan. Tantangan seperti disparitas layanan dasar, keterbatasan ruang aman anak, serta masih adanya kasus kekerasan dan pernikahan usia dini memerlukan respon kebijakan yang sistematis. Peningkatan IPA dapat dicapai melalui penguatan regulasi daerah ramah anak, perluasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, pembinaan keluarga, serta pemberdayaan komunitas untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Dengan memastikan setiap dimensi dalam IPA terakomodasi dalam kebijakan pembangunan, Kabupaten Kaur akan mampu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal—yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah dalam jangka panjang.

Tabel II-37. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2023.

	Tahun	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Indeks D5 Perlindungan Khusus	IPA
Kota Bengkulu	2021	53,650	89,890	75,910	32,530	75,330	66,600
	2022	47,860	88,010	79,730	33,400	73,920	65,560
	2023	44,350	91,310	78,670	32,680	75,870	65,690
Seluma	2021	45,260	82,950	74,450	34,290	73,360	63,020
	2022	52,770	81,010	73,910	33,300	69,580	62,980
	2023	48,130	84,560	79,320	31,180	76,530	64,950
Rejang Lebong	2021	46,280	76,020	68,120	30,970	66,720	58,500
	2022	49,080	73,720	71,190	28,230	64,170	58,050
	2023	45,620	80,810	73,510	30,200	75,280	62,130
Mukomuko	2021	42,930	77,870	77,640	32,600	79,690	63,090

	Tahun	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Indeks D5 Perlindungan Khusus	IPA
	2022	48,820	79,620	78,310	30,000	78,160	63,970
	2023	52,610	81,370	77,960	31,240	69,550	63,380
Lebong	2021	44,160	59,430	72,670	25,140	76,430	56,330
	2022	50,150	73,630	71,720	31,330	65,150	59,110
	2023	52,580	66,170	71,590	33,030	73,600	60,100
Kepahiang	2021	43,010	73,040	75,710	20,950	70,100	57,490
	2022	49,520	70,780	75,250	29,930	63,870	58,460
	2023	48,350	76,640	74,430	32,210	66,240	60,300
Kaur	2021	44,830	79,810	78,580	30,540	79,840	63,730
	2022	48,320	78,960	80,680	30,330	71,310	62,700
	2023	45,000	74,750	81,140	29,950	75,220	61,990
Bengkulu Utara	2021	44,460	83,960	72,550	27,900	70,760	61,010
	2022	49,910	82,520	73,100	29,960	71,700	62,460
	2023	52,040	92,620	79,780	27,980	74,900	66,660
Bengkulu Tengah	2021	46,500	65,830	74,650	32,160	80,610	60,740
	2022	50,340	77,010	77,440	31,550	72,340	62,540
	2023	50,010	63,890	72,760	30,300	74,210	58,940
Bengkulu Selatan	2021	45,870	85,010	74,000	21,690	66,000	59,620
	2022	51,500	82,230	74,670	32,770	69,050	62,920
	2023	46,160	82,580	76,010	32,190	70,340	62,350

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2024

Berdasarkan data Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu tahun 2021–2023, Kabupaten Kaur mencatat skor yang relatif stabil, meskipun mengalami sedikit penurunan dari 63,73 pada tahun 2021 menjadi 61,99 pada tahun 2023. IPA ini tersusun dari lima dimensi penting: Hak Sipil dan Kebebasan (D1), Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (D2), Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (D3), Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang (D4), serta Perlindungan Khusus (D5). Penurunan skor IPA Kabupaten Kaur terutama disumbang oleh turunnya nilai pada dimensi D1 dan D2, yaitu dari 48,32 ke 45,00 (D1) dan dari 78,96 ke 74,75 (D2) pada periode 2022–2023.

Meski begitu, Kabupaten Kaur justru mencatat perbaikan pada dimensi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (D3), meningkat dari 78,58 (2021) menjadi 81,14 (2023), menjadikan skor D3 Kaur sebagai salah satu yang tertinggi di provinsi. Hal ini mencerminkan keberhasilan program-program layanan kesehatan anak,

termasuk imunisasi, gizi, dan akses ke fasilitas kesehatan. Demikian pula pada dimensi D5 (Perlindungan Khusus), Kaur secara konsisten mempertahankan skor tinggi di atas 70, dengan capaian 75,22 pada tahun 2023, mengindikasikan bahwa upaya perlindungan terhadap anak-anak rentan (seperti anak korban kekerasan, anak disabilitas, dan anak yang berhadapan dengan hukum) telah berjalan relatif baik.

Namun, tantangan besar masih terlihat pada dimensi D4 (Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang), yang skornya stagnan dan tergolong rendah — hanya 29,95 pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa akses anak terhadap pendidikan bermutu, ruang bermain yang aman, kegiatan budaya, dan pengembangan minat bakat belum optimal di Kabupaten Kaur. Selain itu, rendahnya skor D1 (Hak Sipil dan Kebebasan) memperlihatkan pentingnya penguatan kapasitas keluarga dan masyarakat dalam menjamin partisipasi anak, pencatatan identitas hukum (akta kelahiran), serta ruang berekspresi yang aman dan inklusif bagi anak-anak.

Secara keseluruhan, IPA Kabupaten Kaur berada di tengah-tengah klasemen kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. Kaur masih di bawah Kota Bengkulu (65,69) dan Bengkulu Utara (66,66), namun lebih tinggi dibanding Bengkulu Tengah (58,94) dan Rejang Lebong (62,13). Untuk meningkatkan kinerja ini dalam RPJMD 2025–2029, pendekatan lintas sektor perlu diperkuat, termasuk integrasi program perlindungan anak ke dalam sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan penegakan hukum. Dukungan terhadap forum anak, penguatan peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), penyediaan ruang ramah anak, dan penguatan layanan pengaduan berbasis masyarakat perlu diperluas agar Kabupaten Kaur bisa mewujudkan sistem perlindungan anak yang komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis hak anak.

2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) menjadi tolok ukur penting dalam menilai ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yang mencakup berbagai aspek seperti

pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, dan relasi sosial. Dalam konteks Kabupaten Kaur, upaya peningkatan IKK memiliki makna strategis karena keluarga merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi yang cerdas, sehat, dan produktif. Ketika keluarga memiliki akses terhadap layanan dasar yang memadai serta stabilitas ekonomi, mereka akan lebih mampu membina anak-anak yang berkualitas dan mampu menghadapi tantangan sosial yang terus berubah. Pembangunan yang menitikberatkan pada penguatan keluarga juga menjadi langkah penting untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah secara lebih aktif dan inklusif.

Arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Kaur perlu menjadikan IKK sebagai indikator prioritas lintas sektor. Keluarga yang memiliki pekerjaan layak dan penghasilan yang memadai akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, terutama dalam penguatan UMKM yang berbasis keluarga. Di sisi lain, kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga akan menentukan derajat kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Ketersediaan rumah layak huni, air bersih, dan sanitasi juga menjadi faktor krusial yang harus diperhatikan dalam merancang program pembangunan berbasis keluarga. Penguatan nilai-nilai sosial seperti kebersamaan dan gotong royong yang masih hidup dalam masyarakat Kaur juga perlu difasilitasi agar menjadi kekuatan sosial yang menopang stabilitas dan kesejahteraan daerah secara menyeluruh.

Tabel II-38. Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
Komponen Kualitas Legalitas-Struktur	85,960	87,570	89,650	90,980
Komponen Kualitas Ketahanan Fisik	70,040	78,380	82,110	77,650
Komponen Kualitas Ketahanan Ekonomi	72,050	72,550	73,440	77,550
Komponen Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi	62,930	64,230	72,110	73,270
Komponen Kualitas Ketahanan Sosial -Budaya	57,100	58,610	61,100	62,630
Nilai IKK Total	71,170	74,390	77,890	78,140

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan yang cukup konsisten selama periode 2020-2023, dengan nilai total yang naik dari 71,170 pada tahun 2020 menjadi 78,140 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk legalitas-struktur, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-psikologi, dan ketahanan sosial-budaya. Dari seluruh komponen, Komponen Kualitas Legalitas-Struktur memiliki nilai tertinggi sepanjang periode tersebut, menunjukkan bahwa aspek administrasi keluarga, seperti pencatatan pernikahan, kelahiran, serta kepemilikan dokumen kependudukan, terus membaik. Pada tahun 2023, nilai komponen ini mencapai 90,980, mengalami kenaikan dari 85,960 pada tahun 2020. Kenaikan ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat dalam melengkapi dokumen legal keluarga semakin meningkat, sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam mempermudah akses terhadap layanan administrasi kependudukan.

Komponen Kualitas Ketahanan Fisik menunjukkan tren peningkatan hingga tahun 2022, dari 70,040 pada tahun 2020 menjadi 82,110 pada tahun 2022, tetapi mengalami penurunan menjadi 77,650 pada tahun 2023. Ketahanan fisik ini mencerminkan akses keluarga terhadap layanan kesehatan, kecukupan gizi, dan lingkungan tempat tinggal yang layak. Meskipun secara umum mengalami peningkatan, fluktuasi yang terjadi pada tahun 2023 dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, seperti perumahan yang layak dan pemerataan layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program peningkatan kualitas hidup terus berjalan, masih terdapat faktor-faktor yang perlu dioptimalkan agar ketahanan fisik keluarga tetap meningkat secara berkelanjutan.

Komponen Kualitas Ketahanan Ekonomi juga mengalami kenaikan dari 72,050 pada tahun 2020 menjadi 77,550 pada tahun 2023, mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi keluarga di Bengkulu. Peningkatan ini dapat dikaitkan

dengan penguatan sektor ekonomi daerah, termasuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta program pemberdayaan ekonomi keluarga. Tren ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperluas akses permodalan dan meningkatkan keterampilan keluarga agar lebih produktif. Komponen Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi juga menunjukkan peningkatan signifikan dari 62,930 pada tahun 2020 menjadi 73,270 pada tahun 2023, yang mencerminkan meningkatnya hubungan sosial dan kesejahteraan psikologis dalam keluarga. Kenaikan ini dapat dikaitkan dengan semakin luasnya akses terhadap layanan bimbingan sosial, peningkatan kesadaran akan kesehatan mental, serta semakin kuatnya peran komunitas dalam mendukung kesejahteraan keluarga.

Sementara itu, Komponen Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya mencatat nilai terendah dibandingkan komponen lainnya, meskipun mengalami peningkatan dari 57,100 pada tahun 2020 menjadi 62,630 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada perbaikan dalam partisipasi sosial dan pelestarian budaya lokal, masih diperlukan langkah lebih lanjut untuk memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya dalam kehidupan keluarga. Peningkatan ini dapat mencerminkan upaya daerah dalam mendorong kegiatan berbasis komunitas, seperti gotong royong dan pelestarian budaya lokal, yang semakin dihidupkan kembali dalam beberapa tahun terakhir.

Secara keseluruhan, peningkatan nilai IKK Total dari 71,170 pada tahun 2020 menjadi 78,140 pada tahun 2023 menunjukkan tren perbaikan yang stabil dalam berbagai aspek kehidupan keluarga di Bengkulu. Namun, perbedaan tren antar komponen menunjukkan bahwa peningkatan tidak terjadi secara merata, dengan ketahanan sosial-budaya masih menjadi tantangan terbesar, sementara ketahanan fisik menunjukkan fluktuasi yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Dengan adanya tren ini, pembangunan daerah perlu terus difokuskan pada penguatan kesejahteraan keluarga, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya, agar

peningkatan Indeks Kualitas Keluarga dapat berjalan lebih seimbang dan memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi masyarakat Bengkulu.

3. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah terwujud dalam pembangunan. Dengan mengukur aspek kesehatan reproduksi, keterlibatan perempuan di ranah politik, serta partisipasi dalam dunia kerja, IKG memberikan gambaran komprehensif tentang peluang dan akses yang dimiliki perempuan di Kabupaten Kaur. Ketika nilai IKG tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan dalam memperoleh hak yang setara, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun kepemimpinan. Ketimpangan ini dapat membatasi potensi sumber daya manusia secara keseluruhan, serta memperlambat laju pembangunan daerah yang berkeadilan.

Dalam kerangka RPJMD Kabupaten Kaur 2025–2029, IKG perlu diposisikan sebagai indikator strategis untuk mengarahkan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif gender. Pemerintah daerah perlu memperkuat program yang mendorong keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor, mulai dari peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan ekonomi berbasis perempuan, hingga keterwakilan dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan publik. Dengan memastikan akses dan peran perempuan yang setara dalam pembangunan, Kabupaten Kaur akan mampu menciptakan masyarakat yang lebih tangguh, adil, dan berdaya saing di masa depan.

Tabel II-39. Indeks Ketimpangan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2019-2024

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	0,829	0,827	0,761	0,738	0,784	0,316
Rejang Lebong	0,52	0,469	0,537	0,46	0,45	0,392
Bengkulu Utara	0,588	0,6	0,592	0,538	0,513	0,477
Kaur	0,62	0,555	0,561	0,541	0,547	0,478
Seluma	0,566	0,572	0,541	0,552	0,505	0,493

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mukomuko	0,638	0,633	0,623	0,606	0,604	0,768
Lebong	0,557	0,545	0,474	0,499	0,52	0,432
Kepahiang	0,577	0,529	0,51	0,514	0,515	0,489
Bengkulu Tengah	0,537	0,485	0,512	0,536	0,524	0,483
Kota Bengkulu	0,443	0,412	0,464	0,328	0,319	0,159
Provinsi Bengkulu	0,544	0,523	0,52	0,478	0,469	0,384

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Secara umum, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Kaur menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten dari angka 0,62 pada tahun 2019 menjadi 0,478 pada tahun 2024. Meskipun penurunan ini menggambarkan kemajuan, nilai IKG Kaur masih berada di atas rata-rata Provinsi Bengkulu yang tercatat sebesar 0,384 pada tahun 2024. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, Kaur berada di posisi menengah: lebih baik daripada Mukomuko (0,768) dan Bengkulu Selatan (0,316), tetapi belum sebaik Kota Bengkulu yang mencatatkan angka IKG terendah, yaitu 0,159 pada tahun 2024.

Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada perbaikan, Kabupaten Kaur masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender, terutama dalam akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program berbasis gender, peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan peluang kerja, serta keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan publik untuk mempercepat penurunan ketimpangan gender.

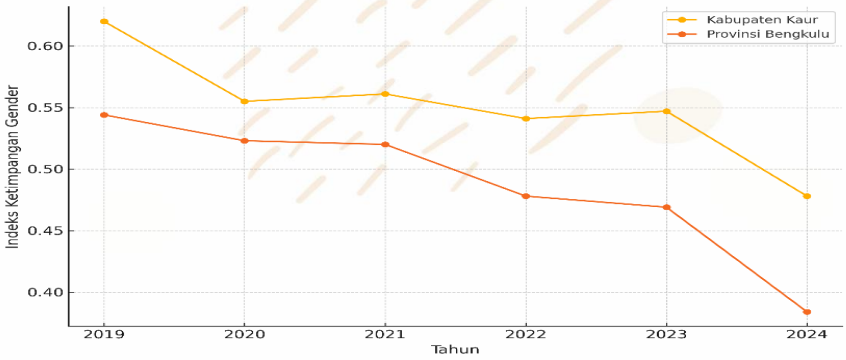

Gambar II-19 Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024

4. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencerminkan sejauh mana hasil pembangunan manusia dapat dinikmati secara setara oleh laki-laki dan perempuan. Dengan melihat capaian dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak dari kedua kelompok gender, IPG tidak hanya menggambarkan pencapaian kuantitatif, tetapi juga menyoroti aspek keadilan distribusi manfaat pembangunan. Nilai IPG yang mendekati angka 100 menandakan keberhasilan daerah dalam menciptakan sistem sosial dan ekonomi yang inklusif gender.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kaur 2025–2029, IPG memiliki fungsi strategis sebagai alat evaluasi sekaligus panduan kebijakan. Pembangunan yang tidak mempertimbangkan kesetaraan gender berpotensi memperlebar jurang ketimpangan sosial dan menurunkan daya saing daerah. Oleh sebab itu, peningkatan IPG perlu diintegrasikan ke dalam setiap sektor pembangunan, mulai dari perluasan akses pendidikan perempuan, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, hingga penciptaan ruang partisipasi yang adil dalam ekonomi dan politik. Dengan komitmen ini, Kabupaten Kaur tidak hanya mengejar pertumbuhan

ekonomi, tetapi juga keadilan dan keberlanjutan pembangunan untuk seluruh warganya.

Tabel II-40. Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2018-2024

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	91,37	91,19	91,00	91,16	91,36	91,57	91,89
Bengkulu Selatan	94,08	94,05	94,14	94,31	94,72	94,74	94,89
Rejang Lebong	94,59	94,15	93,78	93,72	93,83	94,24	94,83
Bengkulu Utara	91,19	91,25	91,23	91,39	91,39	91,47	91,81
Kaur	87,20	87,13	87,12	87,17	87,51	87,72	87,83
Seluma	85,28	85,32	85,65	85,93	86,16	86,30	86,48
Mukomuko	84,18	83,95	83,88	84,03	84,22	84,87	85,61
Lebong	90,99	91,49	91,60	91,86	92,19	92,06	92,35
Kepahiang	95,20	95,32	95,80	95,73	96,11	96,01	96,16
Bengkulu Tengah	86,36	86,55	86,83	87,04	87,29	87,25	87,51
Kota Bengkulu	96,55	95,97	95,67	95,77	96,07	96,12	96,13

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Selama periode 2018 hingga 2024, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kaur mengalami peningkatan secara perlahan namun konsisten. Pada tahun 2018, IPG Kaur tercatat sebesar 87,20 dan meningkat menjadi 87,83 pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, meskipun pertumbuhannya relatif lambat. Dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu, yang IPG-nya sudah berada di atas angka 91 sejak 2018 dan terus meningkat hingga mencapai 91,89 pada tahun 2024, capaian Kabupaten Kaur masih tertinggal cukup signifikan.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, posisi IPG Kaur cenderung berada di kelompok bawah. Beberapa daerah seperti Kota Bengkulu (96,13), Kepahiang (96,16), dan Bengkulu Selatan (94,89) menunjukkan nilai IPG yang jauh lebih tinggi dibandingkan Kaur. Bahkan Kabupaten Lebong, yang secara geografis relatif terpencil, berhasil mempertahankan IPG di atas 92 selama tiga tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa tantangan ketimpangan

gender di Kabupaten Kaur masih cukup besar, terutama dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peran aktif perempuan dalam ekonomi maupun kehidupan publik.

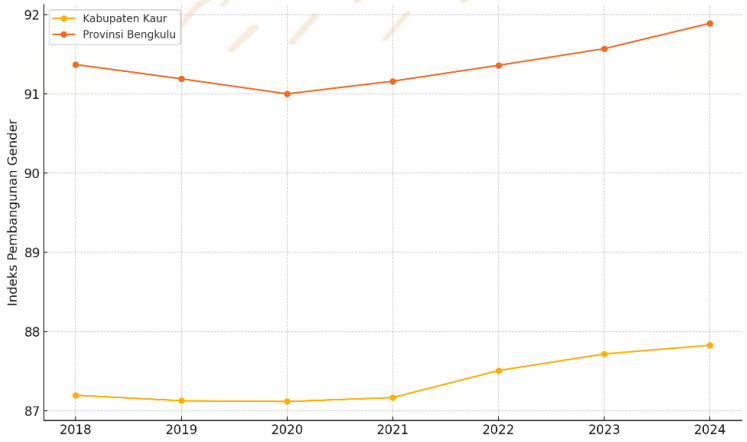

Gambar II-20. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2018–2024

Kesimpulannya, meskipun tren IPG Kabupaten Kaur menunjukkan perbaikan, masih dibutuhkan kebijakan afirmatif dan program-program strategis untuk mempercepat pengurangan ketimpangan gender. Pemerintah daerah perlu mendorong partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi, pemberdayaan ekonomi, serta pengambilan keputusan publik. Penguatan layanan dasar yang responsif gender juga menjadi kunci untuk memastikan pembangunan yang lebih inklusif dan adil.

5. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memainkan peran strategis dalam menggambarkan sejauh mana perempuan dapat mengambil peran setara dalam berbagai bidang kehidupan publik dan ekonomi. Tidak seperti indikator kesetaraan gender lainnya yang berfokus pada akses terhadap layanan dasar, IDG menilai secara lebih dalam keterlibatan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan—baik di sektor politik, pemerintahan, maupun dunia usaha. Melalui IDG, kita dapat melihat apakah perempuan hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, atau telah menjadi aktor aktif dalam proses perumusannya.

Dalam kerangka RPJMD Kabupaten Kaur 2025–2029, IDG menjadi tolok ukur penting untuk mengarahkan kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan gender. Kabupaten Kaur perlu mendorong peningkatan jumlah perempuan di posisi strategis, seperti kepala desa, anggota legislatif, kepala OPD, maupun pelaku ekonomi yang berdaya saing. Pendekatan ini tidak hanya mendukung tercapainya kesetaraan, tetapi juga memperkaya kualitas pengambilan keputusan karena melibatkan perspektif yang lebih beragam. Dengan mengintegrasikan IDG ke dalam perencanaan pembangunan, Kaur dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar partisipatif dan memberi ruang yang adil bagi semua warga tanpa terkecuali.

Tabel II-41. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2018-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu	69,78	70,48	70,22	70,13	70,06	75,69
Bengkulu Selatan	55,2	55,03	54,62	55,63	55,87	60,92
Rejang Lebong	64,71	64,82	65,7	63,57	63,13	64,53
Bengkulu Utara	65,77	62,32	62,52	62,39	61,88	59,07
Kaur	62,13	61,17	61,72	62,29	62,89	71,16
Seluma	65,68	65,6	61,92	62,98	59,07	66,86
Mukomuko	56,78	56,48	56,26	55,42	56,32	51,17
Lebong	67,14	70,74	70,41	74,79	74,25	80,46
Kepahiang	65,09	66,27	66,96	67,12	66,41	55,37
Bengkulu Tengah	76,71	76,78	77,1	76,85	74,93	75,3
Kota Bengkulu	77,58	77,68	77,67	77,54	75,94	76

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Selama periode 2019 hingga 2024, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kaur mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dimulai dari angka 62,13 pada tahun 2019, IDG Kaur sempat mengalami sedikit fluktuasi hingga mencapai 62,89 pada tahun 2023, dan melonjak tajam menjadi 71,16 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan angka IDG Provinsi Bengkulu yang juga mengalami tren kenaikan dari 69,78 di tahun 2019 menjadi 75,69 pada tahun 2024,

maka posisi Kaur masih berada di bawah rata-rata provinsi, meskipun kesenjangan ini semakin menyempit.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, capaian IDG Kaur tahun 2024 menempatkan daerah ini di atas beberapa wilayah lain seperti Mukomuko (51,17) dan Kepahiang (55,37), serta mendekati posisi Bengkulu Tengah (75,3) dan Kota Bengkulu (76,0). Kenaikan tajam yang dicapai Kaur pada 2024 menjadi indikator positif bahwa upaya pemberdayaan perempuan mulai menunjukkan hasil, baik dalam aspek partisipasi politik maupun peran ekonomi, yang sebelumnya masih tertinggal dari daerah lain.

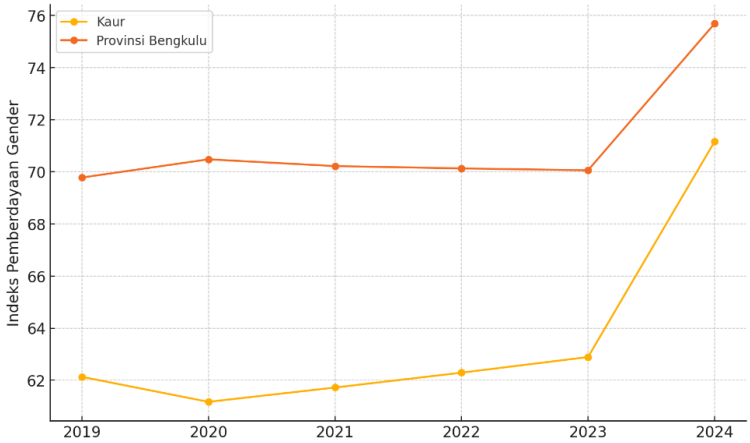

Gambar II-21. Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kaur dengan Provinsi Bengkulu Tahun 2019–2024

Sebagai kesimpulan, pencapaian IDG Kabupaten Kaur menunjukkan arah pembangunan yang semakin inklusif dan responsif terhadap kesetaraan gender. Namun demikian, agar lonjakan ini dapat berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kaur perlu memperkuat program-program yang mendukung keterlibatan perempuan dalam posisi strategis dan pengambilan keputusan, baik di sektor publik maupun swasta. Peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi kunci untuk menjaga dan mempercepat kemajuan IDG Kaur di masa mendatang.

6. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indikator penting yang mencerminkan sejauh mana pemuda di suatu daerah memiliki akses dan peluang untuk berkembang secara optimal. IPP mencakup lima domain utama, yakni pendidikan dan keterampilan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan kerja dan kepemimpinan, partisipasi dan keterlibatan, serta gender dan inklusivitas. Nilai IPP yang tinggi menandakan keberhasilan suatu wilayah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemuda menjadi individu produktif, inovatif, dan mandiri. Sebaliknya, rendahnya IPP menunjukkan tantangan struktural dalam hal akses terhadap layanan dasar pemuda, partisipasi publik, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Bagi Kabupaten Kaur, IPP memiliki nilai strategis dalam mendukung pencapaian visi pembangunan jangka menengah 2025–2029. Pemuda sebagai generasi produktif dan agen perubahan perlu difasilitasi melalui kebijakan lintas sektor, seperti penguatan pendidikan vokasional, akses layanan kesehatan ramah remaja, pengembangan ruang kreatif dan wirausaha pemuda, serta peningkatan partisipasi mereka dalam proses perencanaan pembangunan. Peningkatan IPP tidak hanya mempercepat pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan bonus demografi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan menjadikan IPP sebagai prioritas strategis, Kabupaten Kaur dapat menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih adaptif, berkeadilan, dan visioner.

Tabel II-42. Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Bengkulu 2016-2023

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendidikan	X1 (Rata-rata lama sekolah)	10,28	10,61	10,55	10,53	10,77	10,87	11,14	11,09	11,22
	X2 (APK Sekolah Menengah)	86,03	87,11	88,81	88,95	91,54	92,7	92,98	92,38	93,85
	X3 (APK Perguruan Tinggi)	36,53	41	41,52	38,31	37,63	38,39	38,66	38,15	38,01
	D1	66,67	73,33	73,33	70	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33
Kesehatan dan	X4 (Angka kesakitan	9,29	8,99	7,29	7,21	8,7	8,23	8,61	10,7	6,52

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kesejahteraan	pemuda)									
	X5 (Persentase korban kejahatan)	1,47	1,55	1,93	1,31	1,77	1,54	1,18	0,87	0,79
	X6 (Persentase pemuda yang merokok)	29,72	28,36	29,75	29,75	30	29,54	28,21	28,03	27,12
	X7 (Persentase remaja perempuan yang sedang hamil)	23,83	16,04	16,31	16,31	14,94	27,3	23,12	23,12	11,21
	D2	47,5	52,5	50	55	50	42,5	52,5	52,5	65
Lapangan dan Kesempatan Kerja	X8 (Persentase pemuda wirausaha kerah putih)	0,18	0,97	0,28	0,21	0,32	0,32	0,51	0,56	0,63
	X9 (Tingkat pengangguran terbuka)	11,98	8,6	9,85	9,96	8,34	9,86	9,67	8,84	9,39
	D3	35	60	45	45	50	45	50	50	55
Partisipasi dan Kepemimpinan	X10 (Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan)	82,14	82,14	82,14	78,65	78,65	78,65	64,8	64,8	65,73
	X11 (Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi)	4,85	4,85	4,85	7,79	7,79	7,79	4,54	4,54	5,88
	X12 (Persentase pemuda yang memberikan saran / pendapat dalam rapat)	5,83	5,83	5,83	9,9	9,9	9,9	5,2	5,2	5,97
	D4	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67	40	40	40
Gender dan Diskriminasi	X13 (Angka perkawinan usia anak)	12,77	14,5	14,61	14,33	13,24	10,68	11,93	11,93	7,01
	X14 (Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas)	46,64	43,27	46,22	45,8	45,81	47,34	48,93	48,93	48,33
	X15 (Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal)	19,07	22,06	17,65	15,89	21,29	19,17	19,36	18,85	20,07
	D5	46,67	43,33	40	40	43,33	46,67	50	50	53,33
IPP		48,5	55,17	51	51,33	52,67	50,83	53,17	53,17	57,33

Sumber: https://ipp.sarikata.com

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Bengkulu tahun 2015 hingga 2023, terlihat bahwa terjadi dinamika perkembangan kualitas pemuda di lima domain utama: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan,

kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender. Secara umum, nilai IPP Provinsi Bengkulu menunjukkan tren fluktuatif, namun cenderung meningkat dari 48,5 pada tahun 2015 menjadi 57,33 pada tahun 2023, menandakan adanya perbaikan bertahap dalam pembangunan kepemudaan di provinsi ini.

Pada domain pendidikan, terjadi peningkatan konsisten pada indikator rata-rata lama sekolah dari 10,28 tahun (2015) menjadi 11,22 tahun (2023), serta Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah yang naik dari 86,03% menjadi 93,85%. Namun, APK perguruan tinggi stagnan dan bahkan sedikit menurun dalam dua tahun terakhir, dari 38,66% pada 2021 menjadi 38,01% pada 2023. Meskipun demikian, skor domain pendidikan (D1) tetap stabil di angka 73,33 sejak tahun 2016.

Pada aspek kesehatan dan kesejahteraan, domain ini menunjukkan perbaikan signifikan. Angka kesakitan pemuda menurun dari 9,29% (2015) menjadi 6,52% (2023), demikian pula dengan persentase pemuda yang menjadi korban kejahatan dan yang merokok. Salah satu pencapaian penting adalah penurunan tajam pada angka remaja perempuan yang sedang hamil dari 23,12% (2022) menjadi hanya 11,21% pada tahun 2023. Hal ini menyebabkan peningkatan nilai domain D2 dari 42,5 (2020) menjadi 65 (2023), yang merupakan salah satu kemajuan tertinggi antar domain.

Pada domain lapangan dan kesempatan kerja, meskipun tingkat pengangguran terbuka fluktuatif dan cukup tinggi, partisipasi pemuda dalam wirausaha kerah putih menunjukkan tren meningkat, dari 0,18% (2015) menjadi 0,63% (2023). Hal ini turut mendorong kenaikan skor D3 dari 35 ke 55 selama periode 2015–2023.

Namun, domain partisipasi dan kepemimpinan masih menjadi tantangan utama. Partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi dan forum publik masih rendah, sehingga skor D4 stagnan di angka 40 sejak tahun 2021. Ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih dalam membangun ekosistem yang mendukung keterlibatan aktif pemuda dalam pembangunan sosial dan politik.

Domain terakhir, gender dan diskriminasi, menunjukkan progres cukup baik. Angka perkawinan usia anak menurun drastis dari 12,77% (2015) menjadi hanya 7,01% pada tahun 2023. Selain itu, proporsi pemuda perempuan yang menempuh pendidikan dan bekerja di sektor formal juga meningkat, meski masih terbatas. Skor D5 pun naik dari 46,67 (2021) menjadi 53,33 (2023), mencerminkan kemajuan dalam kesetaraan gender dalam pembangunan kepemudaan.

Secara keseluruhan, IPP Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 mencapai skor 57,33, yang menunjukkan bahwa kualitas pembangunan pemuda masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek partisipasi, kewirausahaan, dan akses pendidikan tinggi. Data ini dapat menjadi acuan penting bagi Pemerintah Kabupaten Kaur untuk merumuskan kebijakan pembangunan pemuda yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam RPJMD 2025–2029, dengan fokus pada penguatan kapasitas, keterlibatan sosial, dan akses yang merata antar gender.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan fondasi penting dalam mendukung transformasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kaur. Daya saing daerah mencerminkan kemampuan wilayah dalam mengelola potensi sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sistem ekonomi secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks RPJMD 2025–2029, penguatan daya saing diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan inovasi, penerapan prinsip ekonomi hijau dan biru, percepatan transformasi digital, serta integrasi ekonomi domestik dan global.

Selain itu, pembangunan yang merata antara wilayah perkotaan dan perdesaan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Stabilitas ekonomi makro turut menjadi penyangga dalam menjaga kesinambungan fiskal dan mendukung

kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-pemerataan. Seluruh dimensi daya saing ini diukur melalui berbagai indikator sesuai konteks daerah, yang mencerminkan kesiapan Kabupaten Kaur dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan secara adaptif dan berdaya saing tinggi.

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Angka Ketergantungan

Dalam aspek daya saing sumber daya manusia, salah satu indikator penting yang mencerminkan beban ekonomi penduduk usia produktif adalah angka ketergantungan (*dependency ratio*). Angka ini menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (15–64 tahun). Semakin rendah angka ketergantungan, semakin besar kapasitas penduduk usia kerja dalam menopang kebutuhan penduduk usia non-produktif, yang menjadi indikator positif bagi produktivitas dan daya saing daerah. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk yang telah dijelaskan sebelumnya didapatkan Angka Ketergantungan Kabupaten Kaur Tahun 2022-2024 sebagai berikut:

Tabel II-43. Angka Ketergantungan Kabupaten Kaur Tahun 2022-2024

Tahun	Penduduk Usia Non-Produktif (0-14 & 65+)	Penduduk Usia Produktif (15-64)	Rasio Ketergantungan (%)
2022	41426	88235	46,9
2023	40725	90338	45,1
2024	41302	91357	45,2

Sumber : Kaur Dalam Angka, 2025

Data jumlah penduduk Kabupaten Kaur tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil, dengan peningkatan total penduduk dari 129.661 jiwa pada tahun 2022 menjadi 131.063 jiwa pada 2023, dan mencapai 132.659 jiwa pada 2024. Kelompok umur 0–4 tahun mengalami peningkatan cukup signifikan, dari 10.265 jiwa menjadi 11.458 jiwa dalam tiga tahun terakhir, mengindikasikan peningkatan angka kelahiran. Sebaliknya, kelompok umur 5–14

tahun cenderung menurun, menunjukkan adanya kemungkinan penurunan jumlah anak usia sekolah dasar dan menengah pertama. Kelompok usia produktif (15–64 tahun) tetap menjadi mayoritas dengan distribusi yang relatif stabil, sementara kelompok lansia (65 tahun ke atas) menunjukkan sedikit fluktuasi namun secara umum cenderung meningkat.

Distribusi penduduk pada masing-masing kelompok umur tidak menunjukkan perubahan drastis, mencerminkan struktur penduduk yang seimbang dalam jangka pendek. Kelompok umur 20–39 tahun tetap stabil dan cukup besar jumlahnya, mengindikasikan potensi tenaga kerja yang kuat dalam beberapa tahun ke depan. Sementara itu, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) meningkat dari 8.736 jiwa pada tahun 2022 menjadi 8.313 jiwa pada 2024, meskipun mengalami sedikit penurunan pada 2023. Pola ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kaur berada pada fase transisi demografi awal, di mana jumlah penduduk usia muda dan produktif masih dominan, tetapi kelompok lansia mulai menunjukkan peningkatan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pelayanan sosial dan kesehatan.

B. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri pengolahan merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam mendukung diversifikasi ekonomi dan peningkatan nilai tambah di tingkat daerah. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana transformasi ekonomi mulai bergerak dari sektor primer menuju sektor sekunder. Rasio PDRB industri pengolahan terhadap total PDRB memberikan gambaran mengenai peran relatif sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian daerah. Data berikut menyajikan perkembangan nilai PDRB industri pengolahan Kabupaten Kaur selama periode 2020–2024 dan kontribusinya terhadap total

PDRB atas dasar harga konstan, yang dapat menjadi dasar evaluasi dan perumusan kebijakan penguatan sektor industri lokal.

Tabel II-44. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kaur Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1116,58	1144,63	1190,75	1221,9	1256,22
Pertambangan dan Penggalian	99,98	100,45	101,08	103,98	107,33
Industri Pengolahan	84,63	87	90,32	91,79	94,27
Pengadaan Listrik dan Gas	1,68	1,84	1,99	2,03	2,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,45	5,51	5,75	5,89	6,25
Konstruksi	141,88	146,1	147,1	152,8	161,5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	213,46	228,73	241,49	244,52	251,72
Transportasi dan Pergudangan	106,22	110,61	119,1	126,87	133,45
Informasi dan Komunikasi	29,58	29,96	32,72	35,67	39
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	76,28	79,82	86,05	93,9	102,56
Jasa Keuangan dan Asuransi	27,18	29,14	28,63	27,13	28,54
Real Estate	100	100,45	104,19	108,97	113,52
Jasa Perusahaan	1,16	1,14	1,28	1,38	1,49
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	179,31	185,03	185,34	196,55	213,01
Jasa Pendidikan	62,93	64,38	66,16	69,37	73,63
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,76	12,92	13,54	14,62	15,95
Jasa lainnya	5,46	5,6	5,96	6,47	7,07
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2263,55	2333,3	2421,45	2503,82	2607,62

Sumber : Kaur Dalam Angka, 2025

Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Kaur dalam lima tahun terakhir menunjukkan peran yang relatif kecil namun stabil. Pada tahun 2020, nilai PDRB sektor ini sebesar 84,63 miliar rupiah atau sekitar 3,74% dari total PDRB sebesar 2.263,55 miliar rupiah. Proporsi ini mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2022 menjadi sekitar 3,73%, namun secara umum kontribusinya tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan hingga tahun 2024, di mana sektor ini mencatat nilai sebesar 94,27 miliar rupiah dari total PDRB 2.607,62 miliar rupiah, atau hanya sekitar 3,61%.

Angka-angka ini mengindikasikan bahwa sektor Industri Pengolahan belum menjadi motor utama penggerak perekonomian Kabupaten Kaur. Meskipun mengalami pertumbuhan nominal dari tahun ke tahun, laju pertumbuhan sektor ini relatif lebih lambat dibandingkan pertumbuhan agregat PDRB. Rendahnya rasio

ini menunjukkan potensi yang masih dapat dioptimalkan, khususnya melalui pengembangan industri berbasis sumber daya lokal seperti pertanian dan perikanan yang menjadi sektor dominan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan memperluas basis ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menunjukkan kinerja yang positif dalam struktur perekonomian Kabupaten Kaur berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan 2010 tahun 2020–2024. Nilai tambah bruto sektor ini meningkat dari Rp76,28 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp102,56 miliar pada tahun 2024, atau mengalami pertumbuhan sebesar 34,4% dalam lima tahun. Peningkatan ini menandakan adanya pertumbuhan signifikan dalam aktivitas pariwisata, perhotelan, rumah makan, dan jasa kuliner di daerah.

Jika dilihat dari rasio kontribusinya terhadap total PDRB, sektor ini juga mencatat tren kenaikan. Pada tahun 2020, kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap total PDRB sebesar 3,37%. Angka ini terus meningkat menjadi 3,93% pada tahun 2022, dan mencapai 3,93% kembali pada tahun 2024. Meskipun persentasenya tidak melonjak drastis, peningkatan konsisten ini mencerminkan menguatnya peran sektor pariwisata dan jasa konsumsi dalam mendukung struktur ekonomi daerah, serta adanya pergeseran minat konsumsi masyarakat dan wisatawan terhadap produk dan layanan lokal.

3. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif di Kabupaten Kaur menunjukkan tren pertumbuhan yang menjanjikan selama periode 2020–2024, yang tercermin dari peningkatan kontribusi beberapa sektor yang berkaitan langsung dengan aktivitas kreatif. Sektor-sektor tersebut antara lain penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, jasa lainnya, serta sebagian dari perdagangan besar dan eceran. Secara umum, sektor-sektor ini memiliki karakteristik yang bertumpu pada kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan teknologi

dalam menciptakan nilai tambah, serta menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi ekonomi daerah menuju model ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2020, total nilai PDRB dari sektor-sektor ekonomi kreatif tersebut diperkirakan mencapai Rp326,96 miliar atau sekitar 14,45% dari total PDRB Kabupaten Kaur sebesar Rp2.263,55 miliar. Proporsi ini terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp393,84 miliar atau sekitar 15,11% dari total PDRB sebesar Rp2.607,62 miliar. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang meningkat dari Rp76,28 miliar menjadi Rp102,56 miliar dalam lima tahun, serta sektor informasi dan komunikasi yang mengalami kenaikan dari Rp29,58 miliar menjadi Rp39 miliar pada periode yang sama. Kenaikan signifikan ini menunjukkan bahwa sektor-sektor berbasis kreativitas dan digitalisasi mulai memainkan peran penting dalam struktur ekonomi daerah.

Perkembangan tersebut juga mencerminkan potensi besar yang dimiliki Kabupaten Kaur dalam mengembangkan ekonomi kreatif sebagai pilar pertumbuhan baru. Dukungan terhadap usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang kuliner, kerajinan, pariwisata, konten digital, dan penyediaan jasa berbasis kreativitas dapat menjadi kunci dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat identitas budaya lokal. Potensi ini akan semakin besar apabila diintegrasikan dengan sektor unggulan lainnya seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, sehingga menciptakan sinergi yang mampu mendorong tumbuhnya rantai nilai kreatif di tingkat lokal.

4. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kapasitas suatu wilayah dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing daerah. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan

Nasional Tahun 2021–2024, pembangunan kewirausahaan nasional diarahkan untuk mendorong peningkatan jumlah wirausahawan aktif dan produktif, khususnya dari kalangan pemuda, perempuan, dan pelaku usaha kecil menengah.

Berdasarkan Satu Data Kabupaten Kaur tahun 2024, tercatat sebanyak 6.433 pemuda wirausaha yang aktif dalam pembangunan daerah, dari total populasi penduduk sebanyak 132.700 jiwa. Perhitungan rasio kewirausahaan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-45. Rasio Kewirausahaan Kabupaten Kaur Tahun 2024

No.	Komponen	Satuan	Jumlah
1.	Jumlah Wirausaha Aktif[1]	Orang	6.433
2.	Jumlah Penduduk Kabupaten Kaur[2]	Jiwa	132.700
3.	Rasio Kewirausahaan	Persentase	(6.433:132.700)x100= 4,85%

Sumber:
(1). Satu Data Kabupaten Kaur/Dinas Pemuda dan Olahraga/Jumlah Pemuda Wirausaha yang Aktif dalam Pembangunan, 2025
(2). Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, 2025

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio kewirausahaan Kabupaten Kaur tahun 2024 sebesar 4,85 persen. Angka ini berada di atas target nasional yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2022, yaitu sebesar 3,95 persen pada akhir tahun 2024. Capaian ini mencerminkan partisipasi pemuda yang cukup tinggi dalam sektor ekonomi produktif serta menunjukkan potensi Kabupaten Kaur dalam mengembangkan ekonomi lokal berbasis inovasi dan kewirausahaan.

Peningkatan kualitas kewirausahaan masih menjadi tantangan dalam pembangunan daerah, baik dari sisi akses terhadap pembiayaan, pelatihan keterampilan digital, hingga penguatan ekosistem inovasi daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menyusun kebijakan yang mendukung pengembangan wirausaha muda secara berkelanjutan, termasuk melalui integrasi program kewirausahaan dalam pendidikan, pelatihan vokasi, serta pemberdayaan ekonomi lokal

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masuk dalam angkatan kerja

dibandingkan dengan total penduduk usia kerja. Angkatan kerja sendiri mencakup penduduk yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. TPAK digunakan sebagai indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk usia kerja berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, baik secara formal maupun informal. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, yang menunjukkan ketersediaan dan pemanfaatan tenaga kerja dalam pembangunan daerah.

TPAK juga mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja serta efektivitas kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan di suatu wilayah. Tingkat partisipasi yang tinggi dapat mengindikasikan tingginya motivasi kerja penduduk dan adanya peluang kerja yang tersedia. Sebaliknya, TPAK yang rendah bisa menunjukkan adanya hambatan struktural seperti keterbatasan lapangan kerja, rendahnya pendidikan dan keterampilan, atau tingginya angka pekerja tidak aktif karena beban domestik, terutama pada perempuan. Oleh karena itu, dalam konteks perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, peningkatan TPAK menjadi sasaran strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia.

Tabel II-46. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2024

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	72,09	71,71	70,37	70,11	73,95	75,64	75,95	74,45
Rejang Lebong	76,67	76,82	76,32	77,93	76,09	74,46	77,86	74,92
Bengkulu Utara	60,55	68,9	66,03	72	67,62	67,72	68,6	71,9
Kaur	73,5	73,46	72,18	69,54	69,28	72,22	68,44	71,63
Seluma	76,7	71,79	73,99	76,45	70,13	70,57	73,44	73,45
Mukomuko	65,31	63,78	65,24	65,68	64,11	62,72	67,16	66,46
Lebong	71,23	70,84	74,51	74,38	72,01	72,8	70,23	71,67
Kepahiang	75,48	75,02	75,7	78,99	75,59	74,47	75,73	76,51
Bengkulu Tengah	71,26	71,54	67,61	69,71	67,32	65,16	64,96	68,89
Kota Bengkulu	63,48	64,33	65,19	65,99	65,42	66,29	66,61	68,54
Provinsi Bengkulu	69,3	70,06	69,9	71,73	69,75	69,81	70,91	71,71

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu 2025

Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kaur selama periode 2017–2024 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika ketenagakerjaan di daerah tersebut. Pada tahun 2017, TPAK Kabupaten Kaur tercatat sebesar 73,5%, yang berarti lebih dari tujuh dari sepuluh penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Angka ini sempat mengalami penurunan hingga 69,28% pada tahun 2021, yang kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan lapangan kerja. Namun, dalam dua tahun terakhir, terjadi perbaikan dengan TPAK meningkat menjadi 72,22% pada 2022 dan 71,63% pada 2024, menunjukkan pemulihan partisipasi tenaga kerja seiring membaiknya kondisi ekonomi dan sosial di wilayah ini.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, TPAK Kabupaten Kaur umumnya berada di atas rata-rata provinsi (71,71% pada 2024), namun masih di bawah beberapa daerah seperti Kepahiang (76,51%) dan Bengkulu Selatan (74,45%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi tenaga kerja di Kabupaten Kaur relatif kuat, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam menjangkau kelompok usia kerja yang belum berpartisipasi secara aktif, seperti perempuan dan generasi muda. Oleh karena itu, strategi pembangunan sumber daya manusia di Kaur perlu diarahkan pada penyediaan pelatihan vokasi, penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, serta pemberdayaan sektor-sektor produktif agar partisipasi tenaga kerja dapat ditingkatkan secara merata dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

6. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan alat ukur dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembaruan dalam tata kelola pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah. Indeks ini berperan strategis dalam mendorong peningkatan produktivitas sektor ekonomi karena mencerminkan sejauh mana daerah mampu menghadirkan

kebijakan yang kreatif dan inovatif, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik, kapasitas, serta kearifan lokal masing-masing wilayah.

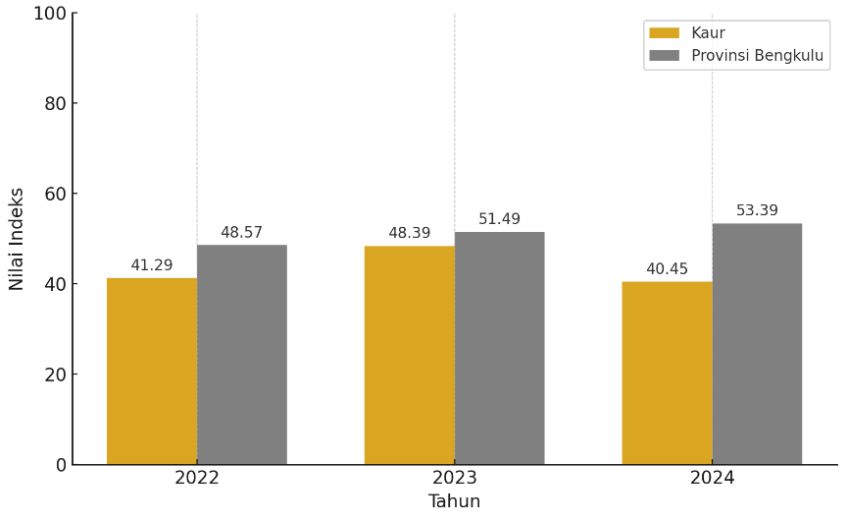

Gambar II-22. Indeks Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kaur Tahun 2022-2024

Sumber: Bapperida Kabupaten Kaur, 2025

Tabel II-47. Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2021-2024

Wilayah	2021		2022		2023		2024	
	Indeks Inovasi	Kategori	Indeks Inovasi	Kategori	Indeks Inovasi	Kategori	Indeks Inovasi	Kategori
Provinsi Bengkulu	57,93	Inovatif	48,57	Inovatif	51,49	Inovatif	53,39	Inovatif
Kota Bengkulu	59,37	Inovatif	64	Sangat Inovatif	69,46	Sangat Inovatif	76,72	Sangat Inovatif
Bengkulu Utara	52,61	Inovatif	55,42	Inovatif	48,16	Inovatif	55,39	Inovatif
Bengkulu Selatan	50,42	Inovatif	37,95	Inovatif	51,45	Inovatif	54,34	Inovatif
Kepahiang	46	Inovatif	46,49	Inovatif	48,15	Inovatif	39,68	Inovatif
Seluma	45,05	Inovatif	42,85	Inovatif	42,73	Inovatif	51,64	Inovatif
Rejang Lebong	44,07	Inovatif	51,32	Inovatif	40,69	Inovatif	47,67	Inovatif
Bengkulu Tengah	37,47	Inovatif	40,24	Inovatif	34,18	Kurang Inovatif	42,04	Inovatif
Kaur	11,68	Kurang Inovatif	41,29	Inovatif	48,39	Inovatif	40,45	Inovatif
Mukomuko	11,76	Kurang Inovatif	41,54	Inovatif	32,89	Kurang Inovatif	23,16	Kurang Inovatif
Lebong	22,69	Kurang Inovatif	27,41	Kurang Inovatif	45,92	Inovatif	38,26	Inovatif

Sumber: Kepmendagri Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024

Berdasarkan data Indeks Inovasi Daerah tahun 2021–2024, Kabupaten Kaur menunjukkan tren peningkatan kinerja inovasi, meskipun masih menghadapi fluktuasi capaian. Pada tahun 2021, Kabupaten Kaur berada dalam kategori

"Kurang Inovatif" dengan nilai 11,68, namun mengalami lonjakan signifikan ke kategori "Inovatif" pada tahun 2022 dengan nilai 41,29, dan kembali mencatatkan skor 48,39 pada tahun 2023. Meski demikian, pada tahun 2024 nilai indeks sedikit menurun menjadi 40,45, namun Kabupaten Kaur tetap bertahan dalam kategori "Inovatif."

Perkembangan ini mencerminkan adanya upaya perbaikan dalam ekosistem inovasi daerah, baik melalui kebijakan, pelayanan publik, maupun tata kelola pemerintahan. Namun, capaian yang masih berada di kisaran bawah dalam kategori "Inovatif" menunjukkan bahwa ruang perbaikan masih cukup besar, terutama dalam memperkuat kelembagaan, mendorong kolaborasi lintas sektor, serta memanfaatkan teknologi dan potensi lokal secara lebih optimal. Konsistensi dan keberlanjutan inovasi menjadi kunci penting agar Kabupaten Kaur dapat bergerak menuju kategori "Sangat Inovatif" di masa mendatang.

C. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau di Kabupaten Kaur hingga kini masih berada pada tahap awal. Arah kebijakan nasional telah mendorong penguatan ekonomi lokal berbasis keberlanjutan lingkungan, implementasinya di Kabupaten Kaur masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Kabupaten Kaur memiliki potensi strategis untuk mengembangkan model ekonomi hijau yang mendukung konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, inisiatif seperti pertanian organik, ekowisata, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat masih bersifat terbatas, belum terintegrasi dalam kebijakan daerah, dan terkendala oleh kapasitas kelembagaan serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal.

Di sisi lain, potensi pengembangan ekonomi biru juga menjadi peluang besar bagi Kabupaten Kaur, khususnya melalui pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah pengembangan program *Smart Fisheries Village* (SFV) Linau yang menjadi model

desa perikanan berbasis teknologi dan keberlanjutan. Linau, yang terletak di Kecamatan Maje, memiliki komoditas unggulan yaitu Gurita dengan wilayah tangkapan mencapai 450 hektare, menjadikannya salah satu sentra perikanan potensial di Provinsi Bengkulu. Program SFV Linau bertujuan untuk meningkatkan produktivitas nelayan dan pembudidaya ikan melalui pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan kelembagaan ekonomi lokal. SFV juga mendorong praktik perikanan berkelanjutan dan konservasi pesisir yang terintegrasi dengan pengembangan ekowisata bahari. Dengan menggabungkan pendekatan ekonomi hijau di daratan dan ekonomi biru di wilayah pesisir, Kabupaten Kaur memiliki potensi besar untuk membangun sistem ekonomi lokal yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

D. Transformasi Digital

1. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan pendekatan penting untuk melihat kondisi dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital, baik di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. IMDI disusun berdasarkan pengembangan dari G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy, dan menjadi kerangka kerja komprehensif dalam mengukur keterampilan digital masyarakat secara objektif dan terstandarisasi.

Kerangka IMDI terdiri atas tiga komponen utama, yaitu pilar, subpilar, dan indikator. Secara khusus, terdapat empat pilar utama dalam pengukuran IMDI, yaitu:

a. Infrastruktur dan Ekosistem

Pilar ini menjadi landasan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan jangkauan, kualitas,

dan biaya layanan internet. Pilar ini menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap infrastruktur digital, serta pentingnya keberadaan ekosistem pembelajaran yang mendukung kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perkembangan teknologi.

b. Keterampilan Digital

Pilar ini mencakup literasi digital dan keterampilan dasar penggunaan teknologi. Pengukuran dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kesetaraan, seperti perbedaan jenis kelamin dan tingkat pendidikan, untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penguasaan teknologi antar kelompok masyarakat. Pilar ini merujuk pada Digital Literacy Global Framework dari UNESCO sebagai acuan pengembangan indikator.

c. Pemberdayaan

Pilar ini mencerminkan sejauh mana masyarakat mampu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan taraf hidup dan menciptakan peluang ekonomi, baik melalui usaha digital mandiri maupun partisipasi dalam ekonomi berbagi (sharing economy). Akses terhadap platform digital tidak hanya membuka ruang bagi peningkatan pendapatan, tetapi juga memperkuat inklusi keuangan dan kualitas hidup secara keseluruhan.

d. Pekerjaan

Pilar ini berfokus pada keterampilan digital yang dibutuhkan dalam dunia kerja, baik saat ini maupun di masa depan. Pengukuran meliputi kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital untuk menyelesaikan tugas kerja, serta kesesuaian antara permintaan keterampilan di pasar tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja yang memiliki kompetensi digital.

Melalui keempat pilar ini, IMDI memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat kesiapan masyarakat dalam menghadapi era digital. Bagi Kabupaten Kaur, penguatan indikator-indikator IMDI menjadi bagian strategis dalam mendorong transformasi digital yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian pembangunan berbasis teknologi informasi.

Tabel II-48. Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2022-2024

Tahun	Kabupaten/ Kota	Indeks Masyarakat Digital	Pilar Infratrukstur dan Ekosistem	Pilar Keterampilan Digital	Pilar Pemberdayaan	Pilar Pekerjaan
2022	Bengkulu Selatan	36,17	31,65	53,82	20,74	37,83
	Bengkulu Tengah	42,30	36,52	62,38	27,11	42,26
	Bengkulu Utara	33,81	33,85	39,51	22,84	39,3
	Kaur	39,08	33,96	51,04	22,88	47,81
	Kepahiang	45,67	36,71	67,67	27,93	48,89
	Kota Bengkulu	40,99	40,7	59,9	23,38	40,22
	Lebong	41,48	32,43	67,53	25,46	38,89
	Mukomuko	41,09	37,86	56,14	26,89	43,07
	Rejang Lebong	34,31	33,48	42,01	21,35	40,53
	Seluma	43,48	31,49	70,07	27,81	42,36
	Provinsi Bengkulu	39,82	34,86	57,06	24,64	42,12
2023	Bengkulu Selatan	41,88	55,2	50,86	27,01	35,23
	Bengkulu Tengah	46,42	53,95	70,65	24,62	36,01
	Bengkulu Utara	44,65	53,13	63,2	26,58	35,22
	Kaur	45,90	55,24	65,18	27,68	34,23
	Kepahiang	48,45	54,95	71,26	30,24	35,07
	Kota Bengkulu	45,72	56,58	71,35	21,39	32,8
	Lebong	44,59	56,29	62,48	23,98	36,4
	Mukomuko	46,68	53,77	68,75	27,47	35,58
	Rejang Lebong	41,88	53,16	53,17	26,36	35,66
	Seluma	45,93	53,1	70,28	24,81	34,55
	Provinsi Bengkulu	45,21	56,55	58,38	27,51	36,16
2024	Bengkulu Selatan	38,65	51,94	49,73	19,8	36,21
	Bengkulu Tengah	42,18	50,71	59,73	23,1	36,37
	Bengkulu Utara	45,46	54,08	69,21	22,25	37
	Kaur	44,19	49,13	64,13	25,81	38,41
	Kepahiang	47,88	51,01	66,29	32,91	40,82
	Kota Bengkulu	47,25	58,58	63,56	29	37,7
	Lebong	39,78	51,86	54,4	19,15	36,6
	Mukomuko	44,58	50,52	63,25	26,78	38,33
	Rejang Lebong	44,13	54,86	62,56	22,42	38,63
	Seluma	41,60	51,77	58,46	21,62	36,25
	Provinsi Bengkulu	43,57	52,45	61,13	24,28	37,63

Sumber: https://imdi.sdmdigital.id/

Kabupaten Kaur menunjukkan tren positif dalam perkembangan Indeks Masyarakat Digital (IMD) selama periode 2022–2024, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai IMD Kabupaten Kaur tercatat sebesar 39,08, kemudian meningkat signifikan menjadi 45,90 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 indeks ini sedikit menurun menjadi 44,19, meskipun masih lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Bengkulu tahun 2024 yang berada di angka 43,57.

Dari keempat pilar penyusun IMD, Pilar Keterampilan Digital dan Pilar Pekerjaan Digital merupakan aspek terkuat Kabupaten Kaur. Pada tahun 2024, keterampilan digital masyarakat Kaur mencapai 64,13, menjadikannya salah satu skor tertinggi di provinsi. Demikian pula, pilar pekerjaan digital tercatat 38,41, menunjukkan kesiapan tenaga kerja lokal untuk beradaptasi dengan transformasi digital. Namun demikian, Pilar Infrastruktur dan Ekosistem Digital yang hanya mencapai 49,13 pada tahun 2024, dan Pilar Pemberdayaan sebesar 25,81, masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa transformasi digital di Kabupaten Kaur mulai menunjukkan kemajuan, khususnya dalam peningkatan literasi dan keterampilan digital masyarakat. Ke depan, penguatan infrastruktur digital serta peningkatan pemberdayaan berbasis teknologi perlu menjadi fokus untuk memastikan transformasi digital yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Kaur.

E. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen utama dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan pendekatan pengeluaran. Indikator ini mencerminkan investasi dalam bentuk penambahan aset tetap yang digunakan untuk kegiatan produksi jangka panjang. PMTB meliputi pengeluaran untuk barang-barang modal seperti mesin, peralatan,

kendaraan, gedung, infrastruktur, dan aset tetap lainnya yang berfungsi menunjang aktivitas ekonomi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Dengan demikian, PMTB dapat dianggap sebagai indikator investasi fisik yang mencerminkan seberapa besar pembangunan aset produktif yang berlangsung di suatu wilayah.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kaur, PMTB memiliki peran strategis sebagai cerminan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan indikator kepercayaan investor terhadap arah pembangunan daerah. Peningkatan nilai PMTB menunjukkan adanya aktivitas investasi yang dinamis, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, seperti ekspansi usaha, pembangunan infrastruktur baru, serta peningkatan kapasitas produksi. Kondisi ini mencerminkan struktur ekonomi daerah yang semakin solid karena didukung oleh penguatan infrastruktur dan aset produksi yang berkelanjutan.

Untuk menganalisis perkembangan PMTB secara akurat, penggunaan PDRB atas dasar harga konstan lebih tepat dibandingkan harga berlaku. Harga konstan mampu menghilangkan pengaruh inflasi, sehingga mencerminkan pertumbuhan riil dari sisi volume fisik investasi yang terjadi. Sebaliknya, jika menggunakan harga berlaku, angka yang ditampilkan masih dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga lebih relevan untuk analisis nilai nominal atau kontribusi terhadap struktur ekonomi. PMTB yang tidak menunjukkan peningkatan bahkan cenderung menurun dapat menjadi sinyal terjadinya penurunan aktivitas investasi atau hambatan dalam iklim usaha. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kaur perlu menjadikan PMTB sebagai indikator kinerja penting dalam RPJMD, khususnya untuk mengukur capaian pembangunan fisik, mendorong kemudahan investasi, serta memperkuat transformasi ekonomi daerah. Upaya peningkatan PMTB dapat difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan belanja modal yang berkualitas, serta penciptaan iklim usaha yang mendukung partisipasi swasta.

Tabel II-49. Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kaur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

PDRB Pengeluaran (Seri 2020)	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.344.640,02	2.441.188,20	2.643.866,08	2.868.830,24	3.068.835,90
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	88.701,00	86.748,43	97.860,38	113.161,30	130.263,65
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	774.509,34	803.933,24	829.455,19	902.212,95	995.398,72
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.157.670,56	2.347.139,55	2.547.716,72	2.694.588,76	2.800.251,88
Perubahan Inventori	22.965,58	1.475,47	3.610,48	-20.968,53	8.878,52
Net Ekspor Barang dan Jasa	-1.776.149,76	-1.779.618,45	-1.895.906,23	-2.010.128,12	-2.040.057,31
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3.612.336,74	3.900.866,44	4.226.602,61	4.547.696,61	4.963.571,36

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Kaur atas dasar harga berlaku selama periode 2020–2024 menunjukkan tren pertumbuhan positif yang mencerminkan meningkatnya aktivitas investasi fisik di wilayah tersebut. Pada tahun 2020, nilai PMTB tercatat sebesar Rp2,16 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp2,35 triliun pada tahun 2021, dan terus bertumbuh menjadi Rp2,55 triliun pada 2022. Tren ini berlanjut pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing mencapai Rp2,69 triliun dan Rp2,80 triliun. Kenaikan nilai PMTB ini mencerminkan adanya ekspansi dalam pembangunan aset tetap seperti infrastruktur, gedung, mesin, serta sarana dan prasarana produksi lainnya.

Secara struktural, PMTB menjadi komponen terbesar kedua dalam struktur PDRB Kabupaten Kaur berdasarkan pengeluaran, setelah konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2024, PMTB menyumbang sekitar 56,4% dari total PDRB harga berlaku yang mencapai Rp4,96 triliun. Kontribusi ini menunjukkan pentingnya sektor investasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Kuatnya posisi PMTB juga menunjukkan adanya kepercayaan dari pelaku ekonomi terhadap prospek jangka panjang perekonomian Kabupaten Kaur, baik dari sisi pemerintah

dalam belanja modal maupun sektor swasta yang terlibat dalam pengembangan usaha dan pembangunan infrastruktur.

Meskipun demikian, peningkatan PMTB dalam nilai nominal (harga berlaku) juga harus dianalisis secara hati-hati karena dapat terpengaruh oleh fluktuasi harga barang dan jasa modal. Oleh karena itu, untuk menilai pertumbuhan investasi secara riil, penting juga dilakukan analisis berdasarkan harga konstan. Namun secara umum, tren kenaikan PMTB atas dasar harga berlaku menunjukkan arah yang positif dalam pembangunan fisik dan penguatan kapasitas produksi daerah, serta mencerminkan peran strategis PMTB dalam mendukung transformasi ekonomi Kabupaten Kaur menuju pertumbuhan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Tabel II-50. Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kaur Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

PDRB Pengeluaran (Seri 2020)	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.484.094,51	1.523.920,06	1.588.528,98	1.651.017,32	1.728.593,77
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	62.896,00	60.020,53	65.250,95	71.812,94	80.427,53
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	467.261,88	481.674,15	487.071,92	516.923,25	553.406,49
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.399.331,27	1.446.265,67	1.493.604,28	1.531.801,06	1.564.429,58
Perubahan Inventori	7.980,30	328,99	1.560,74	-13.108,70	8.274,65
Net Ekspor Barang dan Jasa	9.579.402,93	-1.178.904,45	-1.214.562,09	-1.254.622,83	-1.327.510,60
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2.263.548,65	2.333.304,95	2.421.454,79	2.503.823,04	2.607.621,42

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Kaur atas dasar harga konstan selama periode 2020–2024 menunjukkan pertumbuhan yang stabil, mencerminkan peningkatan volume riil investasi fisik tanpa terdistorsi oleh inflasi. Pada tahun 2020, nilai PMTB tercatat sebesar Rp1,40 triliun, kemudian naik menjadi Rp1,45 triliun pada 2021, dan terus meningkat menjadi Rp1,49 triliun pada

2022. Kenaikan ini berlanjut hingga mencapai Rp1,53 triliun pada 2023 dan Rp1,56 triliun pada 2024. Tren pertumbuhan ini menandakan adanya konsistensi dalam pengembangan aset tetap di Kabupaten Kaur, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta.

Dari sisi kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, PMTB memiliki peran yang signifikan dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2024, PMTB menyumbang sekitar 60% dari total PDRB harga konstan sebesar Rp2,61 triliun, menjadikannya salah satu komponen terbesar dalam struktur PDRB berdasarkan pengeluaran. Stabilitas pertumbuhan PMTB ini mencerminkan bahwa Kabupaten Kaur terus melakukan pembangunan fisik seperti infrastruktur, fasilitas umum, dan aset produktif yang mendukung peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi perekonomian daerah secara keseluruhan.

Dengan demikian, PMTB atas dasar harga konstan menjadi indikator penting untuk menilai kekuatan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kaur dari sisi investasi riil. Konsistensi pertumbuhan PMTB ini menunjukkan bahwa meskipun nilai nominal PMTB (harga berlaku) juga meningkat, pertumbuhan tersebut bukan hanya disebabkan oleh inflasi, tetapi benar-benar mencerminkan peningkatan fisik pembangunan. Oleh karena itu, menjaga dan memperkuat tren positif PMTB perlu menjadi prioritas dalam RPJMD Kabupaten Kaur, melalui kebijakan yang mendorong investasi infrastruktur strategis, efisiensi belanja modal, serta kolaborasi investasi publik dan swasta yang produktif.

F. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Indeks Infrastruktur

Kondisi infrastruktur jalan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat konektivitas dan aksesibilitas suatu daerah. Jalan yang memadai tidak hanya menunjang kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang, tetapi juga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal serta

pemerataan pembangunan antarwilayah. Dalam konteks Kabupaten Kaur, analisis kondisi jalan selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika baik dari segi panjang jalan menurut tingkat kerusakannya maupun persentase jalan mantap yang tersedia. Data berikut menyajikan perkembangan panjang jalan berdasarkan klasifikasi kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat serta persentase kondisi jalan mantap sebagai gambaran umum kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Kaur selama lima tahun terakhir.

Tabel II-51. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Kaur (km) Tahun 2020-2024

Kondisi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Baik	131,59	68,78	68,78	60,46	103,63
Sedang	146,65	174,37	174,37	151,6	142,94
Rusak	275,52	58,69	58,69	37,4	33,32
Rusak Berat	24,77	276,7	276,7	329,09	298,65
Kondisi Jalan Mantap	48,1%	42,0%	42,0%	36,7%	42,6%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kaur

Selain infrastruktur jalan, jaringan irigasi merupakan infrastruktur vital yang mendukung produktivitas khususnya sektor pertanian dalam menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian sepanjang musim tanam. Keberadaan dan fungsi jaringan irigasi yang memadai berperan langsung dalam meningkatkan ketahanan pangan, efisiensi pemanfaatan sumber daya air, serta kesejahteraan petani. Sistem irigasi di Kabupaten Kaur tersebar di berbagai wilayah dengan cakupan 3.357 Ha dari jumlah jaringan irigasi sebanyak 116. Data berikut menyajikan jumlah jaringan irigasi yang telah terbangun beserta luas area potensial dan luas area fungsional yang saat ini telah dimanfaatkan secara aktif untuk mendukung kegiatan pertanian di daerah tersebut.

Tabel II-52. Jumlah dan Luas Area Jaringan Irigasi Kabupaten Kaur

Jumlah Jaringan Irigasi	Luas Area Potensial (Ha)	Luas Area Fungsional (Ha)
116	3.730	3.357

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kaur

2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak adalah indikator yang menunjukkan persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan, baik dari segi fisik bangunan, luas hunian, akses terhadap air bersih, sanitasi, pencahayaan, ventilasi, serta ketahanan terhadap cuaca dan bencana. Hunian layak juga mencakup aspek non-fisik seperti keamanan tempat tinggal dan akses terhadap layanan dasar seperti listrik dan jalan.

Dalam konteks pembangunan daerah, indikator ini memiliki peran yang sangat penting karena mencerminkan kualitas hidup masyarakat secara langsung. Akses terhadap hunian yang layak berdampak pada kesehatan masyarakat, produktivitas tenaga kerja, serta pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan. Rumah yang sehat dan aman mendukung terciptanya lingkungan keluarga yang stabil, nyaman, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak serta aktivitas sosial ekonomi warga.

Bagi Kabupaten Kaur, peningkatan akses terhadap hunian layak harus menjadi prioritas dalam RPJMD 2025–2029 karena masih banyak wilayah yang menghadapi tantangan dalam aspek perumahan, terutama di daerah pedesaan dan pesisir. Penyediaan hunian yang layak juga erat kaitannya dengan upaya pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Oleh karena itu, pembangunan hunian layak yang merata, inklusif, dan berkelanjutan merupakan bagian integral dalam mendorong transformasi sosial dan ekonomi di tingkat daerah.

Tabel II-53. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Provinsi Bengkulu 2020-2024(Persen)

2020	2021	2022	2023	2024
47,94	51,36	54,98	54,74	56,52

Berdasarkan data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di Provinsi Bengkulu tahun 2020–2024, terlihat adanya tren peningkatan secara bertahap, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023. Pada tahun 2020, hanya 47,94% rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak. Angka ini kemudian meningkat menjadi 51,36% pada 2021 dan terus naik menjadi 54,98% pada 2022. Namun, pada 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 54,74%, sebelum akhirnya kembali meningkat ke 56,52% pada tahun 2024.

Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya pemerintah provinsi, termasuk kabupaten/kota di dalamnya, dalam memperbaiki kondisi perumahan melalui berbagai program seperti bantuan rumah tidak layak huni, pembangunan perumahan berbasis komunitas, dan penyediaan akses air bersih serta sanitasi. Namun, dengan lebih dari 40% rumah tangga masih belum memiliki akses terhadap hunian layak, tantangan besar masih dihadapi terutama di daerah pedesaan dan kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Untuk Kabupaten Kaur, tren ini menjadi referensi penting dalam menyusun kebijakan perumahan dan kawasan permukiman dalam RPJMD 2025–2029. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah memperluas program rehabilitasi rumah, memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dalam penyediaan perumahan terjangkau, serta memastikan pembangunan rumah baru memenuhi kriteria hunian layak baik dari segi struktur bangunan, akses air bersih, sanitasi, hingga pencahayaan alami. Dengan strategi yang terencana dan berbasis data, peningkatan persentase hunian layak akan mendorong kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

3. Persentase Desa Mandiri

Status Desa Mandiri merupakan capaian tertinggi dalam klasifikasi desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), yang mencerminkan kemampuan desa dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh. Di

Kabupaten Kaur, keberadaan desa dengan status Mandiri menunjukkan bahwa desa tersebut telah berhasil menyediakan infrastruktur dasar yang layak, menyelenggarakan pelayanan publik secara optimal, memiliki partisipasi masyarakat yang tinggi, serta mampu mengembangkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Desa dengan status Mandiri juga menunjukkan adanya tata kelola pemerintahan desa yang efektif serta kemandirian dalam mengelola sumber daya dan menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Dalam kerangka IDM, desa diklasifikasikan ke dalam lima kategori: Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal. Desa Mandiri berada di posisi tertinggi, sementara desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal masih menghadapi kendala dasar seperti keterbatasan infrastruktur, akses layanan publik, dan rendahnya pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kaur 2025–2029, perlu dirumuskan langkah-langkah strategis untuk menurunkan jumlah desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal, serta mendorong desa Berkembang agar naik status menjadi Maju dan Mandiri. Percepatan transformasi status desa dapat ditempuh melalui pembangunan infrastruktur yang terarah, penguatan kelembagaan dan kapasitas perangkat desa, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan. Upaya ini tidak hanya meningkatkan capaian IDM, tetapi juga mendukung peningkatan IPM, pengurangan kemiskinan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Kabupaten Kaur.

Tabel II-54. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
	Nilai IDM	Status IDM	Nilai IDM	Status IDM	Nilai IDM	Status IDM	Nilai IDM	Status IDM	Nilai IDM	Status IDM
Bengkulu Selatan	2,27	Cukup	0,6749	Berkembang	0,7011	Berkembang	0,7161	Maju	0,7411	Maju
Rejang Lebong	1,66	Kurang	0,6461	Berkembang	0,6749	Berkembang	0,6909	Berkembang	0,7066	Berkembang
Bengkulu Utara	1,82	Cukup	0,6749	Berkembang	0,6925	Berkembang	0,7008	Berkembang	0,7187	Maju
Kaur	1	Kurang	0,6504	Berkembang	0,6659	Berkembang	0,6913	Berkembang	0,7092	Maju
Seluma	1,19	Kurang	0,6404	Berkembang	0,6531	Berkembang	0,6656	Berkembang	0,6796	Berkembang
Mukomuko	1,54	Kurang	0,6924	Berkembang	0,7018	Berkembang	0,7266	Maju	0,7485	Maju

Kabupaten/ Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
	Nilai IDM	Status IDM	Nilai IDM	Status IDM	Nilai IDM	Status IDM	Nilai IDM	Status IDM	Nilai IDM	Status IDM
Lebong	1,66	Kurang	0,6295	Berkembang	0,6469	Berkembang	0,666	Berkembang	0,6864	Berkembang
Kepahiang	2,03	Cukup	0,6518	Berkembang	0,669	Berkembang	0,6864	Berkembang	0,7106	Maju
Bengkulu Tengah	1,43	Kurang	0,6266	Berkembang	0,6563	Berkembang	0,6901	Berkembang	0,7104	Maju
Kota Bengkulu	1,74	Kurang	0,7123	Maju	0,7572	Maju	0,7572	Maju	0,7572	Maju
Provinsi Bengkulu	2,9	Baik	0,6559	Berkembang	0,6748	Berkembang	0,6935	Berkembang	0,7176	Maju

Sumber : Kemendes, 2025

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kaur tahun 2020–2024, terlihat adanya peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, Kabupaten Kaur memiliki nilai IDM sebesar 1,00 dengan status "Kurang", yang merupakan salah satu nilai terendah di Provinsi Bengkulu pada saat itu. Namun, sejak tahun 2021, status IDM Kaur naik menjadi "Berkembang" dengan nilai 0,6504, dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 0,7092 pada tahun 2024, sehingga statusnya meningkat menjadi "Maju". Kenaikan nilai ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pembangunan desa, baik dari aspek pelayanan dasar, kegiatan ekonomi, maupun partisipasi masyarakat dan tata kelola pemerintahan desa.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, perkembangan IDM Kabupaten Kaur cukup kompetitif. Pada tahun 2024, nilai IDM Kabupaten Kaur (0,7092) sudah melampaui beberapa daerah seperti Seluma (0,6796), Lebong (0,6864), dan Rejang Lebong (0,7066), serta setara dengan atau sedikit lebih rendah dari Kepahiang (0,7106) dan Bengkulu Tengah (0,7104). Namun, Kaur masih tertinggal dibandingkan Kabupaten Mukomuko (0,7485) dan Kota Bengkulu (0,7572), yang sejak beberapa tahun terakhir telah konsisten berada pada status "Maju" dan menunjukkan capaian pembangunan desa yang lebih matang. Sementara itu, nilai IDM rata-rata Provinsi Bengkulu tahun 2024 mencapai 0,7176, sehingga posisi Kabupaten Kaur masih sedikit di bawah rata-rata provinsi.

Secara keseluruhan, Kabupaten Kaur telah menunjukkan progres yang positif dalam meningkatkan status IDM dan memperkuat pembangunan desa. Namun, untuk mengejar ketertinggalan dari kabupaten/kota dengan capaian IDM lebih tinggi, diperlukan langkah percepatan yang mencakup penguatan infrastruktur dasar desa, peningkatan kapasitas pemerintahan desa, serta pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Pemerintah daerah juga perlu memastikan agar intervensi pembangunan bersifat merata dan menyentuh desa-desa yang masih tertinggal, agar peningkatan status IDM dapat berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

4. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak

Akses terhadap sanitasi yang layak merupakan salah satu indikator penting dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan di sektor kesehatan dan lingkungan. Sanitasi layak mencakup fasilitas buang air besar yang higienis, aman, dan tidak mencemari lingkungan, serta dikelola secara berkelanjutan. Di Kabupaten Kaur, peningkatan cakupan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi bagian integral dari agenda pembangunan daerah, mengingat masih adanya kesenjangan akses antar wilayah dan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029, indikator ini menjadi fokus penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan risiko penyakit berbasis lingkungan, dan pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel II-55. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020–2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Selatan	72,02	74,73	84,09	83,81	84,42
Rejang Lebong	70,02	71,5	70,3	64,41	71,81
Bengkulu Utara	79,23	83,37	83,43	82,44	85,53
Kaur	78,21	81,23	82,14	83,4	84,63
Seluma	76,96	80,84	81,66	81,77	85,75
Mukomuko	81,04	86,78	79,12	90,84	88,61
Lebong	66,8	51,55	59,12	65,23	59,49

Kepahiang	65,95	66,89	68,54	70,55	72,55
Bengkulu Tengah	85,44	74,05	75,45	78,9	81,37
Kota Bengkulu	95,71	97,49	94,99	93,94	96,15
Provinsi Bengkulu	78,1	79,81	79,58	80,28	83,01

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Kabupaten Kaur menunjukkan tren positif dan stabil dalam peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak selama periode 2020–2024. Dimulai dari capaian 78,21% pada tahun 2020, angka ini meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 84,63% pada tahun 2024. Kinerja ini menjadikan Kabupaten Kaur salah satu daerah dengan capaian sanitasi layak tertinggi di Provinsi Bengkulu, dan berada di atas rata-rata provinsi yang pada tahun 2024 mencapai 83,01%.

Konsistensi peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur sanitasi dasar dan mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Meski demikian, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan, terutama dalam menjangkau wilayah terpencil dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang mungkin belum sepenuhnya menikmati layanan sanitasi yang layak dan aman. Ke depan, Kabupaten Kaur perlu mempertahankan momentum ini dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor, pengawasan kualitas layanan, serta edukasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan berkelanjutan.

G. Stabilitas Ekonomi Makro

1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kaur selama periode 2020–2024 menunjukkan kontribusi yang sangat kecil terhadap total output ekonomi daerah. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun dasar 2010, rasio ini tercatat sebesar 0,32% pada tahun 2020, dengan pendapatan pajak daerah sebesar Rp7,24 miliar dari total PDRB Rp2,26 triliun. Pada tahun 2021, rasio ini sedikit meningkat menjadi 0,33%, dengan pajak daerah mencapai Rp7,8 miliar dan PDRB sebesar Rp2,33 triliun. Tren

ini berlanjut di tahun 2022 dengan rasio sekitar 0,34%, di mana penerimaan pajak mencapai Rp8,22 miliar dari total PDRB Rp2,42 triliun. Walaupun terjadi peningkatan nilai absolut penerimaan pajak, laju pertumbuhan pajak daerah masih jauh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Pada tahun 2023, meskipun PDRB meningkat menjadi Rp2,5 triliun, pendapatan pajak daerah justru sedikit menurun menjadi Rp8,1 miliar, yang menyebabkan rasio tetap berada di kisaran 0,32%. Namun pada tahun 2024, rasio ini mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,34%, seiring dengan kenaikan pendapatan pajak daerah menjadi Rp8,89 miliar, sementara PDRB mencapai Rp2,6 triliun. Secara umum, rasio ini memperlihatkan bahwa potensi kontribusi sektor pajak terhadap struktur ekonomi daerah masih belum tergali secara optimal. Hal ini terjadi meskipun sektor-sektor ekonomi strategis seperti perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makanan-minuman terus tumbuh secara konsisten dari tahun ke tahun.

Kecilnya rasio pajak daerah terhadap PDRB menjadi sinyal penting bagi Pemerintah Kabupaten Kaur untuk memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui optimalisasi penerimaan pajak. Upaya ini dapat dilakukan melalui penguatan basis data perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan dan kepatuhan pajak, serta digitalisasi sistem pemungutan. Di sisi lain, penting pula untuk mengembangkan inovasi kebijakan yang mampu menangkap potensi ekonomi lokal, termasuk dari sektor informal dan kegiatan ekonomi kreatif yang selama ini belum tergarap maksimal. Dengan demikian, peningkatan rasio pajak terhadap PDRB tidak hanya menjadi indikator kinerja fiskal, tetapi juga mencerminkan kapasitas daerah dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya ekonomi secara berkelanjutan dan mandiri.

2. Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi merupakan indikator penting yang menggambarkan persentase kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode waktu tertentu. Inflasi diukur melalui Indeks Harga Konsumen (IHK) dan mencerminkan tekanan harga yang langsung dirasakan oleh rumah tangga. Faktor penyebab inflasi bisa berasal dari sisi permintaan, sisi penawaran, maupun kendala struktural seperti distribusi barang dan efisiensi logistik. Jika inflasi tidak terkendali, hal ini dapat menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan biaya hidup, dan berdampak lebih besar terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, kestabilan inflasi merupakan salah satu fondasi utama dalam menciptakan stabilitas ekonomi daerah, termasuk di Kabupaten Kaur.

Saat ini, Kabupaten Kaur belum memiliki data inflasi spesifik yang dihitung oleh BPS karena belum ditetapkan sebagai kota IHK. Oleh karena itu, dalam dokumen perencanaan digunakan data inflasi Kota Bengkulu sebagai pendekatan (proxy), mengingat tingginya keterkaitan ekonomi, arus barang, serta pola konsumsi antara Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu. Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Kaur 2025–2029, inflasi memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aspek strategis pembangunan, seperti daya beli masyarakat, tingkat kemiskinan, dan kesejahteraan. Inflasi juga berdampak terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah, serta efisiensi dalam penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan belanja daerah. Oleh sebab itu, pengendalian inflasi perlu menjadi bagian dari kebijakan pembangunan melalui penguatan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), pengembangan pusat produksi pangan lokal, dan perbaikan sistem distribusi barang dan jasa demi menjaga kestabilan harga dan mendukung kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaur.

Tabel II-56. Inflasi Kota Bengkulu tahun 2018-2023

Bulan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	0,99	0,88	0,14	0,39	0,54	0,62
Februari	-0,3	-0,28	0,09	0,14	-0,1	0,04
Maret	0,37	-0,23	-0,02	0,23	0,74	0,25
April	0,26	0,54	-0,35	0,1	1,45	0,28
Mei	0,32	1,11	0,41	0,11	0,53	0,17
Juni	0,81	0,76	0,04	0,31	0,6	0,21
Juli	0,87	0,56	-0,23	-0,12	0,91	0,49
Agustus	-1,8	0,86	-0,22	0,16	-0,24	-0,07
September	0,59	0,64	0,08	0,17	1,22	0,23
Oktober	-0,74	0,56	0,02	-0,02	-0,14	0,28
November	0,2	0,27	0,35	0,52	0,05	0,3
Desember	0,79	0,59	0,14	0,39	0,23	0,24
Tahunan	**2,35**	**2,91**	**0,89**	**2,42**	**5,92**	**3,09**

Selama periode 2018 hingga 2023, tingkat inflasi Kota Bengkulu mengalami fluktuasi tahunan dengan pola yang mencerminkan dinamika ekonomi regional dan nasional. Inflasi tahunan terendah tercatat pada tahun 2020 sebesar 0,89%, dipengaruhi oleh penurunan aktivitas ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Sebaliknya, puncak inflasi terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,92%, sejalan dengan tren inflasi global akibat krisis energi dan terganggunya rantai pasok pangan. Rata-rata inflasi tahunan dalam enam tahun terakhir berada pada kisaran 2,76%, yang menunjukkan kondisi harga yang relatif stabil dan terkendali.

Meskipun Kabupaten Kaur belum memiliki data inflasi tersendiri karena bukan wilayah penghitungan IHK oleh BPS, kondisi inflasi di Kota Bengkulu dapat digunakan sebagai pendekatan (proxy) yang relevan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Kabupaten Kaur secara spasial dan ekonomi sangat bergantung pada Kota Bengkulu, baik sebagai pusat distribusi barang maupun sebagai pasar konsumsi utama. Arus barang kebutuhan pokok, jasa, serta aktivitas perdagangan yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen dari Kaur sebagian besar melalui Kota Bengkulu. Oleh karena itu, dinamika inflasi di Kota Bengkulu mencerminkan tekanan harga yang juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Kaur. Dalam konteks penyusunan RPJMD 2025–2029, pemahaman

terhadap tren inflasi ini menjadi penting sebagai dasar perencanaan pertumbuhan ekonomi riil, perumusan strategi pengendalian harga, serta perlindungan daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan dan berpenghasilan rendah.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan reformasi hukum telah berjalan secara efektif di tingkat nasional maupun daerah. Indeks ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menciptakan kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Penguatan reformasi hukum di daerah sangat diperlukan untuk mendorong iklim investasi yang sehat, memperkuat pelayanan publik berbasis kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hak-hak masyarakat secara menyeluruh.

Dalam konteks Kabupaten Kaur, pelaksanaan reformasi hukum menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Reformasi ini mencakup pembenahan regulasi, penyederhanaan prosedur hukum, peningkatan kualitas pelayanan hukum, serta pemberantasan praktik hukum yang diskriminatif atau koruptif. Oleh karena itu, pencapaian Indeks Reformasi Hukum di daerah menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan transformasi tata kelola hukum sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tabel II-57. Indeks Reformasi Hukum 2024

Kabupaten/Kota	Nilai	Kategori
Muko-Muko	98,58	AA / Istimewa
Kota Bengkulu	96,18	AA / Istimewa
Provinsi Bengkulu	87,66	A / Sangat Baik
Bengkulu Selatan	87,32	A / Sangat Baik

Kabupaten/Kota	Nilai	Kategori
Seluma	86,78	A / Sangat Baik
Kepahiang	77,3	BB / Baik
Rejang Lebong	76,86	BB / Baik
Bengkulu Utara	76,66	BB / Baik
Bengkulu Tengah	67,9	B / Cukup Baik
Kaur	66,58	B / Cukup Baik
Lebong	66,24	B / Cukup Baik

Sumber: https://bengkulu.kemenkum.go.id/

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan tata kelola pemerintahan digital pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Indeks ini mencakup berbagai aspek mulai dari kebijakan internal, manajemen layanan, infrastruktur digital, hingga kualitas layanan publik berbasis elektronik. Tujuan utama dari pengukuran ini adalah untuk menilai sejauh mana pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip digitalisasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam konteks pembangunan daerah, Indeks SPBE memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan publik, kecepatan pengambilan keputusan, serta efisiensi penggunaan sumber daya daerah. Daerah yang memiliki indeks SPBE tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah berhasil mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat mempercepat layanan, memperluas akses masyarakat terhadap informasi, dan mendorong keterlibatan publik dalam proses pemerintahan. Dengan kata lain, implementasi SPBE yang baik dapat memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pelayanan yang lebih cepat dan transparan.

Lebih jauh, penerapan SPBE yang optimal juga dapat membantu pemerintah daerah seperti Kabupaten Kaur untuk mengatasi tantangan-tantangan

pembangunan yang bersifat geografis maupun demografis, misalnya dengan menyediakan platform pelayanan publik daring di wilayah terpencil. Selain itu, SPBE juga menjadi salah satu indikator dalam transformasi digital nasional, sehingga pencapaiannya akan berkontribusi pada integrasi dan harmonisasi pembangunan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, peningkatan nilai SPBE harus menjadi prioritas strategis dalam RPJMD Kabupaten Kaur 2025–2029, seiring dengan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis data, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel II-58. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2021-2024

Nama Instansi	2021		2022		2023		2024	
	Indeks	Predikat	Indeks	Predikat	Indeks	Predikat	Indeks	Predikat
Provinsi Bengkulu	2,79	Baik	3.14	Baik	3,12	Baik	3,92	Sangat Baik
Bengkulu Utara	1,44	Kurang	2.20	Cukup	2,9	Baik	3,28	Baik
Bengkulu Selatan	1,96	Cukup	2.34	Cukup	2,45	Cukup	2,87	Baik
Rejang Lebong	1,84	Cukup	2.80	Baik	3,23	Baik	3,24	Baik
Kaur			1.27	Kurang	2,24	Cukup	2,42	Cukup
Seluma	1,41	Kurang	2.57	Cukup	2,54	Cukup	2,26	Cukup
Mukomuko	1,74	Kurang	2.06	Cukup	2,07	Cukup	2,07	Cukup
Kepahiang	1,94	Cukup	2.13	Cukup	2,28	Cukup	2,47	Cukup
Lebong	1,55	Kurang	1.55	Kurang	2,93	Baik	3,38	Baik
Bengkulu Tengah	1,29	Kurang	2.37	Cukup	2,55	Cukup	2,84	Baik
Kota Bengkulu	1,68	Kurang	2.22	Cukup	2,61	Baik	2,63	Baik

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2025

Berdasarkan data Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2021 hingga 2024, Kabupaten Kaur memperlihatkan tren peningkatan yang positif, meskipun masih berada pada kategori "Cukup". Tahun 2021 belum tercatat nilai SPBE untuk Kabupaten Kaur, namun pada tahun 2022 skor awal sebesar 1,27 mengindikasikan posisi awal yang cukup rendah dengan predikat "Kurang". Dua tahun berikutnya menunjukkan adanya perbaikan signifikan, dengan skor meningkat menjadi 2,24 pada tahun 2023 dan 2,42 pada tahun 2024. Meskipun belum menembus kategori "Baik", lonjakan ini mencerminkan upaya konkret Pemerintah Kabupaten Kaur dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan membangun fondasi sistem pemerintahan yang lebih modern.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, capaian Kabupaten Kaur masih memerlukan perhatian lebih. Kabupaten seperti Rejang Lebong, Bengkulu Utara, dan Lebong pada tahun 2024 telah menembus kategori "Baik", bahkan mendekati skor maksimal untuk predikat tersebut. Sementara itu, Provinsi Bengkulu sebagai induk wilayah berhasil mencapai kategori "Sangat Baik" dengan nilai 3,92. Ini menunjukkan bahwa beberapa daerah di provinsi ini telah lebih siap dan adaptif dalam implementasi sistem digitalisasi pemerintahan. Meski begitu, laju pertumbuhan indeks di Kaur tetap patut diapresiasi karena mencerminkan komitmen awal dalam membangun transformasi digital yang sebelumnya belum berjalan optimal.

Tantangan utama yang masih dihadapi Kabupaten Kaur dalam penguatan SPBE meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, baik dalam hal jaringan internet maupun perangkat keras yang mendukung sistem digital di kantor-kantor pemerintahan. Selain itu, kualitas dan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang memahami sistem elektronik masih belum merata di seluruh unit kerja perangkat daerah, yang menyebabkan penerapan SPBE belum optimal. Masih lemahnya integrasi antar aplikasi dan sistem layanan juga menyebabkan birokrasi digital berjalan lambat, serta kurangnya inovasi layanan publik berbasis digital yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Indeks Pelayanan Publik

Sistem zonasi penilaian kepatuhan pelayanan publik yang dikembangkan oleh Ombudsman Republik Indonesia saat ini telah mengalami penyempurnaan dengan pendekatan yang lebih rinci, menggunakan skema klasifikasi berdasarkan interval nilai dan kategori kualitas. Pendekatan ini tetap menggunakan prinsip "traffic light" atau lampu lalu lintas, namun dengan rentang nilai dan kriteria yang lebih spesifik. Zona hijau kini terbagi menjadi dua kategori: Kategori A (nilai 88,00–100) yang mencerminkan Kualitas Tertinggi, dan Kategori B (nilai 78,00–87,99)

yang menunjukkan Kualitas Tinggi. Kedua kategori ini menunjukkan bahwa penyelenggara pelayanan publik telah menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap standar yang ditetapkan. Zona kuning, dengan Kategori C (nilai 54,00–77,99), menandakan Kualitas Sedang yang masih memerlukan pembenahan. Sementara itu, Zona Merah terbagi ke dalam Kategori D (nilai 32,00–53,99) sebagai Kualitas Rendah, dan Kategori E (nilai 0–31,99) sebagai Kualitas Terendah, yang menunjukkan urgensi tindakan korektif menyeluruh.

Tujuan utama dari penilaian ini tetap selaras, yaitu untuk mengukur sejauh mana pemerintah dan penyelenggara pelayanan publik mampu memenuhi standar layanan publik yang telah ditetapkan, sekaligus mendorong terciptanya layanan yang berkualitas, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Bagi pemerintah daerah seperti Kabupaten Kaur, sistem zonasi terbaru ini menjadi alat ukur strategis dalam mengevaluasi kinerja dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan bertahap. Hasil dari penilaian ini bukan hanya menjadi dasar perbaikan sistem pelayanan publik, tetapi juga digunakan sebagai bahan pemberian penghargaan kepada daerah yang berhasil mencapai Zona Hijau, serta menjadi instrumen kontrol sosial yang penting bagi masyarakat. Dengan demikian, sistem ini memperkuat komitmen terhadap reformasi birokrasi, mendorong pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Tabel II-59. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten/Kota di Provinsi Bangkulu Tahun 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Kaur	57,99	89,01	96,14	96,14
Bengkulu Selatan	72,21	84,48	95,57	95,27
Rejang Lebong	65,99	83,05	93,76	93,07
Lebong	97,65	84,23	93,07	93,76
Kepahiang	88,74	85,97	92,72	92,72
Bengkulu Tengah	51,05	64,89	91,33	91,33
Kota Bengkulu	89,05	83,21	90,47	90,74
Seluma	62,71	85,51	89,1	89,61

	2021	2022	2023	2024
Bengkulu Utara	83,51	78,56	88,34	88,34
Mukomuko	54,79	60,35	90,02	90,64
Provinsi Bengkulu	91,91	80,2	87,05	88,3

Sumber : Ombudsman RI Provinsi Bengkulu, 2025

Berdasarkan data penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI di Provinsi Bengkulu selama periode 2021 hingga 2024, terlihat tren peningkatan yang signifikan pada sebagian besar kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Kaur. Pada tahun 2021, Kabupaten Kaur memperoleh nilai 57,99, yang menempatkannya dalam Zona Kuning (kategori C: kualitas sedang). Namun, capaian ini meningkat tajam di tahun 2022 dengan nilai 89,01, naik ke Zona Hijau (kategori B: kualitas tinggi), dan kemudian mempertahankan tren positifnya dengan capaian 96,14 pada tahun 2023 dan 2024, masuk dalam Kategori A (Kualitas Tertinggi). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kaur telah melakukan lompatan besar dalam meningkatkan kualitas dan kepatuhan pelayanan publiknya.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, capaian Kabupaten Kaur pada 2023–2024 bahkan menjadi salah satu yang tertinggi. Sebagai contoh, kabupaten lain seperti Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, dan Lebong juga menunjukkan nilai tinggi di atas 90, namun Kaur berhasil mempertahankan skor stabil tertinggi selama dua tahun berturut-turut. Pencapaian ini mengindikasikan keberhasilan reformasi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik dari sisi kelembagaan, SDM aparatur, maupun inovasi pelayanan. Capaian tinggi ini juga mencerminkan semakin meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pelayanan pada kebutuhan masyarakat.

Tantangan ke depan bagi Kabupaten Kaur adalah mempertahankan posisi dalam Zona Hijau kategori A, sekaligus memperluas praktik-praktik pelayanan terbaik ke seluruh unit pelayanan publik di tingkat kecamatan dan desa.

Pemerintah daerah perlu terus mendorong penguatan sistem manajemen pelayanan, digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan. Strategi tersebut penting untuk memastikan bahwa capaian tinggi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar dirasakan dalam peningkatan kualitas layanan publik di lapangan secara merata dan berkelanjutan.

4. Indeks Integritas Nasional

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kaur 2025–2029, aspek integritas tata kelola pemerintahan menjadi komponen penting yang harus mendapat perhatian serius. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur dan memperkuat dimensi ini adalah Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SPI mengukur persepsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan—baik dari kalangan aparatur pemerintah, masyarakat pengguna layanan, maupun kalangan ahli—terhadap praktik integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Skor SPI yang berada pada skala 0 hingga 100 memberikan gambaran seberapa besar penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di suatu daerah.

Mengintegrasikan hasil SPI ke dalam RPJMD Kabupaten Kaur dapat diwujudkan dengan menjadikannya sebagai indikator kinerja utama dalam agenda reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola. Pendekatan ini tidak hanya menekankan capaian pembangunan dari sisi infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga mendorong perbaikan sistem pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan hasil SPI untuk mengidentifikasi titik-titik rawan korupsi dan merancang kebijakan yang lebih terarah dan berbasis bukti. Strategi ini mencakup penguatan kapasitas Inspektorat Daerah dalam pengawasan dan audit, peningkatan transparansi melalui digitalisasi

data anggaran dan kegiatan, serta pengembangan kapasitas ASN dalam hal integritas dan etika kerja.

Selain penguatan internal, partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui mekanisme pelibatan publik dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pemerintah Kabupaten Kaur perlu menyediakan saluran pelaporan dan pengaduan publik yang mudah diakses, cepat ditanggapi, dan aman digunakan oleh masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, SPI tidak hanya menjadi alat ukur integritas, tetapi juga sarana untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Integrasi SPI dalam RPJMD Kabupaten Kaur pada akhirnya merupakan strategi penting untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif, adaptif, dan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik.

Tabel II-60. Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2024

Nama Instansi	2021	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	63,04	62,77	69,24	71,76
Kabupaten Bengkulu Selatan	63,5	63,45	70,6	72,12
Kabupaten Rejang Lebong	72,64	65,86	71,65	74,62
Kabupaten Bengkulu Utara	72,58	72,62	74,21	73,15
Kabupaten Kaur	67,9	68,98	71,54	70,72
Kabupaten Seluma	71,69	63,55	70,26	63,07
Kabupaten Mukomuko	64,7	72,74	73,77	73,02
Kabupaten Lebong	75,21	71,36	70,94	69,66
Kabupaten Kepahiang	75,74	74,66	73,7	74,44
Kabupaten Bengkulu Tengah	76,15	65,82	72,3	66,64
Kota Bengkulu	72,37	71,41	72,51	70,67

Berdasarkan data Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu tahun 2021 hingga 2024, terlihat bahwa Kabupaten Kaur mengalami fluktuasi skor yang cukup dinamis. Pada tahun 2021, skor SPI Kabupaten Kaur tercatat sebesar 67,9 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 68,98. Kenaikan ini kemudian berlanjut dengan pencapaian tertinggi

pada tahun 2023 yaitu sebesar 71,54, namun sedikit menurun kembali menjadi 70,72 pada tahun 2024. Secara umum, tren ini menunjukkan adanya peningkatan integritas dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kaur, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai skor ideal di atas 75 atau masuk dalam kategori "zona hijau" dengan kualitas tertinggi.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, posisi Kabupaten Kaur berada di level menengah. Beberapa daerah seperti Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong mencatat skor lebih tinggi dari Kaur pada tahun 2024, yaitu masing-masing sebesar 74,44 dan 74,62, menunjukkan integritas tata kelola yang lebih baik. Sementara itu, beberapa daerah lain seperti Kabupaten Seluma dan Bengkulu Tengah justru mencatat skor yang lebih rendah dari Kaur, dengan nilai masing-masing 63,07 dan 66,64 di tahun yang sama. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun Kaur bukan yang terdepan dalam hal integritas birokrasi, namun berada dalam kelompok daerah yang menunjukkan tren positif dan relatif stabil dalam perbaikan sistem pengelolaan pemerintahan yang bersih.

Analisis terhadap fluktuasi data ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kaur telah melakukan sejumlah langkah perbaikan, namun perlu strategi yang lebih sistematis dan terukur untuk mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Peluang utama yang bisa dimanfaatkan adalah memperkuat sistem pengawasan internal dan keterlibatan publik dalam pengawasan program. Kaur memiliki potensi memperbaiki SPI melalui peningkatan transparansi, penguatan sistem pelaporan dan pengaduan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk membuka akses data publik. Tantangan terbesar bagi Kaur adalah memastikan bahwa komitmen terhadap integritas tidak hanya berhenti di level kebijakan, tetapi juga diimplementasikan secara menyeluruh hingga ke tingkat operasional.

5. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator strategis yang digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana efektivitas tata kelola pemerintahan dijalankan secara bersih, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Komponen utama dalam penilaian indeks ini mencakup manajemen perubahan, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan internal, serta efektivitas sumber daya manusia aparatur.

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029, penguatan reformasi birokrasi menjadi salah satu prioritas penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan skor Indeks Reformasi Birokrasi tidak hanya menjadi refleksi kinerja kelembagaan, tetapi juga menjadi prasyarat utama dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan, efisiensi anggaran, serta pencapaian target-target pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, indikator ini perlu secara konsisten dipantau dan diperkuat sebagai bagian dari kerangka transformasi tata kelola pemerintahan daerah.

Tabel II-61. Indeks Birokrasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024

	2022	2023	2024
Provinsi Bengkulu	B	B	BB
Bengkulu Utara	CC	B	BB
Bengkulu Selatan	C	B	BB
Rejang Lebong	CC	BB	BB
Kaur	C	C	CC
Seluma	C	B	BB
Mukomuko	CC	CC	BB
Kepahiang	CC	CC	BB
Lebong	CC	CC	BB

Bengkulu Tengah	CC	CC	BB
Kota Bengkulu	CC	CC	BB

Sumber: https://1data.menpan.go.id/#

Selama periode 2022–2024, Kabupaten Kaur menunjukkan perbaikan bertahap dalam kinerja birokrasinya, meskipun capaian masih berada pada kategori bawah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2022 dan 2023, Kabupaten Kaur berada di kategori "C", yang mencerminkan kualitas birokrasi yang masih belum optimal. Namun pada tahun 2024, terjadi peningkatan ke kategori "CC", menandakan adanya kemajuan dalam aspek-aspek birokrasi seperti tata kelola pemerintahan, efisiensi pelayanan publik, serta transparansi dan akuntabilitas.

Meskipun peningkatan ini patut diapresiasi, Kabupaten Kaur masih menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Bengkulu yang belum mencapai kategori "B" atau "BB" pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Kabupaten Kaur masih memerlukan percepatan dan penguatan, terutama dalam hal peningkatan kompetensi aparatur sipil negara, digitalisasi layanan publik, dan efektivitas sistem pengambilan keputusan. Dengan komitmen dan intervensi yang lebih strategis, Kaur memiliki peluang untuk mempercepat transformasi tata kelola pemerintahannya menuju birokrasi yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

1. Penegakan Perda

Dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur telah menetapkan sejumlah peraturan daerah (Perda) yang disertai dengan ketentuan sanksi sebagai dasar penegakan hukum di wilayahnya. Peraturan ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan, khususnya dalam menjaga

keamanan lingkungan, keteraturan sosial, serta perlindungan masyarakat. Tabel berikut menyajikan data keseluruhan Perda/Perkada yang memuat ketentuan sanksi dan telah ditegakkan oleh pemerintah daerah, yang mencakup pengaturan terkait pemeliharaan hewan ternak serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Tabel II-62 Jumlah Keseluruhan Perda/Perkada Yang Memuat Sanksi Yang Yang Di Tegakan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024

NO	Nama Perda / Perkada	Nomor	Jenis Penegakan Perda
1.	Perda tentang pemeliharaan hewan ternak	Nomor 02 Tahun 2023	Penyelenggaraan ketertiban umum,ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat
2.	Perda tentang ketentraman dan ketertiban umum	Nomor 03 Tahun 2020	Penyelenggaraan ketertiban umum,ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat

Sumber: Satu Data Kabupaten Kaur/ Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur dan Bagian Hukum

2. Persentase Capaian Aksi HAM

Dalam upaya mengukur komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), Kementerian Hukum dan HAM melakukan penilaian capaian pelaksanaan Aksi HAM di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Penilaian ini mencakup keberpihakan terhadap kelompok rentan, penyediaan layanan publik berbasis HAM, serta pelaporan aksi HAM oleh pemerintah daerah. Tabel berikut menyajikan capaian rata-rata Aksi HAM Tahun 2024, termasuk capaian Kabupaten Kaur yang masih berada di bawah rata-rata provinsi, sehingga menunjukkan perlunya peningkatan komitmen dan intervensi yang lebih kuat dalam pelaksanaan prinsip-prinsip HAM di tingkat daerah.

Tabel II-63 Tabel Capaian Rata-rata Aksi HAM Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bengkulu 2024

No	Pemerintah Daerah	Capaian 2021	Capaian 2023	Capaian 2024
1	Provinsi Bengkulu	66,19	76,27	80.7
2	Kab. Bengkulu Selatan	76,36	79,0	83.6
3	Kab. Rejang Lebong	78,41	88,6	83
4	Kab. Bengkulu Utara	50.56	76,7	76.7

No	Pemerintah Daerah	Capaian 2021	Capaian 2023	Capaian 2024
5	Kab. Kaur	42,64	54,0	65.3
6	Kab. Seluma	57,82	61,7	84.7
7	Kab. Muko-Muko	87,47	61,7	66.1
8	Kab. Lebong	30,43	81,9	74.2
9	Kab. Kepahiang	54,72	61,0	71.9
10	Kab. Bengkulu Tengah	66,74	61,7	68.6
11	Kota Bengkulu	70,39	86,4	83.3

Sumber: LKJIP Kementerian Hukum Bengkulu Tahun 2021-2024

Capaian pelaksanaan Aksi HAM di Kabupaten Kaur pada tahun 2024 menunjukkan bahwa upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di daerah ini masih memerlukan penguatan. Meskipun terdapat komitmen awal melalui penyusunan dan pelaksanaan sejumlah program, implementasinya belum sepenuhnya optimal jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu. Salah satu aspek yang masih lemah adalah penyediaan layanan publik yang responsif terhadap prinsip-prinsip HAM, yang menjadi indikator penting dalam penilaian capaian.

Selain itu, masih dibutuhkan peningkatan dalam pelaporan, koordinasi lintas perangkat daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung aksi-aksi HAM. Dengan memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas aparatur, dan memperluas integrasi nilai-nilai HAM dalam kebijakan dan pelayanan publik. Berikut ini data kasus pelanggaran HAM (Kekerasan terhadap perempuan dan anak) di Kabupaten Kaur Tahun 2022-2023:

Tabel II-64 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Kaur Tahun 2022-2023

No.	Jenis Kasus	2022	2023
1.	KDRT	4	8
2.	Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur	1	3
3.	Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur	8	9
4.	Pelecehan Seksual Fisik atau Perbuatan Cabul atau Percobaan Pemerkosaan	-	3
	Total	13	23

Sumber: Satu Data Kabupaten Kaur/ Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, 2025

3. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi di suatu wilayah berdasarkan tiga aspek utama, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi. Kebebasan sipil mencakup hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat, dan memperoleh informasi; hak-hak politik mencerminkan sejauh mana warga dapat berpartisipasi dalam proses pemilu dan pengambilan keputusan politik; sedangkan aspek lembaga demokrasi mengukur efektivitas institusi-institusi pemerintahan seperti DPRD, partai politik, dan lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi demokratis. IDI dinyatakan dalam skala 0 sampai 100, di mana semakin tinggi angkanya menunjukkan semakin kuat kualitas demokrasi di wilayah tersebut, dengan klasifikasi kategori baik (di atas 80), sedang (60–80), dan buruk (di bawah 60).

Dalam konteks pembangunan daerah, khususnya dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kaur 2025–2029, IDI menjadi salah satu tolok ukur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Demokrasi yang sehat merupakan prasyarat untuk menciptakan kebijakan publik yang responsif dan inklusif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. IDI yang tinggi juga mencerminkan adanya stabilitas politik daerah yang baik, yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan investasi, penguatan layanan publik, serta pengendalian korupsi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kaur perlu terus mendorong penguatan kelembagaan demokrasi melalui peningkatan kapasitas legislatif dan eksekutif, menjamin kebebasan berpendapat masyarakat, serta memperluas ruang partisipasi publik dalam setiap proses perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Tabel II-65. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bengkulu tahun 2021-2023

2023	2022	2021
74,26	73,23	72,73

Berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bengkulu tahun 2021 hingga 2023, terlihat adanya tren peningkatan kualitas demokrasi secara bertahap. Pada tahun 2021, IDI Bengkulu tercatat sebesar 72,73, kemudian meningkat menjadi 73,23 pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 74,26 pada tahun 2023. Meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahun, tren ini menunjukkan arah positif dalam penguatan demokrasi di wilayah Bengkulu. Dengan angka IDI yang berada dalam rentang 60–80, Provinsi Bengkulu termasuk dalam kategori sedang, namun secara perlahan mendekati kategori baik (nilai di atas 80).

Peningkatan IDI ini mencerminkan perbaikan dalam beberapa aspek demokrasi, seperti semakin terbukanya ruang partisipasi publik, meningkatnya kebebasan sipil, serta kinerja lembaga-lembaga demokrasi yang mulai menunjukkan efektivitas yang lebih baik. Bagi Kabupaten Kaur, sebagai bagian dari Provinsi Bengkulu, tren ini menjadi landasan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis dan responsif. Pemerintah daerah perlu terus menjaga dan meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil warga. Upaya ini akan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih inklusif dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan di tingkat lokal.

4. Ketenteraman dan Ketertiban

Selama tahun 2024, upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kaur menunjukkan kinerja yang responsif dan terukur. Berbagai bentuk pengaduan masyarakat, terutama yang terkait dengan aksi demonstrasi dan isu ketidaktertiban lingkungan, ditangani secara sigap oleh satuan penegak ketertiban daerah. Dalam seluruh kasus yang tercatat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) telah melakukan langkah-langkah pengamanan dan penanganan

sesuai dengan prosedur, sehingga seluruh pengaduan dapat dikategorikan sebagai "terlayani".

Merujuk dari satu data Kabupaten Kaur, Beberapa isu yang mencuat antara lain demonstrasi damai yang menuntut PT. DSC keluar dari Kabupaten Kaur, aksi unjuk rasa atas dugaan korupsi dana hibah KPU Kaur tahun 2020 dan pengadaan Alsintan, serta pemortalan jalan plasma oleh PT. CBS. Satpol-PP juga turut mengamankan aksi yang digelar oleh Forum Aliansi Selamatkan Bengkulu Selatan (FASBS) dan Forum Peduli Wilayah Kedurang (FPWK) di area perkebunan milik PT. Dinamika Selaras Jaya, dengan dukungan pengamanan tambahan dari Polri dan TNI. Selain itu, pengamanan berjalan lancar dalam aksi damai terhadap pelayanan PLN ULP Bintuhan. Di luar demonstrasi, pengaduan mengenai keberadaan hewan ternak liar di Desa Linau juga mendapat tindak lanjut dengan pelaksanaan penertiban oleh Satpol-PP.

Kondisi ini mencerminkan bahwa koordinasi lintas aparat keamanan telah berjalan efektif dalam menjaga situasi tetap kondusif, serta menunjukkan adanya respons pemerintah daerah yang sigap dalam menangani aspirasi masyarakat. Penguatan sistem deteksi dini, pendekatan persuasif kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas aparat Satpol-PP akan menjadi kunci untuk mempertahankan stabilitas ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Kaur secara berkelanjutan.

C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). IDSD untuk di level provinsi terdapat 62 indikator dan di level kabupaten/kota, ada 48 indikator dari 12 pilar. Keduabelas pilar tersebut adalah:

a. Pilar 1: Institusi

Pilar Institusi mengukur kekuatan kondisi institusi di daerah, dengan indikator yaitu keamanan, modal sosial, check and balances, transparansi, hak atas kepemilikan, dan orientasi masa depan Pemerintah.

b. Pilar 2: Infrastruktur

Pilar Infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas infrastruktur di daerah, dengan indikator, yaitu, infrastruktur transportasi, infrastruktur utilitas kelistrikan, dan infrastruktur air minum.

c. Pilar 3: Adopsi TIK

Pilar ini mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah, dengan indikator, yaitu pengguna telepon seluler, jangkauan jaringan 4G, pelanggan internet *fixed-broadband*, dan pengguna internet.

d. Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro

Pilar ini mengukur kondisi keuangan daerah, dengan indikator inflasi, kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks ketahanan pangan, nilai investasi, dan PDRB per kapita.

e. Pilar 5: Kesehatan

Pilar Kesehatan mengukur "harapan hidup" yang disesuaikan dengan kesehatan di daerah melalui satu indikator, yaitu angka harapan hidup.

f. Pilar 6: Keterampilan

Pilar Keterampilan mengukur kuantitas dan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di daerah. Indikatornya adalah tenaga kerja saat ini dan tenaga kerja masa depan.

g. Pilar 7: Pasar Produk

Pilar Pasar Produk mengukur keterbukaan pasar produk di daerah melalui dimensi persaingan domestik, dengan indikator tingkat dominasi pasar, dan persaingan sektor jasa.

h. Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja

Pilar Pasar Tenaga Kerja menggambarkan fleksibilitas dan pemanfaatan tenaga kerja di daerah, dengan indikator kebijakan pasar tenaga kerja aktif, upah pekerja, dan kesetaraan upah perempuan dan laki-laki.

i. Pilar 9: Sistem Keuangan

Pilar ini mengalokasikan sumber daya dan investasi yang dapat dimanfaatkan suatu daerah, dengan indikator kredit usaha rakyat per penduduk, pembiayaan lembaga ventura kepada umkm/start-up, dan rasio kredit bermasalah terhadap total pinjaman.

j. Pilar 10: Ukuran Pasar

Pilar Ukuran Pasar menggambarkan ukuran pasar yang dapat menguatkan struktur industri di daerah melalui dua indikator, yaitu PDRB, dan Rasio Nilai Impor terhadap PDRB.

k. Pilar 11: Dinamisme Bisnis

Pilar ini menggambarkan kapasitas sektor swasta untuk menghasilkan dan mengadopsi teknologi baru dan cara baru di daerah, dengan indikator biaya untuk memulai usaha, dan waktu untuk memulai usaha.

l. Pilar 12: Kapabilitas Inovasi

Pilar Kapabilitas Inovasi menggambarkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal yang mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, dan konfrontasi lintas visi dan sudut

pandang yang berbeda, serta kapasitas untuk mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indikatornya adalah keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang.

Tabel II-66. Skor IDSD Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2022

Wilayah	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	SKOR IDSD
Nasional	4,14	2,91	3,57	3,05	3,76	3,73	2,68	3,73	2,66	3,14	5	2,62	3,26
Prov. Bengkulu	3,92	2,11	4,17	2,64	3,67	3,18	3,18	4,2	4,23	1,04	5	2,35	3,29
Bengkulu Selatan	3,84	1,35	2,87	2,36	3,69	3,72	3,53	3,6	4,21	0,25	5	0,76	2,94
Rejang Lebong	3,94	2,18	2,77	2,42	3,77	3,22	2,94	4,06	2,04	0,46	5	0,82	2,94
Bengkulu Utara	4,16	2,77	2,55	2,56	3,66	3,27	2,35	3,86	3,36	0,55	5	0,85	2,94
Kaur	3,8	1,83	2,09	2,36	3,6	2,94	2,4	2,85	2,1	0,94	5	0,95	2,91
Seluma	3,86	1,26	2,44	2,03	2,99	2,94	2,12	2,54	1,75	0,19	5	0,97	2,8
Mukomuko	3,88	2,28	2,32	2,24	3,36	3,13	2,18	2,77	2,01	0,94	5	0,76	2,9
Lebong	4,2	1,76	2,3	2,34	3,31	3,15	2,31	2,56	2,61	0,14	5	1,24	2,75
Kepahiang	4,11	1,7	2,9	2,38	3,16	2,58	2,45	2,61	1,65	0,95	5	0,45	2,65
Bengkulu Tengah	3,87	1,86	2,99	2,17	3,69	3,13	3,42	2,09	1,49	0,19	5	0,53	2,77
Kota Bengkulu	4,03	2,69	4,97	2,79	3,85	4,19	5	4,6	4,15	1,04	5	3,41	3,81

Sumber: https://brin.go.id/

Tabel II-67. Skor IDSD Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Wilayah	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	SKOR IDSD
Nasional	4,3	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,38	3,22	3,03	3,44
Prov. Bengkulu	4,26	2,67	4,26	3,43	3,73	3,24	3,1	4,5	2,96	3,96	2,52	2,28	3,47
Rata-Rata Kab/Kota	4,07	2,26	3,88	3,36	3,59	3,02	3,95	4,26	3,7	3,5	2,59	2,44	3,06
Bengkulu Selatan	4,08	2,3	4,18	3,7	3,64	3,07	3,87	4,18	3,53	3,25	2,5	2,44	3,11
Rejang Lebong	4,09	2,39	3,99	3,32	3,77	3,39	3,85	3,91	3,44	4,15	2,78	2,64	3,19
Bengkulu Utara	4,19	2,81	3,77	3,2	3,73	3,55	3,07	3,6	3,6	3,25	2,57	2,24	2,91
Kaur	3,81	2,02	3,29	3,84	3,36	3,26	2,55	4,1	3,4	3,5	2,67	2,04	2,85
Seluma	3,87	1,95	3,76	3,6	3,15	3,24	2,45	3,96	3,57	3,33	2,22	1,84	2,74
Mukomuko	4,06	1,73	3,53	3,68	3,22	3,22	2,47	3,22	2,57	3,22	2,4	2,07	2,78
Lebong	4,09	2,05	3,65	3,51	3,41	3,55	2,55	3,56	3,05	3,55	2,5	2,01	2,99
Kepahiang	4,2	2,49	4,05	3,85	3,72	3,4	2,6	4,07	3,46	3,27	2,27	2,09	3,03
Bengkulu Tengah	4,16	2	4,12	3,86	3,72	3,44	2,7	4,11	3,41	3,57	2,35	2	2,95
Kota Bengkulu	4,16	2,98	5	2,81	3,88	4,35	5	4,67	4,33	4,52	2,79	3,52	3,83

Sumber: https://brin.go.id/

Tabel II-68. Skor IDSD Nasional, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2024

Wilayah	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	SKOR IDSD
Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
Prov. Bengkulu	4,28	2,56	3,52	4,02	3,75	4,33	3,07	3,38	3,35	3,99	2,68	2,83	3,48
Rata-Rata Kab/Kota	4,4	3,07	4,04	3,82	3,6	4,13	2,84	3,84	2,31	3,72	3,74	1,71	3,43

Wilayah	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	SKOR IDSD
Bengkulu Selatan	4,51	3,3	4,2	3,68	3,62	4,27	3,57	3,93	2,63	3,7	4,7	1,55	3,64
Rejang Lebong	4,6	3,1	4,24	3,61	3,69	4,28	3,79	3,86	2,27	3,93	4,49	1,69	3,63
Bengkulu Utara	4,64	3,2	3,76	3,79	3,65	3,98	2,1	3,86	2,55	3,86	3,41	1,41	3,35
Kaur	4,26	2,76	3,43	4,09	3,53	4,04	2,24	3,76	2,19	3,49	4,54	1,62	3,33
Seluma	4,37	3,04	3,94	4,03	3,62	4,08	2,25	3,34	2,35	3,58	3,68	1,57	3,32
Mukomuko	4,64	2,8	3,83	3,93	3,53	4,04	2,32	3,05	2,62	3,66	2,58	0,85	3,16
Lebong	4,27	3,08	3,29	4,13	3,25	4,11	2,43	3,93	2,35	3,45	4,12	2,44	3,4
Kepahiang	3,99	3,05	4,45	3,71	3,63	4,15	2,73	3,68	1,67	3,59	3,49	1,09	3,27
Bengkulu Tengah	4,53	3,23	4,38	3,77	3,63	4,12	1,97	4,05	1,27	3,59	3,1	1,18	3,24
Kota Bengkulu	4,18	3,12	4,91	3,46	3,82	4,21	5	4,93	3,16	4,36	3,28	3,7	4,01

Sumber: https://brin.go.id/

Selama periode 2022 hingga 2024, Kabupaten Kaur menunjukkan tren peningkatan skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), dari 2,91 pada tahun 2022, naik menjadi 2,85 pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 3,33 pada tahun 2024. Kenaikan skor IDSD pada tahun 2024 ini mencerminkan adanya penguatan di berbagai pilar, terutama pada Pilar 1 (Kondisi Sosial Ekonomi Dasar) dengan skor tinggi 4,26, Pilar 4 (Kapasitas Pemerintah Daerah) sebesar 4,09, serta Pilar 11 (Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Konektivitas Wilayah) dengan capaian sangat baik sebesar 4,54.

Namun demikian, Kabupaten Kaur masih berada di bawah rata-rata provinsi (3,48) maupun rata-rata kabupaten/kota di Bengkulu (3,43) pada tahun 2024. Skor Kaur juga masih tertinggal dibandingkan kabupaten seperti Rejang Lebong (3,63), Bengkulu Selatan (3,64), dan jauh dari Kota Bengkulu yang memimpin dengan 4,01. Selain itu, skor rendah pada Pilar 7 (Kapasitas Sumber Daya Manusia, 2,24) dan Pilar 9 (Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi, 2,19) menunjukkan bahwa daya saing SDM dan kemampuan adaptasi teknologi di Kaur masih menjadi tantangan serius yang harus diatasi.

Dengan demikian, meskipun menunjukkan kemajuan, Kabupaten Kaur perlu memperkuat daya saing daerah secara lebih menyeluruh, khususnya dalam aspek SDM, inovasi, dan teknologi. Intervensi strategis yang konsisten dibutuhkan, baik melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi, peningkatan kapasitas digital masyarakat dan birokrasi, serta pemanfaatan teknologi dalam sektor-

sektor unggulan daerah, guna mendorong Kaur naik ke posisi yang lebih kompetitif dalam lanskap daya saing regional di Provinsi Bengkulu.

D. Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah.

No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
- Pendidikan						
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1.138	73.679	74.522	100	77.397
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	5.463	92.324	87.9	93.472	91.219
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	1.872	78.04	71.983	57.58	75.963
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	6.205	19.382	100	100
- Kesehatan						
1.b.1	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	0.088	0.109	1.082	1.114	1.26
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100	100	100	100
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	97.975	83.864	100	50.409
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	97.896	100	100	89.019
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	95.147	83.011	100	100	90.55
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	83.607	88.663	100	96.051	94.313
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23.521	0.859	100	100	52.03
1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	54.519	10.5	100	83.818	20.028
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	54.519	77.283	100	90.7	96.736
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	49.132	100	24.631	64.908	100
1.b.11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	22.101	100	100	71.041	100
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	26.744	100	100	96.936	100
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100	87.348	100
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini	0	92200	0.818	82.765	99.859

No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
	HIV sesuai standar					
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	24.444	24.444	24.444	24.444	0
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	100	100	0	0
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	26.597	26.597	78.727	50.115	49.492
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	39.636	41.473	55.645	72.241	167.852
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	3.231	4.395	6.559	58.223	97.922
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	100	100	95.305	100
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	480.942	45.292	45.292	36.648.287	42.619
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	100	100	84	0
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	100	100	100
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	33.67	100	0	0
1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	100	100	0	0
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0	100	100	0.369	2.111
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	15.417	15.862	15.862	0.369	0.221
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0	2.981	0.003	0.555	0
- Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	75	69.444	69.444	100	100
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	40	33.333	27.778	100	100
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	131128	1080	100	100	166.667

No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	131128	1080	100	100	9.333
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4900	100	100	0	100
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	88.235	90
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	24	32	30	25	9.2
- Sosial						
1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	75.188	1.534	40	100	100
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	64.476	100	100
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
- Tenaga Kerja						
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	100	100	100
2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	62.247	3.388	8.481	1.678	65.184
2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	104.101.635	133.458.422	164.897.876	17.360.588	184.154
2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	95.455	100	73.913	100	100
2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	81.818	0.394	7.385	17.931	100
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0	53.354	0.007	1.09	1.336
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	0.035	0.047	100	0.039	100
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	15.792	6.269	10.938	7.754	3.048
- Pangan						
2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	2.030.948	159.415	189.278	112.829	454.5
- Pertanahan						
2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	100	100	100	100

No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	36.455	100	100	100	100
2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	12.121	100	100	100	100
2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	94.986.083.333	100	100	100	100
2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	100	100	0	0
2.i.6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0	100	100	0	0
- Lingkungan Hidup						
2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	79.33	2.25	150.06	179.3	78.3
2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	617.38	96.68	96.271	76.113	0.062
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	0	36.364	4.167	0	3.125
- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2.k.1.1	Perekaman KTP elektronik	96.012	98.263	99.172	95.449	95.204
2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	35.24	67.622	74.376	66.931	65.948
2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	97.276	91.389	99.162	98.345	80.218
2.k.1.4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100	15.556	15.556	26.667	100
- Pemberdayaan masyarakat dan desa						
2.l.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	100	98.077	96.774	0	57.143
2.l.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	100	38.06	20.548	0	18.75
- Pengendalian penduduk dan keluarga berencana						
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2481	0.496	2033	1841	3.385
2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	2.931	78.232	76.579	99.142	75.524
2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	0.087	21.768	66.58	2.17	5.017
- Perhubungan						
2.n.1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	495219	45.41	21978	0.88	0
2.n.2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,168	13.63	400	1.11	0.004
- Komunikasi dan Informatika						
2.o.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	15.556	13.333	100	100

No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	100	100	100
2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	99.24	94.874	12.278	124.896
- Koperasi, usaha kecil dan menengah						
2.p.1	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	7.885	5.479	10.333	8.581	20.455
2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	18.916	0.006	0.006	0	43.011
- Penanaman Modal						
2.q	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	109.56	325	649.02	0.008	-40.419
- Kepemudaan dan Olahraga						
2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1.009	0.274	0.276	35.994	19.075
2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	14.409	15.911	16.22	62.728	3.796
2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga	16	16	16	7	6
- Statistik						
2.s.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	35.556	35.556	32.609	39.13
2.s.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	35.556	35.556	32.609	39.13
- Persandian						
2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0	100	100	0	0
- Kebudayaan						
2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	6.757	66.667	66.667	100	1.351
- Perpustakaan						
2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0	68	68	64.5	284.75
2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0	12.93	74.73	70.34	180.691
- Kearsipan						
2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	177	178.75	182	206.75	2.328
2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap	0	1	1	0	0

No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
	aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat					
3. Urusan Pilihan						
- Kelautan dan Perikanan						
3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	6124.45	10169.04	131.149	93.054	79.647
- Pariwisata						
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-59.459	47.5	1.173	12.242	77.143
3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-9.967	14.515	1.457	87.537	-92.641
3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	83.333	84.884	84.884	26.765	27.786
3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	275466.06	49974.36	1.381	6.769	1.451
3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	275466.06	4000000	0.128	0.106	10.326
- Pertanian						
3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun	497.033	513.752	6.648	489.98	515.405
3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	-135.681	-25.962	34.961	-78.238	-54.923
- Kehutanan						
3.d		0	1	1	0	0
- Energi dan Sumber Daya Mineral						
3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0	100	100	0	0
- Perdagangan						
3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	15.149	1.319	2.309	23.636	75
3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	76.018	37.689	12.976	100	67.363
3.f.3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0	10	100	100	17.5
- Perindustrian						
3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	-88.498	2.006	12.64	-100	51.923
3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	100	100	0	67.9

No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	100	100	0	0
3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	100	100	0	0
3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0	100	100	0	0
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0	5	1	0	50
- Transmigrasi						
3.h	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	2	3	2	0	0
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
- Perencanaan dan Keuangan						
4.a.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	32.821	89.047	0.947	19.374	23.387
4.a.2	Rasio PAD	74.330.516.218	3.106.496.471	1.799.505.597	4.593	3.6
4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1	2	2	2	2
4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	0	2	2	2	2
4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	2.397	36.171	77.059	21.102	59.644
4.a.6	Opini Laporan Keuangan	0	10	10	5	5
- Pengadaan						
4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	2.658	0	42.623	0	0
4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	56.872	33.333	34.821	48.057	99.198
4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	60.877	20.963	74.72	84.506	23.718
4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	0	7.154	62.677	88.548	3.082
- Kepegawaian						
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	267.708	271.309	392.391	834.884	89.655
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	8.973	19.862	80.669	25.277	24.474
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	100	34.246	20.539	18.213

No.IKK	IKK Outcome	2020	2021	2022	2023	2024
- Manajemen Keuangan						
4.d.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	96.648	122.921	51.825	83.352	56.574
4.d.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	141.857	281.327	115.156	954.067	420.333
4.d.3	Manajemen Aset	3	4	3	4	3
4.d.4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	56.155	0.872	2.088	2.552	0.456
- Transparansi dan Partisipasi Publik						
4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	0	92.041	93.891	0	0
4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	0	100	100	0	0

E. HASIL EVALUASI CAPAIAN PEMBBANGUNAN DAERAH

Tabel II-69 Target dan Realisasi IKD Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian				Realisasi Capaian				SUMBER DATA
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
Pertumbuhan PDRB (%)	4,98	5,15	5,32	5,67	5,79	3,08	3,78	3,40	4,15	Publikasi PDRB Lapangan Usaha 2020-2024 Kabupaten
PDRB per Kapita (Jutaan Rp)	29,1 jutaan rupiah	30,0 jutaan rupiah	32,2 jutaan rupiah	33,0 jutaan rupiah	34,1 jutaan rupiah	30,5 jutaan rupiah	32,6 jutaan rupiah	34,7 jutaan rupiah	34,7 jutaan rupiah	Publikasi PDRB Lapangan Usaha 2020-2024 Kabupaten
Indeks Gini	0	0	0,272	0,270	0,268	0,28	0,28	0,29	0,30	Tabel Statistik Website BPS Kaur dan BPS Provinsi Bengkulu
Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0	0	≤ 1-0,9	≤ 0,97 - 0,95	≤ 0,94 - 0,90					
Angka Kemiskinan (%)	18,47	18,10	17,47	17,12	16,69	18,62	18,10	17,83	17,12	Tabel Statistik Website BPS Kaur
Indeks Pembangunan Manusia	66,78	66,82	66,85	66,98	70,00	69.71	70,30	70,92	71,53	Tabel Statistik Website BPS Kaur
Angka Penganggguran Terbuka (%)	2,4 %	2,4 %	2,1 %	1,9 %	1,83 %	3,45	3,83	3,81	3,71	Tabel Statistik Website BPS Kaur
Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
Indeks Kepuasan Masyarakat	-	67,37	70,98	76,77	80,79					
Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	-	-	70,64	79,40	85,32					
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,37	8,37	8,48	8,53	8,71	8,38	8,39	8,41	8,47	Tabel Statistik Website BPS Kaur
Angka Harapan Lama Sekolah	12,98	12,98	12,99	13,00	13,01	13,06	13,07	13,14	13,05	Tabel Statistik Website BPS Kaur
Angka Melek Huruf	98,35	98,40	98,46	98,66	99,11	Data tidak tersedia	96,13	97,72	97,52	Kabupaten Kaur Dalam Angka 2021-2025

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian				Realisasi Capaian				SUMBER DATA
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Angka Harapan Hidup	66,5	66,5	66,66	66,69	66,70	66,73	72,49	72,74	72,97	Tabel Statistik Website BPS Kaur
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	49,89	49,89	49,90	49,92	49,95	50,03	50,75	50,74	51,4	Publikasi PDRB Lapangan Usaha 2020-2024 Kabupaten
ASPEK DAYA SAING DAERAH										
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran	3,52	3,52	3,67	3,79	3,83	3.90	4.23	4,55	4,96	Tabel Statistik Website BPS Kaur
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran	2,26	2,26	2,29	2,31	2,33	2,33	2.42	2.50	2,61	Tabel Statistik Website BPS Kaur
Desa Swasembada (%)	0	0	40 %	50 %	60 %					
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar										
Pendidikan										
Pendidikan Anak Usia Dini	36,14-38,14	36,14-38,14	40,15-50.00	50,01-60,01	70,02-70,02	73,60	73,10	86,24	89,76	Data Dari Dinas Diknas
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	99,26-99,46	99,26-99,46	99,47-100	100	100	99,28	97,29	97,90	97,27	Kabupaten Kaur Dalam Angka 2023,2024 dan 2025
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	88,00-91,00	88,00-91.00	91,01-97.00	97,00-100	100	74,01	76,54	75,73	75,74	Kabupaten Kaur Dalam Angka 2023,2024 dan 2025
Angka Buta Aksara (%)	4-3 %	3-2,5 %	2,5-2,0 %	2,0-1,5%	1,5-1,00 %	Data tidak tersedia	3,87%	2,28%	2,48%	Kabupaten Kaur Dalam Angka 2023,2024 dan 2025
Persentase Angka Putus Sekolah SD	0	0	0,076	0,070	0,064	23,00	23	31	21	Data Dari Dinas Diknas

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian				Realisasi Capaian				SUMBER DATA
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Persentase Angka Putus Sekolah SMP	0	0	0,076	0,070	0,064	23,00	23	31	21	Data Dari Dinas Diknas
Angka Kelulusan SD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	Data Dari Dinas Diknas
Angka Kelulusan SMP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	99,88%	99,94%	Data Dari Dinas Diknas
Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	96,91%	94,63%	96,24%	100,97%	Data Dari Dinas Diknas
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4	%	%	85 %	90 %	95 %	91%	92%	93%	98%	Data Dari Dinas Diknas
Kesehatan										
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	142,3	142,3	87	90	90	36,78	7,86	12,38	3,86	komdat.kesmas.kemenkes
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	99,97	99,97	95	97	97	94,68	87,91	87,86	88,97	komdat.kesmas.kemenkes
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	99,65	99,65	100	100	100	82	79	66	64	LAPORAN PUSKESMAS
Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	gizikesga.kemenkes
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	36,8	36,8	70	70	70	10,85	24,08	41,47	35,4	SITB
Cakupan Penemuan dan Penanganan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	LAPORAN PROGRAM

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian				Realisasi Capaian				SUMBER DATA
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	-	-	32,5	37	40	81,88	83,32	80,85	80,53	Dasboard BPJS kesehatan
Cakupan Kunjungan Bayi	97,8	97,8	99	99	99	100	73	84	92	komdat.kesmas.kemenkes
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	278,21 Km/48,09 %Kondisi Jalan Mantap	50.1 %	52.1 %	4.1%	56.1 %	45,29%	42.03%	36,65%	42,62%	
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	39% Dalam Kondisi Baik	47%	47%	47%	47%	70,13%	29,28%	14,27%	12,00%	
Rumah Tangga Bersanitasi	80% (Sanitasi Individu, Komunal)	80%	2%	84%	6%	106,29 %	106,29 %	116,84 %	117,61%	
Kawasan Kumuh	0% penanganan belum maksimal	50%	55%	60%	65%					
Layanan Air Minum	70% Dari Sumur Bor, Jaringan PAM, PAMSIMAS.	70,0 %	72,0 %	4,0%	6,0%	113,47%	113,80%	113,80%	117,61%	
RTH per Satuan Luas Wilayah	55 % dari luas wilayah Kab. Kaur	55,0 %	55,0 %	55,0 %	55,0 %	20,00%	20,00%	25,00%	30,00%	

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian				Realisasi Capaian				SUMBER DATA
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
Persentase Rumah Tangga Penguna Air Bersih	75-80 %	75-80 %	83 %	85 %	87 %	-	-			
Persentase Luas Lingkungan Permukiman Kumuh	15-16 %	15-16 %	14-11 %	10-7 %	7-5 %	-	3,2%	0,36%	8,9%	Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Persentase Rumah Layak Huni	10-15 %	10-15 %	8-9%	7-6 %	5 %	2,6%	24%	1,45%	0,2%	Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										
Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota per 10.000 Penduduk	1.101 per 10.000 penduduk	1.101 per 10.000 penduduk	1.120 per 10.000 penduduk	1.150 per 10.000 penduduk	1.200 per 10.000 penduduk	1.101 per 10.000 penduduk	1.101 per 10.000 penduduk	999 per 10.000 penduduk	983 per 10.000 penduduk	Satpol PP
Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	42,14 menit	36 menit	30,6 menit	26 menit	22,1 menit	25 Menit	25 Menit	20 Menit	15 Menit	Satpol PP
Angka Tunawisma	0	0	40 orang	25 orang	10 orang	7 Orang	5 Orang	3 Orang	2 Orang	Satpol PP
Angka Prostitusi	12 lokasi	10 lokasi	7 lokasi	5 lokasi	2 lokasi	3 Lokasi	2 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	Satpol PP
Persentase Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin	-	-	80%	30%	5%	40%	30%	10%	1%	Satpol PP
Angka Kasus Perjudian	-	-	10-15 kasus	5-9 kasus	4-1 kasus	7 Kasus	5 Kasus	2 Kasus	1 Kasus	Satpol PP

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian				Realisasi Capaian				SUMBER DATA
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Persentase Angka Kasus Penggunaan Narkotika dan Barang Zat Adektif	-	-	30-40 %	20-30 %	10-20 %	6%	5%	2%	2%	Satpol PP
Sosial										
Persentase Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS)	8,26	0	100	100	100		118	50	44	RPJMD/ DINSOS
Persentase Pemberdayaan Lansia Terlantar Potensial	0	5	10	15	20		98	10	10	RPJMD/ DINSOS
Persentase Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Potensial	30,90	30,90	35	35	35	48	0	10	10	RPJMD/ DINSOS
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	75,74	75,74	78	80	82		315	50	44	RPJMD/ DINSOS
Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	1,30	0	100	100	100		1	0	0	RPJMD/ DINSOS
Persentase RTLH Masyarakat Miskin yang ditangani	1,30	0	100	100	100		1	0	0	RPJMD/ DINSOS
Persentase Penyandang Cacat dan Trauma yang direhabilitasi	7,01	10	10	15	15		0	10	14	RPJMD/ DINSOS
Persentase Manula Potensial yang Mendapat	56,05	56,05	60	65	70		0	50	60	RPJMD/ DINSOS

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian				Realisasi Capaian				SUMBER DATA
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Perlindungan										
Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Menerima Program Pemberdayaan	0	0	15	20	20		0	15	15	RPJMD/ DINSOS
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial										
Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar										
Tenaga Kerja										
Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	20 %	20 %	60 %	80 %	100 %	100%	100%	100%	100%	
Persentase Pencari Kerja yang terdaftar	48 %	50 %	62 %	70 %	75 %	49,74%	37,73%	17,93%	10,21%	
Persentase Perusahaan yang membuat & Mengesahkan Peraturan Perusahaan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan	4 perusahaan yang membuat dan mengesahkan Peraturan Perusahaan sesuai UU ketenagakerjaan dari 26 perusahaan yang terdaftar	15,38 %	30,76 %	46,15 %	61,53 %	100%	62,96%	62,96%	10,21%	

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian				Realisasi Capaian				SUMBER DATA
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Persentase Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	22 kasus diselesaikan dengan perjanjian bersama dari 3 kasus yang diterima	66,66 %	33,33 %	100 %	100 %	100%	100%	50%	100%	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	24,976	25,815	26,712	27,23	27,34	25,095	27,130	26,745	27,851	Kaur Dalam Angka Tahun 2022,2023,2024 dan 2025
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	1,533	1,609	1,689	1,773	1,861	1.488	1.680	1.500	1.460	Kaur Dalam Angka Tahun 2022,2023,2024 dan 2025
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	36,815	36,836	36,85	36,955	37,271	23.607	25.450	25.245	26.391	Kaur Dalam Angka Tahun 2022,2023,2024 dan 2025
Pangan										
Rasio Tingkat Konsumsi Energi	-	-	1 : 0,92	1 : 0,94	1 : 0,96			96	95	Lakip 2023 dan Susenas 2023
Rasio Tingkat Konsumsi Protein	-	-	1 : 1,44	1 : 1,39	1 : 1,34			56,2	101,1	Lakip 2023 dan Susenas 2023
Persentase Tingkat Konsumsi Sayur	-	-	80 %	90 %	100 %			23	31,41	Lakip 2023 dan Susenas 2023
Persentase Tingkat Konsumsi Buah	-	-	80 %	90 %	100 %			23	50,2	Lakip 2023 dan Susenas 2023
Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	-	-	100 %	100 %	100 %					

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian				Realisasi Capaian				SUMBER DATA
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Pengawasan Keamanan Pangan Segar (%)	-	-	60 %	70 %	80 %					
Pertanahan										
Persentase Sertifikat Lahan Pemda yang Terbit	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
Persentase Izin Lokasi yang Berjalan Sesuai Aturan	%	%	80 %	90 %	100 %					
Persentase KonflikLahan yang Ditangani	%	%	100 %	100 %	100 %					
Persentase Pembebasan Lahan untuk Pembangunan	%	%	100 %	100 %	100 %					
Lingkungan Hidup										
Persentase Pengurangan Sampah	12,71	25,33	25,24	25,14	25,05					
Persentase Penanganan Sampah	12,71	25,33	25,24	25,14	25,05					
Indeks Kualitas Air	78%	78%	79%	80%	80%					
Indeks Kualitas Udara	85%	85%	86%	86%	87%					
Administrasi Kependudukan dan Sipil										Laporan Bulanan Semester II Tahun 2024
Cakupan Penerbitan Akte Perkawinan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	47,65%	47,70%	47,76%	47,77%	
Cakupan Penerbitan KTP	%	80-90 %	90-95 %	100 %	100 %	98,26%	99,17%	95,45%	95,99%	
Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	110.53%	99,16%	98,35%	97,79%	

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian				Realisasi Capaian				SUMBER DATA
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	%	85-90 %	100 %	100 %	91,98%	94,28%	97,49%	97,87%	
Cakupan Penerbitan Akte Kematian	%	%	75-80 %	80-85 %	85-90 %	20,79%	26,29%	31,56%	37,07%	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Aktif	5-30 %	5-30 %	50 %	70 %	100 %	61,46%	61,46%	61,46%	44,27%	Tenaga Ahli Pendamping Desa
Persentase Perempuan yang Aktif di Desa	10 %	10 %	13 %	15 %	20 %	-	-	-	-	Tidak Ada Data
Persentase Desa Kreatif/Inovatif	2 %	3 %	8 %	10 %	15 %	3	-	-	-	Desa yang mengikuti lomba desa
Persentase Pemerintahan Desa yang Terbina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	Data Pemerintahan yang aktif
Desa Swasembada	0	0	40	50	60	0	8	14	13	Aplikasi Prodeskel (Profil Desa/ Kelurahan)
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
Cakupan Peserta KB Aktif (%)	62,34	62,73	63,13	63,52	64,03	78,23	76,58	77,92	75,52	Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)
Persentase Masyarakat Sadar KB oleh Tenaga penyuluh KB	6,29	6,50	6,75	6,92	7,55	76,52	74,85	70,74	69,38	Pemutakhiran PK (Pendataan Keluarga)
Perhubungan										
Persentase Angkutan Transportasi dalam Kondisi Baik	54% (Baru tersedia Angkutan 3.048 Unit)	55%	60%	65%	75%	53%	55%	62%	60%	Dinas Perhubungan

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian				Realisasi Capaian				SUMBER DATA
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Persentase Pengoperasioan Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	Tersedia 54% (3.098 Unit Angkutan)	55%	60%	65%	75%	73%	70%	75%	78%	Dinas Perhubungan
Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Lalu Lintas	Belum	0%	25%	50%	75%	25	41	40	49	Polres Kaur
Komunikasi dan Informatika										
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di TingkatKecamatan	Belum Terbentuk	30%	50%	70%	80%					
Jumlah Menara telekomunikasi	58 Unit	95%	100 %	100 %	100 %	100%	105%	110%	110%	
Jumlah Jaringan Internet di Kantor Kecamatan yang Baik	Jaringan 4G	95%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	
	Jaringan Fiber Optic	70%	90%	100 %	100 %	87%	93%	100%	100%	
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
Persentase Peningkatan Wirausaha Baru	%	%	60 %	65 %	70 %	52,63%	52,63%	52.63%	43,01%	Data Wirausaha Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
Persentase UMKM Yang Dilakukan Pembinaan Berupa Dana Yang Diakses dari Perbankan, Tingkat Penjualan, Kualitas SDM, Sistem Administrasi	%	%	20-30 %	30-40 %	40-50 %					

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian				Realisasi Capaian				SUMBER DATA
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
dan Keuangan, Jumlah Pelanggan yang dilayani										
Persentase Koperasi Yang Dilakukan Pembinaan, Berkreteria Sehat, Minimal Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Setahun Sekali sesuai Permenkop UKM Nomor 22 Tahun 2017	%	%	86,00	87,00	88,00	17,61	17,61	20,45	20,45	Data Koperasi RAT Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
Jumlah Tenant Inkubator Bisnis Teknologi	4	4	8	10	15					
Penanaman Modal										
Kontribusi Investasi Daerah	-	800 miliar	850 miliar	900 miliar	920 miliar	857.839.120.150	413.730.889.237	545.729.908.741	499.293.076.808	
Persentase Layanan Perizinan Investasi Daerah	-	25%	30 %	60 %	80 %	100%	100%	100%	100%	
Kepemudaan dan Olahraga										

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian				Realisasi Capaian				SUMBER DATA
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	15 organisasi pemuda aktif dari jumlah organisasi sebanyak 40 organisasi	37,5 %	37,5 %	42,5 %	42,5 %	37,50%	37,50%	45,00%	66,67%	
Persentase Pemuda yang Aktif Berorganisasi	225 pemuda aktif berorganisasi dari 2000 pemuda	11,2 %	11,2 %	15%	15%	3,50%	3,50%	3,60%	3,79%	
Persentase Pemuda yang Berwirausaha	30 pemuda wirausaha yang aktif dari jumlah pemuda wira dari jumlah pemuda wira usaha sebanyak 75 pemuda	40%	40%	42,5 %	42,5 %	15,00%	16,00%	17,00%	19,07%	

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian				Realisasi Capaian				SUMBER DATA
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Rasio Lapangan Olahraga per 1000 Penduduk	Untuk saat ini tidak ada tersedia lapangan olahraga dengan rasio 1000 penduduk. Yang ada lapangan kabupaten dengan rasio 3000 penduduk, saat ini adalah lapangan merdeka di bintuhan dan lapangan cukonau.								2,10%	
Statistik										
Persentase Ketersediaan Data Informasi Statistik Sektoral	Baru 45% Data Yang Tersedia	45%	60%	70%	80%					
Persandian										
Persentase Berita Sandi Daerah yang diamankan	Belum Tersedia	30%	50%	70%	80%					
Kebudayaan										

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian				Realisasi Capaian				SUMBER DATA
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Persentase Benda dan Situs Cagar Budaya yang dikelola	-	-	60%	70 %	90 %	75%	75%	75%	75%	
Persentase Kegiatan Seni Budaya yang dilaksanakan	-	-	80%	90%	100 %	27%	27%	27%	27%	
Persentase Pengelolaan Situs Bersejarah	-	-	30-40 %	41-50 %	51-60 %	74%	74%	74%	74%	
Perpustakaan										
Persentase Jenis Koleksi Perpustakaan Umum Daerah	31,312	31.612 0%	31.912 20%	32.212 40%	32.512 60%	69.034 35%	69.034 35%	69.451 35%	70699 35%	
Persentase Perpustakaan Desa/Kelurahan/Kecamatan yang dikembangkan	8.788	9.000 8,9%	9.200 9,1%	9.400 9,4%	9.600 9,6%	27,40%	34,25%	41,10%	47,95%	
Persentase Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Usia Sekolah	1 Desa	3 Desa 16,7 %	5 Desa 33,3 %	7 Desa 50%	9 Desa 66,7 %	7 Desa 30,6%	7 Desa 31,6%	9 Desa 32,9%	10 Desa 48,6%	
Kearsipan										
Persentase Arsip Statis dan Dinamis OPD yang Tertib Arsip	0 OPD	100 %	100 %	100 %	100 %	12%	14%	26%	37%	RPJMD (Indikator dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)
Persentase Arsip Statis dan Dinamis OPD yang dibina/ dilatih	0 OPD	100 %	100 %	100 %	100 %	0%	0%	100%	100%	RPJMD (Indikator dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola										

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian				Realisasi Capaian				SUMBER DATA
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
arsip secara baku										
Persentase Peningkata SDM pengelola kearsipan										
Fokus Layanan Urusan Pilihan										
Pariwisata										
Destinasi Wisata yang Berkualitas (%)	8 Destinasi Wisata aktif dari jumlah objek wisata sebanyak 24 Destinasi	33,3%	33,3%	41,7%	41,7%	16,6%	20,8%	29,1%	33,3%	Dinas Pariwisata
Persentase Usaha Pariwisata yang Memiliki Sertifikasi/Memenuhi Standar Usaha Pariwisata	6 Usaha Pariwisata yang bersertifikat dari keseluruhan 24 Kawasan Usaha Pariwisata	25%	25%	29%	33,3%	12,5%	16,7%	20,8%	25,0%	Dinas Pariwisata
Persentase Pelaku Wisata yang Memiliki Sertifikasi Profesi	4 Pelaku Wisata yang bersertifikasi profesi dari keseluruhan 8 pelaku usaha wisata	50%	50%	75%	75%	37,5%	50,0%	50,0%	50,0%	Dinas Pariwisata

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian				Realisasi Capaian				SUMBER DATA
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Kunjungan Wisata	5.000 wisatawan dari target kunjungan wisatawan 200.000 orang	15%	25%	50%	75%	2,5%	50%	70,5%	76,1%	Indikator bersumber dari Dinas Pariwisata
Lama Kunjungan Wisata	1 hari dari jumlah target 2 hari	1 hari	1 hari	2 hari	2 hari	1 hari	1 hari	2 hari	2 hari	Indikator bersumber dari Dinas Pariwisata
PAD Sektor Pariwisata	51,6% dari target pertahun	100 %	100 %	100 %	100 %	51,6%	94%	65,7%	68,57%	Indikator bersumber dari Dinas Pariwisata
Pertanian										
Peningkatan Kelompok Tani (%)	-	-	90 %	100 %	100 %		90%	100%	100%	Pertumbuhan Kelompok Tani maupun Kelompok Wanita Tani Tanaman Pangan baru di tiap Kecamatan/ Desa dapat dilihat dari Aplikasi Simluhtan
Persentase Penyuluh Pertanian Berkinerja BAIK	-	-	80 %	100 %	100 %		100%	100%	100%	Laporan Kegiatan Kunjungan PPL pada Kelompok Tani disampaikan manual maupun melalui e-Pusluh tiap bulan
Persentase Alat/Teknologi Tinggi Pertanian dimanfaatkan petani secara maksimal	-	-	60-65 %	65-70 %	70-75 %		70%	80%	80%	Bantuan Alsintan Pra Panen dan Pasca Panen yan bersumber dari DAK Fisik di Tahun 2023
Perdagangan										
Persentase Peredaraan Barang dan Jasa yang tidak sesuai Standar	%	%	10 %	8,50 %	7,00 %					
Persentase tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang	%	%	70-74 %	75-79 %	80-84 %	50%	50%	50%	50%	Dokumentasi Foto Pasar Bidang Perdagangan

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian				Realisasi Capaian				SUMBER DATA
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Representatif										
Perindustrian										
Persentase Peningkatan IKM yang Berbasis Teknologi	%	%	68,52	75,89	76,92	25,13	25,13	29,05	22,13	Data IKM Dinas KOPURINDAG
Persentase IKM terlatih terhadap Jumlah IKM	%	%	8-12 %	13-19 %	20-27 %	25,13%	25,13%	29,05%	44,13%	Data IKM Dinas KOPURINDAG
Kelautan dan Perikanan										
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	≥ 6.000	≥ 6.500	≥ 7.000	≥ 7.500	≥ 8.000	5.083,00	8.029,00	8.120,00	5.704,54	Statistik Kementerian Keluatan dan Perikanan RI, 2024
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	≥ 5.000	≥ 5.000	≥ 5.000	≥ 6.000	≥ 6.000	4.278,00	6.724,93	5.970,00	4.867,82	Statistik Kementerian Keluatan dan Perikanan RI, 2024
Persentase Nelayan yang Berperalatan Lengkap	%	%	60-70 %	70-90 %	90-100 %	63,63%	49,56%	55,83%	Proses Validasi	Statistik Kementerian Keluatan dan Perikanan RI, 2024
Penunjang Urusan										
Perencanaan Pembangunan										
Persentase Program RKPD yang dijabarkan dalam APBD Tiap Tahunnya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
Persentase Program RKPD terhadap RPJMD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
Persentase Jumlah Program RKPD yang konsisten terhadap	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian				Realisasi Capaian				SUMBER DATA
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
program RPJMD										
Persentase Program Renstra PD terhadap RPJMD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
Persentase Jumlah Program Renstra OPD yang konsisten terhadap program RPJMD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
Persentase Program Renja PD terhadap Renstra PD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
Persentase Jumlah Program Renja OPD yang konsisten terhadap program Rentra PD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap Program RKP	%	%	55 %	65 %	75 %					
Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang RKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
Persentase Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Musrenbang	5 %	10 %	40 %	70 %	100 %					
Persentase Pokok-Pokok Pikiran DPRD termuat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian				Realisasi Capaian				SUMBER DATA
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
dalam Program RPJMD										
Persentase Pokok-Pokok Pikiran DPRD termuat dalam Program RKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
Persentase Ketaatan Penginputan SIPD untuk Perencanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
Keuangan										
Opini hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	BELUM RILIS	2023 Menunggu Hasil Evaluasi Dari BPK
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
Konsistensi Anggaran Yang disediakan untukusulan Program Pembangunan yang direncanakan	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Konsisten	Untuk seluruh Program sudah di anggarkan
Kepegawaian										
Indek Profesional ASN						38,15	57,43	60,67		
Persentase Peningkatan Kualitas Aparatur yang Kompeten sesuai Tupoksi	%	%	90 %	95 %	100 %		48%	100%	70,25%	BKDPSDM
Persentase Aparatur yang Mendapatkan Pengembangan	%	%	20 %	25 %	30 %		18,70%	19,85%	20,80%	BKDPSDM

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian				Realisasi Capaian				SUMBER DATA
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Kompetensi Teknis										
Persentase Aparatur yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	%	%	55 %	65 %	75 %		5,50%	83,80%	95,37%	BKDPSDM
Persentase Penerapan Sistem Merit	%	%	20 %	25 %	30 %		0,00%	35,61%	0,00%	BKDPSDM
Persentase ASN yang mendapat sangsi	%	%	100 %	100 %	100 %		0,00%	100,00 %	100,00 %	BKDPSDM
Penelitian dan Pengembangan										
Persentase Penelitian yang Mendukung Perencanaan yang dilaksanakan	%	%	80 %	100 %	100 %					
Persentase Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dari Hasil Penelitian	%	%	85 %	85 %	85 %					
Persentase Peningkatan Inovasi Daerah yang dikembangkan	%	%	90 %	100 %	100 %					
Penerapan SIDa										
Penggunaan Teknologi Tepat Guna										

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian				Realisasi Capaian				SUMBER DATA
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	%	10 %	11-20 %	21-30 %					
Pengawasan										
% OPD yang Bebas dari Penyimpangan Keuangan	%	%	70-75 %	76-80 %	81-85 %		54%	53%	Proses Pemeriksaan BPK	Lakip Tahun 2023 dan 2024
% Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan APIP yang Selesai ditindaklanjuti	%	%	80 %	85 %	90 %		100%	100%	23,12%	Lakip Tahun 2023 dan 2024
% Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan BPK yang Selesai ditindaklanjuti	%	%	80 %	85 %	90 %		83%	81%	81%	Berita Acara Pembahasan Tindaklanjut Rekomendasi BPK Semester II Tahun 2022, 2023 dan 2024
% Kasus/Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%	%	100 %	100 %	100 %		100%	84%	100%	Lakip Tahun 2023 dan 2024
% OPD yang Maturitas SPIP Minimal Level 3	%	%	60-70 %	70-80 %	80-90 %		0	0	0	Lakip Tahun 2023 dan 2024
Sekretariat Dewan										
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada					
Tersusun dan Terintegrasinya	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada					

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian				Realisasi Capaian				SUMBER DATA
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Program – Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)										
Terintegrasinya Program–Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaandan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada					

F.

2.5. Gambaran Keuangan Daerah

A. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Tabel II-70. Realisasi APBD Kabupaten Kaur 2020-2024

URAIAN	REALISASI TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan	787.859.374.173	855.813.361.199	796.624.497.003	860.843.562.976	889.906.671.973
A. Pendapatan Asli Daerah	53.863.681.053	43.825.515.292	40.458.619.328	39.617.624.115	18.986.171.752
B. Pendapatan Transfer	582.122.712.359	811.987.845.907	735.946.172.175	801.555.558.861	870.368.500.221
C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	151.872.980.761	-	20.219.705.500	19.670.380.000	552.000.000
Belanja	825.302.284.164	853.169.623.222	783.122.911.304	857.762.838.525	859.858.111.996
A. Belanja Operasi	517.168.044.286	469.488.631.346	497.292.213.015	541.403.025.695	526.642.238.515
B. Belanja Modal	95.151.127.676	137.295.590.804	106.767.349.289	117.521.845.829	138.959.164.881
C. Belanja Tak Terduga	19.951.748.668	38.730.243.196	-	69.180.000	-
D. Belanja Transfer	193.031.363.535	207.655.157.876	179.063.349.000	198.768.787.000	194.256.708.600
Pembiayaan	40.864.206.101	3.421.296.110	5.593.566.216	17.886.176.019	-
A. Penerimaan Pembiayaan	41.864.206.101	3.421.296.110	5.593.566.216	18.886.176.019	-
B. Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000	-		1.000.000.000	-
PEMBIAYAAN NETTO	40.864.206.101	3.421.296.110	5.593.566.216	17.886.176.019	-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	3.421.296.110	6.065.034.087	19.095.151.915	20.941.346.840	30.048.559.977

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Kaur selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan secara nominal, dari Rp787,86 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp889,91 miliar pada 2024. Namun, jika dicermati lebih dalam, peningkatan tersebut tidak mencerminkan penguatan kapasitas fiskal daerah secara mandiri, melainkan ditopang oleh pertumbuhan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, yang pada 2024 mencapai Rp870,37 miliar atau lebih dari 97% dari total pendapatan daerah. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer ini menempatkan keuangan daerah dalam posisi rentan terhadap dinamika kebijakan fiskal nasional, seperti perubahan formula alokasi DAU/DAK atau refocusing anggaran dari pusat. Hal ini juga membatasi fleksibilitas daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal.

Kekhawatiran ini semakin relevan dengan adanya kebijakan pengetatan fiskal dan efisiensi belanja pemerintah pusat pada tahun 2025, yang diambil sebagai respons terhadap beban pembiayaan pembangunan nasional, meningkatnya kebutuhan untuk konsolidasi fiskal pascapandemi, dan fokus pada peningkatan kualitas belanja. Dalam situasi ini, sangat mungkin terjadi penyesuaian alokasi transfer ke daerah, baik melalui rasionalisasi belanja transfer umum maupun selektivitas belanja transfer khusus. Kabupaten seperti Kaur yang sangat bergantung pada transfer pusat tentu harus mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan pengurangan atau keterlambatan dana transfer, yang dapat berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam menjalankan program-program prioritas dan layanan dasar.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami penurunan drastis dan berkelanjutan, dari Rp53,86 miliar pada 2020 menjadi hanya Rp18,99 miliar pada 2024. Penurunan lebih dari 60% ini mengindikasikan persoalan serius dalam optimalisasi potensi fiskal lokal. Beberapa faktor penyebabnya antara lain rendahnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, lemahnya pengawasan dan kepatuhan wajib pajak, belum maksimalnya pemanfaatan aset daerah, serta kinerja BUMD yang belum menunjukkan kontribusi signifikan. Dalam konteks efisiensi belanja pemerintah pusat dan terbatasnya ruang fiskal nasional, maka daerah tidak hanya dituntut untuk lebih mandiri secara fiskal, tetapi juga untuk lebih inovatif dan agresif dalam menggali potensi PAD sebagai sumber pembiayaan utama pembangunan.

Selain itu, pendapatan lain-lain yang sah juga menunjukkan pola yang tidak stabil, bahkan pada 2021 tidak terealisasi sama sekali, dan pada 2024 hanya mencapai Rp552 juta. Padahal, potensi dari kerja sama daerah, hibah, dan pengelolaan kekayaan daerah cukup besar untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan alternatif. Ketidakmampuan dalam memanfaatkan ruang-ruang tersebut menunjukkan adanya kekosongan kebijakan dan kelemahan

kelembagaan yang perlu segera dibenahi agar potensi tersebut bisa berkontribusi nyata terhadap kas daerah.

Dalam kerangka penyusunan RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Kaur perlu menempatkan penguatan kemandirian fiskal sebagai isu strategis utama. Langkah konkret yang harus ditempuh antara lain: pembenahan sistem pemungutan pajak dan retribusi berbasis digital, optimalisasi aset dan potensi ekonomi lokal, revitalisasi BUMD agar lebih profesional dan berorientasi profit, serta menciptakan iklim investasi yang mendorong kemitraan dengan sektor swasta. Dalam konteks kebijakan efisiensi nasional, pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara belanja wajib dan belanja strategis, serta menyusun perencanaan anggaran yang responsif, adaptif, dan berbasis kinerja. Dengan cara ini, Kabupaten Kaur tidak hanya mampu bertahan di tengah tekanan fiskal nasional, tetapi juga membangun landasan fiskal yang kuat dan berkelanjutan untuk mendukung visi pembangunan daerah yang maju, sejahtera, dan bahagia.

2. Belanja Daerah

Struktur belanja Kabupaten Kaur selama periode 2020–2024 memperlihatkan pola yang konsisten, di mana belanja operasi menjadi komponen dominan dalam struktur pengeluaran daerah. Pada tahun 2024, belanja operasi mencapai Rp526,64 miliar atau sekitar 61,2% dari total belanja daerah, menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk pembiayaan kegiatan rutin, seperti gaji dan tunjangan ASN, operasional kantor, serta pemeliharaan barang dan jasa. Kondisi ini mencerminkan tingginya ketergantungan fiskal terhadap pembiayaan aktivitas pemerintahan yang bersifat administratif, yang memang penting untuk menjamin kesinambungan layanan dasar. Namun di sisi lain, dominasi belanja operasi yang terlalu besar juga mengindikasikan ruang fiskal yang sempit untuk belanja pembangunan dan

inovasi, sehingga berpotensi memperlambat laju pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Tingginya belanja rutin ini perlu menjadi perhatian serius dalam RPJMD 2025–2029, terutama dalam konteks efisiensi fiskal nasional yang mulai diterapkan pada tahun 2025. Pemerintah pusat mulai mendorong rasionalisasi anggaran melalui pengendalian belanja pegawai dan optimalisasi belanja berbasis kinerja. Dengan demikian, pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Kaur, harus mulai menata ulang struktur belanja agar lebih proporsional dan berorientasi pada hasil. Perlu dilakukan audit efektivitas belanja operasi, identifikasi komponen belanja yang tidak produktif, serta penerapan sistem anggaran berbasis program prioritas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran tidak hanya habis untuk membiayai sistem birokrasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik, efisien, dan inklusif.

Di sisi lain, belanja modal menunjukkan arah yang lebih konstruktif, dengan tren meningkat dari Rp95,15 miliar pada 2020 menjadi Rp138,96 miliar pada 2024. Peningkatan ini dapat dimaknai sebagai komitmen daerah dalam membangun infrastruktur dan fasilitas publik yang menjadi pondasi utama pertumbuhan jangka panjang. Investasi belanja modal yang efektif akan memperbaiki akses dan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, serta mendukung produktivitas sektor ekonomi unggulan daerah. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa peningkatan nominal belanja modal tidak otomatis berbanding lurus dengan pencapaian output atau dampak pembangunan, terlebih bila belanja tersebut tidak diarahkan pada proyek-proyek yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, dalam RPJMD mendatang, penting bagi Kabupaten Kaur untuk menyusun strategi penguatan belanja modal secara terukur dan akuntabel. Setiap alokasi belanja modal perlu dikaitkan langsung dengan target-target pembangunan daerah, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan daya saing ekonomi, penguatan pelayanan dasar, dan pengurangan kesenjangan wilayah.

Evaluasi mendalam terhadap efektivitas penggunaan belanja modal juga harus menjadi bagian dari mekanisme penganggaran, termasuk melalui penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja (performance-based budgeting). Dengan demikian, kombinasi antara penataan belanja operasi dan optimalisasi belanja modal akan menjadi kunci dalam mewujudkan struktur belanja daerah yang sehat, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan salah satu instrumen strategis dalam pengelolaan fiskal, yang berfungsi untuk menutup defisit anggaran ketika belanja melebihi pendapatan, tanpa harus membebani daerah dengan utang. Dalam konteks Kabupaten Kaur, penerimaan pembiayaan selama periode 2020–2023 secara konsisten digunakan untuk menyeimbangkan struktur anggaran, terutama saat PAD mengalami penurunan dan belanja daerah terus meningkat. Sumber utama pembiayaan tersebut berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun-tahun sebelumnya, yang pada dasarnya merupakan akumulasi dana yang tidak terserap atau belum dimanfaatkan pada tahun anggaran berjalan. Strategi ini umum digunakan di banyak daerah, karena dinilai aman, tidak menimbulkan risiko bunga seperti utang, dan dapat segera dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan prioritas.

Namun, praktik yang terlalu mengandalkan pembiayaan dari SILPA juga menyiratkan ketidakefisienan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. SILPA yang besar umumnya timbul karena lemahnya kapasitas serapan anggaran, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, atau kurangnya ketepatan dalam perencanaan program. Pada tahun 2024, Kabupaten Kaur tidak mencatat adanya realisasi pembiayaan, sebuah kondisi yang dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan disiplin fiskal dan efisiensi dalam penyusunan APBD. Tidak digunakannya pembiayaan di tahun tersebut menunjukkan adanya kecenderungan untuk menjalankan anggaran secara lebih seimbang antara

pendapatan dan belanja, yang patut diapresiasi sebagai langkah menuju tata kelola keuangan yang lebih berkelanjutan dan mandiri.

Meskipun pembiayaan daerah tidak bersifat wajib, namun ke depan, penggunaannya harus diarahkan secara lebih strategis, tidak hanya untuk menambal kekurangan kas jangka pendek, tetapi juga sebagai alat percepatan pembangunan pada sektor-sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pembiayaan sebaiknya dimanfaatkan secara selektif untuk mendukung investasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi), penguatan ketahanan pangan, serta perluasan akses ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, daerah harus memiliki kerangka prioritas yang jelas, termasuk indikator kinerja pembangunan, agar setiap pembiayaan benar-benar memberikan dampak positif terhadap capaian pembangunan.

Dalam RPJMD 2025–2029, Kabupaten Kaur perlu memperkuat mekanisme pengelolaan pembiayaan yang lebih terukur dan berbasis kinerja. Langkah-langkah seperti penguatan proyeksi keuangan jangka menengah (Medium-Term Fiscal Framework), integrasi sistem perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan harus menjadi agenda utama. Pemerintah daerah juga harus mampu mengantisipasi fluktuasi pendapatan dan belanja, serta menyediakan cadangan fiskal yang memadai untuk menghadapi kondisi darurat tanpa harus mengganggu program strategis. Dengan demikian, pembiayaan daerah bukan hanya sekadar penyeimbang anggaran, tetapi juga menjadi alat kendali fiskal yang adaptif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Kaur menunjukkan tren yang meningkat secara signifikan selama periode 2020–2024, dari Rp3,42 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp30,05 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini, meskipun di satu sisi dapat mencerminkan adanya cadangan fiskal yang aman, di sisi lain justru menimbulkan kekhawatiran apabila disebabkan oleh rendahnya kualitas

perencanaan dan lemahnya eksekusi anggaran. Idealnya, SILPA mencerminkan sisa anggaran karena efisiensi penggunaan, seperti hasil penghematan belanja, diskon pengadaan, atau penundaan yang terencana. Namun, jika SILPA terbentuk akibat tidak terlaksananya kegiatan, keterlambatan pengadaan barang dan jasa, atau penyerapan anggaran yang jauh di bawah target, maka hal tersebut mencerminkan adanya masalah struktural dalam manajemen keuangan daerah.

Dalam konteks pengelolaan keuangan yang sehat, SILPA yang terlalu besar dan berulang bukanlah indikator keberhasilan, melainkan alarm atas inefisiensi dalam tahapan perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD tidak berjalan sesuai dengan waktu dan skala yang direncanakan, sehingga masyarakat tidak menerima manfaat dari anggaran publik secara maksimal. Di sisi lain, SILPA yang tidak dirancang secara strategis juga berisiko menjadi "anggaran mengendap" yang hanya mempertebal saldo kas, tanpa kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap efektivitas belanja pemerintah daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kaur perlu menata kembali sistem penganggaran secara menyeluruh, dimulai dari peningkatan kualitas perencanaan program, dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan yang diusulkan benar-benar layak, siap dilaksanakan, dan didukung oleh kesiapan teknis serta administrasi. Penguatan sinkronisasi antarperangkat daerah, penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yang realistis, serta percepatan proses lelang dan pengadaan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan ketepatan waktu pelaksanaan anggaran. Selain itu, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala, baik melalui teknologi informasi maupun forum koordinasi lintas sektor, perlu ditingkatkan agar potensi pembentukan SILPA bisa dikendalikan sejak dini.

Dalam kerangka RPJMD 2025–2029, SILPA seharusnya difungsikan secara strategis sebagai cadangan fiskal yang digunakan untuk mempercepat pembangunan, bukan sebagai hasil dari stagnasi pelaksanaan anggaran. Pemerintah Kabupaten Kaur perlu menetapkan kebijakan pemanfaatan SILPA yang terukur dan transparan, seperti untuk mendanai belanja modal yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan angka kemiskinan, atau mendukung respons terhadap kondisi darurat. Dengan demikian, SILPA tidak hanya menjadi angka nominal dalam laporan keuangan, tetapi juga menjadi instrumen yang memperkuat keandalan fiskal, efektivitas belanja, dan ketepatan capaian pembangunan daerah.

B. Neraca Daerah Tahun Anggaran 2020-2024

Neraca Daerah merupakan representasi menyeluruh kondisi aktual suatu wilayah, mencakup dimensi ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan hidup, yang berperan sebagai dasar teknokratik penting dalam penyusunan RPJMD. Dalam konteks Kabupaten Kaur, Neraca Daerah menjadi alat analisis untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dan potensi pembangunan secara objektif, sehingga kebijakan yang dirumuskan dalam RPJMD benar-benar sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat. Sebagai contoh, jika ditemukan masih rendahnya akses terhadap air minum yang layak atau adanya peningkatan angka kemiskinan meskipun indikator makro menunjukkan perbaikan, maka kondisi tersebut menandakan perlunya intervensi pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis data. Dengan pendekatan ini, RPJMD Kabupaten Kaur disusun bukan semata-mata berdasarkan asumsi, tetapi berlandaskan pada fakta empiris dan data yang terukur secara sistematis.

Tabel II-71. Tabel Neraca Kabupaten Kaur Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET					
	A. Aset Lancar	38.712.219.214	28.865.445.828	33.292.825.880	40.660.900.955	46.555.648.347
	B. Investasi Jangka Panjang	16.991.750.000	16.991.750.000	16.991.750.000	17.991.750.000	17.991.750.000
	C. Aset Tetap	1.218.307.123.164	1.284.620.037.268	1.280.906.708.033	1.322.676.124.767	986.301.269.610
	D. Aset Lainnya	22.366.665.243	20.243.437.545	20.643.370.042	28.179.874.721	22.339.827.721
	JUMLAH ASET	1.296.377.757.621	1.350.720.670.641	1.351.834.653.955	1.409.508.650.444	1.073.188.495.679
2	KEWAJIBAN	29.173.820.369	38.111.562.488	24.350.014.649	14.970.606.956	18.825.776.766
	A. Kewajiban Jangka Pendek	29.173.820.369	38.111.562.488	24.350.014.649	14.970.606.956	18.825.776.766
	B. Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0	0
3	EKUITAS	1.267.203.937.252	1.312.609.108.153	1.327.484.639.307	1.394.538.043.488	1.054.362.718.913
	JUMLAH EKUITAS	1.267.203.937.252	1.312.609.108.153	1.327.484.639.307	1.394.538.043.488	1.054.362.718.913

Berdasarkan data Neraca Daerah Kabupaten Kaur tahun 2020–2024, terlihat bahwa total aset daerah mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2023, yaitu dari Rp1,296 triliun pada 2020 menjadi Rp1,409 triliun pada 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan menjadi Rp1,073 triliun, terutama disebabkan oleh penurunan drastis pada pos aset tetap, dari Rp1,322 triliun pada 2023 menjadi hanya Rp986 miliar pada 2024. Hal ini berpotensi menunjukkan adanya penghapusan atau revaluasi aset tetap yang signifikan, atau kesalahan pencatatan yang perlu diverifikasi lebih lanjut.

Di sisi lain, kewajiban daerah menurun cukup tajam dari Rp38,1 miliar pada 2021 menjadi hanya Rp14,9 miliar pada 2023, dan sedikit meningkat lagi menjadi Rp18,8 miliar pada 2024, dengan seluruh kewajiban tercatat dalam bentuk jangka pendek. Tidak adanya kewajiban jangka panjang mengindikasikan bahwa struktur utang daerah Kabupaten Kaur cukup ringan dan dikelola secara konservatif. Sementara itu, ekuitas daerah secara umum menunjukkan tren peningkatan dari Rp1,267 triliun pada 2020 menjadi Rp1,394 triliun pada 2023, namun juga mengalami penurunan signifikan menjadi Rp1,054 triliun pada 2024, sejalan dengan turunnya nilai aset tetap.

Secara keseluruhan, struktur neraca Kabupaten Kaur memperlihatkan kondisi keuangan yang relatif sehat hingga 2023, ditandai dengan peningkatan aset dan ekuitas, serta penurunan kewajiban. Namun, penurunan tajam pada nilai aset tetap dan ekuitas di tahun 2024 menjadi catatan penting yang perlu ditindaklanjuti secara administratif dan teknis. Hal ini penting untuk memastikan keandalan data keuangan daerah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Pemerintah daerah perlu menelusuri lebih lanjut penyebab penurunan nilai aset tetap tersebut dan memastikan bahwa pencatatan aset dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

C. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030

Menyikapi kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat pada awal 2025 sebagai bagian dari pengendalian fiskal nasional, Pemerintah Kabupaten Kaur perlu mengelola keuangan daerah secara hati-hati. Kebijakan ini berpotensi memengaruhi transfer dana seperti DAU, DAK, serta menimbulkan keterlambatan atau pengurangan belanja sektoral. Namun, kemungkinan adanya relaksasi anggaran atau stimulus fiskal pada pertengahan tahun juga membuka peluang yang perlu direspons cepat dan strategis.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Bapperida dan Badan Keuangan Daerah tengah menyusun Kajian Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026–2030 guna memetakan kemampuan fiskal daerah secara realistis dan berkelanjutan. Kajian ini mencakup potensi PAD, tren transfer dana, belanja wajib, serta ruang fiskal untuk prioritas pembangunan. Hasilnya akan menjadi dasar arah kebijakan fiskal jangka menengah, penyusunan RKPD, dan RPJMD berikutnya, sekaligus mendorong inovasi pendanaan melalui skema KPBU, efisiensi belanja, dan digitalisasi keuangan daerah.

Tabel II-72. Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2026-2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN 2026	2027	2028	2029	2030
1	**PENDAPATAN**						
A.	Pendapatan Asli Daerah	56.474.127.595	57.603.610.147	59.331.718.451	61.111.670.005	62.945.020.105	64.833.370.708
B.	Pendapatan Transfer	906.384.118.887	764.378.780.172	787.310.143.577	810.929.447.884	835.257.331.321	860.315.051.261
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	10.450.273.749	10.659.279.224	10.979.057.601	11.308.429.329	11.647.682.209	11.997.112.675
	JUMLAH PENDAPATAN	**973.308.520.231**	**832.641.669.543**	**857.620.919.629**	**883.349.547.218**	**909.850.033.635**	**937.145.534.644**
2	**BELANJA**						
A.	Belanja Operasi	628.090.748.424	467.222.114.867	472.593.810.827	477.763.238.110	482.704.721.104	487.390.862.278
B.	Belanja Modal	166.375.903.647	174.694.698.829	183.429.433.770	192.600.905.459	202.230.950.732	212.342.498.268
C.	Belanja Tak Terduga	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
D.	Belanja Transfer	199.283.215.000	209.247.375.750	219.709.744.537	230.695.231.764	242.229.993.352	254.341.493.020
	JUMLAH BELANJA	**994.249.867.071**	**852.164.189.446**	**876.732.989.134**	**902.059.375.333**	**928.165.665.188**	**955.074.853.566**
	SURPLUS/DEFISIT	**-20.941.346.840**	**-19.522.519.903**	**-19.112.069.505**	**-18.709.828.115**	**-18.315.631.553**	**-17.929.318.922**
3	**PEMBIAYAAN**						
A.	Penerimaan Pembiayaan	20.941.346.840	20.522.519.903	20.112.069.505	19.709.828.115	19.315.631.553	18.929.318.922
B.	Pengeluaran Pembiayaan	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	**20.941.346.840**	**19.522.519.903**	**19.112.069.505**	**18.709.828.115**	**18.315.631.553**	**17.929.318.922**

1. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2026–2030

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kaur untuk periode 2026–2030 menunjukkan tren kenaikan bertahap dan stabil, mencerminkan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah di tengah dinamika kebijakan efisiensi fiskal nasional. Total pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari Rp832,64 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp937,15 miliar pada tahun 2030, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 3% per tahun. Kenaikan ini didorong oleh optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat, serta peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan lain yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan tumbuh secara konsisten dari Rp57,60 miliar (2026) menjadi Rp64,83 miliar (2030). Pertumbuhan ini menggambarkan kebijakan pemerintah daerah dalam memperluas basis penerimaan, melalui digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, peningkatan pelayanan publik berbasis kinerja, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.
2. Pendapatan Transfer diperkirakan tetap menjadi sumber dominan dalam struktur pendapatan daerah. Meskipun mengalami penurunan pada awal periode proyeksi akibat kebijakan efisiensi fiskal nasional—yakni dari Rp764,38 miliar pada 2026—alokasinya diproyeksikan meningkat kembali hingga mencapai Rp860,32 miliar pada 2030. Pemulihan ini diasumsikan sejalan dengan stabilisasi fiskal nasional dan penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bertahap.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan mengalami peningkatan moderat dari Rp10,66 miliar (2026) menjadi Rp11,99 miliar (2030). Proyeksi ini didukung oleh potensi tambahan penerimaan dari kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga,

penerimaan hibah, dan pendapatan non-reguler lainnya yang bersifat mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kaur 2026–2030 menggambarkan arah fiskal yang hati-hati namun progresif, dengan fokus pada peningkatan PAD dan optimalisasi dana transfer. Peningkatan kapasitas pendapatan ini diharapkan dapat memperkuat ruang fiskal daerah untuk mendukung prioritas pembangunan dan menjaga stabilitas keuangan daerah dalam jangka menengah.

2. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2026–2030

Belanja daerah Kabupaten Kaur untuk periode 2026–2030 diproyeksikan mengalami kenaikan bertahap dan terkendali, sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja nasional serta upaya pemerintah daerah menjaga keseimbangan fiskal. Total belanja daerah diperkirakan meningkat dari Rp852,16 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp955,07 miliar pada tahun 2030, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 2,9% per tahun. Kenaikan ini mencerminkan penyesuaian terhadap kebutuhan layanan publik, belanja pembangunan prioritas, serta komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan fiskal di tengah dinamika pendapatan daerah.

1. Belanja Operasi diproyeksikan menurun signifikan dari baseline Rp628,09 miliar (2024) menjadi Rp467,22 miliar (2026), kemudian meningkat perlahan hingga Rp487,39 miliar (2030). Penurunan awal mencerminkan kebijakan efisiensi dan rasionalisasi belanja rutin, termasuk pengendalian belanja pegawai dan operasional perangkat daerah. Kenaikan bertahap setelahnya diasumsikan sebagai penyesuaian terhadap inflasi, kebutuhan layanan dasar, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Belanja Modal menunjukkan tren kenaikan yang cukup kuat dari Rp174,69 miliar (2026) menjadi Rp212,34 miliar (2030). Kenaikan ini menunjukkan arah kebijakan pemerintah daerah yang lebih fokus pada pembangunan infrastruktur produktif dan peningkatan aset daerah. Peningkatan belanja modal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendukung pelayanan publik jangka panjang.
3. Belanja Tak Terduga dipertahankan secara konstan sebesar Rp1 miliar per tahun, sebagai bentuk kesiapsiagaan fiskal dalam menghadapi situasi darurat seperti bencana alam, krisis kesehatan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Konsistensi alokasi ini menandakan pendekatan kehati-hatian fiskal tanpa membebani struktur anggaran secara signifikan.
4. Belanja Transfer menunjukkan peningkatan stabil dari Rp209,25 miliar (2026) menjadi Rp254,34 miliar (2030). Kenaikan ini berkaitan dengan penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi ke desa serta dukungan fiskal terhadap pemerintahan desa. Proyeksi ini juga sejalan dengan komitmen untuk memperkuat pembangunan berbasis desa dan mendukung pemerataan pembangunan wilayah.

Secara keseluruhan, proyeksi belanja daerah Kabupaten Kaur 2026–2030 diarahkan pada pola belanja yang efisien, produktif, dan berorientasi hasil. Pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga proporsi belanja operasi agar tidak mendominasi anggaran, sekaligus meningkatkan porsi belanja modal untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Pendekatan ini menegaskan arah kebijakan fiskal Kabupaten Kaur yang berbasis pada efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pembangunan jangka menengah.

3. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2026–2030

Komponen pembiayaan daerah dalam proyeksi keuangan Kabupaten Kaur tahun 2026–2030 berperan penting dalam menjaga keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja. Berdasarkan proyeksi, setiap tahun daerah diperkirakan mengalami defisit anggaran yang relatif kecil dan terkendali, sehingga kebutuhan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit secara proporsional tanpa menimbulkan beban fiskal jangka panjang. Total pembiayaan netto diproyeksikan menurun secara gradual dari Rp19,52 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp17,93 miliar pada tahun 2030, sejalan dengan penurunan defisit anggaran di periode yang sama.

1. Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan berasal terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya serta potensi sumber pembiayaan lain yang sah. Nilainya menurun dari Rp20,52 miliar (2026) menjadi Rp18,93 miliar (2030). Tren penurunan ini mencerminkan arah kebijakan fiskal yang lebih disiplin, di mana akumulasi SiLPA diharapkan semakin kecil seiring meningkatnya efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Penurunan juga menunjukkan perbaikan dalam manajemen kas daerah, dengan target agar pendapatan dan belanja lebih seimbang dalam satu tahun anggaran.
2. Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan relatif konstan sebesar Rp1 miliar per tahun sepanjang 2026–2030. Komponen ini terutama mencakup penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau investasi lainnya yang bersifat produktif. Konsistensi alokasi ini menunjukkan pendekatan yang hati-hati dalam ekspansi investasi daerah, dengan fokus pada penguatan BUMD yang memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Pembiayaan Netto secara keseluruhan menurun secara bertahap dari Rp19,52 miliar (2026) menjadi Rp17,93 miliar (2030), sejalan dengan turunnya defisit anggaran. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Kaur memproyeksikan kondisi fiskal yang semakin sehat dan berkelanjutan, di mana kebutuhan pembiayaan dapat ditutup secara efisien tanpa menambah beban pinjaman daerah.

Proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Kaur menggambarkan strategi fiskal yang hati-hati dan terukur, dengan orientasi pada pengendalian defisit, optimalisasi SiLPA, dan penguatan investasi produktif. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas fiskal daerah dalam jangka menengah, sekaligus memberikan ruang bagi inovasi pendanaan pembangunan dan sumber pembiayaan alternatif yang berorientasi pada keberlanjutan fiskal daerah.

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis

2.6.1. Permasalan Kabupaten Kaur

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Kaur dapat dipahami sebagai bentuk ketidakharmonisan antara kondisi aktual pembangunan dengan target yang telah dirumuskan, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Ketidaksesuaian ini tidak hanya mengindikasikan capaian yang belum optimal atau masih di bawah ekspektasi, tetapi juga mencakup kondisi yang secara umum telah baik namun masih menyisakan ruang untuk perbaikan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Permasalahan pembangunan tidak selalu berakar dari kekurangan semata, tetapi juga muncul dari kebutuhan untuk terus mendorong peningkatan mutu layanan dan efektivitas pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan. Dalam konteks ini, analisis terhadap permasalahan pembangunan di Kabupaten Kaur menjadi langkah strategis untuk mengidentifikasi peluang yang dapat dimaksimalkan dan tantangan yang perlu diatasi secara tepat. Pendekatan

tersebut diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan progresif dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

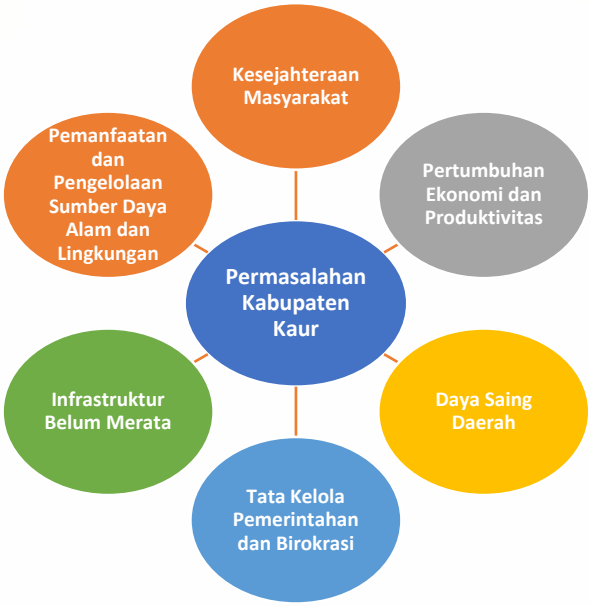

Gambar II-23. Permasalahan Kabupaten Kaur

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, diperlukan analisis yang tepat terhadap berbagai permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan kajian atas kondisi objektif di masing-masing bidang urusan serta mempertimbangkan masukan dan kesepakatan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan, telah diidentifikasi enam isu utama yang menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan Kabupaten Kaur sebagai berikut:

1. Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat
2. Permasalahan Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas
3. Permasalahan Rendahnya Daya Saing Daerah
4. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi
5. Permasalahan Pemerataan Infrastruktur
6. Permasalahan Pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Kaur diidentifikasi melalui analisis terhadap data dan informasi strategis yang mencerminkan kondisi aktual pembangunan daerah. Penjabaran permasalahan tersebut disusun berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan Kabupaten Kaur, yang menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah untuk periode 2025–2029. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kaur disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien, dengan cakupan pembahasan meliputi kondisi umum daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, pendanaan pembangunan, hingga evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hasil kajian, telah diidentifikasi sejumlah permasalahan utama yang menjadi tantangan mendasar dalam pembangunan daerah. Permasalahan pokok ini kemudian digunakan sebagai landasan dalam merumuskan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Kaur, mengingat secara konseptual, isu strategis juga mencakup potensi permasalahan yang perlu diantisipasi dan ditangani secara tepat untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

A. Kesejahteraaan Masyarakat

Permasalahan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaur masih menjadi tantangan mendasar dalam pembangunan daerah yang menuntut penanganan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan dari 14,04% pada tahun 2023 menjadi 13,6% pada tahun 2024, angka tersebut masih menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Kaur belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Angka kemiskinan yang relatif tinggi ini mengindikasikan belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan akses terhadap berbagai layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan sanitasi yang layak, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil.

Masih dominannya penduduk yang bekerja di sektor pertanian tradisional dengan tingkat produktivitas yang rendah turut memperbesar kerentanan ekonomi rumah tangga. Tingginya proporsi tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah dan memiliki keterampilan terbatas, menjadi kendala dalam mendorong mobilitas ekonomi masyarakat ke sektor-sektor yang lebih produktif. Kondisi ini diperparah dengan minimnya akses terhadap pelatihan kerja, permodalan, serta terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal. Hal ini berimplikasi pada tingginya angka pengangguran terselubung dan kurangnya diversifikasi sumber penghidupan, terutama bagi generasi muda dan perempuan di daerah perdesaan.

Dari sisi infrastruktur penunjang kesejahteraan, masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap air minum layak, sanitasi sehat, serta hunian yang memenuhi standar kelayakan. Ketimpangan akses infrastruktur ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara langsung, tetapi juga berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan aktivitas ekonomi. Di samping itu, sistem perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, anak yatim piatu, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, masih memerlukan penguatan dari segi cakupan, keberlanjutan, dan efektivitas penyaluran.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaur harus dilaksanakan melalui pendekatan multi-sektor yang mencakup peningkatan kualitas layanan dasar, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja yang produktif, serta pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis pemberdayaan masyarakat. Intervensi kebijakan pembangunan yang bersifat partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada keadilan sosial sangat diperlukan guna mewujudkan masyarakat Kaur yang hidup dalam kondisi sosial-ekonomi yang layak, mandiri, dan berkelanjutan.

B. Permasalahan Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas

Pertumbuhan ekonomi dan produktivitas di Kabupaten Kaur menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi secara komprehensif. Perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor primer, khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan, namun kontribusinya terhadap nilai tambah daerah relatif stagnan. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor-sektor berbasis sumber daya alam ini belum diimbangi dengan proses hilirisasi yang memadai, sehingga nilai ekonomi yang dihasilkan masih rendah. Sektor-sektor produktif lainnya seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa belum berkembang optimal dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih terbatas.

Kapasitas produksi masyarakat, terutama petani, nelayan, dan pelaku UMKM, masih rendah akibat keterbatasan akses terhadap teknologi, permodalan, serta pasar. Selain itu, rendahnya produktivitas tenaga kerja juga menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Peluang pengembangan ekonomi lokal dan investasi belum dimanfaatkan secara maksimal, yang berdampak pada lambatnya peningkatan pendapatan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja. Permasalahan ini mencerminkan perlunya intervensi yang lebih strategis dalam memperkuat struktur ekonomi daerah, mendorong diversifikasi usaha, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan dan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

C. Permasalahan Daya Saing Daerah

Daya saing daerah di Kabupaten Kaur masih menghadapi tantangan struktural dan sistemik yang cukup kompleks, yang berdampak langsung pada lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah serta rendahnya kontribusi sektor-sektor produktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu permasalahan mendasar terletak pada kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai. Tingginya proporsi tenaga kerja dengan latar belakang

pendidikan menengah ke bawah menyebabkan keterbatasan dalam penyerapan teknologi dan inovasi, serta mempersempit peluang kerja yang berkualitas. Akses terhadap pendidikan kejuruan dan pelatihan vokasional juga masih terbatas, sehingga tidak mampu secara maksimal menjawab kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.

Infrastruktur sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan konektivitas wilayah juga belum berkembang secara optimal. Kondisi jalan yang masih banyak mengalami kerusakan, terbatasnya jaringan irigasi yang memadai, serta kurangnya akses terhadap infrastruktur logistik dan teknologi informasi menjadi hambatan dalam mendukung pertumbuhan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Produk-produk lokal, baik dari sektor pertanian maupun UMKM, sering kali terkendala dalam aspek produktivitas, efisiensi, daya saing harga, dan kesulitan menembus pasar yang lebih luas akibat keterbatasan akses modal, teknologi, serta belum optimalnya kelembagaan ekonomi lokal.

Rendahnya tingkat investasi menjadi indikator lain dari lemahnya daya tarik Kabupaten Kaur sebagai daerah tujuan investasi. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya promosi potensi daerah, kesiapan infrastruktur pendukung investasi yang belum memadai, dan belum kuatnya jaminan regulasi serta kemudahan perizinan yang diharapkan investor. Keberadaan BUMDes dan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi lokal juga belum sepenuhnya mampu mendorong ekonomi rakyat karena lemahnya kapasitas kelembagaan, tata kelola usaha, serta rendahnya inovasi produk.

Rendahnya integrasi antar sektor pembangunan dan minimnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil turut menjadi faktor penghambat dalam menciptakan ekosistem pembangunan daerah yang kompetitif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, peningkatan daya saing daerah di Kabupaten Kaur memerlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi, dengan fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia,

perbaikan infrastruktur ekonomi dan sosial, penguatan inovasi dan teknologi, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Kebijakan pembangunan ke depan harus mampu menjembatani kesenjangan antarwilayah dan antar sektor, agar Kabupaten Kaur dapat bersaing secara lebih efektif dalam konteks regional maupun nasional.

D. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi

Permasalahan tata kelola pemerintahan dan birokrasi di Kabupaten Kaur mencerminkan masih terbatasnya efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kinerja pembangunan yang terintegrasi. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Kaur berada pada kategori Baik (predikat B), yang menunjukkan sudah baik dalam manajemen kinerja serta keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran. Kualitas pelayanan publik belum optimal, dengan keterbatasan dalam inovasi layanan serta pemanfaatan teknologi informasi yang belum merata di seluruh perangkat daerah.

Pemerintah daerah masih dihadapkan pada persoalan distribusi pegawai yang belum merata, kurangnya pelatihan berbasis kebutuhan aktual, serta lemahnya sistem pengukuran kinerja individu dan organisasi. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang seharusnya menjadi instrumen percepatan layanan dan efisiensi birokrasi, belum berjalan optimal akibat keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Permasalahan-permasalahan ini secara keseluruhan berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan birokrasi dan menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Kaur.

E. Permasalahan Infrastruktur Belum Merata

Permasalahan infrastruktur yang belum merata di Kabupaten Kaur merupakan salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pembangunan

daerah. Pemerintah Kabupaten Kaur menghadapi keterbatasan dalam penyediaan dan pemerataan infrastruktur dasar yang layak dan memadai di seluruh wilayah. Sebagian besar infrastruktur jalan masih berada dalam kondisi rusak berat, yakni mencapai sekitar 48% dari total panjang jalan kabupaten, yang menghambat konektivitas antarwilayah serta aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat layanan dan kegiatan ekonomi. Akses terhadap air minum layak juga belum sepenuhnya terpenuhi, dengan sekitar 26,93% rumah tangga belum memperoleh layanan tersebut. Sanitasi layak masih menjadi permasalahan signifikan, di mana 18,77% rumah tangga belum memiliki fasilitas sanitasi yang sesuai standar kesehatan. Sementara itu, persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni baru mencapai 57,16%, menunjukkan masih tingginya ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan hunian yang sehat dan aman. Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kaur masih belum merata, khususnya di wilayah terpencil dan perdesaan, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang terarah dan berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

F. Permasalahan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Permasalahan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan di Kabupaten Kaur menjadi salah satu tantangan penting dalam pembangunan daerah. Kabupaten Kaur memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah, seperti hutan, hasil pertanian, perikanan, dan potensi pertambangan. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Tingginya persentase kawasan hutan yang mencapai lebih dari separuh wilayah kabupaten membatasi ruang pemanfaatan untuk kegiatan produktif masyarakat, sementara pemanfaatan yang telah berjalan belum sepenuhnya memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Pemanfaatan kawasan pesisir dan laut juga belum disertai dengan tata kelola yang terintegrasi, sehingga menimbulkan risiko degradasi ekosistem. Pengelolaan pertambangan, khususnya tambang rakyat, masih menghadapi persoalan legalitas, pengawasan, serta dampak lingkungan yang belum tertangani secara sistematis. Penurunan kualitas lingkungan hidup ditunjukkan melalui rendahnya nilai indeks kualitas air dan udara, serta peningkatan potensi risiko bencana akibat kerusakan lingkungan. Pengelolaan sampah dan limbah domestik belum tertata dengan baik, ditambah dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Kaur masih membutuhkan pendekatan yang terarah, kolaboratif, dan berwawasan keberlanjutan untuk mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan tangguh terhadap perubahan iklim.

2.6.2. Isu Lingkungan Dinamis

Dalam konteks pembangunan Kabupaten Kaur ke depan, tantangan yang dihadapi tidak hanya bersumber dari dinamika internal wilayah, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai perubahan dan perkembangan di tingkat global, nasional, dan regional. Lingkungan eksternal yang terus berkembang membawa dampak yang kompleks terhadap arah pembangunan daerah, baik berupa peluang yang dapat dimanfaatkan maupun risiko yang perlu diantisipasi.

Pada tingkat global, isu perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi internasional, dan dinamika geopolitik dunia dapat memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan di tingkat lokal. Sementara itu, di tingkat nasional, tantangan berkaitan dengan keberlanjutan tata ruang, pelestarian budaya, dan ketahanan lingkungan menjadi perhatian penting yang harus direspons secara adaptif. Memahami berbagai dinamika eksternal ini menjadi dasar penting dalam merumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Identifikasi isu lingkungan dinamis dilakukan dengan mengelompokkannya ke dalam tiga tingkatan, yaitu isu global, isu nasional, dan isu regional. Kabupaten Kaur diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam mendukung pencapaian program-program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Sementara di tingkat regional, Kabupaten Kaur memiliki peranan penting dalam mendorong pencapaian pembangunan Provinsi Bengkulu secara menyeluruh dan berkelanjutan.

2.6.2.1. Isu KLHS RPJMD Kabupaten Kaur 2025-2029

A. Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang

Isu belum optimalnya kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang merupakan salah satu isu strategis yang diidentifikasi dalam KLHS RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029. Isu ini mencerminkan masih banyaknya tantangan mendasar yang harus dihadapi dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang layak dan berkeadilan. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Kaur hingga saat ini masih menghadapi berbagai hambatan, sebagaimana tercermin dari rendahnya capaian indikator pembangunan di berbagai sektor, baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Secara ekonomi, laju pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita masih tergolong rendah, menunjukkan bahwa potensi ekonomi lokal belum termanfaatkan secara optimal dan nilai tambah dari sektor unggulan belum signifikan. Kondisi ini berdampak pada daya beli dan pendapatan masyarakat yang belum merata, khususnya di wilayah pedesaan. Di sektor ketenagakerjaan, rendahnya kepatuhan perusahaan dalam pelaporan tenaga kerja dan minimnya cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan masih tingginya kerentanan sosial dan ekonomi, terutama bagi pekerja informal.

Di sisi lain, sektor sosial-budaya dan pariwisata belum berkembang maksimal, dengan sedikitnya objek wisata unggulan yang dikembangkan dan rendahnya kunjungan wisatawan, meskipun Kabupaten Kaur memiliki potensi wisata alam dan budaya yang besar. Kondisi ini dikonfirmasi oleh rendahnya capaian berbagai indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), seperti masih tingginya angka kemiskinan ekstrem, rendahnya akses air bersih dan sanitasi, kurangnya fasilitas pendidikan, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar hingga PAUD. Kualitas konsumsi pangan, kemampuan literasi dan numerasi siswa, serta akreditasi sekolah juga masih di bawah standar. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam hal ketimpangan gender dalam pendidikan, keterampilan TIK yang rendah pada remaja dan dewasa, serta keterbatasan akses sekolah terhadap listrik, air minum layak, internet, dan fasilitas sanitasi. Kondisi desa juga menunjukkan adanya desa tertinggal yang cukup banyak dan belum meratanya desa mandiri. Di bidang kesehatan, beberapa indikator seperti imunisasi dasar lengkap, prevalensi HIV, tuberkulosis, malaria, dan deteksi dini hepatitis B masih menunjukkan capaian yang rendah. Seluruh permasalahan ini menggambarkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan belum berjalan secara holistik dan inklusif di seluruh dimensi kehidupan masyarakat Kabupaten Kaur.

B. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan daya Saing daerah

Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah merupakan salah satu isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029 yang memerlukan perhatian dan penanganan serius. Kabupaten Kaur meskipun telah mencatat pertumbuhan ekonomi positif dalam periode 2019–2024, masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Laju pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi, dengan penurunan tajam akibat pandemi pada tahun 2020, dan perlahan pulih hingga mencapai 4,15% pada tahun 2024. Namun demikian, pertumbuhan tersebut belum mampu mengimbangi peningkatan jumlah penduduk secara proporsional, sebagaimana ditunjukkan oleh masih rendahnya PDRB per kapita dan belum meratanya peningkatan kesejahteraan. Capaian indikator TPB pun menunjukkan berbagai kelemahan, seperti laju pertumbuhan PDRB per kapita yang rendah, tingkat kepatuhan pelaporan ketenagakerjaan yang belum optimal, serta cakupan kepesertaan dalam sistem jaminan sosial yang masih terbatas. Di sektor pariwisata, jumlah objek wisata unggulan yang dikembangkan masih sedikit, dan tingkat kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara belum mencapai target, menandakan potensi wisata alam dan budaya Kabupaten Kaur belum dikelola secara optimal.

Rendahnya produktivitas sektor ekonomi utama serta terbatasnya diversifikasi usaha juga menjadi hambatan dalam mendorong daya saing daerah. Sektor ketenagakerjaan mengalami persoalan struktural akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran terhadap regulasi, sehingga banyak tenaga kerja tidak tercakup dalam sistem perlindungan sosial. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, KLHS merekomendasikan berbagai program strategis yang telah sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406/2024, antara lain: pengembangan kawasan ekonomi unggulan berbasis pertanian, perikanan, dan UMKM berkelanjutan; insentif investasi hijau;

sistem pelaporan ketenagakerjaan digital terintegrasi; penguatan POKDARWIS dan penyusunan masterplan ekowisata; serta program promosi dan branding wisata "Eco-Kaur" secara internasional. Selain itu, perlu didorong program jaminan sosial seperti Sah Mitra BPJS untuk pekerja sektor informal, dan pemanfaatan dana desa secara produktif guna memperkuat struktur ekonomi lokal. Semua intervensi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kaur yang lebih inklusif, tangguh, dan berdaya saing tinggi di masa mendatang.

C. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur Strategis

Isu belum optimalnya penyediaan infrastruktur strategis merupakan salah satu isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029 yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah. Infrastruktur dasar, yang seharusnya menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat seperti rumah layak huni, air bersih, sanitasi, listrik, jalan lingkungan, pendidikan, dan kesehatan, masih belum tersedia secara merata di seluruh wilayah. Ketimpangan akses terhadap infrastruktur ini berimplikasi pada rendahnya standar hidup minimum, terganggunya kesehatan lingkungan, serta keterbatasan ruang belajar dan layanan kesehatan yang memadai, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil.

Infrastruktur penunjang ekonomi yang seharusnya berfungsi mendorong pertumbuhan investasi, mobilitas barang dan jasa, serta penguatan daya saing daerah juga belum berkembang secara optimal. Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya konektivitas antarwilayah melalui jaringan jalan yang baik, keterbatasan infrastruktur pasar dan pusat distribusi, serta minimnya dukungan infrastruktur energi, pelabuhan, pariwisata, dan teknologi informasi. Infrastruktur untuk mitigasi bencana pun masih terbatas, padahal Kabupaten Kaur termasuk wilayah yang memiliki risiko bencana cukup tinggi.

Capaian beberapa indikator TPB juga menunjukkan masih rendahnya kualitas infrastruktur di Kabupaten Kaur, seperti rendahnya persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki akses terhadap sumber penerangan listrik (baik dari PLN maupun non-PLN), akses air bersih dan sanitasi layak, serta rendahnya kapasitas pembangkit listrik dari energi terbarukan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, KLHS RPJMD merekomendasikan beberapa program prioritas sesuai dengan Kepmendagri No. 900.1.15.5.3406/2024, antara lain: Program Penerangan Pedesaan melalui pemasangan listrik gratis dan sistem *microgrid hybrid* (PLN + PLTS) serta pelatihan teknisi lokal; Proyek SPAM Pedesaan Terintegrasi dengan instalasi sumur bor dan *rainwater harvesting* untuk warga miskin; Program STBM Plus untuk pembangunan sanitasi dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); serta pengembangan Program Mini/Grid PLTS Desa dan pilot *project micro-hydro* dan biogas dengan pendekatan kemitraan publik-swasta. Keseluruhan program tersebut ditujukan untuk mempercepat ketersediaan dan pemerataan infrastruktur strategis di Kabupaten Kaur, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

D. Tingginya Resiko bencana, Degradasi, dan alih Fungsi Lahan

Isu tingginya risiko bencana, degradasi lingkungan, dan alih fungsi lahan merupakan salah satu isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029 yang perlu segera ditangani secara komprehensif. Secara geografis dan geologis, Kabupaten Kaur berada di zona rawan bencana, khususnya gempa bumi dan tsunami karena kedekatannya dengan zona subduksi lempeng di pesisir barat Pulau Sumatera. Selain itu, curah hujan yang tinggi tanpa didukung oleh sistem drainase dan pengelolaan air yang baik menyebabkan banjir rutin di beberapa kecamatan seperti Kaur Selatan, Kinal, dan Tetap. Kawasan perbukitan seperti Muara Sahung dan Luas juga menghadapi ancaman longsor akibat deforestasi dan

pembukaan lahan yang tidak terkendali. Kondisi ini diperparah oleh kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), penurunan kualitas air, serta penurunan keanekaragaman hayati karena berkurangnya tutupan hutan dan habitat alami.

Permasalahan alih fungsi lahan semakin memperburuk situasi. Kawasan hutan yang seharusnya dilindungi kini banyak berubah menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa izin, dan lahan pertanian pangan berubah menjadi kawasan pemukiman maupun infrastruktur. Hal ini tidak hanya memperbesar risiko bencana, tetapi juga mengancam ketahanan pangan daerah dan mempercepat degradasi lingkungan. Beberapa indikator TPB menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan, seperti tingginya jumlah korban bencana per 100.000 penduduk, rendahnya tingkat kesiapsiagaan masyarakat, belum optimalnya penanganan korban bencana sosial dan alam, serta rendahnya ketaatan pemegang izin lingkungan dan luasnya kawasan konservasi yang belum dipulihkan.

Untuk mengatasi isu ini, KLHS merekomendasikan berbagai program prioritas sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5.3406/2024, antara lain: penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi penanggulangan bencana berbasis komunitas; bantuan dan rehabilitasi korban bencana; pengembangan sistem peringatan dini multi-bencana; serta penegakan hukum lingkungan terhadap pelanggaran izin. Selain itu, perlu dilakukan rehabilitasi kawasan konservasi yang rusak, integrasi zonasi rawan bencana ke dalam perencanaan tata ruang, penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana, dan peningkatan pengawasan terhadap alih fungsi lahan dengan pendekatan berbasis teknologi informasi geospasial (SIG). Pendekatan yang terpadu ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melindungi keselamatan masyarakat, dan mendukung pembangunan Kabupaten Kaur yang tangguh terhadap bencana dan berwawasan lingkungan.

E. Tingginya potensi pencemaran dari berbagai sumber

Isu tingginya potensi pencemaran dari berbagai sumber merupakan salah satu isu strategis yang diangkat dalam KLHS RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029 karena berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, kesehatan lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya alam. Kabupaten Kaur saat ini menghadapi permasalahan serius terkait pencemaran air, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), serta sistem pengelolaan sampah yang belum memadai. Salah satu isu krusial adalah penurunan kualitas air tanah dan air permukaan, terutama di wilayah pesisir seperti Desa Wayhawang, yang dipicu oleh aktivitas budidaya tambak udang tanpa pengelolaan limbah yang baik. Air sungai dan pantai mengalami perubahan warna dan aroma, menandakan pencemaran yang signifikan terhadap sumber air baku masyarakat.

Pengelolaan LB3 dari rumah tangga maupun usaha kecil juga belum optimal akibat minimnya fasilitas dan sistem pengumpulan yang aman, sehingga meningkatkan risiko pencemaran tanah dan air di kawasan pemukiman. Masalah sampah juga menjadi perhatian utama, dengan persentase penanganan yang masih rendah dan TPA di Desa Tanjung Besar yang sering kelebihan kapasitas. Belum diterapkannya sistem *sanitary landfill* serta kebiasaan membuang sampah sembarangan memperburuk kebersihan dan estetika lingkungan, khususnya di kawasan perkantoran dan jalan utama. Limbah organik dan plastik dari rumah tangga juga menjadi penyumbang utama pencemaran di wilayah padat seperti Kaur Selatan, berpotensi menghasilkan gas beracun dan mencemari air tanah.

Sebagai upaya mitigasi, KLHS merekomendasikan program prioritas sesuai dengan Kepmendagri No. 900.1.15.5.3406/2024, antara lain: monitoring kualitas air secara berkala, penguatan pengelolaan LB3 melalui inventarisasi pelaku usaha dan fasilitasi pengelolaan LB3 rumah tangga, pembangunan TPA *sanitary landfill* dan revitalisasi TPS 3R, serta penguatan edukasi publik melalui gerakan masyarakat peduli sampah dan air bersih. Selain itu, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan

seperti *insinerator mini*, *biodigester*, dan sistem pemilahan digital juga menjadi solusi inovatif yang diusulkan. Pengawasan terhadap pelaku pencemaran akan diperkuat melalui operasi gabungan dan peningkatan koordinasi antarinstansi penegak hukum lingkungan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kabupaten Kaur dapat mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

2.6.2.2. Isu Global

Dalam menyusun arah pembangunan jangka menengah yang adaptif dan berkelanjutan, pemahaman terhadap isu-isu strategis global menjadi sangat penting, termasuk bagi Kabupaten Kaur. Dalam menghadapi era global yang sarat ketidakpastian, Kabupaten Kaur perlu mencermati berbagai dinamika eksternal yang berpotensi besar memengaruhi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya daerah. Beragam risiko global yang mungkin terjadi mencerminkan adanya tekanan terhadap stabilitas kehidupan masyarakat secara luas, termasuk di wilayah Kabupaten Kaur.

A. Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global paling mendesak yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan pembangunan di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Kaur. Dalam Global Risks Report 2025, perubahan iklim tercatat sebagai risiko utama yang mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan dunia. Secara hukum internasional, isu ini telah direspons melalui Paris Agreement 2015, yang mengikat negara-negara untuk mengambil langkah mitigasi dan adaptasi guna menekan laju pemanasan global. Dampaknya tidak lagi bersifat jangka panjang atau abstrak, melainkan telah nyata terlihat melalui peningkatan suhu bumi, perubahan pola cuaca ekstrem, naiknya permukaan laut, serta semakin seringnya terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor.

Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) melalui *Sixth Assessment Report* (2021–2022) juga memperkuat kesimpulan bahwa intensitas perubahan iklim terjadi semakin cepat, merusak tatanan ekosistem, mengganggu rantai pangan, serta meningkatkan kerentanan kelompok masyarakat rentan. Di Indonesia sendiri, data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan adanya tren kenaikan suhu rata-rata tahunan yang disertai dengan perubahan signifikan pola musim.

Kondisi ini turut dirasakan di Kabupaten Kaur, yang secara geografis memiliki bentang wilayah pesisir, dataran rendah, serta kawasan pegunungan yang menjadikannya rentan terhadap dampak perubahan iklim. Fenomena seperti abrasi pantai di wilayah pesisir, banjir akibat curah hujan tinggi, kekeringan di musim kemarau yang mempengaruhi produksi pertanian, serta peningkatan risiko longsor di daerah berbukit menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi. Selain itu, ketidakpastian musim tanam dan panen berpengaruh langsung terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.

Pembangunan daerah harus mengintegrasikan pendekatan mitigasi, termasuk dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah. Hal ini mencakup perlunya penguatan sistem peringatan dini bencana, rehabilitasi kawasan pesisir, pengelolaan tata air terpadu, konservasi lahan kritis, serta edukasi dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko iklim. Kabupaten Kaur dituntut untuk tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada ketahanan ekologis dan keberlanjutan.

B. Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan *New Urban Agenda* (NUA)

Pembangunan daerah pada abad ke-21 tidak dapat dilepaskan dari komitmen global terhadap agenda pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati secara internasional, khususnya melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *New*

Urban Agenda (NUA). Kedua agenda tersebut menjadi pijakan penting dalam membangun masa depan wilayah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan tangguh terhadap berbagai tantangan. SDGs memberikan kerangka kerja pembangunan lintas sektor hingga tahun 2030, sementara NUA memperjelas bagaimana implementasi pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan di tingkat lokal, termasuk dalam pengelolaan kawasan perkotaan dan sekitarnya. Dalam konteks ini, setiap daerah, termasuk Kabupaten Kaur, dituntut untuk mengintegrasikan nilai-nilai SDGs dan NUA ke dalam seluruh aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

SDGs mencakup 17 tujuan dan 169 target yang meliputi berbagai dimensi pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perlindungan lingkungan, hingga penguatan institusi. Tujuan-tujuan seperti Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, Penanganan Perubahan Iklim, Akses terhadap Air Bersih dan Sanitasi, serta Pengurangan Ketimpangan sangat relevan bagi daerah yang tengah menghadapi tantangan pembangunan dan perubahan iklim. Sementara itu, NUA hasil dari Konferensi Habitat III tahun 2016 menekankan pentingnya tata kelola yang inklusif, keadilan dalam akses ruang publik, serta integrasi fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pembangunan wilayah. Komitmen terhadap agenda global ini bukan hanya formalitas, melainkan harus diterjemahkan dalam kebijakan konkret, sistem perencanaan yang partisipatif, serta penguatan kelembagaan dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya. Dengan waktu pencapaian SDGs yang semakin dekat, percepatan integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi semakin mendesak agar daerah tidak tertinggal dalam menjawab tantangan masa depan dan dapat mewujudkan wilayah yang adil, tangguh, dan berdaya saing.

C. Ketidakpastian Kondisi Ekonomi Global

Ketidakpastian ekonomi global telah menjadi salah satu tantangan utama dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk bagi Kabupaten Kaur.

Ketidakpastian ini timbul dari berbagai faktor saling terkait, seperti meningkatnya konflik geopolitik antarnegara, krisis energi global, disrupsi rantai pasok pasca pandemi, serta kebijakan proteksionis dari negara-negara besar yang berdampak pada stabilitas perdagangan internasional. Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta memanasnya situasi geopolitik di kawasan Laut Cina Selatan, memperlihatkan bagaimana geokonflik saat ini telah berkembang menjadi konfrontasi geoekonomi yang memengaruhi arus barang, energi, dan investasi di tingkat global. Fluktuasi harga komoditas, inflasi internasional, dan ancaman resesi di negara-negara maju memperbesar ketidakpastian ini, dan turut menciptakan tekanan ekonomi yang tidak hanya dirasakan pada skala nasional, tetapi juga menyentuh struktur ekonomi lokal hingga ke daerah terpencil seperti Kabupaten Kaur.

Bagi Kabupaten Kaur yang perekonomiannya masih sangat bergantung pada sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, ketidakpastian ekonomi global dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga pupuk dan bahan bakar, gangguan distribusi logistik, serta fluktuasi harga komoditas pertanian dan hasil laut dapat menurunkan margin keuntungan pelaku usaha mikro dan petani lokal. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur logistik serta akses ke pasar global membuat Kabupaten Kaur berada dalam posisi yang rentan terhadap gangguan eksternal. Sektor lain seperti industri pengolahan dan pariwisata yang mulai berkembang pun menghadapi tantangan akibat kehati-hatian investor dan berkurangnya daya beli masyarakat secara umum.

Jika tidak diantisipasi dengan langkah strategis dan responsif, ketidakpastian global ini berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi antarwilayah, meningkatkan kerentanan sosial, dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah Kabupaten Kaur perlu mendorong transformasi ekonomi menuju struktur yang lebih resilien dan berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.

Penguatan ketahanan pangan lokal, revitalisasi sistem distribusi hasil pertanian dan perikanan, pengembangan industri hilir berbasis sumber daya lokal, serta perluasan akses pembiayaan dan digitalisasi UMKM menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Selain itu, kebijakan fiskal daerah juga harus diarahkan pada perlindungan masyarakat rentan, penguatan kapasitas pelaku usaha lokal, dan pembangunan infrastruktur penopang konektivitas antarwilayah. Dalam jangka panjang, membangun sistem ekonomi yang adaptif terhadap gejolak global adalah prasyarat untuk menciptakan kemandirian daerah dan mewujudkan pembangunan Kabupaten Kaur yang tangguh dan berkelanjutan.

D. Disrupsi Informasi, Polarisasi Sosial, dan Ketimpangan yang Meningkat

Salah satu isu krusial yang disoroti dalam *Global Risks Report 2025* dari *World Economic Forum* adalah meningkatnya risiko polarisasi sosial dan meluasnya penyebaran misinformasi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat mengakses dan menyebarkan informasi secara drastis. Namun, percepatan transformasi digital ini tidak selalu diiringi dengan peningkatan kapasitas literasi digital masyarakat, termasuk di daerah. Ketidaksiapan ini menyebabkan ruang publik digital, khususnya media sosial, menjadi semakin rentan terhadap penyebaran hoaks, disinformasi terorganisir, serta konflik opini yang dapat memicu ketegangan sosial, terutama terkait isu-isu politik, agama, dan identitas.

Fenomena ini tidak hanya terjadi pada skala global atau nasional, tetapi juga mulai terasa relevansinya di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Kaur. Dalam konteks politik lokal, seperti pemilihan kepala daerah, potensi terjadinya ketegangan akibat perbedaan pilihan politik menjadi semakin tinggi seiring masifnya penggunaan media sosial sebagai alat kampanye dan mobilisasi. Pola komunikasi yang cenderung konfrontatif, penyebaran ujaran kebencian, serta

kampanye berbasis informasi yang menyesatkan dapat mengganggu harmonisasi sosial di tengah masyarakat. Kabupaten Kaur yang sedang dalam fase transisi pembangunan dan menghadapi tantangan kesenjangan layanan publik di beberapa wilayah, juga berpotensi mengalami ketimpangan persepsi, kecemburuan sosial, serta penguatan sentimen kelompok jika tidak diantisipasi secara dini.

Kombinasi antara rendahnya literasi digital, polarisasi sosial, dan ketimpangan akses terhadap pendidikan, ekonomi, serta layanan publik dapat berujung pada melemahnya kohesi sosial dan meningkatnya ketegangan antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kaur perlu mengambil langkah preventif dan strategis, antara lain dengan memperkuat edukasi literasi digital, mendorong pemanfaatan media sosial yang sehat dan produktif, serta membangun ruang dialog antar kelompok masyarakat guna menjaga keutuhan sosial. Upaya ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi benar-benar menjadi alat pemersatu, bukan pemicu konflik sosial yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat daerah.

2.6.2.3. Isu Startegis Nasional

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, pemahaman terhadap isu-isu strategis nasional menjadi hal yang sangat penting bagi Kabupaten Kaur. Isu-isu tersebut tidak hanya mencerminkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, tetapi juga menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah yang relevan, responsif, dan kontekstual terhadap tantangan serta potensi lokal. Keterkaitan antara agenda transformasi nasional dengan kondisi aktual di Kabupaten Kaur menjadi dasar dalam merumuskan strategi pembangunan daerah yang selaras dengan prioritas nasional, guna memastikan

efektivitas pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Oleh karena itu, analisis isu strategis nasional dan keterkaitannya dengan Kabupaten Kaur perlu dilakukan secara menyeluruh agar pembangunan di tingkat daerah dapat berjalan secara terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.

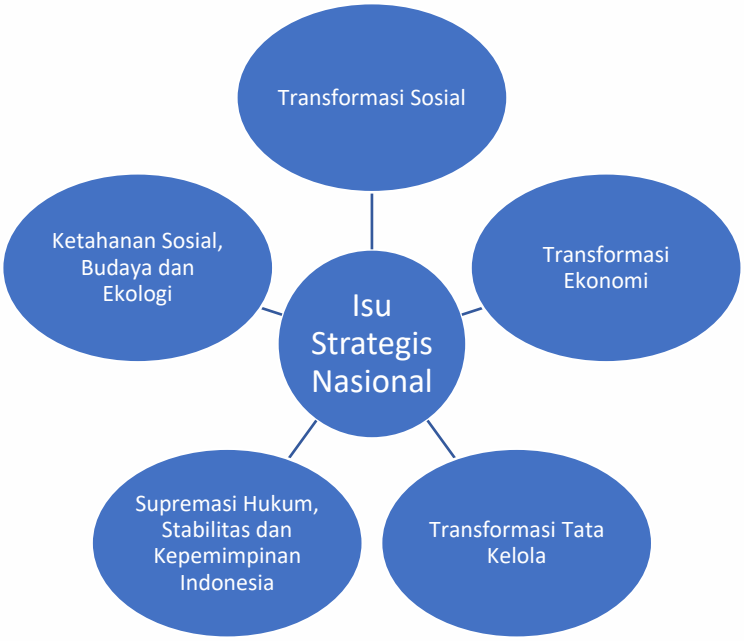

Gambar II-24. Isu Strategis Nasional

Dalam rangka menyusun isu strategis Kabupaten Kaur, diperlukan analisa yang tepat terhadap isu-isu yang mempengaruhinya. Berdasarkan kajian pada dokumen RPJMN 2025-2029, telah diidentifikasi terdapat lima isu strategis nasional sebagai berikut:

1. Isu Transformasi Sosial Nasional
2. Isu Transformasi Ekonomi Nasional
3. Isu Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
4. Isu Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
5. Isu Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Berdasarkan isu-isu tersebut secara lebih mendalam akan dibahas isu dan permaslahan yang mendasarinya.

A. Isu Transformasi Sosial Nasional

Agenda pembangunan nasional 2025–2029 menempatkan pemenuhan pelayanan dasar sebagai prioritas utama, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, guna membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Namun, pelaksanaan agenda ini masih menghadapi tantangan di berbagai sektor yang memerlukan kebijakan yang tepat dan strategi yang terarah.

Sektor kesehatan, Kabupaten Kaur masih menghadapi rendahnya cakupan layanan, tingginya angka penyakit menular dan tidak menular, serta ketimpangan akses antarwilayah. Di bidang pendidikan, persoalan meliputi keterbatasan akses dan kualitas pendidikan, distribusi guru yang belum merata, serta rendahnya daya saing perguruan tinggi. Perlindungan sosial masih menghadapi persoalan akurasi sasaran, keterbatasan layanan bagi kelompok rentan, serta rendahnya literasi dan cakupan program jaminan sosial, terutama bagi pekerja informal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kaur perlu merumuskan kebijakan yang selaras dengan strategi nasional dan berbasis pada kebutuhan lokal, agar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Tabel II-73 Isu Strategis Transformasi Sosial Nasional

No.	Kategori	Permasalahan
1.	Kesehatan untuk Semua	Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi (189/100.000)
		Stunting masih tinggi (21,6%)
		Prevalensi obesitas terus meningkat (21,8%)
		Persentase aktivitas fisik cukup pada penduduk usia ≥10 tahun masih rendah (66,5%)
		Kasus baru TBC peringkat ke-2 dunia (385 per 100.000 penduduk)
		Kasus baru kusta peringkat ke-3 dunia (10.976 kasus baru)
		43,78% puskesmas tidak tersedia 9 jenis nakes sesuai standar
		20,36% RSUD kelas C belum memiliki 7 dokter spesialis dasar dan penunjang
		78,35% rumah sakit terakreditasi paripurna
		63,54% FKTP terakreditasi paripurna
2.	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Akses pendidikan belum merata (APK PAUD rendah; tingkat penyelesaian SMA/SMK/MA sederajat 76,79%)
		Kualitas pendidikan masih rendah (skor PISA: membaca 359; matematika 366; sains 383)

No.	Kategori	Permasalahan
		Kualitas fasilitas, dan distribusi guru terbatas (<50% memiliki sertifikat pendidik dan hanya 870 ribu guru)
		Kualifikasi pendidikan angkatan kerja masih rendah (55,43% berpendidikan SMP ke bawah)
		.Rendahnya kualitas lulusan, sehingga produktivitas dan daya saingnya masih rendah (40,9% yang bekerja di bidang keahlian non tinggi)
		Daya saing perguruan tinggi di tingkat nasional masih rendah (peringkat 75 dari 132 negara dalam GII pada tahun 2022)
3.	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Akurasi program bantuan sosial masih rendah
		Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim
		Kesempatan yang belum merata bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih rendah
		Belum optimalnya integrasi layanan dan sistem administrasi kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan
		Program Jaminan Sosial belum optimal dan inklusif

B. Isu Transformasi Ekonomi Nasional

Isu-isu strategis transformasi ekonomi nasional mencerminkan tantangan utama yang juga dirasakan di Kabupaten Kaur. Salah satunya adalah lemahnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap ekonomi. Di Kaur, kegiatan industri masih terbatas, nilai tambah produk pertanian dan perikanan belum optimal, serta pemanfaatan teknologi masih rendah.

Potensi perikanan dan pesisir belum dikelola secara maksimal. Diversifikasi usaha di wilayah pesisir masih minim, dan belum ada kebijakan tata kelola ekonomi biru yang kuat. Ekonomi kreatif juga belum berkembang karena kurangnya dukungan terhadap pelaku usaha kreatif, lemahnya promosi, dan terbatasnya akses pasar.

Mayoritas tenaga kerja di Kaur berpendidikan menengah ke bawah dan bekerja di sektor informal. Ini mempengaruhi produktivitas daerah dan menyulitkan pengembangan sektor industri atau jasa modern. Pertanian sebagai sektor utama juga menghadapi masalah produktivitas rendah, minimnya regenerasi petani muda, dan degradasi lahan.

UMKM dan koperasi di Kaur masih kesulitan dalam mengakses pembiayaan dan memanfaatkan teknologi. Banyak pelaku usaha kecil belum memiliki

pendampingan usaha dan belum siap terhubung dengan pasar digital. Sementara itu, infrastruktur dasar di wilayah perdesaan masih belum memadai. Akses terhadap air bersih, sanitasi, dan jalan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan.

Transformasi energi ke arah yang lebih bersih juga belum berjalan cepat. Kaur memiliki potensi energi terbarukan seperti mikrohidro dan surya, namun pemanfaatannya masih sangat terbatas. Kesadaran terhadap pekerjaan hijau pun masih rendah.

Digitalisasi belum merata. Banyak desa masih belum terjangkau jaringan internet yang stabil, sehingga pemanfaatan teknologi informasi belum bisa mendorong ekonomi lokal secara optimal. Sektor pariwisata juga belum mampu berkontribusi signifikan terhadap perekonomian karena keterbatasan akses, promosi, dan infrastruktur.

Melihat kondisi ini, Kabupaten Kaur perlu fokus pada pengembangan sektor unggulan yang berbasis potensi lokal. Langkah ini perlu diikuti dengan peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan UMKM, percepatan digitalisasi, serta pembangunan infrastruktur dan energi ramah lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Adapun secara lebih detail, berbagai isu strategis nasional dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:

Tabel II-74 Isu Strategis Transformasi Ekonomi Nasional

No.	Kategori	Permasalahan
1.	Industri	Deindustrialisasi akibat penurunan rasio PDB industri pengolahan
		Rendahnya produktivitas tenaga kerja dalam industri
		Kompleksitas dan daya saing produk industri masih rendah
		Adopsi teknologi lama masih dominan
		Mismatch produk dengan permintaan global
		Rendahnya kemampuan inovasi dalam industri
		Tuntutan energi hijau semakin besar dalam industri
2.	Ekonomi Biru	Upaya konservasi kawasan perairan dan pesisir yang belum maksimal
		Rendahnya diversifikasi usaha ekonomi biru
		Kurangnya kebijakan tata kelola pada sektor ekonomi biru
3.	Ekonomi Kreatif	Ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal
		Indeks kekayaan intelektual Indonesia masih di bawah rata-rata
		Kurangnya akses dalam komersialisasi kekayaan intelektual

No.	Kategori	Permasalahan
		Kurangnya kemitraan dalam ekosistem ekonomi kreatif
		Daya saing SDM ekonomi kreatif yang masih rendah
4.	Produktivitas Tenaga Kerja	Besarnya angkatan kerja berpendidikan SMP ke bawah
		Ketidaksesuaian keahlian dengan kebutuhan industri
		Belum terbangunnya sistem informasi pasar tenaga kerja yang kredibel
		Stagnasi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
5.	Pertanian	Rendahnya nilai tambah produk pertanian
		Rendahnya produktivitas pertanian
		Rendahnya adopsi teknologi pertanian
		Aging farmer
		Degradasi kualitas lahan
6.	UMKM dan Koperasi	Rendahnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian
		Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam UMKM
		Belum optimalnya akses UMKM terhadap pendanaan
		Rendahnya wirausaha yang berorientasi tumbuh
7.	Perkotaan dan Perdesaan	Belum optimalnya kontribusi perkotaan terhadap ekonomi nasional
		Pola pembangunan perkotaan yang tidak merata
		Kurangnya layanan perkotaan yang memadai
		Masalah sosial-ekonomi di perkotaan
		Degradasi lingkungan perkotaan dan risiko bencana
		Tata kelola wilayah yang belum terpadu
		Ketimpangan kesejahteraan antara perkotaan dan perdesaan
		Perubahan struktur ekonomi akibat pembangunan urbanisasi
8.	Pekerjaan Hijau	Minimnya pemahaman dunia industri terhadap pekerjaan hijau
		Belum terintegrasinya strategi SDM dalam pekerjaan hijau
		Belum memadainya pengembangan keahlian SDM untuk pekerjaan hijau
		Terbatasnya akses pendanaan dalam mendukung pekerjaan hijau
		Lemahnya peran dunia usaha dan akademisi dalam pekerjaan hijau
9.	Pengelolaan Hutan Lestari	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional masih rendah
		Rendahnya produktivitas sektor hasil hutan kayu
		Belum optimalnya pemanfaatan bioekonomi sektor kehutanan
		Kurangnya peran masyarakat dalam pengelolaan hutan
		Rendahnya dukungan regulasi dalam pengelolaan hutan
		Tingginya tingkat deforestasi
		Belum optimalnya kerja sama multistakeholder dalam pengelolaan hutan
10.	Percepatan Transisi Energi	Ketergantungan terhadap energi fosil yang terus meningkat
		Emisi GRK sektor energi cukup tinggi
		Potensi energi terbarukan masih belum dimanfaatkan optimal
		Kualitas infrastruktur ketenagalistrikan belum memadai
		Kurangnya dukungan regulasi dalam transisi energi
		Dominasi pembangkit listrik berbasis fosil masih tinggi
		Ketergantungan pada impor energi meningkat
		Belum optimalnya rantai nilai dalam transisi energi
11.	Digital	Kurangnya pondasi dalam percepatan digitalisasi nasional
		Belum meratanya akses infrastruktur digital
		Kurangnya adopsi teknologi digital dalam industri dan layanan publik
		Kurangnya investasi dalam SDM digital
		Belum optimalnya sistem keamanan siber
12.	Badan Usaha Milik Negara	Rendahnya daya saing BUMN dalam sektor ekonomi
		Kurangnya kontribusi BUMN dalam ekonomi nasional

No.	Kategori	Permasalahan
		Kurangnya efisiensi pengelolaan BUMN dalam pembangunan nasional
13.	Pariwisata	Destinasi wisata menghadapi masalah keberlanjutan budaya
		Aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata masih belum optimal
		Kurangnya kualitas layanan wisata
		Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan akibat minimnya pilihan wisata
		Kurangnya keterampilan SDM pariwisata
14.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Keterbatasan integrasi ekonomi domestik dan global
		Ketimpangan sektor perdagangan antarwilayah
		Kurangnya partisipasi dalam perdagangan global
		Kurangnya akses keuangan untuk mendukung ekspor
		Regulasi yang menghambat ekspor dan investasi
		Ketimpangan sektor perdagangan dalam negeri akibat regulasi yang belum efisien

C. Isu Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan merupakan fondasi penting dalam proses perencanaan pembangunan dan telah diakui secara luas sebagai faktor penentu keberhasilan kebijakan publik. Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, tata kelola tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup dimensi politik dan hukum. Esensi utama dari tata kelola yang baik terletak pada kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya secara efisien, berintegritas, serta menjamin transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, dan kebermanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi.

Perubahan global yang berlangsung cepat, termasuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang bersih dan responsif, menjadikan transformasi tata kelola sebagai agenda yang semakin mendesak. Pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Kaur, perlu menyesuaikan sistem tata kelolanya agar selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan mampu menjaga konsistensi serta kesinambungan program lintas sektor.

Implementasi tata kelola di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Reformasi birokrasi yang selama ini dijalankan cenderung berfokus pada aspek prosedural dan belum menyentuh substansi tata kelola secara

komprehensif. Hal ini terlihat dari rendahnya efektivitas dalam mencegah praktik-praktik korupsi, yang tercermin pula dari menurunnya skor Indeks Persepsi Korupsi secara nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Persoalan tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya distribusi tugas dan kewenangan antarunit kerja menjadi hambatan utama dalam menciptakan birokrasi yang efisien dan adaptif. Keadaan ini berdampak pada lambatnya proses pengambilan keputusan, terganggunya kelancaran pelayanan publik, dan berkurangnya efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Intervensi politik dalam birokrasi turut menjadi persoalan yang memengaruhi stabilitas dan kesinambungan kebijakan. Fluktuasi dinamika politik lokal seringkali menyebabkan inkonsistensi arah kebijakan, yang pada akhirnya melemahkan tata kelola yang berbasis prinsip-prinsip good governance. Untuk merespons hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kaur perlu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas regulasi, dan menanamkan budaya birokrasi yang profesional serta independen dari pengaruh politik.

Jika berbagai tantangan ini tidak segera diatasi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan akan terus terhambat dan pencapaian pembangunan tidak akan mampu menjawab kebutuhan serta ekspektasi masyarakat. Reformasi tata kelola yang berkelanjutan perlu dikawal sebagai dasar yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan Kabupaten Kaur yang modern, transparan, akuntabel, dan kompetitif. Adapun secara lebih detail, berbagai isu strategis dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:

Tabel II-75. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

No.	Kategori	Permasalahan
1	Integritas Partai Politik	Integritas partai politik belum terwujud karena standar etika belum ada, demokrasi internal belum optimal, kaderisasi belum terlembaga, rekrutmen politik belum terbuka, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan belum optimal.
2	Sistem Anti Korupsi	Lemahnya kontrol dalam pencegahan di sektor-sektor rawan

No.	Kategori	Permasalahan
	dan Akuntabilitas Pembangunan	korupsi serta rendahnya budaya antikorupsi yang menghambat partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi.
3	Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik	Belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat serta belum memadainya kompetensi digital penyelenggara dan pengguna pelayanan publik.
4	Sistem Penggajian Tunggal	Disparitas kesejahteraan ASN pusat dan daerah, remunerasi ASN belum memenuhi prinsip kompetitif, manfaat pensiun ASN masih rendah, dan adanya dual sistem penggajian ASN.
5	Manajemen Talenta	Penerapan sistem merit belum optimal, belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D, dan 34% ASN berusia 50 tahun ke atas (aging).
6	Kualitas Regulasi	Kondisi hiper regulasi, kewenangan pengelolaan regulasi tersebar di beberapa Kementerian, SDM di bidang regulasi belum memadai, serta partisipasi dalam pembentukan regulasi belum optimal.
7	Integrasi Proses Bisnis	Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih terfragmentasi, tidak efektif, serta tumpang tindih program yang memboroskan anggaran.

D. Isu Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Sistem hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, belum maksimalnya penerapan hak asasi manusia, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum. Akibatnya, kepatuhan hukum masih rendah, dan akses terhadap keadilan belum merata, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan kelompok rentan.

Perkembangan teknologi digital membuka peluang untuk memperkuat keamanan dan kesadaran bela negara, namun belum didukung oleh sistem yang merata. Demokrasi lokal masih bersifat prosedural, ditandai dengan rendahnya partisipasi masyarakat, maraknya politik uang, serta belum kuatnya peran lembaga legislatif. Nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan juga belum sepenuhnya membentuk kehidupan sosial dan politik masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kaur perlu memperkuat tata kelola hukum, politik, dan ekonomi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, sinergi lintas sektor, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan agar pembangunan bisa

berjalan lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. Adapun secara lebih detail, berbagai isu strategis dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:

Tabel II-76. Isu Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

No.	Kategori	Permasalahan
1	Stabilitas Makro	Risiko climate action; deglobalisasi; krisis lapangan pekerjaan; krisis utang; konfrontasi geoekonomi; asset bubble burst; inflasi tinggi; tingkat suku bunga tinggi; masih geopolitik; disrupsi rantai pasok; perlemahan ekonomi global; transisi demografi; potensi pandemi ke depan; rendahnya penerimaan perpajakan; terbatasnya belanja negara; serta imbal hasil obligasi yang tinggi.
2	Demokrasi	Demokrasi masih prosedural dengan ciri: kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; informasi dan komunikasi publik belum merata; politik electoral masih memiliki permasalahan seperti politik uang dan polarisasi isu SARA; serta fungsi-fungsi asasi demokrasi belum terlaksana optimal.
3	Politik Luar Negeri	Dinamika geopolitik dan geoekonomi meningkatkan ketidakpastian pelaksanaan kebijakan luar negeri; konflik intra dan antar negara; disrupsi rantai pasok global; tren global economic decoupling; belum selesainya perundingan batas wilayah; serta postur dan sinergi diplomasi Indonesia yang belum ideal.
4	Hukum	Praktik penegakan hukum yang belum terpadu; efisiensi rendah; HAM belum menjadi dasar utama; rendahnya budaya hukum masyarakat akibat minimnya literasi dan pemberdayaan; keterbatasan akses terhadap keadilan; serta kelembagaan penegak hukum yang belum profesional.
5	Keamanan	Ancaman insurgensi; konflik sosial; serangan terorisme; pelanggaran batas wilayah; kejahatan transnasional; disrupsi teknologi; pelanggaran hukum di wilayah perbatasan; serta perlindungan IIVN dari serangan siber.
6	Pertahanan	Dampak konflik hegemoni; perubahan tipologi perang semakin kompleks; perang berbasis Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, dan High Yield Explosive (CBRNE); serta meningkatnya respons negara-negara dalam memperkuat industri pertahanan.

E. Isu Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Pembangunan di Kabupaten Kaur perlu diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara nilai agama, budaya lokal, dan pelestarian lingkungan. Nilai-nilai tersebut penting sebagai dasar dalam memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat. Peran sumber daya manusia, khususnya dari lingkungan keluarga, sangat penting dalam membentuk karakter dan etika masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan harus melibatkan semua kelompok secara setara, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan, terutama dalam akses terhadap layanan dasar dan peluang pembangunan.

Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan tekanan terhadap sumber daya alam, Kabupaten Kaur menghadapi tantangan dalam menjaga kelestarian

lingkungan. Alih fungsi hutan yang tidak terkendali mengganggu fungsi ekosistem dan menurunkan kualitas lingkungan. Petani dan nelayan juga belum menikmati peningkatan kesejahteraan karena rendahnya produktivitas dan akses pasar. Di sisi lain, pengelolaan sampah menjadi isu yang mendesak karena kapasitas TPA mendekati batas maksimal tanpa solusi pengelolaan yang terintegrasi.

Kabupaten Kaur juga menghadapi risiko perubahan iklim yang berdampak pada sektor pertanian, perikanan, air bersih, dan kesehatan masyarakat. Masalah bencana alam, kelangkaan air, serta infrastruktur sanitasi yang belum memadai memperparah kondisi sosial dan ekonomi warga. Untuk itu, arah pembangunan daerah harus dirancang secara menyeluruh dengan mengedepankan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan yang berbasis kearifan lokal dan berkelanjutan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Adapun secara lebih detail, berbagai isu strategis dalam lima tahun kedepan sebagai berikut:

Tabel II-77. Isu Ketahanan Sosial dan Politik

No.	Kategori	Permasalahan
1.	Isu Agama	Nilai agama belum optimal dalam pembangunan, wawasan dan identitas nasional belum maju, serta rendahnya literasi keagamaan.
2.	Isu Budaya	Karakter dan jati diri bangsa menghadapi tantangan negatif budaya global, nilai Pancasila belum terinternalisasi, serta rendahnya peran budaya dalam pembangunan.
3.	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Belum optimalnya peran keluarga, rendahnya pemenuhan hak perempuan dan kelompok rentan, serta masih adanya ketimpangan gender.
4.	Pangan	Belum idealnya kualitas pangan, rendahnya kapasitas produksi pangan, serta tata kelola sistem pangan yang masih lemah.
5.	Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati	Kualitas air, udara, dan lahan semakin menurun, meningkatnya pembuangan limbah ilegal, serta ancaman kepunahan spesies tumbuhan dan hewan.
6.	Energi	Akses energi yang belum merata, pemanfaatan energi baru-terbarukan masih rendah, serta tata kelola energi yang belum efektif.
7.	Bencana dan Perubahan Iklim	Frekuensi bencana meningkat drastis, jutaan keluarga tinggal di daerah rawan bencana, serta dampak perubahan iklim yang makin luas.

2.6.2.4. Isu Strategis Wilayah Sumatera

Dalam rangka mendukung sinkronisasi antara arah pembangunan nasional dan daerah, pemahaman terhadap isu-isu strategis wilayah Sumatera menjadi langkah penting bagi Kabupaten Kaur dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah. Isu-isu strategis tersebut merupakan bagian dari agenda pembangunan regional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dan mencerminkan karakteristik serta tantangan pembangunan lintas wilayah di Pulau Sumatera. Dengan memahami isu-isu ini, Kabupaten Kaur dapat merumuskan kebijakan yang selaras dengan prioritas pembangunan kawasan, sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan, potensi, dan kondisi aktual di tingkat lokal. Pemahaman tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan efektivitas pembangunan daerah yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.

Gambar II-25. Isu Strategis Wilayah Sumatera

Untuk merumuskan isu strategis di Kabupaten Kaur, dibutuhkan analisis yang akurat terhadap berbagai faktor yang memengaruhinya. Mengacu pada hasil telaah terhadap dokumen RPJMN 2025–2029, terdapat enam isu strategis wilayah

Sumatera yang telah diidentifikasi sebagai rujukan utama dalam perumusan isu strategis daerah:

1. Belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan lain-lain.
2. Belum optimalnya kualitas SDM dimana mayoritas tenaga kerja didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah.
3. Degradasi lingkungan karena aktivitas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.
4. Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan terutama di daerah 3T.
5. Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas infrastruktur konektivitas antarwilayah.
6. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana terutama di pesisir barat Sumatra.

2.6.2.5. Isu Strategis Provinsi Bengkulu

Gambar II-26. Isu Strategis Provinsi Bengkulu

Penguatan keterpaduan antara kebijakan pembangunan provinsi dan kabupaten/kota menuntut adanya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan yang terstruktur dan tidak dapat diabaikan. Sebagai bagian integral dari sistem pembangunan nasional, Provinsi Bengkulu memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan selaras dengan prioritas pembangunan di daerah, termasuk Kabupaten Kaur. Untuk itu, penguasaan yang komprehensif terhadap isu-isu strategis di tingkat provinsi menjadi landasan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang responsif, kontekstual, dan berorientasi pada hasil. Keterhubungan yang erat antara isu strategis provinsi dan kebutuhan riil di tingkat lokal menjadi kunci bagi Pemerintah Kabupaten Kaur dalam merancang strategi pembangunan yang terintegrasi dengan agenda provinsi, sekaligus mampu mengatasi tantangan dan mengakselerasi pemanfaatan potensi wilayah secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, terdapat enam isu strategis utama yang menjadi fokus arah pembangunan Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance* dalam tata kelola pemerintahan.
2. Belum optimalnya ketahanan pangan daerah.
3. Kurangnya pengembangan hilirisasi komoditas unggulan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah
4. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar dan strategis yang merata dan berkualitas
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta mitigasi kebencanaan.
6. Ketimpangan dalam kualitas dan akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesetaraan gender, serta perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas

Provinsi Bengkulu saat ini dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap kualitas pembangunan. Salah satu isu utama adalah belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip *good and clean governance* dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini tercermin dari masih adanya praktik birokrasi yang belum efisien, rendahnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Kondisi ini berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Pada sektor ketahanan pangan, Provinsi Bengkulu juga menghadapi tantangan serius. Ketergantungan pada pasokan luar daerah, belum kuatnya sistem produksi lokal, serta lemahnya infrastruktur pendukung menjadikan ketahanan pangan masih rentan terhadap gejolak harga dan krisis distribusi. Hal ini diperparah dengan kurang optimalnya pengembangan hilirisasi komoditas unggulan, seperti kopi, karet, sawit, dan perikanan. Potensi besar sektor-sektor ini belum mampu dimaksimalkan untuk menciptakan nilai tambah, memperkuat industri lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi.

Isu lain yang menjadi sorotan adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar dan strategis. Sebagian wilayah di Bengkulu masih mengalami keterbatasan akses jalan, air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi. Ketimpangan infrastruktur ini berdampak pada rendahnya konektivitas antarwilayah dan lambatnya pertumbuhan kawasan potensial. Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal, serta lemahnya sistem mitigasi kebencanaan, membuat wilayah ini rentan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana alam.

Ketimpangan juga terjadi dalam aspek sosial, khususnya pada akses dan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta perlindungan kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Ketidakmerataan ini tidak hanya memperlebar jurang ketimpangan antar wilayah,

tetapi juga menghambat terwujudnya pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan mengidentifikasi dan memahami isu-isu strategis di atas, pemerintah kabupaten, termasuk Kabupaten Kaur, perlu merumuskan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan arah kebijakan provinsi. Pendekatan ini akan memastikan sinergi yang kuat antar level pemerintahan dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

2.6.2.6. Isu Strategis Kabupaten Kaur

Dalam rangka menyusun arah pembangunan jangka menengah yang terarah dan berkelanjutan, identifikasi isu strategis Kabupaten Kaur perlu dilakukan secara menyeluruh dan mendalam. Isu-isu tersebut merupakan hasil integrasi dari berbagai sumber, mulai dari potensi dan permasalahan khas daerah, temuan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), hingga keselarasan dengan isu-isu global, isu strategis nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, serta isu-isu strategis wilayah Sumatera. Dengan memahami dan merumuskan isu strategis secara holistik, Pemerintah Kabupaten Kaur dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih kontekstual, adaptif, serta selaras dengan dinamika regional dan global, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Isu strategis yang dihadapi Kabupaten Kaur mencerminkan tantangan nyata dari berbagai dimensi pembangunan, mulai dari rendahnya daya saing sumber daya manusia, lambatnya pertumbuhan ekonomi lokal, hingga belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup. Kondisi ini diperkuat oleh temuan KLHS yang menunjukkan adanya tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Di sisi lain, isu global seperti perubahan iklim, krisis biodiversitas, dan perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan turut mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Hal ini

juga sejalan dengan agenda transformasi nasional yang menitikberatkan pada transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, dan ketahanan lingkungan. Di tingkat regional, isu strategis Pulau Sumatera seperti rendahnya hilirisasi komoditas unggulan, keterbatasan infrastruktur, dan tingginya kerentanan bencana di wilayah pesisir turut relevan dengan konteks Kabupaten Kaur. Dengan demikian, perumusan isu strategis daerah harus mempertimbangkan keterkaitan lintas skala dan lintas sektor, agar mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan menjawab tantangan pembangunan secara komprehensif. Berikut ini isu strategis daerah Kabupaten Kaur:

Tabel II-78 Isu Stratgeis Daerah

Potensi Daerah	Permasalahan			Isu Lingkungan Dinamis			Kabupaten Kaur
		Isu Klhs		Global	Nasional	Sumatera	
Demografi dan SDM	Daya Saing Sumber Daya Manuisa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang; Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan daya Saing daerah	Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	Involuntary Migration; Dampak Buruk Teknologi Berbasis AI	Transformasi Sosial	kualitas SDM dimana mayoritas tenaga kerja didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah	Peningkatan kualitas SDM belum optimal
Potensi Ekonomi Lokal	Rendahnya Daya Saing Daerah		Tidak Pastian Ekonomi Global	Cuaca Ekstrem; Perubahan Kritikal Terhadap Ekosistem; Biodiversity dan Gangguan Ekosistem; Krisis Sumber Daya Alam; Polarisasi Sosial	Transforamsi Ekonomi; Isu Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan lain-lain.	Daya Saing Daerah dan Produktivitas Ekonomi Belum Optimal
Potensi Pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas yang Lambat						
	Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat		Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)			akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan terutama di daerah 3T	Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi lokal belum optimal
Potensi Sumber Daya Alam	Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Belum Optimal	Tingginya Resiko bencana, Degradasi, dan alih Fungsi Lahan; Tingginya potensi pencemaran dari berbagai sumber	Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana			Degradasi lingkungan karena aktivitas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan; tingginya kerentanan dan potensi bencana terutama di pesisir	Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan

Potensi Daerah	Permasalahan			Isu Lingkungan Dinamis			Kabupaten Kaur
		Isu Klhs		Global	Nasional	Sumatera	
						barat Sumatra	
Potensi Geografis dan Konektivitas Laut	Infrastruktur yang Belum Merata	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur Strategis	Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)			terbatasnya kapasitas dan kualitas infrastruktur konektivitas antarwilayah	Belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah
	Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi		Disrupsi Informasi, Polarisasi Sosial, dan Ketimpangan yang Meningkat	Misinformasi dan Disinformasi	Transformasi Tata Kelola; Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia		Belum optimalnya efektivitas dan akuntabilitas birokrasi daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, responsif, dan partisipatif

BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

A. Visi dan Misi

Visi merupakan pernyataan umum tentang kondisi yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga mencerminkan arah pembangunan atau gambaran masa depan daerah yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan (kejelasan arah), yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan isu strategis dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang, kondisi daerah, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis yang muncul, maka visi Kabupaten Seluma tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

"Menuju Kabupaten Kaur Yang Maju, Sejahtera dan Bahagia"

Penjabaran Visi diatas adalah sebagai berikut:

Maju : Maju berarti mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, baik dari segi infrastruktur, perekonomian, maupun kualitas sumber daya manusia. Kabupaten Kaur dapat dikatakan maju apabila terjadi peningkatan daya saing daerah melalui optimalisasi sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata, serta tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Sejahtera : mencerminkan kondisi masyarakat yang hidup dalam kecukupan, aman, dan makmur. Dalam konteks Kabupaten Kaur, kesejahteraan dapat terwujud jika masyarakat memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak, pendapatan yang cukup,

serta layanan sosial yang berkualitas. Masih adanya tantangan seperti tingkat kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan melalui kebijakan yang berpihak pada peningkatan ekonomi rakyat, penguatan UMKM, serta pemerataan pembangunan.

Bahagia : Bahagia tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga dari ketenteraman dan keharmonisan sosial. Masyarakat Kabupaten Kaur dapat dikatakan bahagia apabila memiliki lingkungan yang nyaman, kehidupan sosial yang harmonis, serta pelayanan publik yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Pembangunan yang berorientasi pada kebahagiaan masyarakat dapat dilakukan dengan memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya, mengembangkan potensi wisata yang inklusif, serta menghadirkan kebijakan publik yang mendukung kesejahteraan dan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Visi "Menuju Kabupaten Kaur yang Maju, Sejahtera, dan Bahagia" mencerminkan harapan akan terciptanya daerah yang berkembang, makmur, dan harmonis. Maju berarti adanya peningkatan infrastruktur, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui penguatan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Sejahtera menggambarkan masyarakat yang hidup layak, memiliki pekerjaan, pendapatan cukup, serta akses terhadap layanan sosial yang merata. Sementara itu, bahagia mencerminkan kondisi masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang aman, harmonis, dan mendapatkan pelayanan publik yang adil dan responsif. Visi ini menjadi arah pembangunan Kabupaten Kaur yang berpihak pada rakyat dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

1. ***Misi Pertama: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Inovatif, Humanis, Akuntabel, Tanggap Dan Melayani.*** Birokrasi pemerintahan didorong untuk tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan ramah. Melalui peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, diharapkan birokrasi Pemerintah Kabupaten Kaur mampu menjadi motor penggerak perubahan yang melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
2. ***Misi Kedua: Peningkatan Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Perkotaan Yang Selaras, Seimbang dan Berkeadilan Antar Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan Dan Mitigasi Bencana.*** Fokus utama dari misi ini adalah memastikan bahwa seluruh masyarakat, memiliki akses yang setara terhadap infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, pembangunan juga diarahkan untuk tanggap terhadap potensi bencana, dengan memperkuat aspek mitigasi dan adaptasi lingkungan, sehingga infrastruktur yang dibangun tidak hanya fungsional tetapi juga tahan terhadap risiko bencana di masa depan.
3. ***Misi Ketiga: Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cedas, Berkualitas, Religius, Harmonis Dan Berdaya Saing Yang Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama, Adat Budaya Dan Kearifan Lokal Melalui Peningkatan Akses Serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan Dan Kebutuhan Dasar Lainnya.*** Dengan layanan pendidikan yang lebih merata dan tenaga kesehatan yang tersebar hingga ke pelosok, diharapkan masyarakat tidak hanya memperoleh kesejahteraan fisik, tetapi juga memiliki kecerdasan spiritual, sosial, dan emosional yang seimbang. Misi ini menjadi dasar dalam mewujudkan

generasi yang unggul, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.

4. ***Misi Keempat: Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Mengoptimalkan Sumberdaya Daerah Melalui Peningkatan Dan Pengembangan Sektor Pertanian, Perikanan/Kelautan, Industri UMKM Dan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Lokal Dan Kewirausahaan.*** Dengan mengedepankan potensi daerah dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, misi ini bertujuan menciptakan ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan daerah secara merata dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, misi ini diarahkan untuk memperluas akses terhadap modal usaha, meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi lokal, memperkuat rantai pasok dan pemasaran produk unggulan daerah, serta mengembangkan kawasan ekonomi strategis yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi Kabupaten Kaur di tengah dinamika perubahan global dan tantangan pembangunan jangka panjang.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-1. Keselarasan Misi Pada RPJPD Kabupaten Kaur dengan RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029

Misi RPJPD 2025-2045	Misi RPJMD 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029	Misi RPJMN 2025-2029 (Asta Cita)
Misi3: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintah yang berkualitas dan pelayanan yang profesional.	Misi 1: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Inovatif, Humanis, Akuntabel, Tanggap Dan Melayani.	Misi 1: .Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan	Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

Misi RPJPD 2025-2045	Misi RPJMD 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029	Misi RPJMN 2025-2029 (Asta Cita)
		dan teknologi, berbudaya, profesional serta religius	
Misi7: Meningkatkan pembangunan kewilayahan yang merata, berkualitas, ramah lingkungan, dan berkesinambungan	Misi 2: Peningkatan Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Perkotaan Yang Selaras, Seimbang dan Berkeadilan Antar Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan Dan Mitigasi Bencana.	Misi 2: Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilaya	Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Berdaya Saing, dan Berkarakter	Misi 3: Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cedas, Berkualitas, Religius, Harmonis Dan Berdaya Saing Yang Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama, Adat Budaya Dan Kearifan Lokal Melalui Peningkatan Akses Serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan Dan Kebutuhan Dasar Lainnya..	Misi 3: Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan Rasa Aman.	Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
			Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Misi 5: Menciptakan Ketahanan Sosial Budaya yang moderat serta berorientasi kemaslahatan dan Pengelolaan Sumber Daya Ekologi yang Berkelanjutan.			Asta Cita 8: Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Misi 2: Mewujudkan transformasi ekonomi secara inklusif, dan berkelanjutan dengan peningkatan produktivitas daerah yang berdaya saing.	Misi 4: Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Mengoptimalkan Sumberdaya Daerah Melalui Peningkatan Dan Pengembangan Sektor Pertanian, Perikanan/Kelautan, Industri UMKM Dan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Lokal Dan Kewirausahaan	Misi 4: Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan	Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
			Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
			Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
			Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Keselarasan antara Misi RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029 dengan arah pembangunan jangka panjang dalam RPJPD 2025–2045, serta dengan RPJMD Provinsi Bengkulu dan RPJMN (Asta Cita), mencerminkan konsistensi visi

pembangunan yang terintegrasi dari tingkat daerah hingga nasional. Dokumen perencanaan ini menjadi acuan utama untuk memastikan bahwa setiap misi pembangunan di Kabupaten Kaur tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari sinergi dan harmonisasi kebijakan pembangunan yang menyeluruh, inklusif, dan berkelanjutan.

Misi pertama RPJMD Kabupaten Kaur, yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang inovatif, humanis, akuntabel, tanggap, dan melayani, menunjukkan keterpaduan arah dengan Misi ketiga RPJPD, yaitu transformasi tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan pelayanan yang profesional. Keterpaduan ini juga tercermin dalam Misi RPJMD Provinsi Bengkulu, yang menekankan penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi serta pembangunan karakter ASN. Sementara itu, di tingkat nasional, Asta Cita 7 secara tegas menyuarakan penguatan reformasi birokrasi, hukum, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang semuanya mendukung terwujudnya pemerintahan yang berintegritas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam hal pembangunan wilayah dan infrastruktur, Misi kedua RPJMD Kabupaten Kaur mengedepankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar dan perkotaan yang merata, berkeadilan, dan berbasis mitigasi bencana serta berwawasan lingkungan. Arah ini sepenuhnya sejalan dengan Misi ketujuh RPJPD, yang mendorong pembangunan kewilayahan yang berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Di tingkat provinsi, Misi kedua RPJMD Bengkulu mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Hal ini juga beririsan erat dengan Asta Cita 3, yang menempatkan pengembangan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam mendorong penciptaan lapangan kerja, penguatan koperasi, serta pengembangan agromaritim dan industri kreatif di daerah.

Misi ketiga RPJMD Kabupaten Kaur, yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, religius, harmonis, dan berdaya saing melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar, memperlihatkan hubungan yang erat dengan Misi pertama RPJPD, yaitu transformasi sosial menuju pembangunan manusia yang berkualitas, serta Misi kelima RPJPD, yakni pembangunan ketahanan sosial budaya yang moderat dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan. Di tingkat provinsi, misi ini diperkuat dengan agenda kesejahteraan sosial yang adil dan demokratis. Dalam kerangka nasional, Asta Cita 1 dan Asta Cita 4 memberikan fondasi yang kuat melalui penguatan ideologi Pancasila, nilai HAM, serta pengembangan SDM unggul yang menjunjung kesetaraan, pendidikan, kesehatan, dan prestasi bangsa.

Misi keempat RPJMD Kabupaten Kaur, yang mendorong penguatan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi lokal, menunjukkan keselarasan dengan Misi kedua RPJPD, yakni transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Misi ini juga sejalan dengan Misi keempat RPJMD Provinsi Bengkulu, yang memfokuskan pembangunan ekonomi pada sektor unggulan berbasis hilirisasi dan keberlanjutan. Arah tersebut bersinergi dengan berbagai sasaran dalam Asta Cita, terutama Asta Cita 2 (kemandirian ekonomi melalui swasembada pangan, energi, dan ekonomi hijau), Asta Cita 3(penguatan kewirausahaan dan industri kreatif), Asta Cita 5 (hilirisasi sumber daya alam untuk peningkatan nilai tambah), dan Asta Cita 6 (pemberdayaan desa dan pemerataan ekonomi).

Keselarasan misi pembangunan daerah Kabupaten Kaur dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan nasional tidak hanya menjadi dasar dalam mengarahkan kebijakan, program, dan penganggaran, tetapi juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian visi

Indonesia Emas 2045. Integrasi tersebut penting untuk memastikan pembangunan yang konsisten, berkesinambungan, dan adaptif terhadap dinamika lokal maupun nasional.

B. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan elemen penting dalam merancang arah strategis pembangunan yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan. Tujuan dirumuskan sebagai penjabaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang mencerminkan serangkaian capaian kinerja strategis dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029, tujuan pembangunan tidak hanya menjadi panduan arah kebijakan, tetapi juga menggambarkan prioritas-prioritas utama yang mendukung pencapaian Asta Cita, yaitu delapan agenda prioritas nasional yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah.

Tujuan pembangunan ini dapat mencakup berbagai aspek penting, seperti pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan pelayanan dasar, serta peningkatan produktivitas daerah melalui optimalisasi potensi lokal. Tujuan juga diarahkan pada penguatan daya saing sumber daya manusia yang berkelanjutan, penciptaan lingkungan sosial yang sehat dan harmonis, serta pelestarian budaya lokal yang maju dan adaptif. Tak kalah penting, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi bagian integral dari arah tujuan pembangunan.

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran, pemerintah daerah mempertimbangkan secara seksama tantangan serta peluang yang ada agar kebijakan yang diterapkan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Sasaran yang ditetapkan harus bersifat terukur dan realistis agar dapat menjadi landasan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran, berdampak nyata, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Keselarasan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam dokumen RPJMD menjadi kunci penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah secara konsisten. Keterpaduan ini diperkuat dengan indikator kinerja utama yang jelas, sehingga setiap program pembangunan dapat dipantau, dievaluasi, dan disesuaikan secara berkala untuk memastikan hasil yang optimal dan berkelanjutan. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran, pembangunan daerah dapat dilihat dalam uraian berikut:

Tabel III-2. Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029 dengan Asta Cita

Visi	Misi	Asta Cita	Tujuan	Sasaran
Menuju Kabupaten Kaur Yang Maju, Sejahtera dan Bahagia	Misi 1: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Inovatif, Humanis, Akuntabel, Tanggap Dan Melayani	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1.1: Meningkatnya kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan	1.1.2: Meningkatkan akuntabilitas kinerja
				1.1.3: Meningkatkan integritas dan akuntabilitas pemerintah daerah
				1.1.4: Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ASN
				1.1.5: Meningkatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
				1.1.6: Meningkatkan kualitas pelayanan publik
	Misi 2: Peningkatan Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Perkotaan Yang Selaras, Seimbang dan Berkeadilan Antar Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan Dan Mitigasi Bencana.	Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	2.1: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan	2.1.1: Terpenuhinya akses masyarakat terhadap air minum layak
				2.1.2: Terpenuhinya akses masyarakat terhadap sanitasi layak
				2.1.3: Meningkatkan jumlah rumah layak huni
				2.1.4: Meningkatkan kualitas jaringan jalan
				2.1.5: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur jaringan irigasi
				2.1.6: Meningkatnya kualitas lingkungan air
				2.1.7: Meningkatnya kualitas lingkungan Udara
				2.1.8: Meningkatnya pola pengelolaan sumber daya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan
				2.1.9: Menurunnya resiko bencana
	Misi 3: Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cedas, Berkualitas, Religius, Harmonis Dan	Penguatan Daya Saing SDM Berkelanjutan	3.1: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	3.1.1: Menekan Angka Kemiskinan
				3.1.2: Meningkatkan derajat Pendidikan masyarakat
				3.1.3: Meningkatkan derajat kesehatan

Visi	Misi	Asta Cita	Tujuan	Sasaran
	Berdaya Saing Yang Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama, Adat Budaya Dan Kearifan Lokal Melalui Peningkatan Akses Serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan Dan Kebutuhan Dasar Lainnya			3.1.4: Menekan angka stunting
				3.1.5: Meningkatkan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS
				3.1.6: Menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan
				3.1.7: Meningkatkan Angkatan Kerja
				3.1.8: Mengurangi Angka Pengangguran
	Misi 4: Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Mengoptimalkan Sumberdaya Daerah Melalui Peningkatan Dan Pengembangan Sektor Pertanian, Perikanan/Kelautan, Industri UMKM Dan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Lokal Dan Kewirausahaan	Pembangunan Ekononomi Inklusif Berkelanjutan	4.1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan	4.1.1: meningkatkan kontribusi dan pertumbuhan sub sektor pertanian, perikanan dan perkebunan terhadap perekonomian daerah
				4.1.2: meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah
				4.1.3: meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah
				4.1.4: meningkatkan kontribusi dan pertumbuhan pariwisata terhadap perekonomian daerah
				4.1.5: Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
				4.1.6: meningkatkan realisasi penanaman modal
				4.1.7: Meningkatkan rasio wirausaha melalui pengembangan UMKM produktif dan inovatif

Pembangunan Kabupaten Kaur periode 2025-2029 dirancang dengan 4 misi utama, yang menjadi arah kebijakan dalam mewujudkan visi daerah. Dari misi-misi tersebut, ditetapkan 4 tujuan strategis yang menjadi landasan dalam menentukan program prioritas pembangunan. Selanjutnya, tujuan tersebut dijabarkan ke dalam 30 sasaran pembangunan, yang merupakan target spesifik untuk memastikan pencapaian visi daerah secara terukur dan efektif. Sebagai gambaran lebih lanjut mengenai bagaimana misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kaur disusun secara sistematis, penjelasan lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini berikut yang menguraikan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator, kondisi saat ini, dan target kinerja tahun 2026-2030:

Tabel III-3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Basseline (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi : Menuju Kabupaten Kaur Yang Maju, Sejahtera dan Bahagia	1.1: Meningkatnya kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (59,9)	B (60-65)	B (66-70)	BB (71-75)	BB (76-80)	A (81-85)	A (86-90)
	1.1.1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	B (61,62)	B (66)	BB (72)	BB (74)	BB (76)	BB (78)	A (80)
Misi 1: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Inovatif, Humanis, Akuntabel, Tanggap Dan Melayani	1.1.2: Meningkatkan integritas dan akuntabilitas pemerintah daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPK)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Survei Penilaian Integritas (SPI)	70,72	71	72	73	74	75	76
	1.1.3: Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	77,69	79	80	81	82	83	84
	1.1.4: Meningkatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,42	2,50	2,58	2,66	2,74	2,82	2,9 (b)
		Indeks Pemerintah Digital	N/A	n/a	n/a	n/a	n/a	1,8	2
	1.1.5: Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	3,82	3,88	3,94	4	4,06	4,12	4,18
Misi 2: Peningkatan Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Perkotaan Yang Selaras, Seimbang dan Berkeadilan Antar Wilayah Yang Berwawasan	2.1: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	56,13	57	58,1	59,04	59,98	60,92	61,86
	2.1.1: Terpenuhinya akses masyarakat terhadap air minum layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	84,14	84,18	84,48	84,78	85,08	85,38	85,68
	2.1.2: Terpenuhinya akses masyarakat terhadap sanitasi layak	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	81,23	81,33	81,43	81,53	81,63	81,73	81,83

Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Basseline (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lingkungan Dan Mitigasi Bencana.	2.1.3: Meningkatkan jumlah rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	58	59	59	60	62	64	66
	2.1.4: Meningkatkan kualitas jaringan jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	42,6	44,1	45,6	47,1	48,6	50,1	51,6
	2.1.5: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	14,7	15,5	16,3	17,1	17,9	18,7	19,5
	2.1.6: Meningkatnya kualitas lingkungan air	Indeks kualitas air	66,67	38,67	38,67	39,17	39,67	40,17	40,67
	2.1.7: Meningkatnya kualitas lingkungan Udara	Indeks kualitas Udara	95,7	95,80	95,86	95,91	95,96	96,01	96,06
	2.1.8: Meningkatnya pola pengelolaan sumber daya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Indeks tutupan lahan	65,99	66,24	66,49	66,74	66,99	67,24	67,49
	2.1.9: Menurunnya resiko bencana	Indeks resiko bencana (IRB)	192,16	189,84	186,64	183,88	181,12	178,36	175,6
	2.1.10 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,30	80,15	82,25	84,55	86,75	88,95	90,0
Misi 3: Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cedas, Berkualitas, Religius, Harmonis Dan Berdaya Saing Yang Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama, Adat Budaya Dan	3.1: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Indeks Modal Manusia (IMM)	n/a	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57
		Indeks Pembangunan Manusia	71,53	72,33	73,14	73,96	74,79	75,63	76,47
	3.1.1: Menekan Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	17,12	16.00	15.62	14.69	13.81	12.99	11,85
	3.1.2: Meningkatkan derajat Pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	13,15	13,22	13,40	13,57	13,75	13,93	14,11

Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Basseline (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kearifan Lokal Melalui Peningkatan Akses Serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan Dan Kebutuhan Dasar Lainnya	3.1.3: Meningkatkan derajat kesehatan	Usia Harapan Hidup	72,97	74,22	74,85	75,48	76,12	76,77	78,08
	3.1.4: Menekan angka stunting	Prevalensi Stunting	15,9	14,79	13,8	12,5	11,00	10,8	9,5
	3.1.5: Meningkatkan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan manfaat pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial	88,63	88,8	88,95	89,1	89,25	89,4	89,52
	3.1.6: Menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan	Indeks Gini	0,3	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24
	3.1.7: Meningkatkan Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,63	72,18	72,52	72,97	73,19	73,65	74,11
	3.1.8: Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,71	3.67	3.58	3,42	3,33	3,26	3,18
Misi 4: Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Mengoptimalkan Sumberdaya Daerah Melalui Peningkatan Dan Pengembangan Sektor Pertanian, Perikanan/Kelautan, Industri UMKM Dan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan	4.1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	4,15	4,3-4,6	4,6-4,8	4,8-5,1	5,1-5,5	5,5-6,0	6,0-6,7
	4.1.1: meningkatkan kontribusi dan pertumbuhan sub sektor pertanian, perikanan dan perkebunan terhadap perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terhadap PDRB	51,4	51,66	51,92	52,17	52,44	52,7	52,96
	4.1.2: meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	3,6	3,7	3,75	3,8	3,85	3,9	4,0
	4.1.3: meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	8,81	8,99	9,17	9,35	9,54	9,73	9,92

Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Basseline (2024)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Masyarakat, Ekonomi Lokal Dan Kewirausahaan	4.1.4: meningkatkan kontribusi dan pertumbuhan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Persentase Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	1,45	1,52	1,6	1,68	1,76	1,85	1,93
	4.1.5: Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	PDRB Perkapita (Ribu Rp)	37.416	38.300 - 40.320	41.260 - 43.430	43.430 - 46.240	46.240 - 49.220	49.220 – 52.390	52.390 – 55.780
	4.1.6: meningkatkan realisasi penanaman modal	Persentase pertumbuhan investasif	6	7	8	9	10	11	12
	4.1.7: Meningkatkan rasio wirausaha melalui pengembangan UMKM produktif dan inovatif	Rasio Kewirausahaan (%)	4,85	4,96	5,07	5,17	5,28	5,39	5,5
	4.1.8 : Meningkatkan rasio/Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Rasio/Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	3,66	3,81	3,99	4,19	4,41	4,64	4,89
	4.1.9 : Meningkatkan rasio/Proporsi PDRB Makan dan Minum	Persentase Kontribusi Sektor Akomodasi Makan dan Minum	1.45	1,95	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5

Keterangan : [(b)] instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital sehingga target disesuaikan dengan RPJMN 2025-2029.

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

A. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029;

Strategi merupakan serangkaian langkah yang memuat program-program prioritas yang dirancang untuk mencapai target pembangunan daerah maupun perangkat daerah. Kehadiran strategi ini mencerminkan keseriusan dan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik.

Ketika perencanaan pembangunan dijalankan dengan pendekatan yang efektif dan efisien, strategi tersebut tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah, baik dari sisi jumlah capaian maupun kualitasnya. Dalam konteks ini, strategi memainkan peran penting sebagai panduan yang menunjukkan bagaimana target-target pembangunan akan diwujudkan melalui arahan kebijakan dari para pemangku kepentingan.

Dari strategi yang telah dirumuskan, kemudian diturunkan ke dalam kebijakan yang lebih operasional dan program-program nyata, sebagai langkah konkret untuk menggapai visi pembangunan daerah. Untuk membantu merancang strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kaur tahun 2025–2029 digunakanlah pendekatan analisis dengan metode *Logic Model* atau Model Logika.

Logic model merupakan alat bantu yang menyajikan gambaran singkat sebuah program, proyek, atau skema dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Model ini bertujuan untuk memperjelas rencana tindakan yang akan dilakukan dan hasil yang ingin dicapai. Secara sederhana, logic model menggambarkan keterkaitan antara input (masukan), aktivitas, output (keluaran), serta outcome (hasil), yang semuanya terhubung dengan kebutuhan masyarakat dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan dan terdampak oleh program tersebut.

Logic model sangat berguna dalam membantu proses desain dan perencanaan strategi, sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai alat monitoring dan evaluasi, terutama di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Model ini juga memungkinkan untuk diuji kelayakannya dan disesuaikan secara lebih rinci dengan kegiatan, sumber daya, serta keluaran di tingkat teknis maupun antar perangkat daerah.

Setiap unsur dalam logic model saling berkaitan melalui hubungan sebab-akibat, sehingga model ini dapat dijadikan dasar dalam merancang rencana aksi, baik di tingkat pemerintah kota maupun perangkat daerah. Visualisasi dari logic model ini dapat dilihat pada gambar berikut.

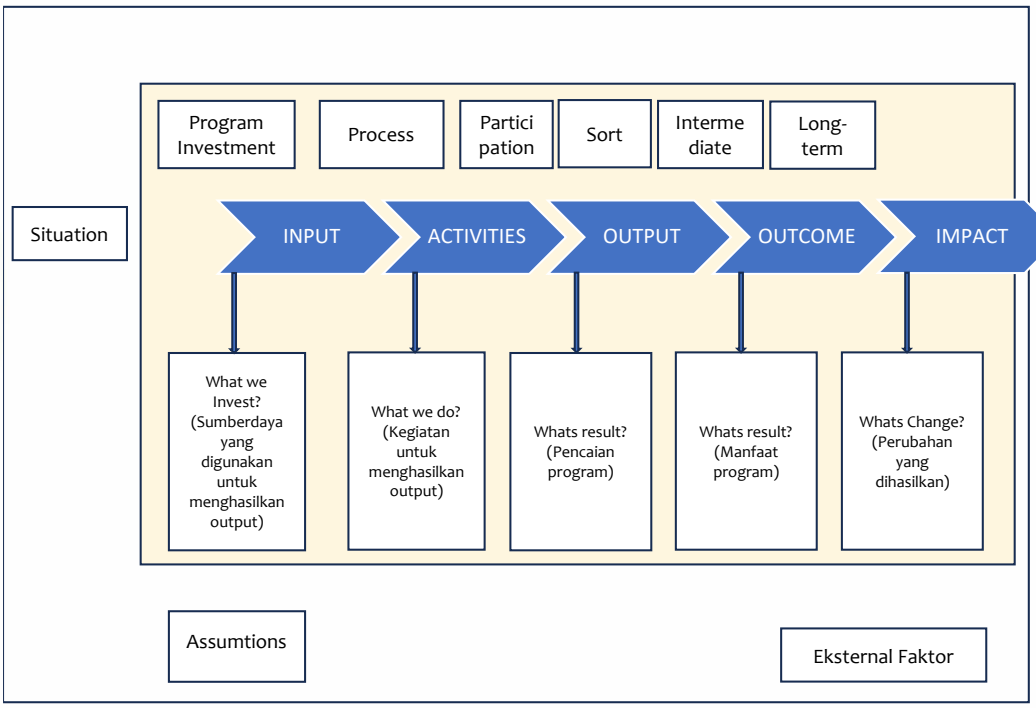

Gambar III-1. Logic Model

Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Bandung dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan, digunakan pendekatan dengan menyusun short term outcome

untuk strategi dan intermediate term outcome untuk arah kebijakan. Kedua hal ini menjadi pijakan utama dalam menentukan program-program prioritas.

Dengan penerapan instrumen tersebut, dapat diukur sejauh mana efektivitas dan keandalan suatu program dalam mencapai target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang disusun pun berlandaskan pada hasil analisis menggunakan logic model, sehingga memberikan dasar yang kuat dan terarah dalam proses perencanaan pembangunan.

Strategi pembangunan Kabupaten Kaur tahun 2025-2029 berfokus pada empat strategi utama, yaitu Penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi, Infrastruktur dasar berbasis pemerataan daya dukung wilayah, peningkatan kualitas SDM, dan Optimalisasi potensi lokal dan unggulan daerah. Strategi jangka menengah ini dijabarkan berikut ini:

Gambar III-2. Strategi Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Kaur

1. Strategi Penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik

Strategi penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, responsif, dan

akuntabel. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas institusi pemerintah daerah agar mampu menjalankan fungsi pelayanan publik secara optimal dan adaptif terhadap dinamika perubahan sosial, ekonomi, serta perkembangan teknologi. Penguatan kelembagaan mencakup pembenahan struktur organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta penyempurnaan sistem koordinasi dan sinergi lintas sektor.

Reformasi birokrasi difokuskan pada penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, digitalisasi layanan publik, serta perbaikan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Transformasi ini ditujukan untuk membangun birokrasi yang tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga pada hasil dan dampak pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, strategi ini mendorong terwujudnya budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan pelaksanaan strategi ini secara konsisten, diharapkan akan tercipta pemerintahan daerah yang modern dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kaur.

2. Strategi Pembangunan Infrastruktur dasar dan strategis berbasis pemerataan daya dukung wilayah

Strategi pembangunan infrastruktur dasar dan strategis berbasis pemerataan daya dukung wilayah diarahkan untuk menciptakan konektivitas antarkawasan yang adil dan merata, serta memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dasar. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan karakteristik geografis, kapasitas lingkungan, serta kebutuhan sosial-ekonomi di setiap wilayah.

Pemerataan pembangunan tidak hanya difokuskan pada kawasan perkotaan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup wilayah-wilayah perdesaan, tertinggal, pesisir, dan terpencil yang selama ini kurang terjangkau.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan jaringan telekomunikasi akan diselaraskan dengan potensi lokal dan kondisi daya dukung lingkungan, agar tidak menimbulkan tekanan ekologis yang berlebihan.

Dengan strategi ini, Pemerintah Kabupaten Kaur diharapkan mampu mendorong efisiensi logistik, memperkuat aksesibilitas terhadap pelayanan publik, meningkatkan produktivitas ekonomi lokal, serta memperkecil kesenjangan antarwilayah. Langkah ini menjadi pondasi penting dalam mendukung pengembangan kawasan yang berkelanjutan dan memperkuat ketahanan wilayah terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.

3. Strategi Peningkatan Kualitas SDM dan Perlindungan Sosial Secara Inklusif serta Pembangunan UMKM

Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan sosial yang inklusif, serta penguatan pelaku UMKM menjadi komponen integral dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kaur. Strategi ini diformulasikan sebagai respons atas tantangan struktural yang dihadapi oleh kelompok rentan, serta sebagai upaya sistematis untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat lokal.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui perbaikan mutu layanan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Fokus diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga pendidik, penguatan pendidikan vokasi, serta pelatihan berbasis potensi lokal yang berorientasi pada peningkatan daya saing tenaga kerja. Di samping itu, integrasi nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kearifan lokal dalam sistem pendidikan menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter SDM yang unggul secara moral dan profesional.

Di bidang kesehatan, strategi difokuskan pada penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan, percepatan penurunan stunting, pengendalian penyakit tidak

menular, serta pembangunan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan adaptif terhadap potensi krisis. Upaya ini diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari strategi promotif dan preventif.

Perlindungan sosial diperkuat melalui pengembangan sistem pendataan sosial ekonomi yang terintegrasi dan berbasis bukti, yang memungkinkan intervensi lebih tepat sasaran. Cakupan bantuan sosial, jaminan sosial, serta kesempatan kerja dan wirausaha diperluas untuk menjangkau seluruh kelompok masyarakat rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia, dalam kerangka perlindungan sosial yang adaptif, responsif, dan inklusif.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Strategi ini mencakup fasilitasi akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, penguatan koperasi, pengembangan ekonomi digital, serta penciptaan ekosistem ekonomi kreatif dan ekonomi sirkular yang mampu mendorong inovasi dan ketahanan ekonomi lokal.

Strategi ini dirancang untuk memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Kaur melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, sistem perlindungan sosial yang inklusif, serta ekosistem ekonomi lokal yang produktif dan berdaya saing, guna mendukung agenda pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

4. Strategi optimalisasi potensi ekonomi lokal melalui penguatan sektor unggulan dan investasi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kekuatan daerah.

Strategi optimalisasi potensi ekonomi lokal melalui penguatan sektor unggulan dan investasi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kekuatan daerah. Kabupaten Kaur memiliki berbagai potensi ekonomi, seperti sektor pertanian, perikanan,

perkebunan, UMKM, dan pariwisata, yang belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui strategi ini, pemerintah daerah diarahkan untuk melakukan identifikasi dan pemetaan komoditas unggulan secara lebih terarah, meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi produk, serta memperkuat akses pasar bagi pelaku usaha lokal.

Penguatan sektor unggulan dilakukan melalui penyediaan infrastruktur penunjang produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendorong produktivitas. Di sisi lain, penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi langkah penting dalam menarik masuknya modal, baik dari sektor swasta maupun publik. Hal ini mencakup penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan sektor-sektor produktif di Kabupaten Kaur dapat berkembang secara kompetitif, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Strategi ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi daerah, serta menjadikan ekonomi lokal sebagai pilar utama dalam menopang ketahanan pembangunan jangka panjang.

Untuk merefleksikan strategi yang telah dijabarkan diatas. Maka diperlukan langkah-langkah strategis untuk dapat mewujudkan keunggulan kompetitif daerah. Berikut ini merupakan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh Kabupaten kaur:

1. **Identifikasi dan pemetaan potensi unggulan daerah.** termasuk potensi di bidang pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, yang selama ini belum digarap secara optimal. Langkah ini selaras dengan misi pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal.
2. **Mengembangkan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah**. seperti jalan mantap, jaringan irigasi, dan sarana transportasi publik, sejalan dengan masih

rendahnya capaian indeks infrastruktur dan kondisi jalan dalam kondisi baik yang baru mencapai 42,6 persen

3. **Meningkatkan pemberdayaan masyarakat,** khususnya kelompok miskin dan rentan, melalui pelatihan keterampilan kerja, dukungan wirausaha, serta penguatan kelembagaan ekonomi rakyat sebagai bagian dari upaya menurunkan ketimpangan dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi
4. **Mendorong pengembangan industri pengolahan** hasil pertanian dan perikanan, serta mendukung tumbuhnya IKM berbasis sumber daya lokal, guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk daerah.
5. **Melakukan promosi potensi daerah secara digital dan fisik** guna menarik investasi, memperluas pasar UMKM, serta mendukung pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal
6. **Membangun sinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, swasta, dan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan program strategis**, seperti peningkatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan mitigasi bencana yang menjadi salah satu risiko tinggi di Kaur.
7. **Mendorong pemanfaatan teknologi informasi** dalam layanan publik, pertanian presisi, serta digitalisasi usaha mikro untuk mendukung efisiensi dan perluasan akses pasar bagi pelaku ekonomi lokal
8. **Mengembangkan destinasi pariwisata berbasis daya tarik alam dan budaya lokal secara inklusif dan berkelanjutan**, sejalan dengan potensi pariwisata pesisir dan kawasan perbukitan di Kabupaten Kaur.
9. **Mengembangkan ekonomi kreatif seperti kriya, kuliner, dan seni budaya**, untuk memperluas basis ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sejalan dengan arah penguatan ekonomi kreatif daerah.

10. **Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan secara berkala dan berbasis data**, guna memastikan bahwa seluruh strategi berjalan efektif, adaptif, dan tepat sasaran sesuai dengan dinamika serta kebutuhan daerah.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan daerah maka diperlukan startegi secara terperinci dari setiap misi RPJMD Kabupaten Kaur tahun 2025-2029. Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut dalam tabel perencanaan strategi pembangunan daerah berikut ini:

Tabel III-4. Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
Menuju Kabupaten Kaur Yang Maju, Sejahtera dan Bahagia		
Misi 1: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Inovatif, Humanis, Akuntabel, Tanggap Dan Melayani		
Meningkatnya kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Penguatan sistem digitalisasi dalam pengawasan internal dan evaluasi kinerja
	Meningkatkan integritas dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah
	Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ASN	Pelatihan, pendidikan berkelanjutan, dan seleksi ASN berbasis merit
	Meningkatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peningkatan sistem keterbukaan informasi dan digitalisasi dokumen
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Transformasi layanan publik yang terstandar dan berbasis digital
Misi 2: Peningkatan Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Perkotaan Yang Selaras, Seimbang dan Berkeadilan Antar Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan Dan Mitigasi Bencana.		
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Terpenuhinya akses masyarakat terhadap air minum layak	Peningkatan jaringan air bersih berbasis wilayah
	Terpenuhinya akses masyarakat terhadap sanitasi layak	Peningkatan cakupan dan kualitas sistem sanitasi
	Meningkatkan jumlah rumah layak huni	Meningkatkan program bedah rumah dan perumahan rakyat
	Meningkatkan kualitas jaringan jalan	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan provinsi/kabupaten
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Peningkatan dan normalisasi jaringan irigasi teknis dan semi teknis
	Meningkatnya kualitas lingkungan air	Pengawasan kualitas air dan konservasi sumber air
	Meningkatnya kualitas lingkungan Udara	Pengendalian emisi dan transportasi ramah lingkungan
	Meningkatnya pola pengelolaan sumber daya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Rehabilitasi hutan dan tata kelola lahan berkelanjutan
	Menurunnya resiko bencana	Penguatan sistem peringatan dini (*early warning system*)
Misi 3: Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cedas, Berkualitas, Religius, Harmonis Dan Berdaya Saing Yang Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama, Adat Budaya Dan Kearifan Lokal Melalui Peningkatan Akses Serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan Dan Kebutuhan Dasar Lainnya		
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Menekan Angka Kemiskinan	Penguatan data terpadu untuk penargetan program bansos adaptif untuk keluarga miskin secara tepat sasaran

Tujuan	Sasaran	Strategi
	Meningkatkan derajat Pendidikan masyarakat	Peningkatan akses pendidikan dan program pendidikan non-formal
	Meningkatkan derajat kesehatan	Peningkatan layanan kesehatan dasar dan rujukan
	Menekan angka stunting	Penguatan posyandu, wajib kunjungan TPK (Tim Pendamping Keluarga) dan pemberian PMT (pemberian makanan tambahan)
	Meningkatkan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	Program bantuan sosial terintegrasi dan berbasis data terpadu
	Menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan	Penguatan kapasitas SDM dan produktifitas masyarakat
	Meningkatkan Angkatan Kerja	Penyelenggaraan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar dan link & match dengan dunia usaha untuk serapan tenaga kerja
	Mengurangi Angka Pengangguran	Pengembangan pasar tenaga kerja dan pelatihan kerja berbasis industri
Misi 4: Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Mengoptimalkan Sumberdaya Daerah Melalui Peningkatan Dan Pengembangan Sektor Pertanian, Perikanan/Kelautan, Industri UMKM Dan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Lokal Dan Kewirausahaan		
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan	meningkatkan kontribusi dan pertumbuhan sub sektor pertanian, perikanan dan perkebunan terhadap perekonomian daerah	Penguatan kelembagaan dan modernisasi proses pra dan pasca panen
	meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah	Fasilitasi industri kecil-menengah dan hilirisasi
	meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah	Penguatan pasar tradisional dan logistik perdagangan
	meningkatkan kontribusi dan pertumbuhan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Promosi pariwisata dan pengembangan destinasi lokal
	Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Mendorong penciptaan lapangan kerja produktif berbasis potensi lokal
	meningkatkan realisasi penanaman modal	Kemudahan perizinan dan promosi investasi daerah
	Meningkatkan rasio wirausaha melalui pengembangan UMKM produktif dan inovatif	Peningkatan program bina UMKM potensial melalui inkubasi bisnis secara berkelanjutan

B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Selain strategi, aspek penting lainnya yang harus ditetapkan adalah arah kebijakan. Arah kebijakan berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan strategi yang telah dipilih agar pelaksanaannya lebih fokus dan sistematis dalam mencapai tujuan serta sasaran pembangunan selama periode lima tahun.

Rumusan arah kebijakan membantu memperjelas dan mempertajam strategi, sehingga setiap langkah yang diambil memiliki dasar yang logis dan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan. Arah kebijakan ini merupakan kerangka

pemikiran atau kerangka kerja yang dirancang untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan serta mengantisipasi isu-isu strategis daerah. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sebagai bentuk konkret dari penerapan strategi.

Dengan demikian, arah kebijakan menjadi wujud nyata dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas utama demi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Secara normatif, struktur perencanaan pembangunan daerah dibagi ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

a. Perencanaan strategik, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
b. Perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang actionable. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional.

Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu periode RPJMD perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap misi. Hal ini penting, sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran misi dimaksud, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya. Berikut penjelasan mengenai langkah dalam menentukan fokus atau tema pembangunan 5 tahun ke depan, yang tertuang dalam tabel berikut.

Tabel III-5. Kondisi Kinerja Saat Ini Terhadap Misi 1

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Saat Ini (2024)
Meningkatnya kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	CC (59,9)
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	B (61,62)
	Meningkatkan integritas dan akuntabilitas pemerintah daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPK)	WDP
		Survei Penilaian Integritas (SPI)	70,72
	Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	77,69
	Meningkatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,42
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	3,82

Berdasarkan capaian kinerja terhadap tujuan peningkatan kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan, secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Nilai SAKIP sebesar 61,62 dengan predikat B mencerminkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sudah mulai terbangun dengan baik. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan daerah menjadi indikator yang perlu ditingkatkan lagi bahwa pengelolaan keuangan publik belum berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 70,72 juga menunjukkan adanya kesadaran terhadap pentingnya integritas, namun tetap memerlukan penguatan pengawasan dan budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan.

Indeks profesionalitas ASN yang berada pada angka 76,72 masih berada dalam kategori sedang, sehingga menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan yang relevan dan berkelanjutan. Indeks SPBE yang berada pada angka 2,42 juga masih dalam kategori cukup, yang mengindikasikan bahwa transformasi digital dalam sistem pemerintahan belum berjalan optimal dan perlu didorong lebih intensif. Sebaliknya, indeks pelayanan publik yang telah mencapai 3,82 dari skala 5 menunjukkan tren positif dalam hal

kualitas layanan kepada masyarakat. Namun demikian, nilai indeks reformasi birokrasi yang masih berada pada level CC (59,9) menunjukkan bahwa pembenahan birokrasi masih perlu menjadi fokus utama, terutama dalam hal efisiensi, koordinasi antarunit, dan budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan.

Melihat kondisi tersebut, maka prioritas pembangunan lima tahun ke depan diarahkan pada penguatan birokrasi yang profesional, peningkatan kompetensi dan integritas ASN, percepatan digitalisasi layanan pemerintahan melalui pengembangan sistem SPBE yang terintegrasi, serta peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Dengan fokus tersebut, tata kelola pemerintahan Kabupaten Kaur diharapkan semakin responsif, partisipatif, dan mampu memberikan layanan publik yang berkualitas serta menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.

Tabel III-6. Kondisi Kinerja Saat Ini Terhadap Misi 2

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Saat Ini (2024)
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan		Indeks Pembangunan Infrastruktur	56,13
	Terpenuhinya akses masyarakat terhadap air minum layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	84,14
	Terpenuhinya akses masyarakat terhadap sanitasi layak	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	81,23
	Meningkatkan jumlah rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	58
	Meningkatkan kualitas jaringan jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	42,6
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	14,7
	Meningkatnya kualitas lingkungan air	Indeks kualitas air	38,17
	Meningkatnya kualitas lingkungan Udara	Indeks kualitas Udara	95,76
	Meningkatnya pola pengelolaan sumber daya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Indeks tutupan lahan	65,99
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,30
	Menurunnya resiko bencana	Indeks resiko bencana	192,16

Berdasarkan capaian kinerja terhadap tujuan peningkatan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dapat disimpulkan bahwa beberapa indikator telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik, namun sebagian lainnya masih memerlukan perhatian dan percepatan intervensi pembangunan. Secara umum, Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten berada pada angka 56,13, yang menunjukkan masih perlunya penguatan dari sisi kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Akses terhadap air minum layak telah mencapai 84,14 persen dan akses terhadap sanitasi layak sebesar 81,23 persen. Kedua capaian ini mencerminkan adanya komitmen dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menunjukkan progres yang baik. Namun demikian, indikator lainnya masih berada pada kategori sedang hingga rendah. Persentase rumah layak huni baru mencapai 58 persen, menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tinggal di hunian tidak memenuhi standar. Kondisi jaringan jalan dalam keadaan mantap baru sebesar 42,6 persen, yang menandakan bahwa aksesibilitas antarwilayah masih perlu ditingkatkan untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, kualitas jaringan irigasi masih menjadi tantangan besar, dengan hanya 14,7 persen jaringan yang berada dalam kondisi baik. Hal ini berpotensi menghambat produktivitas sektor pertanian, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Dari sisi lingkungan, Indeks Kualitas Udara tergolong sangat baik dengan capaian 95,76, namun Indeks Kualitas Air masih rendah yaitu pada angka 38,17. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pengelolaan limbah domestik dan industri agar kualitas air dapat ditingkatkan.

Pengelolaan sumber daya hutan menunjukkan capaian Indeks Tutupan Lahan sebesar 65,99, yang masih memerlukan pengawasan dan upaya pelestarian lebih lanjut untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Indeks Risiko Bencana yang berada pada angka 192,16 menandakan tingkat kerentanan yang sangat tinggi,

sehingga memerlukan langkah mitigasi dan adaptasi yang lebih sistematis dan kolaboratif.

Berdasarkan capaian tersebut, arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan misi 2 perlu difokuskan pada peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur jalan, rehabilitasi dan modernisasi jaringan irigasi, pengembangan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan, peningkatan kualitas permukiman layak huni, serta penguatan tata kelola lingkungan dan pengurangan risiko bencana secara terpadu dan berkelanjutan. Dengan fokus tersebut, diharapkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup di Kabupaten Kaur dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Tabel III-7. Kondisi Kinerja Saat Ini Terhadap Misi 3

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Saat Ini (2024)
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Indeks Modal Manusia (IMM)	n/a
		Indeks Pembangunan Manusia	71,53
	Menekan Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	17,12
	Meningkatkan derajat Pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	13,15
	Meningkatkan derajat kesehatan	Usia Harapan Hidup	72,97
	Menekan angka stunting	Prevalensi Stunting	15,9
	Meningkatkan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan manfaat pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial	88,63
	Menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan	Indeks Gini	0,3
	Meningkatkan Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,63
	Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,71

Berdasarkan capaian kinerja terhadap Misi 3 yang berfokus pada penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator menunjukkan hasil yang cukup positif, meskipun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan secara lebih intensif.

Dari aspek pendidikan, angka harapan lama sekolah mencapai 13,15 tahun, mencerminkan bahwa masyarakat secara rata-rata sudah menempuh pendidikan

hingga tingkat SMA/SMK. Sementara itu, usia harapan hidup berada di angka 72,97 tahun, yang menggambarkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat tergolong sedang dan perlu didorong melalui peningkatan layanan kesehatan dasar dan promotif-preventif. Prevalensi stunting masih menjadi permasalahan seius dengan nilai 15,9 persen, sehingga membutuhkan intervensi gizi dan perbaikan sanitasi, dengan penguatan secara lintas sektor.

Tingkat kemiskinan sebesar 17,12 persen masih tergolong tinggi dan perlu menjadi perhatian utama. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka yang berhasil ditekan hingga 3,08 persen serta tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 71,63 persen mencerminkan membaiknya akses masyarakat terhadap peluang kerja. Untuk mendukung pemerataan ekonomi, Indeks Gini yang berada pada angka 0,3 mengindikasikan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif moderat, namun tetap perlu dijaga melalui program pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial.

Capaian pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menunjukkan tren yang sangat positif, dengan 88,63 persen kelompok sasaran telah menerima manfaat pelayanan, perlindungan, dan jaminan sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem perlindungan sosial mulai berjalan secara lebih menyeluruh, meskipun tantangan terhadap kesinambungan dan ketepatan sasaran tetap harus diantisipasi.

Melihat kondisi tersebut, fokus pembangunan lima tahun ke depan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan kemiskinan dan stunting, penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, penciptaan lapangan kerja produktif dan wirausaha baru, serta pengembangan UMKM dan perbaikan kualitas hunian masyarakat miskin. Seluruh strategi tersebut diharapkan dapat mempercepat transformasi sosial ekonomi di Kabupaten Kaur menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Tabel III-8. Kondisi Kinerja Saat Ini Terhadap Misi 4

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Saat Ini (2024)
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	4,15
	meningkatkan kontribusi dan pertumbuhan sub sektor pertanian, perikanan dan perkebunan terhadap perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terhadap PDRB	51,4
	meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	3,6
	meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	8,81
	meningkatkan kontribusi dan pertumbuhan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Persentase Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	1,45
	Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	PDRB Perkapita (Ribu Rp)	37.416
	meningkatkan realisasi penanaman modal	Persentase pertumbuhan investasi	6
	Meningkatkan rasio wirausaha melalui pengembangan UMKM produktif dan inovatif	Rasio Kewirausahaan (%)	4,84

Berdasarkan capaian kinerja terhadap Misi 4 yang berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terlihat bahwa struktur perekonomian Kabupaten Kaur masih didominasi oleh sektor-sektor primer, khususnya pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kontribusi gabungan dari subsektor tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 51,4 persen pada tahun 2024. Hal ini menegaskan bahwa sektor agraris merupakan fondasi utama ekonomi daerah dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut, khususnya melalui pendekatan hilirisasi, peningkatan produktivitas, serta integrasi dengan pasar dan teknologi.

Meskipun sektor pertanian menjadi penopang utama, kontribusi sektor ekonomi lainnya masih relatif rendah dan belum optimal. Kontribusi sektor industri pengolahan baru mencapai 3,6 persen, yang menunjukkan bahwa pengolahan hasil pertanian dan perikanan masih belum berkembang secara signifikan. Demikian pula, sektor perdagangan berkontribusi sebesar 8,81 persen terhadap

PDRB. Walaupun angkanya lebih tinggi dibanding sektor lain, sektor ini tetap membutuhkan penguatan dari sisi sistem logistik, konektivitas antarwilayah, dan kapasitas pelaku usaha untuk dapat tumbuh lebih cepat.

Sektor pariwisata menunjukkan kontribusi sebesar 1,45 persen, menandakan adanya peningkatan dibanding capaian sebelumnya, namun masih jauh dari potensinya yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata daerah perlu dilakukan secara lebih terpadu dan berkelanjutan, berbasis pada kekayaan alam, budaya, serta potensi ekowisata yang dimiliki Kabupaten Kaur.

Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 4,15 persen, yang masih tergolong sedang dan perlu didorong melalui diversifikasi sektor ekonomi serta penciptaan lapangan kerja baru yang produktif. PDRB per kapita yang berada pada angka 37.416 ribu rupiah menunjukkan tingkat pendapatan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, terutama melalui penguatan sektor-sektor produktif.

Pertumbuhan investasi daerah mencapai 6 persen, mencerminkan adanya geliat ekonomi dan minat investor, namun masih perlu ditingkatkan melalui penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif, kepastian perizinan, serta promosi potensi investasi yang lebih terstruktur. Sementara itu, rasio kewirausahaan daerah berada di angka 4,84, yang berada ditas target nasional pada tahun 2024. akan tetapi, upaya dalam mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan pengembangan UMKM yang inovatif serta berbasis teknologi perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas.

Berdasarkan capaian tersebut, maka arah pembangunan lima tahun ke depan dalam kerangka Misi 4 akan difokuskan pada penguatan sektor pertanian secara berkelanjutan dan berbasis hilirisasi, peningkatan nilai tambah subsektor peternakan, industri pengolahan, perikanan, dan kehutanan, serta pengembangan sektor perdagangan dan pariwisata yang berdaya saing. Selain itu, peningkatan realisasi investasi dan penciptaan ekosistem kewirausahaan menjadi prioritas

penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Gambar III-3 Tahapan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaen Kaur Tahun 2025-2045

Sumber: RPJPD Kabupaten Kaur 2025-2045

Gambar di atas menggambarkan tahapan pembangunan dalam empat fase strategis yang saling berkelanjutan. Saat ini, Kabupaten Kaur sedang berada pada Fase 1, yaitu tahap awal yang difokuskan pada **Penguatan Fondasi Transformasi**. Tahap ini menjadi titik tolak penting untuk membangun kerangka dasar tata kelola pemerintahan yang efektif, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penataan arah kebijakan dan sistem perencanaan berbasis bukti.

Fase pertama ini juga menjadi momentum untuk membentuk landasan transformasi ekonomi lokal melalui pemetaan potensi daerah, penataan regulasi, serta pengembangan SDM yang mendukung pelayanan publik dan daya saing ekonomi. Keberhasilan pada tahap ini menjadi syarat mutlak untuk memastikan tahapan berikutnya dapat berjalan secara sistematis dan berdampak nyata, yaitu

akselerasi pembangunan, penguatan kawasan strategis, hingga tahap konsolidasi dan reformulasi kebijakan jangka panjang.

Berdasarkan analisis terhadap kinerja sasaran misi dan tahapan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kaur Tahun 2025-2045 tahap 1 maka diperlukan pengaturan waktu serta tahapan-tahapan strategis untuk mempercepat tercapainya visi dan misi kepala daerah. Penjabaran lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-9. Penahapan Pembangunan RPJMD

<table>
<tr><th>TAHAP I
(2026)</th><th>TAHAP II
(2027)</th><th>TAHAP III
(2028)</th><th>TAHAP IV
(2029)</th><th>TAHAP V
(2030)</th></tr>
<tr><td colspan="4">Transformasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan, dengan fokus pada akuntabilitas, pelayanan berkualitas, profesionalitas ASN, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Kaur</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">Transformasi perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif melalui peningkatan cakupan bantuan sosial, akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan melalui UMKM dan wirausaha, serta pemenuhan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Percepatan transformasi ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan peningkatan komepetensi tenaga kerja lokal</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Pemerataan dan Peningkatan infrastruktur dasar, serta konektivitas antar wilayah yang berdasarkan keberlanjutan lingkungan dan ketangguhan terhadap bencana.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">Percepatan transformasi ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan peningkatan komepetensi tenaga kerja lokal</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>penguatan tata kelola pembangunan melalui evaluasi menyeluruh capaian RPJMD, finalisasi sistem data dan layanan digital, pengembangan ekonomi hijau, peningkatan kapasitas aparatur</td></tr>
</table>

Rangkaian tahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025–2030 disusun secara bertahap, sistematis, dan saling terintegrasi, dengan satu tujuan: menurunkan angka kemiskinan dan mendorong pertumbuhan

ekonomi masyarakat secara inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Setiap tahapan saling memperkuat, dimulai dari reformasi tata kelola hingga konsolidasi pembangunan berbasis evaluasi dan inovasi ekonomi.

Tahap I (2026) difokuskan pada transformasi tata kelola pemerintahan sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Kaur memulai proses perbaikan birokrasi melalui penguatan akuntabilitas, peningkatan profesionalitas aparatur sipil negara, serta digitalisasi sistem pelayanan publik. Tata kelola yang baik dan responsif diyakini akan menciptakan efektivitas kebijakan, efisiensi penggunaan anggaran, serta meningkatnya kepercayaan publik. Tahapan ini menjadi landasan awal untuk membangun birokrasi yang mampu melayani masyarakat miskin dan rentan secara cepat dan tepat.

Tahap II (2027) diarahkan pada transformasi perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, dengan memperluas jangkauan bantuan sosial, jaminan sosial, dan layanan dasar bagi kelompok miskin dan rentan. Upaya ini dipadukan dengan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan berkualitas serta pemberdayaan ekonomi melalui UMKM dan kewirausahaan lokal. Tujuannya adalah mengurangi kerentanan sosial dan membangun daya tahan masyarakat miskin terhadap risiko sosial-ekonomi, termasuk bencana dan krisis.

Tahap III (2028), pembangunan mulai berfokus pada percepatan transformasi ekonomi daerah. Strategi diarahkan pada pengembangan sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, industri kecil, dan pariwisata yang dapat menjadi penggerak utama ekonomi rakyat. Selain itu, peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal menjadi prioritas agar masyarakat memiliki akses lebih luas terhadap lapangan kerja produktif dan berpenghasilan layak. Langkah ini merupakan bentuk transisi dari perlindungan sosial menuju kemandirian ekonomi masyarakat.

Tahap IV (2029) memperkuat aspek pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah, yang menjadi kunci dalam mendukung transformasi ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Peningkatan kualitas jalan, air bersih, sanitasi, hunian layak, transportasi umum, serta jaringan irigasi akan meningkatkan mobilitas barang dan jasa, memperluas akses pasar, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin, terutama di wilayah tertinggal dan perdesaan.

Tahap V (2030) merupakan tahap konsolidasi pembangunan melalui evaluasi menyeluruh terhadap capaian RPJMD, finalisasi sistem data terintegrasi, serta penguatan ekonomi hijau dan kapasitas aparatur daerah. Dalam tahap ini, pengambilan kebijakan berbasis data dan pembangunan yang berwawasan lingkungan diarahkan untuk menjamin keberlanjutan capaian pembangunan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Tahapan RPJMD Kabupaten Kaur tidak hanya berfungsi sebagai kerangka implementatif pembangunan, tetapi juga sebagai strategi terpadu untuk memutus rantai kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara adil dan merata. Pendekatan ini mencerminkan semangat transformasi struktural dan sosial yang berpihak pada kelompok rentan serta mendorong kemandirian dan daya saing ekonomi lokal secara berkelanjutan. Berdasarkan penahapan pembangunan tersebut, maka tema pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kaur selama kurun waktu 5 tahun (periode RPJMD) adalah sebagai berikut:

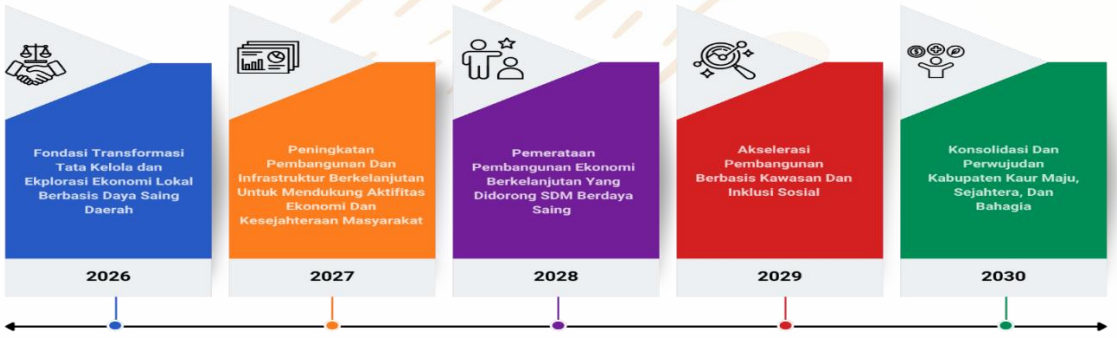

Gambar III-4 Tema Pembangunan Kabupaten Kaur

Tema Tema pembangunan Kabupaten Kaur tahun 2026–2030 disusun secara bertahap dan sistematis sebagai strategi untuk mewujudkan visi daerah yang maju, sejahtera, dan bahagia. Setiap tahapan dirancang untuk saling memperkuat, dimulai dari penguatan fondasi hingga konsolidasi pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Tema pembangunan RPJMD Kabupaten Kaur juga memperhatikan arah pembangunan Provinsi melalui RPJMD 2025-2029 dan Pembangunan Nasional melalui RPJMN 2025-2029.

Pada tahun 2026, fokus pembangunan diarahkan pada fondasi transformasi tata kelola dan eksplorasi ekonomi lokal berbasis daya saing daerah. Pemerintah Kabupaten Kaur memprioritaskan penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penataan sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis bukti. Selain itu, eksplorasi terhadap potensi ekonomi lokal mulai diarahkan untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan sebagai pijakan awal transformasi ekonomi daerah.

Tahun 2027, tema pembangunan difokuskan pada peningkatan infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung akses ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, dan

konektivitas digital ditingkatkan kualitas dan jangkauannya, terutama di wilayah yang masih tertinggal. Tujuannya adalah menciptakan akses yang merata antarwilayah, memperkuat mobilitas barang dan jasa, serta mendukung kelancaran pelayanan publik yang berkualitas.

Tahun 2028 menjadi fase percepatan transformasi ekonomi daerah melalui pemerataan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang didorong oleh sumber daya manusia berdaya saing. Pada tahap ini, sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata diarahkan untuk berkembang melalui hilirisasi dan inovasi. Upaya ini dibarengi dengan peningkatan keterampilan masyarakat lokal melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan dukungan kewirausahaan agar mampu menjadi pelaku aktif dalam pembangunan ekonomi daerah.

Tahun 2029 mengusung tema akselerasi pembangunan berbasis kawasan dan inklusi sosial. Pembangunan diarahkan tidak hanya pada wilayah-wilayah strategis, tetapi juga pada keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah daerah membangun kawasan yang tangguh secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Tahun 2030 difokuskan pada konsolidasi dan reformulasi pembangunan Kabupaten Kaur yang maju, sejahtera, dan bahagia. Pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan selama lima tahun, menyempurnakan sistem monitoring dan evaluasi, serta menyiapkan arah pembangunan jangka panjang melalui penyusunan RPJPD. Dengan demikian, seluruh tahapan ini menjadi dasar yang kokoh untuk memastikan pembangunan Kabupaten Kaur berlangsung secara terarah, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Dari tema pembangunan Kabupaten Kaur Tahun 2026-2030 maka dirumuskan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kaur yang disusun secara

sistematis berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, serta diselaraskan dengan Program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029. Arah kebijakan yang dirumuskan mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kaur untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Melalui pendekatan berbasis misi, setiap kebijakan dijabarkan ke dalam fokus intervensi strategis yang mencakup aspek pemerintahan, infrastruktur, pembangunan manusia, hingga transformasi ekonomi lokal. Perumusan ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin keterpaduan antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dan pusat, tetapi juga untuk memperkuat efektivitas perencanaan dan penganggaran berbasis hasil. Dengan demikian, rumusan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kaur dapat menjadi acuan penting dalam memastikan bahwa setiap langkah pembangunan Kabupaten Kaur dilakukan secara konsisten, adaptif, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel III-10. Perumusan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kaur

Visi	Misi	Arah kebijakan		Program Prioritas Nasional
Menuju Kabupaten Kaur yang Maju, Sejahtera, dan Bahagia	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Inovatif, Humanis, Akuntabel, Tanggap Dan Melayani.	Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pelayanan publik yang adaptif dan responsif	- Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital - Peningkatan kompetensi dan etika aparatur - Reformasi sistem pelayanan publik yang cepat, adil, dan ramah - Optimalisasi peran pengawasan dan akuntabilitas keuangan daerah	PN 7: Reformasi politik, hukum, dan birokrasi

Visi	Misi	Arah kebijakan		Program Prioritas Nasional
	Peningkatan Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Perkotaan Yang Selaras, Seimbang dan Berkeadilan Antar Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan Dan Mitigasi Bencana.	Pembangunan infrastruktur merata, berkelanjutan, dan tangguh terhadap bencana untuk mendukung konektivitas dan stabilitas wilayah	- Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar hingga wilayah terpencil - Integrasi aspek mitigasi bencana dalam perencanaan infrastruktur - Dukungan terhadap konektivitas sentra produksi dan distribusi kebutuhan pokok - Penyediaan fasilitas publik yang mendukung pengendalian inflasi dan distribusi pangan	PN 3: Pengembangan infrastruktur dan lapangan kerja
	Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, Berkualitas, Religius, Harmonis Dan Berdaya Saing Yang Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama, Adat Budaya Dan Kearifan Lokal	Penguatan daya saing SDM melalui peningkatan kualitas layanan dasar, pemenuhan gizi, penurunan stunting, dan pembangunan karakter berbasis budaya lokal	- Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar - Perluasan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata melalui “sekolah rakyat” - Penguatan ekosistem riset dan inovasi - Pencegahan stunting dan penanggulangan kemiskinan ekstrem berbasis keluarga - Penguatan pendidikan karakter berbasis nilai agama, adat, dan budaya lokal	PN 4: Penguatan pembangunan SDM PN 8: Kehidupan harmonis PN 2: Kemandirian bangsa

Visi	Misi	Arah kebijakan		Program Prioritas Nasional
	Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan dan Pengembangan Sektor Pertanian, Perikanan/Kelautan, Industri UMKM dan Pariwisata	Peningkatan produktivitas ekonomi lokal melalui hilirisasi, swasembada pangan, dan penguatan UMKM serta pariwisata	- Peningkatan produktivitas dan hilirisasi sektor pertanian dan perikanan - Dukungan terhadap swasembada pangan lokal dan distribusi harga stabil - Pengembangan industri kerajinan rakyat dan fasilitasi promosi UMKM melalui platform digital dan pameran daerah - Penguatan kelembagaan ekonomi rakyat dan wirausaha berbasis komunitas -Penguatan BUMDES melalui Koperasi Merah Putih	PN 3: Industri kreatif dan agromaritim PN 5: Hilirisasi SDA PN 6: Pembangunan desa

C. Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Riset, Inovasi, dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan transformasi pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Kaur menetapkan arah kebijakan yang berpijak pada penguatan inovasi daerah sebagai penggerak utama pembangunan. Penerapan riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi elemen penting dalam mendukung reformasi tata kelola pemerintahan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta penguatan peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagaimana diatur dalam Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023.

Sebagai bentuk komitmen strategis, Pemerintah Kabupaten Kaur telah menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi Daerah (RIP-JPID) Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi landasan dalam merancang kebijakan, program, dan aksi pembangunan berbasis riset dan inovasi di berbagai sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan.

Arah kebijakan pembangunan daerah dalam kerangka inovasi diarahkan pada:

1. **Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah,** yang mencakup pengembangan kapasitas kelembagaan BAPPERIDA, peningkatan infrastruktur riset, serta dukungan regulasi dan pembiayaan yang berkelanjutan.
2. **Peningkatan Kolaborasi Multipihak (*triple helix*),** antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan perguruan tinggi untuk mendorong riset terapan, hilirisasi hasil penelitian, serta pengembangan produk-produk inovatif berbasis potensi lokal.
3. **Pembangunan Budaya Inovasi di Lingkungan Masyarakat dan ASN,** melalui pendidikan, pelatihan, literasi digital, serta program kompetisi inovasi publik dan inovasi daerah.
4. **Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Digitalisasi Layanan,** untuk mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat
5. **Penyelarasan Program Inovasi Daerah dengan Agenda Nasional dan Global,** termasuk tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan peta jalan transformasi digital nasional

D. Arah Kebijakan Rekomendasi KLHS RPJMD

Dalam mewujudkan Kabupaten Kaur yang berkelanjutan, telah disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025–2029. Pada dokumen tersebut, untuk menjawab isu strategis dan skenario proyeksinya, telah dirumuskan rekomendasi arahan kebijakan dan arahan program. Arahan tersebut disusun berdasarkan alternatif strategi masing-masing isu strategis KLHS,

rekomendasi arahan kebijakan Tahap I (2025–2029) dari KLHS RPJPD 2025–2045, serta diharmonisasikan dengan Rancangan RPJPN 2045, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur, dan RPPLH Kabupaten Kaur. Rekomendasi arahan kebijakan dan program prioritas dari KLHS tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III-11 Arah Kebijakan dan Program Prioritas Rekomendasi KLHS

No.	Isu KLHS	Rekomendasi Arah Kebijakan	Rekomendasi Arahan Program
1.	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang	1. Meningkatkan layanan kesehatan primer, kualitas , dan bantuan sosial untuk memberdayakan masyarakat. 2. Peningkatan ketercukupan pelayanan dasar, akses dan kualitas pendidikan, dan akses dan kualitas kesehatan dasar 3. Peningkatan Jaminan dan perlindungan hak Perempuan, anak, dan kelompok disabilitas terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan 4. Pelayanan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial 5. Meningkatnya kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya dan Religius. 6. Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga dan Pemberdayaan Gender. 7. Meningkatnya Keamanan Masyarakat dan Penegakan Demokrasi.	1. Program Keluarga Harapan (PKH) Intensifikasi. Bantuan Usaha Produktif untuk kelompok miskin berdasarkan gender/umur. Pendampingan literasi keuangan inklusif. 2. Infrastruktur SPAM desa & sambungan rumah. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Pembangunan MCK desa & instalasi IPAL domestic, 4. Revitalisasi/reformasi sekolah menengah pertama (SLTP)• Insentif guru pemukiman terpencil & pelatihan guru lokal 5. Pelatihan keterampilan vokasi & wirausaha• Pemberian hibah pengembangan usaha mikro 6. Program rehabilitasi & asuhan sosial inklusif. Optimalisasi pendampingan Tagana & Puskesos 7. Pendidikan gizi melalui Posyandu & PAUD. Bantuan pangan terpadu (bubur tambah gizi) 8. Pengembangan kelas “Literasi Dasar” & “Matematika Lanjut” di SD/SMP. Program akreditasi sekolah berbasis mutu & WASH. Peningkatan infrastruktur teknologi (internet & listrik). Program literasi TIK remaja/dewasa. Skema beasiswa berbasis gender untuk APM melebihi target 9. Pengadaan sarana WASH lengkap di sekolah (toilet, air layak, cuci tangan). Edukasi perilaku hidup bersih untuk siswa & guru 10. Monitoring disaggregasi program PKH dan ekonomi produktif menurut gender/umur 11. Desa tertinggal: program daya saing desa terpadu (infrastruktur dan kapasitas). Desa mandiri: skema mentor desa untuk peran aktif pemerintah & swasta 12. Kampanye gerakan 5 sehat/4 sehat berbasis budaya lokal. Pemberdayaan posyandu, penyuluhan gizi keluarga 13. Meningkatkan kinerja posyandu/imunisasi keliling. Kampanye “Imunisasi Hari Bayi” berbasis desa 14. Program deteksi dini dan edukasi penyakit menular. 15. Jejaring layanan terpadu: Puskesmas–RS kabupaten– lab rujukan. Protokol 5–T (testing, tracing, treatment, etc.) untuk

No.	Isu KLHS	Rekomendasi Arah Kebijakan	Rekomendasi Arahan Program
			TB, HIV, hepatitis. Intensifikasi fogging & IRS di area malaria endemis. Skrining Hepatitis B ibu hamil & imunisasi bayi.
2.	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan daya Saing daerah,	1. Peningkatan infrastruktur dan pelatihan keterampilan untuk UMKM dan Koperasi, serta insentif pengembangan produk lokal. 2. Program pendidikan hukum, sistem pemantauan publik, dan pelatihan penegak hukum. 3. Penyederhanaan regulasi, peningkatan transparansi, dan Penguatan lembaga audit. 4. Peningkatkan iklim investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, serta pemberdayaan UMKM, ekonomi krearif dan Industri Kecil menengah dalam integrasi hilirisasi produk unggulan Penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan 5. Meningkatnya Implementasi Integrasi Teknologi dan Inovasi. 6. Meningkatnya Inovasi Daerah. Meningkatnya produktivitas ekonomi melalui transformasi ekonomi. 7. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik.	1. Klaster Ekonomi Unggulan: Pengembangan kawasan pertanian, perikanan, UMKM berbasis teknologi tepat guna dan keberlanjutan.- Green Investment Incentive: Skema kemudahan izin dan insentif pajak untuk investor bidang energi terbarukan, agroforestry, dan ekowisata.- Pendanaan Desa Produktif: Roket dana desa difokuskan pada proyek padat karya dan produktif. 2. Sistem "e-Worker" Terintegrasi: Pelaporan ketenagakerjaan online (izin, upah, jaminan) terhubung langsung ke Disnaker & BPJS.- Audit Kepatuhan & Penghargaan: Audit rutin dan pemberian sertifikat digital "Perusahaan Tangguh" bagi yang patuh. 3. Pemetaan & Masterplan Ekowisata: Identifikasi potensi alam/budaya, penyusunan masterplan dan standar pengelolaan berkelanjutan.- Fasilitasi Kelompok Pengelola Wisata Desa (POKDARWIS): Pelatihan manajemen, hospitality, dan pemanfaatan dana desa. 4. Branding "Eco-Kaur" & Promosi Internasional: Kampanye digital, partisipasi event travel fair, dan jasa tour guide bersertifikat.- Paket Wisata Terintegrasi: Program bundling (penginapan lokal, homestay, kuliner), plus paket edukasi lingkungan. 5. Program Sah Mitra BPJS: Subsidi premi untuk pekerja mikro di sektor agrikultur dan pariwisata.- Sosialisasi Keliling Desa: Kampanye terpadu lewat kelurahan dan UMKM, dengan bimbingan koperasi atau LKM.
3.	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur Strategis	- Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan irigasi, serta fasilitas sanitasi dasar. - Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar - Penyediaan infrastruktur penunjang ekonomi - Peningkatan konektivitas antarwilayah dan pembangunan infrastruktur strategis di kawasan/ wilayah strategis yang Disertai Pemenuhunan infrastruktur dasar	1. Program Penerangan Pedesaan (*Rural Electrification*): Pemasangan sambungan listrik gratis/subsidi dan unit microgrid hybrid (PLN + PLTS). Skema Solar Home System (SHS): Bantuan panel surya dan baterai untuk wilayah jauh tanpa jaringan PLN. Pelatihan Teknisi Lokal: Meningkatkan kapasitas perawatan dan pengelolaan pasca instalasi. 2. Proyek SPAM Pedesaan Terintegrasi: Instalasi sumur bor, unit penyaringan, dan sambungan rumah berbasis desa. Rainwater Harvesting untuk Warga Miskin: Pemasangan tandon hujan + filter sederhana. Pelatihan Pengelolaan

No.	Isu KLHS	Rekomendasi Arah Kebijakan	Rekomendasi Arahan Program
			Air dan Pemeliharaan: Membentuk kader desa untuk menjaga operasional. 3. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Plus: Hormati paradigma CLTS, edukasi PHBS, pembangunan jamban dan MCK terpadu. Insentif "Jamban Sehat": Subsidi untuk warga miskin dan rentan agar memiliki sanitasi layak. - Pembentukan Kelompok Pengelola sanitasi desa untuk pemeliharaan dan pengawasan communal. 4. Program Mini/Grid PLTS Desa: Instalasi PLTS 10–50 kWp untuk desa terpencil. Pilot Micro-Hydro & Biogas di wilayah sungai dan peternakan/pertanian. Skema Kemitraan Publik-Swasta (PPP): Pajak insentif dan kemudahan perizinan untuk EBT. Bangun Pusat Pelatihan EBT Lokal: Pelatihan teknisi pemasangan dan perawatan EBT.
4.	Tingginya resiko bencana, Degradasi, dan alih Fungsi Lahan	- Pelestarian cagar budaya, program edukasi kerukunan beragama, dan kesetaraan gender. - Pengurangan resiko bencana daerah yang terintegrasi dengan rencana aksi adaptasi perubahan iklim, - Pencegahan Alih fungsi lahan, - Pengelolaan degradasi lahan,	1. Pengurangan Risiko Bencana. Kegiatan: Sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, 2. Penanganan Korban Bencana Sosial dan Alam. Kegiatan: Bantuan logistik, pemulihan psikososial, dan rehabilitasi pasca-bencana, 3. Peningkatan Sistem Peringatan Dini dan Respons Cepat. Kegiatan: Penguatan sistem peringatan dini bencana multi ancaman (multihazard early warning system), 4. Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan. Kegiatan: Monitoring dan evaluasi pemegang izin 5. lingkungan hidup. Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi. Kegiatan: Rehabilitasi kawasan lindung dan konservasi yang terdegradasi, 6. Penyusunan dan Implementasi Rencana Tata Ruang Berbasis Risiko Bencana. Kegiatan: Integrasi zonasi rawan bencana ke dalam semua dokumen kebijakan Kabupaten Kaur. 7. Penguatan Koordinasi Penanganan Bencana. Kegiatan: Pembentukan forum koordinasi penanggulangan bencana lintas sektor. 8. Peningkatan Pengawasan Alih Fungsi Lahan. Kegiatan: Pengendalian pemanfaatan ruang dan pemantauan penggunaan lahan berbasis SIG.
5.	Tingginya potensi pencemaran dari berbagai	1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya	1. Pengendalian Pencemaran Air dan Pemulihan Mutu Air. Kegiatan:

No.	Isu KLHS	Rekomendasi Arah Kebijakan	Rekomendasi Arahan Program
	sumber	alam dan lingkungan hidup	Monitoring kualitas air tanah dan permukaan secara berkala, 2. Penguatan Pengelolaan Limbah B3. Kegiatan: Inventarisasi dan pengawasan pelaku usaha pemilik LB3, 3. Fasilitasi Pengelolaan LB3 Berbasis Masyarakat dan Swasta. Kegiatan: Pelatihan dan penyediaan fasilitas pengelolaan LB3 rumah tangga (baterai bekas, lampu neon, dll.), 4. Pengurangan dan Penanganan Sampah Domestik. Kegiatan: Revitalisasi TPS 3R, pembangunan TPA sanitary landfill, 5. Gerakan Masyarakat Peduli Sampah dan Air Bersih. Kegiatan: Edukasi publik melalui kampanye, lomba kebersihan, sekolah adiwiyata, 6. Pemanfaatan Teknologi Ramah Lingkungan dalam Pengelolaan Sampah. Kegiatan: Penerapan sistem pemilahan digital, insinerator mini, biodigester, 7. Peningkatan Koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan. Kegiatan: Operasi gabungan inspeksi terhadap pelanggar pencemaran air dan LB3.

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

E. Arah Kebijakan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan merupakan instrumen penting untuk merumuskan arah pembangunan Kabupaten Kaur secara lebih spesifik, sesuai dengan kondisi geografis, potensi sumber daya, serta karakteristik sosial ekonomi masing-masing wilayah. Penyusunan arah kebijakan kewilayahan dalam RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029 didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis yang mencerminkan kepentingan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah, utamanya dalam rangka memperkuat fondasi pembangunan dan mewujudkan visi daerah Menuju Kabupaten Kaur Yang Maju, Sejahtera dan Bahagia. Pertimbangan strategis tersebut antara lain mencakup Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Arah Pembangunan Kewilayahan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029; pengembangan Kawasan Strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaur Tahun

2023–2043; serta hasil identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi landasan dalam memastikan integrasi dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam arah pembangunan kewilayahan.

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Kaur berdasrkan Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2025-2045, dimana visi Kabupaten Kaur Maju, Makmur, dan Berkelanjutan**.** Dari 6 misi pembangunan, terdapat 1 Misi yang langsung terkait dengan pembangunan kewilayahan, yaitu Misi ke-6 terkait **"Pembangunan Kewilayahan Yang Merata, Berkualitas, Ramah Lingkungan, Dan Berkesinambungan".** Selain itu, pembangunan kewilayahan juga tertuang pada Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Kaur 2025-2029 terkait **"Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Perkotaan Yang Selaras, Seimbang dan Berkeadilan Antar Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan Dan Mitigasi Bencana".** Dengan demikian, Arah pembangunan kewilayahan di Kabupaten Kaur adalah untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan, dimana pembangunan perekonomian Kabupaten Kaur berbasis pada sektor pertanian, perikanan, kehutanan, industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata.

Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Kaur berkomitmen mendukung Pariwisata Ramah Muslim (PRM) sebagai salah satu program prioritas nasional. Urgensi penguatan PRM ini semakin penting mengingat posisi Indonesia dalam *Global Muslim Tourism Index* (GMTI) yang pada tahun 2023 berada di peringkat ke-5 dunia, setelah sebelumnya pernah menduduki peringkat pertama. Informasi ini ditegaskan pada saat Sosialisasi Penyelenggaraan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) tanggal 17 Juli 2025, yang menekankan perlunya konsistensi dan inovasi daerah dalam mendukung pariwisata ramah Muslim.

Kabupaten Kaur memiliki potensi pariwisata yang sangat besar untuk dikembangkan dengan pendekatan PRM, mengingat kekayaan alam, budaya, dan religiusitas masyarakat yang kuat. Destinasi unggulan seperti Pantai Laguna, Pantai Way Hawang, Air Terjun Kepala Curup, Danau Kembar, hingga konservasi Penyu di Pantai Way Hawang menjadi daya tarik wisata yang dapat dipadukan dengan layanan ramah Muslim, seperti ketersediaan tempat ibadah yang representatif, penyediaan kuliner halal, serta infrastruktur penunjang berbasis syariah.

Selain itu, event budaya dan religi, seperti perayaan tradisi adat berbasis Islam, potensi wisata desa religi, hingga wisata edukasi berbasis pesantren dan masjid bersejarah di Kaur dapat dikembangkan sebagai bagian dari paket PRM. Hal ini sejalan dengan tren wisata global, di mana wisatawan Muslim mengutamakan aspek halal, kenyamanan beribadah, dan keaslian budaya lokal dalam pengalaman berwisata.

Melalui penguatan PRM, Kabupaten Kaur tidak hanya mendukung capaian target nasional RPJMN 2025–2029, tetapi juga mendorong diversifikasi ekonomi daerah berbasis pariwisata. Peningkatan kualitas destinasi, promosi digital berbasis halal tourism, serta kolaborasi dengan pelaku usaha dan komunitas lokal akan menjadi pilar dalam mengangkat Kaur sebagai salah satu destinasi pariwisata ramah Muslim unggulan di Provinsi Bengkulu.

Dengan demikian, integrasi PRM dalam pembangunan pariwisata Kabupaten Kaur diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, memperluas lapangan kerja, menggerakkan UMKM lokal, serta memperkuat identitas Kaur sebagai daerah yang religius, berbudaya, sekaligus terbuka dalam menyambut wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Dokumen RPJMN 2025-2029 memuat 8 Prioritas Nasional yang terdiri dari 83 Kegiatan Prioritas Utama dalam mencapai sasaran nasional, yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan

ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Pada dokumen RPJMN 2025-2029 terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis, dimana pelaksanaannya dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah. Sebagai bentuk kontribusi terhadap pencapaian sasaran-sasaran RPJMN Kabupaten Kaur dalam hal ini berkomitmen penuh untuk mendukung PSN dimana indikasi nya dijelaskan sebagai berikut:

1. Makan Bergizi Gratis: Program Makan Bergizi Gratis (Nasional)
2. Swasembada Pangan: Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat; Layanan irigasi pendukung lumbung pangan Nasional (Nasional)
3. Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital: Hilirisasi singkong dan ubi jalar; penguatan penyediaan bahan baku hilirisasi tepung singkong, pengembangan kawasan industri terpadu; pengembangan layanan digital pemerintah terpadu (Nasional)
4. Perumahan dan Permukiman: Pembangunan 3 Juta Rumah (Nasional)

Mempedomani Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 pada Lampiran IV terdapat Arah Pembangunan Kewilayahan untuk Provinsi Bengkulu yang terbagi kedalam 4 (empat) klaster: kawasan pertumbuhan, kawasan komoditas unggulan, kawasan swasembada (pangan, air, dan energi), kawasan afirmasi, dan kawasan konservasi/rawan bencana.

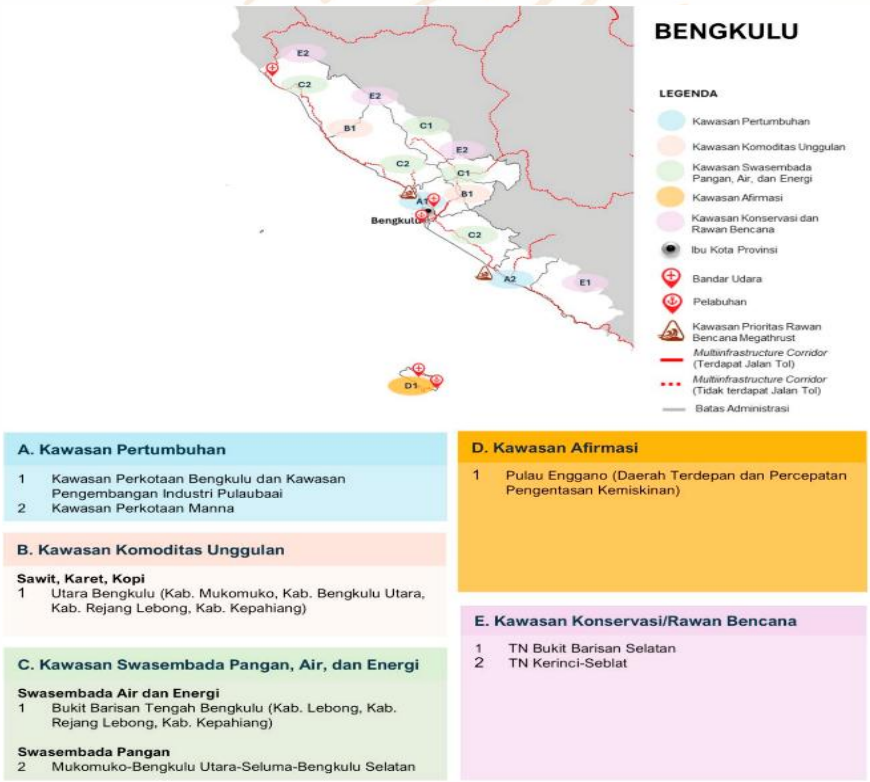

Gambar III-5 Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Bengkulu

Sumber: Perpres No. 12 Tahun 2025 (lampiran IV)

Arah pembangunan kewilayahan Kabupaten Kaur dalam RPJMD 2025–2029 merujuk pada amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang mengarahkan untuk fokus pada dua hal utama, yaitu penguatan ekonomi lokal berbasis ekonomi hijau serta pengembangan ekonomi hijau pada kawasan konservasi dan rawan bencana. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana. Berikut ini merupakan *highlight* indikasi intervensi sebagai langkah penguatan Kabupaten Kaur sebagai kawasan konservasi dan rawan bencana.

Tabel III-12 Kaur Sebagai Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Bukit Barisan Selatan (Kabupaten Kaur)	Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi
	Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan
	Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi
	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
	Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri
	Penguatan pengelolaan hutan lestari
	Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan
	Perlindungan dan pengamanan hutan
	Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi
	Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana
	Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana

Sumber: Perpres No. 12 Tahun 2025 (lampiran IV)

F. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029

Berdasarkan validasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029 Nomor 600.4.2/1186/DLHK.II/2025. Merujuk pada Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029 :

1. analisis Kajian Resiko Dampak Lingkungan
    a. Kecamatan yang memiliki resiko banjir yang luas terdapat di Kecamatan Padang Guci Ulu, Kaur Selatan, Maje, Padang Guci Ilir dan Tanjung Kemuning.

b. Kecamatan yang memiliki resiko longsor yang luas terdapat di Kecamatan Padang Guci Ulu, Nasal, Maje, Muara Sahung, Kinal, Luas, dan Kaur Selatan.

c. Kecamatan yang memiliki resiko Rawan Bencana Gempa Bumi yang luas terdapat di Kecamatan Padang Guci Ilir, Padang Guci Ulu, Nasal, Maje, Muara Sahung, Kinal, Luas, dan Kaur Selatan.

2. Efisiensi Pemanfaatan SDA

   Sebaran potensi Sumber daya perhutanan sosial tersebar di 8 wilayah di Kabupaten Kaur yaitu Kaur Selatan, Kinal, Luas, Maje, Muara Sahung, Nasal, dan Padang Guci Ulu.

Merujuk pada Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029, analisis spasial terhadap kondisi lingkungan wilayah dituangkan melalui sejumlah peta tematik yang menggambarkan fungsi ekosistem dan potensi risiko bencana. Gambar dibawah ini memperlihatkan sebaran kapasitas wilayah dalam mendukung mitigasi risiko bencana berbasis layanan ekosistem. Selain itu, Peta Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas memberikan informasi mengenai wilayah-wilayah dengan kontribusi penting terhadap pelestarian keanekaragaman hayati. Kedua peta ini menjadi instrumen penting dalam integrasi aspek lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kaur, serta mendukung arah kebijakan kewilayahan RPJMN 2025-2029.

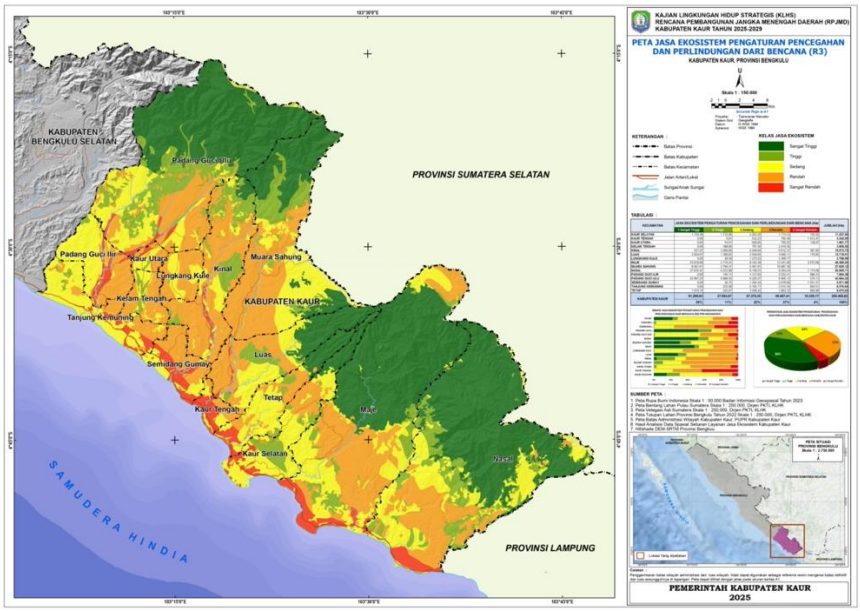

Gambar III-6 Peta Pengaturan dan Perlindungan dari Bencana (R3)

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup dan Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kaur 2025-2029

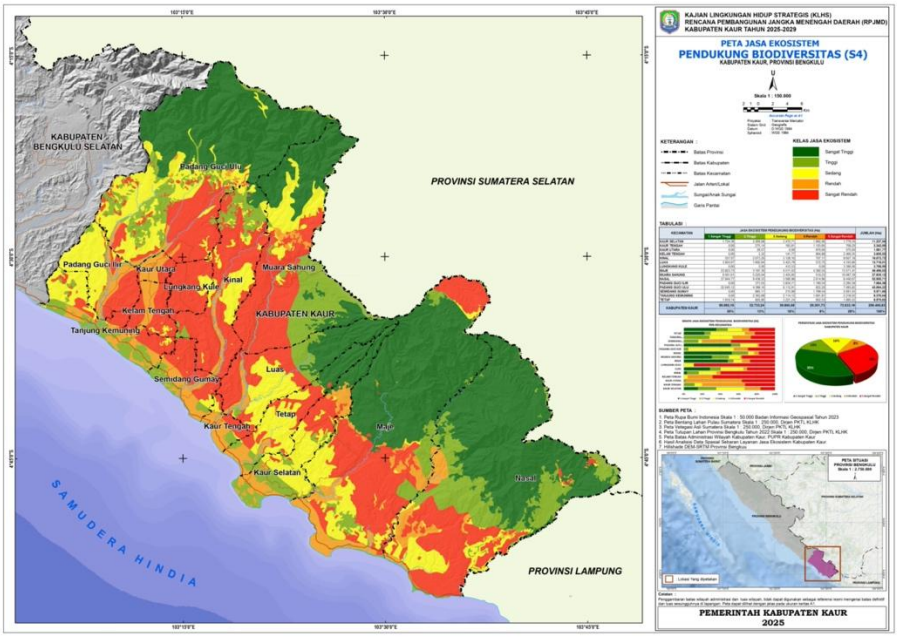

Gambar III-7 Peta Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup dan Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kaur 2025-2029

G. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043, terdapat program utama pembangunan kewilayahan Kabupaten Kaur sebagai berikut :

a. Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Provinsi yang berlokasi pada Kabupaten Kaur

1. Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan Lingkungan

- ❖ Pemantapan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- ❖ Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- ❖ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- ❖ Pusat Pertumbuhan Kelautan

2. Sistem Jaringan Transportasi Wilayah Provinsi yang berlokasi di Kabupaten Kaur

- ❖ Perwujudan Jembatan Timbang, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- ❖ Program Pembangunan, Pemantapan, Rehabilitasi dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan
- ❖ Program Pengembangan Pelabuhan Pengumpul
- ❖ Studi Kelayakan Pelabuhan Pengumpul
- ❖ Studi Kelayakan Pembangunan Terminal Khusus danTerminal untuk kepentingan sendiri
- ❖ Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan
- ❖ Program Alur Pelayaran di Laut

b. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya dapat dicapai dengan :

    1. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berlokasi di Kabupaten Kaur

c. Perwujudan kawasan peruntukan budidaya Perwujudan Kawasan peruntukan budidaya dapat dicapai dengan :

    2. Perwujudan kawasan perkebunan rakyat
    3. Perwujudan Kawasan Pertanian
    4. Perwujudan Kawasan Perikanan
    5. Perwujudan Kawasan Pariwisata
    6. Perwujudan Kawasan Transportasi
    7. Perwujudan Kawasan Dumping Area

Arah kebijakan wilayah juga dirumuskan berdasarkan *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share* (SS). Kedua metode ini digunakan untuk mengevaluasi peran dan kontribusi suatu sektor industri di tingkat kota atau kabupaten jika dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas, seperti Provinsi. Melalui perbandingan proporsi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) antarwilayah, analisis LQ dan SS memberikan gambaran mengenai sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif maupun sektor yang masih tertinggal, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan arah pengembangan ekonomi yang lebih terfokus dan berbasis potensi lokal. Berikut ini hasil analisis LQ dan SS:

Tabel III-13 Hasil Analisis LQ (*Location Quotient*) dan SS (*Shift Share*)

No.	Lapangan Usaha	Kategori
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Unggulan
2	Pertambangan dan Penggalian	Berkembang
3	Industri Pengolahan	Berkembang

No.	Lapangan Usaha	Kategori
4	Pengadaan Listrik dan Gas	Berkembang
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Berkembang
6	Konstruksi	Potensial
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Potensial
8	Transportasi dan Pergudangan	Berkembang
9	Informasi dan Komunikasi	Berkembang
10	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Berkembang
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Berkembang
12	Real Estate	Berkembang
13	Jasa Perusahaan	Berkembang
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Unggulan
15	Jasa Pendidikan	Berkembang
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Berkembang
17	Jasa lainnya	Berkembang

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient*(LQ) dan *Shift Share*(SS), perekonomian Kabupaten Kaur saat ini masih ditopang oleh dua sektor unggulan, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor pemerintahan. Kedua sektor ini memiliki keunggulan dan juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Selain itu, terdapat beberapa sektor yang masuk kategori berkembang seperti industri pengolahan, transportasi, komunikasi, jasa keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Sektor-sektor ini belum dominan, tetapi menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan dan berpotensi untuk dikembangkan ke depan. Di sisi lain, sektor seperti konstruksi dan perdagangan tergolong potensial karena sudah cukup kuat secara struktur, meskipun pertumbuhannya belum optimal. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kaur perlu mendorong sektor unggulan yang ada, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor-sektor berkembang dan memaksimalkan potensi sektor lainnya agar ekonomi daerah semakin kuat dan beragam.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaur Tahun 2021–2041, arah pembangunan kewilayahan ditetapkan melalui penetapan kawasan strategis yang memiliki peran penting dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, maupun lingkungan hidup. Penetapan ini bertujuan untuk mengarahkan pembangunan yang terfokus, berkelanjutan, dan sesuai dengan potensi serta tantangan wilayah. Dalam hal ini, terdapat tiga jenis kawasan strategis yang direncanakan, yaitu kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosial budaya, dan kawasan strategis lingkungan, masing-masing dengan tujuan pengembangan, lokasi wilayah, serta fungsi utama atau spesifik yang mendukung visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kaur.

Tabel III-14 Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten Kaur

Jenis Kawasan Strategis	Tujuan Pengembangan	Lokasi/Wilayah	Fungsi Utama/Spesifik
Kawasan Strategis Ekonomi	Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal	Kawasan perkotaan Bintuhan; Kawasan industri Pelabuhan Linau; Kawasan Pantai sebagai pusat pertumbuhan pariwisata; Perbatasan Nasal-Maje-Kinal; Kecamatan Kaur Selatan; Kawasan pertanian, perikanan, dan pertambangan di bagian tengah dan pesisir	Pengembangan agropolitan dan perikanan; Perdagangan, jasa, dan pariwisata; Kawasan pertumbuhan ekonomi baru
Kawasan Strategis Sosial Budaya	Pemerataan pelayanan dasar dan pusat kegiatan sosial	Kawasan perkotaan Bintuhan; Koridor jalan nasional/provinsi (Muara Sahung-Tanjung Kemuning)	Pusat pemerintahan dan pelayanan publik; Pemukiman terencana; perdagangan; industri; dan jasa; Pendidikan dan kesehatan
Kawasan Strategis Lingkungan	Perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Hutan Lindung dan TWA Padang Guci; Pesisir Samudera Hindia; Sempadan Sungai Padang Guci, Manna, dan Tanjung Kemuning	Konservasi keanekaragaman hayati; Mitigasi abrasi dan perubahan iklim; Pengendalian risiko banjir dan longsor

Sumber: RTRW Kabupaten Kaur Tahun 2021-2041

H. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Dalam rangka memastikan keterpaduan antara arah pembangunan jangka menengah daerah dengan kerangka kebijakan nasional, penyusunan program

prioritas daerah Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029 berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa program prioritas daerah harus merupakan turunan langsung dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan outcome yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, program prioritas daerah juga memperhatikan program prioirtas nasional melalui RPJMN 2025-2029, dan program prioritas Provinsi Bengkulu melalui RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029.

Lebih dari sekadar instrumen teknokratis, program prioritas juga memegang peranan strategis dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Program-program tersebut diformulasikan tidak hanya untuk mewujudkan arah pembangunan jangka menengah, tetapi juga sebagai wahana fasilitasi terhadap janji politik kepala daerah terpilih. Dengan demikian, program prioritas berfungsi sebagai jembatan antara komitmen politik dengan kebutuhan riil masyarakat, yang terwujud dalam bentuk kebijakan dan aksi nyata.

Selain menjawab visi dan misi pembangunan daerah, program prioritas Kabupaten Kaur juga disusun untuk merespons secara langsung berbagai permasalahan aktual dan isu strategis daerah, termasuk tantangan global, nasional, dan regional yang memengaruhi dinamika lokal. Dengan pendekatan yang adaptif, holistik, dan berbasis data, perumusan program prioritas ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi tercapainya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaur.

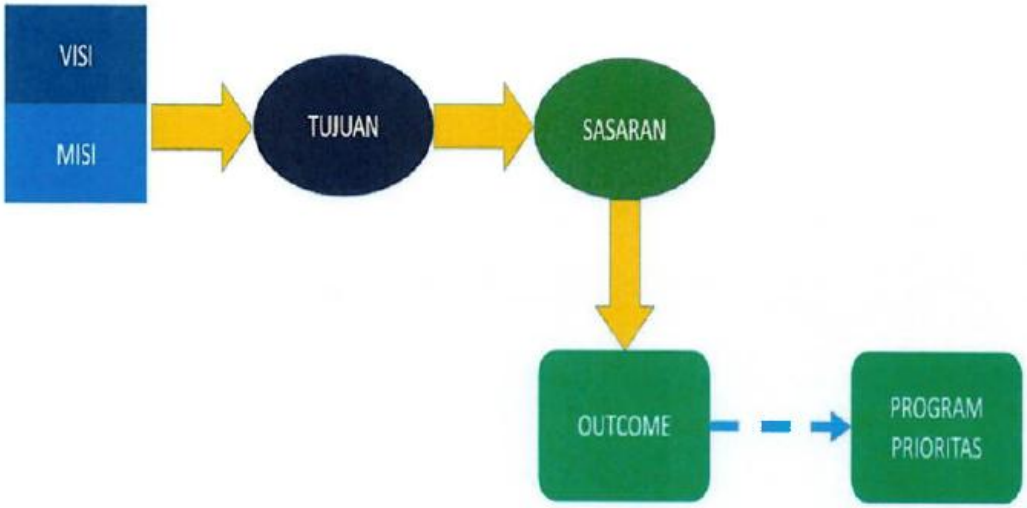

Program pembangunan daerah ini merupakan bentuk upaya dalam menyelesaikan permasalahan strategis di Kabupaten Kaur, yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data, diharapkan pembangunan di Kabupaten Kaur dapat berjalan efektif dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan nasional. Program prioritas daerah juga memperhatikan program prioritas kepala daerah (janji politik). Berikut ini program dan kegiatan yang merupakan janji dari kepala daerah:

Tabel III-15. Program Prioritas Kepala Daerah

No.	Janji Politik (Program)	Kegiatan
1.	APBD tepat sasaran sesuai kebutuhan derah	APBD Tepat Sasaran sesuai kebutuhan daerah dan masyarakat.
		Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi yang menunjang pelayanan publik.
		Peningkatan kualitas layanan bidang kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
		BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah sumber APBD.
2.	Peningkatan pemerataan pembangunan infrastrukutr yang selaras, seimbang dan berkeadilan	Pengembangan Kawasan Perkantoran Daerah (Padang Kempas, Pondok Pusaka, Taman Bhineka) serta Peningkatan Kantor Kecamatan dan Desa.
		Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi Pertanian dan Embung.

No.	Janji Politik (Program)	Kegiatan
		Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Perkotaan meliputi Jalan, Jembatan, Drainase, di seluruh wilayah secara merata dan berkeadilan yang diprioritaskan pada peningkatan dan perbaikan akses jalan menuju pusat kegiatan pemerintahan, pusat pelayanan kesehatan, dan akses menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat lainnya.
		Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal di Wilayah Perkotaan Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan dan Kecamatan Tetap yang berfungsi sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten, Pusat Pelayanan Kesehatan, Perdagangan dan Jasa.
		Penataan dan peningkatan jalan kabupaten dan sarana penerang jalan
		Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan, Kesehatan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Masyarakat.
		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
		Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi di seluruh Kecamatan dan Desa dengan bekerjasama dengan pihak provider dalam rangka menjangkau akses layanan internet sampai pelosok desa.
		Penyediaan dan peningkatan akses air bersih bagi masyarakat.
		Penyediaan akses sanitasi layak untuk masyarakat.
		Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
		Pengembangan dan Peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah yang berkualitas.
		Penyediaan Internet/Wifi gratis bagi masyarakat di ruang-ruang publik Kecamatan dan Desa.
		Peningkatan sarana dan prasarana persampahan serta mengembangkan Bank Sampah Kecamatan/Desa.
3.	Birokrasi pemerintahan tanggap dan melayani	Peningkatan kapasitas dan kualitas Birokrasi Pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
		Peningkatan Kesejahteraan Aparatur melalui Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai yang layak, adil dan berbasis kinerja.
		Peningkatan skill dan kapasitas aparatur Pemerintah Desa melalui kegiatan pelatihan, fasilitasi dan pendampingan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
		Kemudahan dan Percepatan Pelayanan Perizinan dan Kependudukan sampai di Tingkat Desa.
		Penyediaan “Mobil Layanan” dan Pembukaan Loket Layanan di Kantor Kecamatan dan Desa.
		Penegakan Perda secara humanis dengan edukasi kepada masyarakat.
		Penyediaan 1 ambulans per-kecamatan.
		Pembangunan dan pengelolaan “Lapor Pak Bup” sebagai sarana komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, guna

No.	Janji Politik (Program)	Kegiatan
		penanganan cepat terkait laporan-laporan dari masyarakat.
4.	Peningkatan Sumberdaya Manusia unggul dan berkualitas	Peningkatan kesejahteraan dan kompetensi tenaga kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan di kecamatan dan desa.
		Peningkatan kualitas layanan bidang pendidikan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
		Peningkatan kesejahteraan dan kompetensi tenaga pengajar serta pemerataan tenaga pengajar.
		Pemberian beasiswa prestasi bagi masyarakat miskin/kurang mampu yang berprestasi dan mempunyai keunggulan dalam segala bidang.
		Bantuan pembiayaan oleh pemerintah daerah bagi anak kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya (wajib belajar 9 tahun).
5.	Peningkatan dan pengembangan sektor pertanian, perikanan, industri UMKM dan Pariwisata sebagai basic unggulan daerah	Peningkatan dan Penyediaan Akses Jalan Tani Masyarakat.
		Pengembangan Pasar Tradisional Modern di Pusat Kegiatan Lokal Daerah (Bintuhan, Linau, Tanjung Kemuning) dan Kawasan Perkotaan Kabupaten (Bintuhan, Tanjung Iman, Simpang Tiga).
		Bantuan hibah pupuk, benih, dan alat pertanian.
		Bantuan stimulan "Asuransi Usaha Tanaman Padi" bagi petani yang menghadapi gagal panen seperti banjir, kekeringan, dan serangan hama/penyakit.
		Kredit usaha tani dengan bunga rendah.
		Pengembangan dan penguatan kelembagaan petani.
		Meningkatkan produktivitas kawasan lahan pertanian dengan lumbung pangan desa dan daerah.
		Pengembangan akses dan distribusi hasil pertanian.
		Penyediaan kendaraan angkutan guna membantu masyarakat dalam pengangkutan hasil panen.
		Gerakan membeli padi petani oleh ASN.
		Pengembangan kawasan budidaya perikanan kampung ikan dan budidaya udang melalui bantuan benih dan peralatan, stimulan asuransi, dan pengembangan sentra budidaya perikanan.
		Pengembangan sarana penunjang perikanan: pusat pendaratan ikan, pelabuhan perikanan, dan pasar ikan higienis.
		Pengembangan konsep pengolahan sumber daya perikanan guna menaikkan nilai tambah bagi masyarakat melalui bantuan stimulan, pendampingan, dan bantuan pemasaran.
		Percepatan pembangunan kawasan pariwisata daerah dan peningkatan infrastruktur konektivitas.
		Pengembangan dan penguatan kelembagaan nelayan serta bantuan peralatan tangkap.
		Peningkatan pengelolaan destinasi dan layanan pariwisata melalui inovasi produk pariwisata yang meliputi atraksi, kuliner, akomodasi, dan transportasi.
		Pengembangan dan penataan destinasi pariwisata daerah menjadi tujuan wisata regional, nasional, dan mancanegara melalui promosi dan penyelenggaraan "Event Jelajah Kaur" setiap tahunnya dalam rangka memperkenalkan keunggulan pariwisata dan kebudayaan

No.	Janji Politik (Program)	Kegiatan
		daerah.
		Penguatan kualitas dan diversifikasi produk UMKM serta kelembagaan pelaku usaha UMKM melalui pendampingan UMKM Naik Kelas.
		Perencanaan dan pengembangan kawasan strategis industri daerah di wilayah Kecamatan Maje guna penyerapan tenaga kerja.
		Pengembangan ekonomi desa dengan kemitraan dan BUMDes yang berfokus pada sektor pertanian, perikanan, UMKM dan pariwisata.
6.	Meningkatkan investasi daerah berbasis kewirausahaan pemberdayaan masyarakat	Pusat Kegiatan Lokal Linau Kecamatan Maje yang berfungsi sebagai Sentra Industri, Pelabuhan, Perdagangan dan Hankam.
		Pusat Kegiatan Lokal Tanjung Kemuning Kecamatan Tanjung Kemuning sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa serta Sebagai Pusat Agribisnis.
7.	masyarakat yang aman, tentram, harmonis berlandaskan nilai-nilai agama dan adat budaya dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan	Peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat, adat, perempuan, pemuda, dan agama melalui pemberian pelatihan dan bimbingan teknis serta bantuan pengembangan kelembagaan organisasi.
		Peningkatan kapasitas dan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan melalui pemberian bantuan insentif/operasional.
		Pengembangan seni dan budaya daerah untuk menjaga kelestarian adat budaya asli Kaur melalui pembinaan sanggar-sanggar budaya yang ada di masyarakat serta memfasilitasi pertunjukan seni budaya dalam event-event regional dan nasional.

Dalam rangka memastikan keselarasan arah pembangunan antara daerah, Provinsi, dan Nasional, Pemerintah Kabupaten Kaur mempedomani prioritas pembangunan Provinsi Bengkulu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, serta Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sinergi perencanaan, memperkuat keterpaduan program, serta meningkatkan efektivitas capaian pembangunan di berbagai sektor. Tabel III.16 berikut menyajikan keterkaitan antara program prioritas pembangunan Kabupaten Kaur dengan prioritas pembangunan Provinsi Bengkulu dan prioritas nasional, sebagai dasar integrasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan ke depan.

Tabel III-16 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dan Nasional

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kaur	Prioritas Pembangunan Provinsi Bengkulu	Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029
1	Optimalisasi penggunaan APBD yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	Mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat, dengan prinsip tata kelola pemerintah yang transparan, bersih, berkeadilan, dan berlandaskan nilai religius	PN 1: Memperkokoh demokrasi dan tata kelola pemerintahan
2	Peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang selaras, berkeadilan, dan mendukung konektivitas wilayah.	Meningkatkan pembangunan wilayah secara berkelanjutan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan strategis, serta memperkuat konektivitas antar wilayah	PN 3: Pengembangan infrastruktur dan lapangan kerja
3	Penguatan birokrasi pemerintahan yang tanggap, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.	Mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat, dengan prinsip tata kelola pemerintah yang transparan, bersih, berkeadilan, dan berlandaskan nilai religius	PN 7: Reformasi birokrasi, hukum, dan pelayanan publik
4	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat, terdidik, dan berdaya saing.	Mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan sosial dengan memastikan akses setara dalam kesehatan, pendidikan berkualitas, pekerjaan inklusif, serta menjamin kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas	PN 4: Penguatan pembangunan SDM, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender
5	Peningkatan dan pengembangan sektor pertanian, perikanan, industri UMKM dan Pariwisata sebagai basic unggulan daerah	Memperkuat sektor ekonomi lokal dengan mewujudkan ketahanan pangan mandiri melalui hilirisasi dan industrialisasi produk pangan unggulan	PN 5: Hilirisasi SDA PN 6: Pembangunan desa PN 3: Industri kreatif & agromaritim
6	Meningkatkan investasi daerah berbasis kewirausahaan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan pertumbuhan kewirausahaan melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal dan inovasi yang berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi dalam jaringan ekonomi lokal	PN 3: Kewirausahaan dan industri kreatif PN 6: Perekonomian berbasis desa
7	Mewujudkan masyarakat yang aman, tenteram, dan harmonis berlandaskan nilai-nilai agama, adat, serta semangat gotong royong dan kekeluargaan.	Mewujudkan rasa aman dan keseimbangan kehidupan yang harmonis antara lingkungan, alam, dan budaya, serta memperkuat kerukunan antar umat beragama untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur	PN 8: Kehidupan harmonis, toleransi, dan budaya

Untuk memastikan keselarasan antara kebijakan pembangunan Daerah, Provinsi serta arah pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025–2029, prioritas pembangunan yang diusung oleh Kabupaten Kaur telah diharmonisasikan dengan agenda pembangunan Provinsi dan Nasional. Berbagai kebijakan yang telah dirancang di tingkat nasional akan menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan pembangunan, baik secara nasional maupun

di tingkat daerah. Oleh karena itu, setiap arahan dalam agenda pembangunan Provinsi dan Nasional perlu dianalisis dan dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan pembangunan Kabupaten Kaur. Dalam konteks ini, diperlukan penyelarasan antara program prioritas kepala daerah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dan Program nasional agar tercipta kesinambungan dan sinergi antara kebijakan pusat dan daerah, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel III-17 Keselarasan Program Unggulan/Prioritas Kabupaten Kaur dengan Provinsi dan Nasional

No	Program Unggulan/ Prioritas Kabupaten Kaur	Program Prioritas Provinsi	Program/ Proyek Strategis Nasional
1.	**Mendorong produktivitas sektor perkebunan melalui distribusi 1 juta Bibit Sawit Gratis**	Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta sektor Pertambangan dan Penggalian.	Hilirisasi dan Industrialisasi
2.	Membangun Generasi Peradaban Bintang Jemput Bintang (BJB)	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Penciptaan Lapangan Kerja	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3.	AUSBILDUNG: Pendiidkan tenaga kerja vokasi ke Jerman untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing SDM Kaur di tingkat internasional	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Penciptaan Lapangan Kerja	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4.	Penyediaan Layanan Bis Sekolah	Peningkatan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5.	Peningkatan pelayanan Rumah Sakit	Peningkatan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten /Kota
6.	Memperkuat infrastruktur kelistrikan dan menjamin keandalan pasokan energi	Percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur dasar	Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
7.	Membangun konektivitas dan sinergi pengembangan wilayah dengan Kabupaten Tetangga	Pemerataan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dengan peningkatan konektivitas serta pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur strategis	Program Konektivitas dan Kawasan
8.	Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Linau	Percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur dasar	Program Konektivitas dan Kawasan
9.	Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah untuk meningkatkan	Peningkatan Akuntabilitas serta Penataan Hukum dan	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan

No	Program Unggulan/ Prioritas Kabupaten Kaur	Program Prioritas Provinsi	Program/ Proyek Strategis Nasional
	akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penggunaan anggaran pembangunan	Peraturan Perundang-undangan	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
10.	Pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan dengan Gerakan Peduli Sampah	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Penguatan Tata Kelola Persampahan

Sebagai program tambahan, Kabupaten Kaur berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional yang menjadi bagian dari RPJMN Tahun 2025–2029. Beberapa program strategis yang diadopsi dan dikembangkan di daerah antara lain Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Ketiga program ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan kelompok rentan.

1. Makan Bergizi Gratis

Kabupaten Kaur berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya program nasional Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam mengatasi masalah stunting dan gizi buruk yang masih menjadi tantangan di daerah. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Kaur akan menjamin pemenuhan gizi anak usia sekolah dan balita secara merata, dengan menyediakan makanan sehat dan bergizi secara gratis di satuan pendidikan dasar dan posyandu. Pelaksanaan program ini akan dilakukan secara terintegrasi dengan layanan kesehatan dasar, pendidikan, dan pengawasan sosial, melalui kolaborasi antar-perangkat daerah, dukungan masyarakat, serta keterlibatan sektor swasta.

Kabupaten Kaur juga mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal bergizi sebagai bahan baku utama, guna menciptakan rantai ekonomi yang produktif di tingkat lokal. Teknologi digital akan dimanfaatkan untuk pencatatan distribusi dan pemantauan status gizi penerima manfaat secara berkala. Seluruh upaya ini akan didukung oleh berbagai program daerah yang relevan, seperti program pemenuhan gizi anak dan ibu, peningkatan mutu pendidikan dasar, dan penguatan ketahanan pangan lokal.

2. Koperasi Merah Putih

Kabupaten Kaur berkomitmen untuk mendukung program nasional terkait penguatan koperasi melalui inisiatif Koperasi Merah Putih sebagai strategi utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program ini diarahkan untuk membangun kelembagaan koperasi yang kuat dan inklusif di seluruh desa, khususnya di 192 desa yang ada di Kabupaten Kaur. Koperasi akan dikembangkan agar memiliki legalitas, tata kelola yang baik, serta kegiatan usaha yang jelas dan produktif.

Sebagai bagian dari implementasinya, Pemerintah Kabupaten Kaur akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi melalui pelatihan manajemen, literasi keuangan, dan transformasi digital. Akses pembiayaan usaha mikro juga akan diperluas dengan menjalin kemitraan strategis antara koperasi, BUMDes, BUMD, dan sektor swasta. Koperasi didorong untuk menjadi simpul penggerak ekonomi lokal, khususnya dalam pengembangan sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM.

3. Sekolah Rakyat

Kabupaten Kaur berkomitmen untuk mendukung program nasional dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui inisiatif Sekolah Rakyat. Program ini merupakan bentuk inovasi daerah untuk menjawab tantangan ketimpangan akses dan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah pedesaan, terpencil, dan bagi kelompok rentan yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem pendidikan formal.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai layanan pendidikan alternatif berbasis komunitas yang partisipatif dan kontekstual, dengan memanfaatkan potensi lokal dan kearifan masyarakat. Pemerintah daerah akan memberdayakan tenaga pendidik lokal, relawan, serta tokoh masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang inklusif. Program ini juga difokuskan untuk memperkuat

literasi dasar, pendidikan kewargaan, kewirausahaan desa, dan pembentukan karakter masyarakat.

Komitmen ini akan diwujudkan melalui inovasi pendidikan inklusif berbasis komunitas, pemberdayaan pendidikan non-formal, peningkatan literasi dan numerasi masyarakat, pengembangan PKBM, serta penguatan peran masyarakat dalam pendidikan. Dengan langkah ini, Kabupaten Kaur mendukung penuh upaya nasional untuk menciptakan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh warga.

4. Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)

Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa. Dengan garis pantai sepanjang 81 ribu km terpanjang kedua di dunia dan wilayah kepulauan seluas 1.904 ribu km^2, Indonesia berada di jantung segitiga terumbu karang dunia yang menyimpan 37% spesies ikan terumbu karang dan 76% spesies karang dunia. Sumber daya ini menjadikan Indonesia salah satu pemasok utama komoditas perikanan global, sekaligus penopang kebutuhan nasional, di mana 54% protein hewani masyarakat berasal dari ikan.

Di balik potensi tersebut, kehidupan masyarakat nelayan dan pembudidaya masih menghadapi berbagai tantangan. Permukiman yang belum layak, keterbatasan sarana prasarana hingga akses teknologi kerap melekat pada masyarakat nelayan dan pembudidaya ditambah kerentanan terhadap bencana alam.

Program Kampung Nelayan Merah Putih hadir untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya. Melalui pembangunan yang terarah, penguatan akses layanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat, program ini diharapkan mampu melahirkan kampung nelayan dan kampung budi daya yang lebih mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dirancang sebagai bagian dari agenda besar pembangunan nasional, sejalan dengan visi "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

Program ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita, khususnya melalui penguatan swasembada pangan dan pembangunan dari desa untuk menghadirkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia, melalui strategi ekonomi biru kementerian kelautan dan perikanan.

Kawasan Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan pada prinsipnya telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN). Tersedia lahan kurang lebih ±5 Ha yang sangat strategis untuk mendukung pengembangan kegiatan perikanan tangkap, budidaya,serta aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Dari sisi aksesibilitas dan kedekatan dengan sumber daya perikanan, kawasan ini dinilai layak untuk diarahkan sebagai bagian dari pengembangan kawasan agropolitan berbasis kelautan dan perikanan.

Sebagai langkah strategis jangka menengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur mengusulkan kawasan ini untuk dikembangkan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada tahun 2026. selain itu, KNMP Desa Linau Kec Maje juga masuk kedalam rencana strategis yang akan diusulkan selanjutnya.

Tahun 2025 Desa Merpas Kec. Nasal sudah ditetapkan sebagai KNMP oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah melaksanakan beberapa pembangunan infrastruk dengan anggaran yang mencapai 22 M. Pengembangan KNMP di beberapa desa tersebut diharapkan dapat menjadi solusi sementara sekaligus pengungkit ekonomi lokal melalui penyediaan infrastruktur dasar perikanan, penguatan kelembagaan nelayan, pengembangan sarana pasca panen dan pengolahan hasil, serta integrasi dengan sistem pemasaran. Diperlukan dukungan kebijakan, pendanaan, dan sinergi lintas sektor agar kawasan ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan selaras dengan rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara di masa mendatang.

Tabel III-18. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Kaur (Target 2025-2030)

Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Basseline (2024)	Target Tahun						Prioritas Pembangunan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 1: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Inovatif, Humanis, Akuntabel, Tanggap Dan Melayani	1.1: Meningkatnya kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan		**Indeks Reformasi Birokrasi**	CC (59,9)	B (60-65)	B (66-70)	BB (71-75)	BB (76-80)	A (81-85)	A (86-90)	PP3. Penguatan birokrasi pemerintahan yang tanggap, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik
	1.1.2: Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Terwujudnya birokrasi yang berorientasi pada hasil melalui sistem pengukuran dan pelaporan kinerja yang transparan dan terintegrasi	Nilai SAKIP	B (61,62)	B (66)	BB (72)	BB (74)	BB (76)	BB (78)	A (80)	
	1.1.3: Meningkatkan integritas dan akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang ditunjukkan dengan opini BPK minimal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPK)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Survei Penilaian Integritas (SPI)	70,72	71	72	73	74	75	76	
	1.1.4: Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ASN	Peningkatan Pelayanan Publik yang Responsif dan Profesional	Indeks profesionalitas ASN	77,69	79	80	81	82	83	84	
	1.1.5: Meningkatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya layanan pemerintahan berbasis digital yang efisien, responsif, dan terintegrasi antar perangkat daerah	Indeks SPBE	2,42	2,50	2,58	2,66	2,74	2,82	2,9[(b)]	
			Indeks Pemerintah Digital	N/A	n/a	n/a	n/a	n/a	1,8	2	
	1.1.6: Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang profesional, cepat, dan berkeadilan.	Indeks Pelayanan Publik	3,82	3,88	3,94	4	4,06	4,12	4,18	
Misi 2: Peningkatan Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Perkotaan Yang Selaras, Seimbang dan Berkeadilan Antar Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan Dan Mitigasi Bencana.	2.1: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan		**Indeks Pembangunan Infrastruktur**	56,13	57	58,1	59,04	59,98	60,92	61,86	PP2. Peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang selaras, berkeadilan, dan mendukung konektivitas wilayah
	2.1.1: Terpenuhinya akses masyarakat terhadap air minum layak	Meningkatnya akses rumah tangga terhadap air minum layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	84,14	84,18	84,48	84,78	85,08	85,38	85,68	
	2.1.2: Terpenuhinya akses masyarakat terhadap sanitasi layak	Meningkatnya akses sanitasi aman bagi masyarakat	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	81,23	81,33	81,43	81,53	81,63	81,73	81,83	

Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Basseline (2024)	Target Tahun						Prioritas Pembangunan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	2.1.3: Meningkatkan jumlah rumah layak huni	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	58	59	60	61	62	64	66	
	2.1.4: Meningkatkan kualitas jaringan jalan	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	42,6	44,1	45,6	47,1	48,6	50,1	51,6	
	2.1.5: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Meningkatnya irigasi yang fungsional dan berkelanjutan	Persentase jaringan irigasi i dalam kondisi baik	14,7	15,5	16,3	17,1	17,9	18,7	19,5	
	2.1.6: Meningkatnya kualitas lingkungan air	Meningkatnya kualitas air lingkungan	Indeks kualitas air	38,17	38,67	38,67	39,17	39,67	40,17	40,67	
	2.1.7: Meningkatnya kualitas lingkungan Udara	Meningkatnya kualitas udara yang sehat	Indeks kualitas Udara	95,76	95,76	95,86	95,91	95,96	96,01	96,06	
	2.1.8: Meningkatnya pola pengelolaan sumber daya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan hutan yang lestari dan adil	Indeks tutupan lahan	65,99	66,24	66,49	66,74	66,99	67,24	67,49	
	2.1.9: Menurunnya resiko bencana	Menurunnya risiko bencana di wilayah rawan	Indeks resiko bencana (IRB)	192,16	189,84	186,64	183,88	181,12	178,36	175,6	
	2.1.10 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningakatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,30	80,15	82,25	84,55	86,75	88,95	90,0	
Misi 3: Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cedas, Berkualitas, Religius, Harmonis Dan Berdaya Saing Yang Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama, Adat Budaya Dan Kearifan Lokal Melalui Peningkatan Akses Serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan Dan Kebutuhan Dasar Lainnya	3.1: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia (IMM)	n/a	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	PP4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat, terdidik, dan berdaya saing.
			Indeks Pembangunan Manusia	71,53	72,33	73,14	73,96	74,79	75,63	76,47	
	3.1.1: Menekan Angka Kemiskinan	Menurunnya persentase penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	17,12	16.60	15.62	14.69	13.81	12.99	11,85	PP1. Optimalisasi penggunaan APBD yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah
	3.1.2: Meningkatkan derajat Pendidikan masyarakat	Meningkatnya rata-rata lama sekolah dan partisipasi pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,15	13,19	13,23	13,27	13,31	13,35	13,38	
	3.1.3: Meningkatkan derajat kesehatan	Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan usia harapan hidup	Usia Harapan Hidup	72,97	74,22	74,85	75,48	76,12	76,77	78,08	
	3.1.4: Menekan angka stunting	Menurunnya prevalensi balita stunting secara signifikan	Prevalensi Stunting	15,9	14,79	13,8	12,5	11,00	10,8	9,5	

Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Basseline (2024)	Target Tahun						Prioritas Pembangunan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	3.1.5: Meningkatkan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan manfaat pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial	88,63	88,8	88,95	89,1	89,25	89,4	89,52	
	3.1.6: Menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan	Menurunnya nilai indeks Gini	**Indeks Gini**	0,3	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	
	3.1.7: Meningkatkan Angkatan Kerja	Meningkatnya persentase angkatan kerja yang aktif dalam pasar kerja secara produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,63	72,18	72,52	72,97	73,19	73,65	74,11	
	3.1.8: Mengurangi Angka Pengangguran	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,71	3.67	3.58	3,42	3,33	3,26	3,18	
Misi 4: Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Mengoptimalkan Sumberdaya Daerah Melalui Peningkatan Dan Pengembangan Sektor Pertanian, Perikanan/Kelautan, Industri UMKM Dan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Lokal Dan Kewirausahaan	**4.1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan**		Pertumbuhan Ekonomi	4,15	4,3-4,6	4,6-4,8	4,8-5,1	5,1-5,5	5,5-6,0	6,0-6,7	PP5. Peningkatan dan pengembangan sektor pertanian, perikanan, industri UMKM dan Pariwisata sebagai *basic* unggulan daerah
	4.1.1: meningkatkan kontribusi dan pertumbuhan sub sektor pertanian, perikanan dan perkebunan terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terhadap PDRB	51,4	51,66	51,92	52,17	52,44	52,7	52,96	
	4.1.2: meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya peran industri pengolahan dalam pembentukan PDRB	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	3,6	3,7	3,75	3,8	3,85	3,9	4,0	
	4.1.3: meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah	Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	8,81	8,99	9,17	9,35	9,54	9,73	9,92	
	4.1.4: meningkatkan kontribusi dan pertumbuhan pariwisata terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	1,45	1,52	1,6	1,68	1,76	1,85	1,93	
	4.1.5: Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya PDRB per kapita sebagai cermin pertumbuhan ekonomi daerah	**PDRB Perkapita (Ribu Rp)**	37.416	38.300 - 40.320	41.260 - 43.430	43.430 - 46.240	46.240 - 49.220	49.220 – 52.390	52.390 – 55.780	
	4.1.6: meningkatkan realisasi penanaman modal	Meningkatnya realisasi dan pertumbuhan investasi daerah	Persentase pertumbuhan investasi	6	7	8	9	10	11	12	PP6. Meningkatkan investasi daerah berbasis

Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	Indikator	Basseline (2024)	Target Tahun						Prioritas Pembangunan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	4.1.7: Meningkatkan rasio wirausaha melalui pengembangan UMKM produktif dan inovatif	Meningkatnya rasio kewirausahaan melalui pengembangan UMKM	Rasio Kewirausahaan (%)	4,84	4,96	5,07	5,17	5,28	5,39	5,5	kewirausahaan pemberdayaan masyarakat

Keterangan : [b] instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital sehingga target disesuaikan dengan RPJMN 2025-2029.

TABEL 3.19 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM PRIORITAS RANCANGAN AKHIR RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
20252029 - MENUJU KABUPATEN KAUR YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BAHAGIA - MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG INOVATIF, HUMANIS, AKUNTABEL, TANGGAP DAN MELAYANI - PENINGKATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN PERKOTAAN YANG SELARAS, SEIMBANG DAN BERKEADILAN ANTAR WILAYAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN MITIGASI BENCANA - MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEHAT, CERDAS, BERKUALITAS, RELIGIUS, HARMONIS DAN BERDAYA SAING YANG BERPIJAK PADA NILAI-NILAI AGAMA, ADAT BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL MELALUI PENINGKATAN AKSES SERTA KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KEBUTUHAN DASAR LAINNYA - MEMBANGUN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN MENGOPTIMALKAN SUMBERDAYA DAERAH MELALUI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN/KELAUTAN, INDUSTRI UMKM DAN PARIWISATA BERBASIS PERMBERDAYAAN MASYARAKAT, EKONOMI LOKAL DAN KEWIRAUSAHAAN	Meningkatnya kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan			Indeks Reformasi Birokrasi(Indeks)		
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja		Nilai SAKIP (Nilai)		
			Mengingkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (%)	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatkan Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Level)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (%)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Level)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Level)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap layanan kesekretariatan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan otonomi Daerah serta Meningkatnya Kualitas	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya Kualitas Layanan dan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Level)	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Administrasi Pengelola Keuangan (Dokumen)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen Laporan Kegiatan Administrasi Umum (Dokumen)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen perencanaan (Perubahan Renja PD, Renja PD, KAK Perencanaan Sub kegiatan, PK, register risiko, RKA DPA) (Dokumen)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian (%)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Dinas Perikanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Upaya Extensifikasi dan Instensifikasi Pendapatan	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ((%))	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan	Manajemen Risiko Indeks (MRI) (Indeks)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan dan kebutuhan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan dan kebutuhan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan dan kebutuhan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Peningkatan Tatakelola dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Persentase Adminsitrasi Perkantoran Yang Dilaksanakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen perencanaan (Perubahan Renja PD, Renja PD, KAK Perencanaan Sub kegiatan, PK, register risiko, RKA DPA) (Dokumen)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Tercapainyan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tingkat kepuasan ASN terhadap layanan Sekretariat	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tingkat Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatkan integritas dan akuntabilitas pemerintah daerah		Survei Penilaian Integritas (SPI) (Nilai)		
				Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)		
			Mengingkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (%)	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Level)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap layanan kesekretariatan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Administrasi Pengelola Keuangan (Dokumen)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen Laporan Kegiatan Administrasi Umum (Dokumen)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen perencanaan (Perubahan Renja PD, Renja PD, KAK Perencanaan Sub kegiatan, PK, register risiko, RKA DPA) (Dokumen)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian (%)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Dinas Perikanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan	Manajemen Risiko Indeks (MRI) (Indeks)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Peningkatan Tatakelola dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Persentase Adminsitrasi Perkantoran Yang Dilaksanakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Capaian kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen perencanaan (Perubahan Renja PD, Renja PD, KAK Perencanaan Sub kegiatan, PK, register risiko, RKA DPA) (Dokumen)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tercapainyan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tingkat kepuasan ASN terhadap layanan Sekretariat	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tingkat Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)		
			Mengingkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (%)	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Level)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (%)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Level)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Level)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap layanan kesekretariatan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan otonomi Daerah serta Meningkatnya Kualitas	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Persentase pegawai pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Layanan dan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Level)	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			meningkatnya Kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN (Indeks)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Administrasi Pengelola Keuangan (Dokumen)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Dokumen Laporan Kegiatan Administrasi Umum (Dokumen)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen perencanaan (Perubahan Renja PD, Renja PD, KAK Perencanaan Sub kegiatan, PK, register risiko, RKA DPA) (Dokumen)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian (%)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Dinas Perikanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan dan kebutuhan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan dan kebutuhan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan dan kebutuhan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Peningkatan Tatakelola dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Persentase Adminsitrasi Perkantoran Yang Dilaksanakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen perencanaan (Perubahan Renja PD, Renja PD, KAK Perencanaan Sub kegiatan, PK, register risiko, RKA DPA) (Dokumen)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tercapainyan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tingkat kepuasan ASN terhadap layanan Sekretariat	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tingkat Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Pemerintah Digital (Indeks)		
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)		
			MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas Transformasi komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Persentase)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya Keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE (Indeks)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			MENINGKATNYA KUALITAS PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah data profil kependudukan yang disusun (Dokumen)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
			MENINGKATNYA PEMANFAATAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
			Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional SSN	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
			Mengingkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (%)	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Perekaman KTP elektronik (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Level)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (%)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Level)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Level)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas Transformasi komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Persentase)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap layanan kesekretariatan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan otonomi Daerah serta Meningkatnya Kualitas	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya Kualitas Layanan dan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Level)	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Konektivitas kabupaten/kota (Indeks)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut (Unit)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
			Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			MENINGKATNYA KUALITAS PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah data profil kependudukan yang disusun (Dokumen)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
			MENINGKATNYA PEMANFAATAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Administrasi Pengelola Keuangan (Dokumen)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen Laporan Kegiatan Administrasi Umum (Dokumen)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen perencanaan (Perubahan Renja PD, Renja PD, KAK Perencanaan Sub kegiatan, PK, register risiko, RKA DPA) (Dokumen)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian (%)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Dinas Perikanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan dan kebutuhan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan dan kebutuhan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan dan kebutuhan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Peningkatan Tatakelola dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Persentase Adminsitrasi Perkantoran Yang Dilaksanakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian (%)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen perencanaan (Perubahan Renja PD, Renja PD, KAK Perencanaan Sub kegiatan, PK, register risiko, RKA DPA) (Dokumen)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional SSN	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
			Tercapainyan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tingkat kepuasan ASN terhadap layanan Sekretariat	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tingkat Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis yang Berwawasan Lingkungan			Indeks Pembangunan Infrastruktur(Indeks)		
		Terpenuhinya akses masyarakat terhadap air minum layak		Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak (%)		
			Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase pencegahan kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru (Persentase)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
		Terpenuhinya akses masyarakat terhadap sanitasi layak		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (Persentase)		
			Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase pencegahan kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru (Persentase)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
		Meningkatkan jumlah rumah layak huni		Persentase Rumah Layak Huni (%)		
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase pencegahan kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru (Persentase)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
		Meningkatkan kualitas jaringan jalan		Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (%)		
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Rasio kemantapan jalan (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur jaringan irigasi		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (Persentase)		
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
		Meningkatnya kualitas lingkungan air		Indeks Kualitas Air (Indeks)		
			Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Meningkatnya kualitas lingkungan Udara		Indeks Kualitas Udara (Indeks)		
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Meningkatnya pola pengelolaan sumber daya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan		Indeks Tutupan Lahan (Indeks)		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Menurunnya risiko bencana		Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
			Meningkatnya Kopetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsigaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Orang)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya Penangan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadapÂ bencana (Unit)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. (Orang)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Orang)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia			Indeks Modal Manusia(Angka)		
				Indeks Pembangunan Manusia(Indeks)		
		Menekan Angka Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan ((%))		
			Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			Persentase Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Persentase pemberdayaan psks	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Persentase perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Terkendalinya jumlah pertambahan penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
		Meningkatkan derajat Pendidikan masyarakat		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
			Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga Pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Iklim Keamanan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentase ruang kelas sekolah dasar, sekolah menengah pertama dalam kondisi baik (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Kebinekaan Sekolah Jenjang SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Indeks Iklim Kebinekaan Sekolah Jenjang SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklim Keamanan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Persentasse Toilet sekolah dasar, sekolah menengah pertama dalam kondisi baik (Persentase)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
			Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
			Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
		Meningkatkan derajat kesehatan		Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) (Tahun)		
			Meningkatnya Kualitas dan Distribus Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta. (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Jumlah kematian ibu (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga (b) di fasilitas kesehatan. (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase lanjut usia yang mandiri (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan penemuan kasus TB (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase merokok pada penduduk umur ?15 tahun. (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Kejadian Malaria per 1000 orang. (Kasus)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Jumlah kematian balita (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripuma (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas >= 18 tahun (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Terkendalinya jumlah pertambahan penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
		Menekan Angka Stunting		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)		
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		Meningkatkan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		Persentase PPKS yang mendapatkan manfaat pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial (%)		
		Menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan		Indeks Gini (Indeks)		
			Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran Dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
		Meningkatkan Angkatan Kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)		
			Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
				Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
		Mengurangi Angka Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
			Meningkatnya Pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
				Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan			Pertumbuhan Ekonomi(Persentase)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
		Meningkatkan kontribusi dan pertumbuhan sub sektor pertanian, perikanan dan perkebunan terhadap perekonomian daerah		Persentase kontribusi sub sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terhadap PDRB (Persentase)		
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
		Meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah		Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (Persentase)		
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
		Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)		
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang efisien	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
		Meningkatkan kontribusi dan pertumbuhan pariwisata terhadap perekonomian daerah		Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)		
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
		Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat		PDRB Perkapita (Ribu Rupiah)		
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Kualifikasi dan Kompentensi SDM PBJ (Skor)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Pemanfaatan Sistem Pengadaan (Skor)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan, Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Potensi Unggulan, Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah, dan Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan, Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Potensi Unggulan, , Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah, dan Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
				Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
				Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
				Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			Meningkatnya Produktivitas Koperas	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
		Meningkatkan realisasi penanaman modal		Nilai Realisasi Investasi Daerah (Rp)		
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
		Meningkatkan rasio wirausaha melalui pengembangan UMKM produktif dan inovatif		Rasio Kewirausahaan (Persentase)		
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		Meningkatkan rasio/Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)		
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			persentase Pelaku Ekraf yang terfailitasi	Jumlah Produk/Jasa Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya (Produk)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	

BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

A. Program Perangkat Daerah

Dalam perencanaan kinerja program pembangunan, keterkaitan antara aspek strategis dan operasional merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Aspek strategis tercermin dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sementara aspek operasional diwujudkan melalui pelaksanaan program-program oleh Perangkat Daerah. Suatu program dikategorikan sebagai program strategis atau prioritas apabila memiliki keterkaitan langsung dengan visi, misi, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sebaliknya, program yang tidak memiliki keterkaitan langsung tersebut dianggap sebagai program pendukung (supporting).

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Kabupaten kaur menetapkan program-program berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah. Hal ini dilakukan secara konsisten sesuai amanat peraturan perundang-undangan, dengan mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk mendukung pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selain itu, ketentuan yang bersifat wajib (mandatory) juga diatur melalui peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan minimal 20% dari belanja daerah dialokasikan untuk sektor pendidikan, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengamanatkan alokasi minimal 10% dari belanja langsung untuk sektor kesehatan. Di samping itu, melalui Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor

893.5/9039/SJ terkait Program Kompetensi SDM ASN Tahun Anggaran 2019, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran pengembangan kompetensi ASN minimal sebesar 0,16% dari total belanja daerah.

Seluruh program tersebut dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target kinerja yang terukur, yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Penyusunan pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan prediksi kebutuhan belanja berdasarkan target kinerja yang harus dicapai, serta merujuk pada proporsi belanja aktual perangkat daerah dalam beberapa tahun sebelumnya. Persentase belanja ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan pagu anggaran, terutama bagi urusan strategis, meskipun terjadi perubahan besaran anggaran.

Dengan demikian, pola belanja setiap perangkat daerah selama lima tahun ke depan harus mampu menyesuaikan dengan proyeksi kapasitas keuangan riil daerah. Proyeksi ini telah dihitung untuk mencakup kebutuhan belanja langsung maupun tidak langsung dalam jangka waktu lima tahun. Rangka pendanaan pembangunan daerah selanjutnya dirinci dalam bentuk tabel.

Tabel IV-1. Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					239.942.519.595,00		239.942.519.595,00		239.942.519.595,00		239.942.519.595,00		239.942.519.595,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					189.738.084.786,00		189.738.084.786,00		189.738.084.786,00		189.738.084.786,00		189.738.084.786,00	
Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100,00	96,00	97,00	189.738.084.786,00	98,00	189.738.084.786,00	99,00	189.738.084.786,00	100	189.738.084.786,00	100	189.738.084.786,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					48.351.401.047,00		48.351.401.047,00		48.351.401.047,00		48.351.401.047,00		48.351.401.047,00	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	74,22	77,19	80,16	48.351.401.047,00	83,12	48.351.401.047,00	86,09	48.351.401.047,00	89,06	48.351.401.047,00	92,03	48.351.401.047,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	98,57	98,84	99,11		99,38		99,66		99,93		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	46,42	54,62	61,11		67,60		74,09		74,86		75,62		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	kesetaraan (APS) (Persentase)													
	Iklim Keamanan SD (Nilai)	70,00	70,90	71,80		72,70		73,60		74,50		75,40		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	34,53	51,05	61,86		76,28		94,30		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Keamanan SMP (Nilai)	65,23	66,73	68,23		69,73		71,23		72,73		74,23		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	44,99	36,06	37,06		38,06		39,06		40,06		41,06		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	56,29	58,79	61,29		63,79		66,29		68,79		71,29		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	53,90	56,30	58,70		61,10		63,50		65,90		68,30		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase ruang kelas sekolah dasar, sekolah menengah pertama dalam kondisi baik (Persentase)	0,37	2,00	2,20		2,25		2,30		2,50		3,00		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentasse Toilet sekolah dasar, sekolah menengah pertama dalam kondisi baik (Persentase)	0,39	1,20	1,25		1,30		1,35		1,40		2,00		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Indeks Iklim Kebinekaan Sekolah Jenjang SD (Nilai)	68,48	69,48	70,48		71,48		72,48		73,48		74,48		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Indeks Iklim Kebinekaan Sekolah Jenjang SMP (Nilai)	68,64	69,64	70,64		71,64		72,64		73,64		74,64		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					101.516.926,00		101.516.926,00		101.516.926,00		101.516.926,00		101.516.926,00	
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100	100	100	101.516.926,00	100	101.516.926,00	100	101.516.926,00	100	101.516.926,00	100	101.516.926,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					101.516.926,00		101.516.926,00		101.516.926,00		101.516.926,00		101.516.926,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga Pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	80,2	80,5	80,5	101.516.926,00	80,8	101.516.926,00	90,0	101.516.926,00	90,5	101.516.926,00	90,5	101.516.926,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	81,3	85,5	85,5		85,5		90,3		90,3		93,3		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					149.999.910,00		149.999.910,00		149.999.910,00		149.999.910,00		149.999.910,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	100	100	100	149.999.910,00	100	149.999.910,00	100	149.999.910,00	100	149.999.910,00	100	149.999.910,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	80,7	80,9	80,23	1.500.000.000,00	80,33	1.500.000.000,00	80,43	1.500.000.000,00	80,51	1.500.000.000,00	90,0	1.500.000.000,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					220.980.399.000,00		243.078.439.000,00		267.385.283.000,00		294.123.912.000,00		323.536.403.000,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					58.148.450.000,00		63.963.295.000,00		70.359.625.000,00		77.395.587.000,00		85.135.146.000,00	
Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	75	75	80	58.148.450.000,00	80	63.963.295.000,00	85	70.359.625.000,00	85	77.395.587.000,00	90	85.135.146.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN					160.023.391.000,00		176.025.730.000,00		193.627.303.000,00		212.990.134.000,00		234.289.247.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Jumlah kematian ibu (Orang)	2	2	2	160.023.391.000,00	2	176.025.730.000,00	2	193.627.303.000,00	2	212.990.134.000,00	2	234.289.247.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (Persentase)	20	18	17,8		17		16,5		16		15		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Persentase)	75	75	80		80		85		85		85		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Prevalensi Obesitas >= 18 tahun (Persentase)	10	10	9		9		8		8		7		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (Persentase)	75	75	80		80		85		85		90		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Persentase)	75	75	80		80		85		85		90		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (Persentase)	60	60	65		65		70		70		70		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem	70	70	75		75		80		80		85		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	informasi kesehatan nasional (Persentase)													
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persentase)	70	70	75		75		80		80		85		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase lanjut usia yang mandiri (Persentase)	60	60	65		65		65		70		70		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (Persentase)	20	20	19		19		18		18		17		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Cakupan penemuan kasus TB (Orang)	350	360	370		380		390		400		410		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripuma (Persentase)	70	70	75		75		80		80		85		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga (b) di fasilitas kesehatan. (Persentase)	70	75	80		80		85		85		90		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta. (Orang)	1	1	1		1		1		1		1		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Kejadian Malaria per 1000 orang. (Kasus)	1	1	1		1		1		1		1		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase merokok pada penduduk umur ?15 tahun. (Persentase)	80	80	80		79		78		76		75		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Jumlah kematian balita (Orang)	7	7	6		6		5		5		4		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.151.854.000,00		1.267.039.000,00		1.393.743.000,00		1.533.117.000,00		1.686.429.000,00	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	60	65	65	1.151.854.000,00	70	1.267.039.000,00	75	1.393.743.000,00	80	1.533.117.000,00	85	1.686.429.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Persentase)	70	70	75		75		80		80		85		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (Persentase)	70	70	75		75		80		80		85		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	60	60	65		65		70		70		75		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					801.354.000,00		881.490.000,00		969.639.000,00		1.066.603.000,00		1.173.263.000,00	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	60	65	65	801.354.000,00	70	881.490.000,00	75	969.639.000,00	80	1.066.603.000,00	85	1.173.263.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar (Persentase)	60	60	65		65		70		70		75		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu (Persentase)	60	60	65		65		70		70		75		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (Persentase)	60	60	65		65		70		70		80		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (Persentase)	60	60	65		65		70		70		75		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Persentase)	40	40	45		45		50		55		60		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					855.350.000,00		940.885.000,00		1.034.973.000,00		1.138.471.000,00		1.252.318.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	75	75	75	855.350.000,00	80	940.885.000,00	80	1.034.973.000,00	80	1.138.471.000,00	85	1.252.318.000,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					131.422.477.868,00		141.184.891.192,00		152.558.786.626,00		164.558.855.920,00		176.356.122.625,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.799.689.236,00		8.189.673.697,00		8.599.147.382,00		9.029.115.251,00		9.480.571.014,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	1	1	7.799.689.236,00	1	8.189.673.697,00	1	8.599.147.382,00	1	9.029.115.251,00	1	9.480.571.014,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	70	80	80		80		80		80		80		1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					7.900.000.000,00		8.900.000.000,00		10.500.000.000,00		11.500.000.000,00		11.500.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	12	73	47	7.900.000.000,00	48	8.900.000.000,00	49	10.500.000.000,00	50	11.500.000.000,00	51	11.500.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					16.850.000.000,00		18.500.000.000,00		20.550.000.000,00		23.100.000.000,00		25.650.000.000,00	
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah	100	76	76	16.850.000.000,00	77	18.500.000.000,00	78	20.550.000.000,00	79	23.100.000.000,00	80	25.650.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)													
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	0	50	55	450.000.000,00	55	450.000.000,00	55	450.000.000,00	60	450.000.000,00	65	450.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					16.000.000.000,00		16.100.000.000,00		16.200.000.000,00		16.300.000.000,00		16.400.000.000,00	
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	100	86	80	16.000.000.000,00	82	16.100.000.000,00	84	16.200.000.000,00	86	16.300.000.000,00	88	16.400.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					4.100.000.000,00		4.305.000.000,00		4.520.250.000,00		4.746.262.500,00		4.983.575.625,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	80	80	80	4.100.000.000,00	82	4.305.000.000,00	84	4.520.250.000,00	86	4.746.262.500,00	88	4.983.575.625,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN														
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman														1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					13.150.000.000,00		13.150.000.000,00		13.150.000.000,00		13.150.000.000,00		13.150.000.000,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	80	80	80	13.150.000.000,00	82	13.150.000.000,00	84	13.150.000.000,00	86	13.150.000.000,00	88	13.150.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					63.174.288.632,00		69.491.717.495,00		76.440.889.244,00		84.084.978.169,00		92.493.475.986,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Rasio kemantapan jalan (%)	42:42	58:58	44:44	63.174.288.632,00	47:47	69.491.717.495,00	49:49	76.440.889.244,00	52:52	84.084.978.169,00	55:55	92.493.475.986,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					498.500.000,00		548.500.000,00		548.500.000,00		548.500.000,00		548.500.000,00	
Meningkatnya Kopetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	0	50	55	498.500.000,00	60	548.500.000,00	65	548.500.000,00	70	548.500.000,00	75	548.500.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1.500.000.000,00		1.550.000.000,00		1.600.000.000,00		1.650.000.000,00		1.700.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi (Persentase)	55	68	55	1.500.000.000,00	55	1.550.000.000,00	55	1.600.000.000,00	55	1.650.000.000,00	55	1.700.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					4.700.000.000,00		4.970.000.000,00		5.240.750.000,00		5.505.000.000,00		5.767.500.000,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.600.000.000,00		3.700.000.000,00		3.800.000.000,00		3.900.000.000,00		4.000.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	50	51	52	3.600.000.000,00	53	3.700.000.000,00	54	3.800.000.000,00	55	3.900.000.000,00	55	4.000.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					100.000.000,00		115.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	0	0,05	0,1	100.000.000,00	0,2	115.000.000,00	0,3	130.000.000,00	0,4	140.000.000,00	0,5	150.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	0	0,05	0,1		0,2		0,3		0,4		0,5		1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					300.000.000,00		315.000.000,00		330.750.000,00		350.000.000,00		367.500.000,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	0,32	0,36	0,54	300.000.000,00	0,81	315.000.000,00	1,21	330.750.000,00	1,82	350.000.000,00	2,73	367.500.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase pencegahan kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru (Persentase)	2,32	2,47	2,62	100.000.000,00	3,17	200.000.000,00	3,22	300.000.000,00	3,50	400.000.000,00	4,17	500.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					500.000.000,00		525.000.000,00		550.000.000,00		575.000.000,00		600.000.000,00	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	75	75,5	76	500.000.000,00	76,5	525.000.000,00	77	550.000.000,00	77,5	575.000.000,00	78	600.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					100.000.000,00		115.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	75	75,5	76	100.000.000,00	76,5	115.000.000,00	77	130.000.000,00	77,5	140.000.000,00	78	150.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					53.789.878.291,00		62.619.145.285,00		66.023.635.905,00		74.616.540.234,00		84.192.744.885,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					48.638.667.157,00		56.885.132.858,00		59.781.265.028,00		67.791.590.231,00		76.756.945.162,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (%)	0	70	71	3.431.946.495,00	72	3.947.784.420,00	73	4.541.376.036,00	74	5.222.306.380,00	75	6.004.213.006,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	100	100	100	2.900.442.900,00	100	2.900.442.900,00	100	2.900.442.900,00	100	2.900.442.900,00	100	2.900.442.900,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Persentase Adminsitrasi Perkantoran Yang Dilaksanakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	80	80	85	42.306.277.762,00	90	50.036.905.538,00	80	52.339.446.092,00	90	59.668.840.951,00	90	67.852.289.256,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	64,20	67	70		73		75		77		80		1.05.0.00.0.00.03.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian (%)	80	90	85		90		90		90		90		1.05.0.00.0.00.03.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					793.603.604,00		912.644.145,00		1.048.865.766,00		1.206.971.881,00		1.388.017.664,00	
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	1	98	98	130.000.000,00	98	149.500.000,00	100	171.250.000,00	100	197.713.750,00	100	227.370.813,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya kepatuhan masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	96	98	98	23.789.150,00	98	27.357.523,00	100	31.461.151,00	100	36.180.324,00	100	41.607.372,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SATUAN POLISI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
terhadap Perda dan Perkada														PAMONG PRAJA
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	98	98	618.517.656,00	98	711.295.304,00	100	817.989.600,00	100	940.688.040,00	100	1.081.791.246,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Meningkatnya perlindungan Terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	1	98	98	21.296.798,00	98	24.491.318,00	100	28.165.015,00	100	32.389.767,00	100	37.248.233,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsigaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Orang)	50	50	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	120	300.000.000,00	120	300.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang)	130	130	140		150		150		160		160		1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku (Persentase)	100	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penangan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. (Orang)	32	40	50	500.000.000,00	60	500.000.000,00	70	500.000.000,00	75	500.000.000,00	80	500.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Orang)	80	80	80		80		80		80		80		1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadapÂ bencana (Unit)	0	0	3		3		3		4		4		1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					3.357.607.530,00		3.821.368.282,00		4.193.505.111,00		4.617.978.122,00		5.047.782.059,00	
Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan	80	80	85	2.772.607.530,00	90	3.177.868.282,00	80	3.485.655.111,00	85	3.839.343.122,00	80	4.241.283.559,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kebakaran (Persentase)													PENYELAMATAN
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	90	91	92	585.000.000,00	93	643.500.000,00	94	707.850.000,00	95	778.635.000,00	95	806.498.500,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					4.695.200.000,00		5.515.000.000,00		6.134.600.000,00		6.547.600.000,00		6.766.600.000,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.635.200.000,00		4.365.000.000,00		4.884.600.000,00		5.217.600.000,00		5.366.600.000,00	
Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Dokumen perencanaan (Perubahan Renja PD, Renja PD, KAK Perencanaan Sub kegiatan, PK, register risiko, RKA DPA) (Dokumen)	8	9	9	3.635.200.000,00	9	4.365.000.000,00	9	4.884.600.000,00	9	5.217.600.000,00	9	5.366.600.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Capaian kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)	14	14	14		14		14		14		14		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	90	90	90		90		90		90		90		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	90	90	90		90		90		90		90		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemerintahan Daerah (%)													
	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	90	90	90		90		90		90		90		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					200.000.000,00		230.000.000,00		250.000.000,00		280.000.000,00		300.000.000,00	
Persentase pemberdayaan psks	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	100	100	100	200.000.000,00	100	230.000.000,00	100	250.000.000,00	100	280.000.000,00	100	300.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					330.000.000,00		340.000.000,00		360.000.000,00		380.000.000,00		400.000.000,00	
Persentase Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	70	75	76	330.000.000,00	77	340.000.000,00	78	360.000.000,00	79	380.000.000,00	80	400.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	50	50	52		55		57		59		60		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	60	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	60	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					330.000.000,00		350.000.000,00		380.000.000,00		390.000.000,00		400.000.000,00	
Persentase perlindungan dan jaminan sosial	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (Persentase)	90	90	90	330.000.000,00	90	350.000.000,00	90	380.000.000,00	90	390.000.000,00	90	400.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	60	60	62		63		65		68		69		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	60	60	62		63		65		66		69		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					150.000.000,00		160.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	150.000.000,00	100	160.000.000,00	100	180.000.000,00	100	190.000.000,00	100	200.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					50.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00	
Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	70.000.000,00	100	80.000.000,00	100	90.000.000,00	100	100.000.000,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					3.268.989.492,00		3.414.356.869,00		3.566.992.614,00		3.728.260.147,00		3.896.541.055,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.931.503.522,00		3.072.106.197,00		3.219.739.004,00		3.373.753.453,00		3.536.518.622,00	
Mengingkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (%)	60	63	65	2.931.503.522,00	66	3.072.106.197,00	68	3.219.739.004,00	70	3.373.753.453,00	72	3.536.518.622,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian	Berkembang	Berkembang	Berkembang		Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Terkelola dan Terukur		2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Intern Pemerintah (SPIP) (Level)													TRANSMIGRASI
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					5.559.506,00		5.837.481,00		6.129.355,00		6.435.823,00		6.757.614,00	
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	25	50	60	5.559.506,00	70	5.837.481,00	80	6.129.355,00	90	6.435.823,00	100	6.757.614,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					244.191.908,00		244.191.908,00		244.191.908,00		244.191.908,00		244.191.908,00	
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	80	80	90	244.191.908,00	95	244.191.908,00	100	244.191.908,00	100	244.191.908,00	100	244.191.908,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	80	80	90		95		100		100		100		2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					10.089.749,00		10.594.236,00		11.123.948,00		11.680.145,00		12.264.152,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	50	50	60	10.089.749,00	70	10.594.236,00	80	11.123.948,00	90	11.680.145,00	100	12.264.152,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	18	20	25		30		35		35		35		2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					77.644.807,00		81.627.047,00		85.808.399,00		92.198.818,00		96.808.759,00	
Meningkatnya Pekerja Indonesia yang terlindungi	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))	35	40	45	77.644.807,00	50	81.627.047,00	55	85.808.399,00	60	92.198.818,00	65	96.808.759,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	1.255	1.355	1.400		1.500		1.550		1.600		2.000		2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan	100	100	100		100		100		100		100		2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)													
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					7.311.200.000,00		7.646.800.000,00		7.983.400.000,00		8.319.000.000,00		8.645.600.000,00	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.241.200.000,00		4.376.800.000,00		4.513.400.000,00		4.649.000.000,00		4.775.600.000,00	
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	80	82	85	4.241.200.000,00	87	4.376.800.000,00	90	4.513.400.000,00	92	4.649.000.000,00	95	4.775.600.000,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					750.000.000,00		805.000.000,00		860.000.000,00		915.000.000,00		970.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan Efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembagunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	1,33	3,0	4,0	750.000.000,00	5,0	805.000.000,00	6,0	860.000.000,00	7,0	915.000.000,00	8,0	970.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	38,26	38,70	40,20		40,60		41,20		41,60		50,10		2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					640.000.000,00		680.000.000,00		720.000.000,00		760.000.000,00		800.000.000,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	640.000.000,00	100	680.000.000,00	100	720.000.000,00	100	760.000.000,00	100	800.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					640.000.000,00		680.000.000,00		720.000.000,00		760.000.000,00		800.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)		1	1	640.000.000,00	1	680.000.000,00	1	720.000.000,00	1	760.000.000,00	1	800.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	1	1	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	1	90.000.000,00	1	95.000.000,00	1	100.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					400.000.000,00		425.000.000,00		450.000.000,00		475.000.000,00		500.000.000,00	
Terjaminya hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	60,75	60,90	70,20	400.000.000,00	70,35	425.000.000,00	70,50	450.000.000,00	70,75	475.000.000,00	70,95	500.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					560.000.000,00		595.000.000,00		630.000.000,00		665.000.000,00		700.000.000,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuansalah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100	560.000.000,00	100	595.000.000,00	100	630.000.000,00	100	665.000.000,00	100	700.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	75,72	75,85	75,95		76,25		76,50		76,75		77,00		2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					3.978.827.168,00		4.153.296.444,00		4.274.196.444,00		4.386.998.774,00		4.509.386.544,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.925.696.429,00		3.024.379.395,00		3.073.379.395,00		3.117.181.725,00		3.163.379.395,00	
Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	74,75	76	77,5	2.925.696.429,00	79	3.024.379.395,00	80	3.073.379.395,00	81	3.117.181.725,00	82	3.163.379.395,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					105.000.000,00		117.000.000,00		129.000.000,00		140.000.000,00		151.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	100	100	100	105.000.000,00	100	117.000.000,00	100	129.000.000,00	100	140.000.000,00	100	151.000.000,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					701.376.421,00		753.162.731,00		804.062.731,00		854.062.731,00		910.252.831,00	
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	83,43	83,75	84	701.376.421,00	84,25	753.162.731,00	84,85	804.062.731,00	90	854.062.731,00	93,5	910.252.831,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					145.813.680,00		152.813.680,00		159.813.680,00		165.813.680,00		173.813.680,00	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	48,21	34,36	32,25	145.813.680,00	30	152.813.680,00	28,09	159.813.680,00	25,01	165.813.680,00	12,05	173.813.680,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					100.940.638,00		105.940.638,00		107.940.638,00		109.940.638,00		110.940.638,00	
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100	100	100	100.940.638,00	100	105.940.638,00	100	107.940.638,00	100	109.940.638,00	100	110.940.638,00	2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					5.458.000.000,00		5.977.000.000,00		6.505.000.000,00		7.025.000.000,00		7.650.000.000,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					8.000.000,00		17.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		60.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	0	50	60	8.000.000,00	70	17.000.000,00	80	35.000.000,00	80	45.000.000,00	80	60.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan (Persentase)	25	35	45		55		57		59		60		1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					5.000.000.000,00		5.100.000.000,00		5.200.000.000,00		5.300.000.000,00		5.500.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	50	10	20	5.000.000.000,00	21	5.100.000.000,00	22	5.200.000.000,00	23	5.300.000.000,00	25	5.500.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu (Persentase)	50	100	100		100		100		100		100		1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persentase)	0	0,05	0,1	100.000.000,00	0,2	200.000.000,00	0,3	300.000.000,00	0,4	400.000.000,00	0,5	500.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	0	50		52		52,12		52,37		53,57		1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase)	0	0,05	0,1	100.000.000,00	0,2	200.000.000,00	0,3	300.000.000,00	0,4	400.000.000,00	0,5	500.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (Persentase)	51	51,45	51,90		51,55		51,60		52		53		1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Persentase Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau yang Tertata (Persentase)	0	0	0		70		100		100		100		1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	25	35	45	100.000.000,00	55	200.000.000,00	57	300.000.000,00	59	400.000.000,00	60	500.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya penggunaan tanah yang teratur, legal, dan berkelanjutan					100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	0	0	0	50.000.000,00	15	60.000.000,00	15	70.000.000,00	15	80.000.000,00	15	90.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					5.747.412.964,00		8.114.525.633,00		8.831.302.426,00		9.797.166.426,00		11.282.116.078,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.759.923.093,00		4.115.564.807,00		4.243.866.426,00		4.284.166.426,00		4.342.566.426,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	90	90	90	3.759.923.093,00	90	4.115.564.807,00	90	4.243.866.426,00	90	4.284.166.426,00	90	4.342.566.426,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					654.075.025,00		871.524.826,00		650.000.000,00		690.000.000,00		1.293.049.652,00	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	654.075.025,00	100	871.524.826,00	100	650.000.000,00	100	690.000.000,00	100	1.293.049.652,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN					270.586.000,00		837.936.000,00		966.436.000,00		1.119.500.000,00		1.301.500.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	66,67	65,18	65,38	270.586.000,00	65,58	837.936.000,00	65,78	966.436.000,00	65,98	1.119.500.000,00	66,18	1.301.500.000,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	95,75	73,13	73,43		73,73		74,03		74,33		74,63		2.11.3.28.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					116.687.193,00		244.500.000,00		340.000.000,00		435.500.000,00		531.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	2,288	2,288	2,298	116.687.193,00	2,309	244.500.000,00	2,319	340.000.000,00	2,330	435.500.000,00	2,340	531.000.000,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					45.000.000,00		312.000.000,00		514.000.000,00		742.000.000,00		880.000.000,00	
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	0	0	60	45.000.000,00	65	312.000.000,00	70	514.000.000,00	75	742.000.000,00	80	880.000.000,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Beracun (Limbah B3)														
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					32.287.500,00		80.000.000,00		97.000.000,00		113.000.000,00		130.000.000,00	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	70	70	72	32.287.500,00	72	80.000.000,00	76	97.000.000,00	78	113.000.000,00	80	130.000.000,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					10.000.000,00		25.000.000,00		32.000.000,00		40.000.000,00		47.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	90	90	92	10.000.000,00	94	25.000.000,00	96	32.000.000,00	98	40.000.000,00	100	47.000.000,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					0,00		85.000.000,00		107.000.000,00		128.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	0	0	0,00	100	85.000.000,00	100	107.000.000,00	100	128.000.000,00	100	150.000.000,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					0,00		10.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	0	0	0	0,00	100	10.000.000,00	100	12.000.000,00	100	15.000.000,00	100	20.000.000,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					38.000.000,00		43.000.000,00		59.000.000,00		85.000.000,00		120.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	38.000.000,00	100	43.000.000,00	100	59.000.000,00	100	85.000.000,00	100	120.000.000,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					820.854.153,00		1.490.000.000,00		1.810.000.000,00		2.145.000.000,00		2.467.000.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	45,09	50	55	820.854.153,00	60	1.490.000.000,00	65	1.810.000.000,00	70	2.145.000.000,00	75	2.467.000.000,00	2.11.3.28.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan														
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					4.009.364.225,00		4.811.237.070,00		5.771.484.484,00		6.921.781.380,00		8.298.064.056,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.334.364.225,00		4.001.237.070,00		4.801.484.484,00		5.761.781.380,00		6.912.064.056,00	
Tercapainyan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	3.334.364.225,00	100	4.001.237.070,00	100	4.801.484.484,00	100	5.761.781.380,00	100	6.912.064.056,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemerintah (AKIP)														PENCATATAN SIPIL
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					245.000.000,00		294.000.000,00		352.800.000,00		423.360.000,00		508.032.000,00	
MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	0	7,10	7,20	245.000.000,00	7,50	294.000.000,00	7,90	352.800.000,00	8,10	423.360.000,00	8,30	508.032.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	65,95	70,56	70,80		80,10		80,20		80,30		80,40		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Perekaman KTP elektronik (%)	95,15	95,3	95,5		96		96,5		97		97,5		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					185.000.000,00		222.000.000,00		266.400.000,00		319.680.000,00		383.616.000,00	
MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	99,05	99,06	99,10	185.000.000,00	99,20	222.000.000,00	99,30	266.400.000,00	99,40	319.680.000,00	99,50	383.616.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	99,78	99,80	99,82		99,84		99,86		99,87		99,99		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi	0,33	0,35	0,37		0,39		0,40		0,42		0,43		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang Melaporkan (Persentase)													PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	0	0,05	0,07		0,1		0,15		0,2		0,3		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)	95,51	96,50	96,50		97,02		97,04		97,06		97,08		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur (Persentase)	97,93	97,95	98		98,01		98,02		98,03		98,05		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					195.000.000,00		234.000.000,00		280.800.000,00		336.960.000,00		404.352.000,00	
MENINGKATNYA PEMANFAATAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama (%)	100	100	100	195.000.000,00	100	234.000.000,00	100	280.800.000,00	100	336.960.000,00	100	404.352.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MENINGKATNYA KUALITAS PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah data profil kependudukan yang disusun (Dokumen)	1	1	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					6.320.000.000,00		6.220.000.000,00		5.915.000.000,00		5.920.000.000,00		6.065.000.000,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.500.000.000,00		3.400.000.000,00		3.230.000.000,00		3.280.000.000,00		3.300.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	80	80	100	3.500.000.000,00	100	3.400.000.000,00	100	3.230.000.000,00	100	3.280.000.000,00	100	3.300.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					300.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	0	0	100	300.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	300.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					70.000.000,00		80.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	70	70	20,83	70.000.000,00	26,04	80.000.000,00	31,25	95.000.000,00	36,46	100.000.000,00	41,67	105.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					550.000.000,00		540.000.000,00		390.000.000,00		390.000.000,00		390.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	80	80	62,50	550.000.000,00	37,50	540.000.000,00	0	390.000.000,00	0	390.000.000,00	0	390.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	80	80	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.900.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		1.950.000.000,00		1.970.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	1	1	100	1.900.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	1.950.000.000,00	100	1.970.000.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	1	1	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					6.215.000.000,00		6.670.000.000,00		7.125.000.000,00		7.580.000.000,00		8.125.000.000,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					560.000.000,00		620.000.000,00		680.000.000,00		740.000.000,00		800.000.000,00	
Terkendalinya jumlah pertambahan penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2,4	2,4	2,4	560.000.000,00	2,4	620.000.000,00	2,39	680.000.000,00	2,39	740.000.000,00	2,39	800.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					4.180.000.000,00		4.500.000.000,00		4.820.000.000,00		5.140.000.000,00		5.570.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	73,8	73,8	73,8	4.180.000.000,00	73,7	4.500.000.000,00	73,7	4.820.000.000,00	73,6	5.140.000.000,00	73,6	5.570.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	5,01	5,01	5,00		5,00		4,9		4,9		4,8		2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	72,52	75,70	75,90		76,10		76,30		76,50		77,70		2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun (Persentase)	32,2	32,2	31,7		31,15		31,3		31,1		31,1		2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														PERLINDUNGAN ANAK
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.475.000.000,00		1.550.000.000,00		1.625.000.000,00		1.700.000.000,00		1.755.000.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	85,00	85,00	85,10	1.475.000.000,00	85,20	1.550.000.000,00	85,20	1.625.000.000,00	85,30	1.700.000.000,00	85,30	1.755.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	69,5	70,1	70,6		71,1		71,6		72,1		72,6		2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	82,8	84,4	85,8		87,1		88,3		89,4		89,9		2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					3.017.194.640,00		5.009.771.100,00		4.780.850.000,00		5.023.300.000,00		5.173.350.000,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.688.006.593,00		2.931.521.100,00		3.062.300.000,00		3.227.350.000,00		3.302.350.000,00	
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap layanan kesekretariatan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	90,59	95	95	2.688.006.593,00	95	2.931.521.100,00	95	3.062.300.000,00	95	3.227.350.000,00	95	3.302.350.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					329.188.047,00		1.568.250.000,00		1.164.550.000,00		1.225.950.000,00		1.270.250.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas kabupaten/kota (Indeks)	0	0,55	0,56	329.188.047,00	0,57	1.568.250.000,00	0,58	1.164.550.000,00	0,59	1.225.950.000,00	0,6	1.270.250.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	0	25	30		35		40		45		50		2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					0,00		510.000.000,00		554.000.000,00		570.000.000,00		600.750.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut (Unit)	0	0	1	0,00	1	510.000.000,00	1	554.000.000,00	1	570.000.000,00	1	600.750.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					10.221.591.000,00		11.243.591.000,00		12.178.591.000,00		13.113.591.000,00		13.991.591.000,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	
Tingkat kepuasan ASN terhadap layanan Sekretariat	Capaian kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)	100	100	100	5.000.000.000,00	100	5.000.000.000,00	100	5.000.000.000,00	100	5.000.000.000,00	100	5.000.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.932.000.000,00		1.969.000.000,00		1.999.000.000,00		2.029.000.000,00		2.052.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas Transformasi komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Persentase)	0	74	80	1.932.000.000,00	85	1.969.000.000,00	90	1.999.000.000,00	95	2.029.000.000,00	100	2.052.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					3.289.591.000,00		4.274.591.000,00		5.179.591.000,00		6.084.591.000,00		6.939.591.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE (Indeks)	2,42	2,9	2,95	3.289.591.000,00	3,00	4.274.591.000,00	3,1	5.179.591.000,00	3,2	6.084.591.000,00	3,5	6.939.591.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					5.064.242.234,00		5.199.242.234,00		5.269.242.234,00		5.404.242.234,00		5.469.242.234,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.404.242.234,00		4.404.242.234,00		4.404.242.234,00		4.454.242.234,00		4.454.242.234,00	
Meningkatnya Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	4.404.242.234,00	100	4.404.242.234,00	100	4.404.242.234,00	100	4.454.242.234,00	100	4.454.242.234,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														PERDAGANGAN
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Meningkatnya pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	0	0	30	30.000.000,00	40	35.000.000,00	50	35.000.000,00	60	40.000.000,00	65	40.000.000,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					150.000.000,00		175.000.000,00		180.000.000,00		185.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	0	80	85	150.000.000,00	90	175.000.000,00	95	180.000.000,00	100	185.000.000,00	100	200.000.000,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					100.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		175.000.000,00		185.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	0	80	85	100.000.000,00	90	150.000.000,00	95	160.000.000,00	100	175.000.000,00	100	185.000.000,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														PERDAGANGAN
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					200.000.000,00		220.000.000,00		250.000.000,00		280.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	0	80	85	200.000.000,00	90	220.000.000,00	95	250.000.000,00	100	280.000.000,00	100	300.000.000,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					50.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	0	80	85	50.000.000,00	90	70.000.000,00	95	80.000.000,00	100	90.000.000,00	100	100.000.000,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					100.000.000,00		110.000.000,00		125.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke	0	80	85	100.000.000,00	90	110.000.000,00	95	125.000.000,00	100	140.000.000,00	100	150.000.000,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Formal (Persentase)													AN DAN PERDAGANGAN
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	0	80	85		90		95		100		100		2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Meningkatnya pengembangan UMKM	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persentase)	43	43	43	30.000.000,00	45	35.000.000,00	45	35.000.000,00	47	40.000.000,00	47	40.000.000,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					4.160.000.000,00		4.160.000.000,00		4.160.000.000,00		4.160.000.000,00		4.160.000.000,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00	
Tingkat Kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	98	98,3	98,5	3.500.000.000,00	98,7	3.500.000.000,00	99	3.500.000.000,00	99,5	3.500.000.000,00	100	3.500.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	88,20	88,50	89	150.000.000,00	89,15	150.000.000,00	89,35	150.000.000,00	89,45	150.000.000,00	89,55	150.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	28,52	35	35	150.000.000,00	40	150.000.000,00	40	150.000.000,00	45	150.000.000,00	50	150.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	40	45	50	75.000.000,00	60	75.000.000,00	60	75.000.000,00	65	75.000.000,00	65	75.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	98	98,5	99	35.000.000,00	99,3	35.000.000,00	99,7	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					8.800.749.650,00		9.063.290.000,00		9.385.650.000,00		9.630.495.000,00		9.833.500.000,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.840.967.000,00		3.956.290.000,00		4.143.190.000,00		4.298.495.000,00		4.373.500.000,00	
Meningkatnya Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	80	85	87	3.840.967.000,00	89	3.956.290.000,00	91	4.143.190.000,00	93	4.298.495.000,00	95	4.373.500.000,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					747.344.000,00		787.000.000,00		821.460.000,00		831.000.000,00		867.000.000,00	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	42	50	50	747.344.000,00	50	787.000.000,00	50	821.460.000,00	50	831.000.000,00	50	867.000.000,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/ training dan memperolehÂ sertifikat (Persentase)	2	5	7		10		12		14		15		2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					2.447.438.650,00		2.520.000.000,00		2.596.000.000,00		2.661.000.000,00		2.728.000.000,00	
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	10	25	26	2.447.438.650,00	27	2.520.000.000,00	28	2.596.000.000,00	29	2.661.000.000,00	30	2.728.000.000,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Persentase Atlet yang berasal dari Kab/Kota yang masuk PelatdaÂ Provinsi (Persentase)	2	3	4		5		6		7		8		2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Persentase jumlah atlet berprestasi (Persentase)	10	12	14		16		18		20		22		2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					1.765.000.000,00		1.800.000.000,00		1.825.000.000,00		1.840.000.000,00		1.865.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	15	15	16	1.765.000.000,00	16	1.800.000.000,00	17	1.825.000.000,00	17	1.840.000.000,00	18	1.865.000.000,00	2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					65.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		95.000.000,00		105.000.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					65.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		95.000.000,00		105.000.000,00	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional SSN	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	1,49	2,6	2,7	65.000.000,00	2,8	75.000.000,00	2,9	85.000.000,00	3,0	95.000.000,00	3,5	105.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					96.000.000,00		130.000.000,00		160.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					96.000.000,00		130.000.000,00		160.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00	
Meningkatnya Keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	0	20	40	96.000.000,00	60	130.000.000,00	80	160.000.000,00	100	200.000.000,00	100	220.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					499.657.273,00		499.657.273,00		499.657.273,00		499.657.273,00		499.657.273,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					338.378.429,00		338.378.429,00		338.378.429,00		338.378.429,00		338.378.429,00	
Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	100	100	100	338.378.429,00	100	338.378.429,00	100	338.378.429,00	100	338.378.429,00	100	338.378.429,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					72.915.131,00		72.915.131,00		72.915.131,00		72.915.131,00		72.915.131,00	
Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	70,3	70,5	70,7	72.915.131,00	70,9	72.915.131,00	71,1	72.915.131,00	71,3	72.915.131,00	71,5	72.915.131,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					88.363.713,00		88.363.713,00		88.363.713,00		88.363.713,00		88.363.713,00	
Meningkatnya Warisan Budaya Yang Dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	2.640	2,70	2,80	88.363.713,00	3,10	88.363.713,00	3,20	88.363.713,00	3,40	88.363.713,00	3,80	88.363.713,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang	70,03	70,05	70,10		70,15		70,20		70,25		70,30		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Ditetapkan (Persentase)													
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					5.138.953.396,00		5.867.598.736,00		5.995.236.109,00		6.688.121.345,00		7.123.333.684,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.148.953.396,00		3.778.098.736,00		3.801.261.109,00		4.384.447.595,00		4.704.476.871,00	
Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	77	78	80	3.148.953.396,00	82	3.778.098.736,00	84	3.801.261.109,00	85	4.384.447.595,00	87	4.704.476.871,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.660.000.000,00		1.743.000.000,00		1.830.150.000,00		1.921.657.500,00		2.017.739.750,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	56,95	60	60	1.660.000.000,00	65	1.743.000.000,00	70	1.830.150.000,00	75	1.921.657.500,00	77	2.017.739.750,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					330.000.000,00		346.500.000,00		363.825.000,00		382.016.250,00		401.117.063,00	
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	70	60	60	330.000.000,00	65	346.500.000,00	70	363.825.000,00	75	382.016.250,00	77	401.117.063,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					1.860.000.000,00		1.953.000.000,00		2.050.650.000,00		2.153.182.500,00		2.260.841.626,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					1.430.000.000,00		1.501.500.000,00		1.576.575.000,00		1.655.403.750,00		1.738.173.938,00	
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	76,02	50	50	1.430.000.000,00	55	1.501.500.000,00	60	1.576.575.000,00	65	1.655.403.750,00	70	1.738.173.938,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					380.000.000,00		399.000.000,00		418.950.000,00		439.897.500,00		461.892.375,00	
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	0	30	30	380.000.000,00	35	399.000.000,00	40	418.950.000,00	45	439.897.500,00	50	461.892.375,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					50.000.000,00		52.500.000,00		55.125.000,00		57.881.250,00		60.775.313,00	
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap	Persentase Akses Masyarakat terhadap	0	30	30	50.000.000,00	35	52.500.000,00	40	55.125.000,00	45	57.881.250,00	50	60.775.313,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)													AN DAN KEARSIPAN
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					8.000.000.000,00		8.000.000.000,00		8.000.000.000,00		8.000.000.000,00		8.000.000.000,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00		4.000.000.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Dinas Perikanan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	71,2	72	74	4.000.000.000,00	76	4.000.000.000,00	78	4.000.000.000,00	80	4.000.000.000,00	82	4.000.000.000,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	8.120	8.370	8.600	1.000.000.000,00	8.870	1.000.000.000,00	9.150	1.000.000.000,00	9.430	1.000.000.000,00	9.500	1.000.000.000,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	5.970	6.100	6.400	1.000.000.000,00	6.700	1.000.000.000,00	7.000	1.000.000.000,00	7.300	1.000.000.000,00	7.500	1.000.000.000,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KELAUTAN DAN PERIKANAN														
Nilai Kepatuhan Pengawasan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)	10	15	20	1.000.000.000,00	25	1.000.000.000,00	30	1.000.000.000,00	35	1.000.000.000,00	40	1.000.000.000,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Meningkatnya produksi olahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Olahan dan Pemasaran (Ton)	23,20	18,00	18,54	1.000.000.000,00	19,10	1.000.000.000,00	19,75	1.000.000.000,00	20,40	1.000.000.000,00	21,10	1.000.000.000,00	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	43,35	43,72	44,09		44,46		44,83		45,20		45,57		3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					4.138.149.661,00		4.331.312.935,00		4.533.533.091,00		4.745.285.047,00		5.065.689.389,00	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.954.328.617,00		3.102.045.048,00		3.257.147.301,00		3.420.004.666,00		3.689.663.984,00	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Laporan Kegiatan Administrasi Umum (Dokumen)	1	1	1	2.954.328.617,00	1	3.102.045.048,00	1	3.257.147.301,00	1	3.420.004.666,00	1	3.689.663.984,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian (%)	100	100	100		100		100		100		100		3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
	Dokumen Administrasi Pengelola Keuangan (Dokumen)	20	20	20		20		20		20		20		3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
	Dokumen perencanaan (Perubahan Renja PD, Renja PD, KAK Perencanaan Sub kegiatan, PK, register risiko, RKA DPA) (Dokumen)	10	10	9		9		9		9		9		3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					238.529.359,00		250.451.618,00		262.974.208,00		276.122.919,00		289.929.065,00	
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	8	10	10	238.529.359,00	12	250.451.618,00	12	262.974.208,00	15	276.122.919,00	15	289.929.065,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					680.700.000,00		696.985.000,00		713.749.250,00		731.012.013,00		748.793.619,00	
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	100	50	33	680.700.000,00	25	696.985.000,00	20	713.749.250,00	16	731.012.013,00	14	748.793.619,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00	
persentase Pelaku Ekraf yang terfailitasi	Jumlah Produk/Jasa Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya (Produk)	0	0	20	20.000.000,00	25	25.000.000,00	30	30.000.000,00	35	35.000.000,00	40	40.000.000,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					244.591.685,00		256.831.269,00		269.662.332,00		283.145.449,00		297.302.721,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan	30	35	37	244.591.685,00	40	256.831.269,00	42	269.662.332,00	45	283.145.449,00	47	297.302.721,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tervalidasi (Persentase)													
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					41.562.618.878,00		45.683.251.363,00		44.972.551.363,00		45.563.551.363,00		45.250.551.363,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.374.836.371,00		12.638.551.363,00		12.638.551.363,00		12.638.551.363,00		12.638.551.363,00	
Peningkatan Tatakelola dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	12.374.836.371,00	100	12.638.551.363,00	100	12.638.551.363,00	100	12.638.551.363,00	100	12.638.551.363,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					16.146.000.000,00		19.257.000.000,00		19.282.000.000,00		19.315.000.000,00		19.289.000.000,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	7,14	7,25	7,35	16.146.000.000,00	7,45	19.257.000.000,00	7,60	19.282.000.000,00	7,86	19.315.000.000,00	8	19.289.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	1,5	2	2,5		2,75		2,8		3		3,1		3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	33,38	37,11	39		42		45		47		50		3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN					11.335.000.000,00		11.355.000.000,00		11.390.000.000,00		11.390.000.000,00		11.320.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	6.391,27	6.391,27	6.391,27	11.335.000.000,00	6.391,27	11.355.000.000,00	6.391,27	11.390.000.000,00	6.391,27	11.390.000.000,00	6.391,27	11.320.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					370.000.000,00		360.000.000,00		475.000.000,00		480.000.000,00		590.000.000,00	
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	1	15	15	370.000.000,00	15	360.000.000,00	15	475.000.000,00	15	480.000.000,00	15	590.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	0	0	80		85		85		90		90		3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	80	100	80		80		80		80		80		3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULA					700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
NGAN BENCANA PERTANIAN														
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	0	50	80	700.000.000,00	85	700.000.000,00	85	700.000.000,00	90	700.000.000,00	90	700.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	0	50	80		85		85		90		90		3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	0	50	80	240.000.000,00	85	240.000.000,00	85	240.000.000,00	90	240.000.000,00	90	240.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					396.782.507,00		1.132.700.000,00		247.000.000,00		800.000.000,00		473.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	4	4	4	396.782.507,00	4	1.132.700.000,00	4	247.000.000,00	4	800.000.000,00	4	473.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	0	0	0		2		0		1		1		3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERTANIAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					370.000.000,00		430.000.000,00		450.000.000,00		485.000.000,00		515.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PERDAGANGAN														
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Meningkatnya perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenaga kerjaan (%)	0	0	30	30.000.000,00	35	35.000.000,00	40	35.000.000,00	50	40.000.000,00	60	40.000.000,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					50.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang efisien	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	0	80	85	50.000.000,00	90	75.000.000,00	95	80.000.000,00	100	90.000.000,00	100	100.000.000,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilisasi Harga Barang	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan	100	100	100	60.000.000,00	100	65.000.000,00	100	70.000.000,00	100	75.000.000,00	100	80.000.000,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Barang Penting (Persentase)													AN DAN PERDAGANGAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Meningkatnya pengembangan ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	0	0	50	30.000.000,00	50	35.000.000,00	60	35.000.000,00	65	40.000.000,00	70	40.000.000,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					150.000.000,00		160.000.000,00		165.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00	
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	50	80	90	150.000.000,00	100	160.000.000,00	100	165.000.000,00	100	170.000.000,00	100	180.000.000,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					50.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00	
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	0	80	85	50.000.000,00	90	60.000.000,00	95	65.000.000,00	100	70.000.000,00	100	75.000.000,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					180.000.000,00		200.000.000,00		212.000.000,00		225.000.000,00		235.000.000,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					100.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00	
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	0	80	85	100.000.000,00	90	110.000.000,00	95	115.000.000,00	100	120.000.000,00	100	125.000.000,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	0	80	85	50.000.000,00	90	55.000.000,00	95	60.000.000,00	100	65.000.000,00	100	70.000.000,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					30.000.000,00		35.000.000,00		37.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengelolaan sistem informasi industri nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap (Persentase)	0	0	50	30.000.000,00	60	35.000.000,00	65	37.000.000,00	75	40.000.000,00	80	40.000.000,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					136.090.124,00		31.936.333,00		33.329.023,00		34.791.346,00		36.326.786,00	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					18.365.419,00		19.283.689,00		20.247.874,00		21.260.268,00		22.323.281,00	
Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	76	80	100	18.365.419,00	100	19.283.689,00	100	20.247.874,00	100	21.260.268,00	100	22.323.281,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					4.082.553,00		4.082.553,00		4.082.553,00		4.082.553,00		4.082.553,00	
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	65	70	85	4.082.553,00	90	4.082.553,00	100	4.082.553,00	100	4.082.553,00	100	4.082.553,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					113.642.152,00		8.570.091,00		8.998.596,00		9.448.525,00		9.920.952,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran Dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	50	65	80	113.642.152,00	90	8.570.091,00	100	8.998.596,00	100	9.448.525,00	100	9.920.952,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					39.160.554.363,00		41.120.915.363,00		42.519.195.363,00		43.925.389.253,00		45.335.891.363,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					33.928.864.105,00		35.705.169.105,00		36.926.938.105,00		38.156.544.995,00		39.390.381.105,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	62,10	64	65	33.928.864.105,00	66	35.705.169.105,00	67	36.926.938.105,00	68	38.156.544.995,00	69	39.390.381.105,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Level)	Rintisan	Berkembang	Berkembang		Berkembang		Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					4.033.789.518,00		4.123.789.518,00		4.213.789.518,00		4.303.789.518,00		4.393.789.518,00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan otonomi Daerah serta Meningkatnya Kualitas	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	60	62	64	4.033.789.518,00	66	4.123.789.518,00	67	4.213.789.518,00	68	4.303.789.518,00	70	4.393.789.518,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	2,60	2,70	2,90		3,10		3,25		3,35		3,45		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	60	62	64		65		66		68		70		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.197.900.740,00		1.291.956.740,00		1.378.467.740,00		1.465.054.740,00		1.551.720.740,00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	60	62	63	1.197.900.740,00	64	1.291.956.740,00	65	1.378.467.740,00	66	1.465.054.740,00	67	1.551.720.740,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Kualifikasi dan Kompentensi SDM PBJ (Skor)	50	50	55		60		65		70		75		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Pemanfaatan Sistem Pengadaan (Skor)	90	91	92		93		94		95		96		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	17,78	20	22		25		28		30		35		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					42.678.649.741,00		45.611.574.998,00		47.892.153.747,00		50.286.761.436,00		51.974.033.546,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27.166.760.667,00		28.525.098.703,00		29.951.353.638,00		31.448.921.320,00		33.021.367.386,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	53,85	60	61	27.166.760.667,00	62	28.525.098.703,00	63	29.951.353.638,00	64	31.448.921.320,00	80	33.021.367.386,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Level)	Berkembang	Berkembang	Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					15.511.889.074,00		17.086.476.295,00		17.940.800.109,00		18.837.840.116,00		18.952.666.160,00	
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	95,47	99,50	100	15.218.909.868,00	100	16.778.848.129,00	100	17.617.790.535,00	100	18.498.680.062,00	100	18.596.548.105,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	83	85	87	292.979.206,00	89	307.628.166,00	90	323.009.574,00	93	339.160.054,00	95	356.118.055,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	95,47	100	100		100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
5.01 - PERENCANAAN					11.529.341.597,00		11.802.223.087,00		12.102.392.726,00		12.432.579.329,00		12.795.784.592,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.800.526.697,00		8.800.526.697,00		8.800.526.697,00		8.800.526.697,00		8.800.526.697,00	
Meningkatnya Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	8.800.526.697,00	100	8.800.526.697,00	100	8.800.526.697,00	100	8.800.526.697,00	100	8.800.526.697,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														INOVASI DAERAH
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.092.507.900,00		1.201.758.690,00		1.321.934.559,00		1.454.128.015,00		1.599.540.816,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100	1.092.507.900,00	100	1.201.758.690,00	100	1.321.934.559,00	100	1.454.128.015,00	100	1.599.540.816,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.636.307.000,00		1.799.937.700,00		1.979.931.470,00		2.177.924.617,00		2.395.717.079,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang	100	100	100	545.000.000,00	100	599.500.000,00	100	659.450.000,00	100	725.395.000,00	100	797.934.500,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Infrastruktur dan Kewilayahan	Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)													PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	548.157.000,00	100	602.972.700,00	100	663.269.970,00	100	729.596.967,00	100	802.556.664,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100	543.150.000,00	100	597.465.000,00	100	657.211.500,00	100	722.932.650,00	100	795.225.915,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.02 - KEUANGAN					200.880.171.294,00		200.990.171.294,00		201.100.171.294,00		201.210.170.394,00		201.320.171.294,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					30.530.000.000,00		30.530.000.000,00		30.530.000.000,00		30.530.000.000,00		30.530.000.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	95,27	95,40	95,60	30.530.000.000,00	95,90	30.530.000.000,00	96	30.530.000.000,00	96,30	30.530.000.000,00	96,60	30.530.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN					168.080.536.672,00		168.080.536.672,00		168.080.536.672,00		168.080.536.672,00		168.080.536.672,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEUANGAN DAERAH														
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	166.509.716.800,00	100	166.509.716.800,00	100	166.509.716.800,00	100	166.509.716.800,00	100	166.509.716.800,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	31,89	31,70	31,30	1.160.279.344,00	30,90	1.160.279.344,00	30,70	1.160.279.344,00	30,30	1.160.279.344,00	30	1.160.279.344,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	24,37	24,50	25,55		27,10		29		30		35		5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	89,01	89,10	89,30	410.540.528,00	89,50	410.540.528,00	89,70	410.540.528,00	89,90	410.540.528,00	90	410.540.528,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	2,05	2	1,8		1,2		1		0,5		0		5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.417.323.050,00		1.517.323.050,00		1.617.323.050,00		1.717.322.150,00		1.817.323.050,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	2,25	2,70	3	1.417.323.050,00	3,5	1.517.323.050,00	4	1.617.323.050,00	4,5	1.717.322.150,00	5	1.817.323.050,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					852.311.572,00		862.311.572,00		872.311.572,00		882.311.572,00		892.311.572,00	
Meningkatnya Upaya Extensifikasi dan Instensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	3,61	3,62	3,63	852.311.572,00	3,64	862.311.572,00	3,65	872.311.572,00	3,67	882.311.572,00	3,68	892.311.572,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ((%))	4,04	4,24	4,45		4,67		4,91		5,15		5,41		5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.03 - KEPEGAWAIAN					6.552.318.467,00		8.001.980.007,00		8.796.990.000,00		9.662.001.000,00		10.613.513.100,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.151.318.467,00		4.260.880.007,00		4.681.780.000,00		5.135.270.000,00		5.634.109.000,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (%)	62,70	65	67	3.151.318.467,00	69	4.260.880.007,00	71	4.681.780.000,00	73	5.135.270.000,00	75	5.634.109.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Rintisan	Berkembang	Berkembang		Berkembang		Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					3.401.000.000,00		3.741.100.000,00		4.115.210.000,00		4.526.731.000,00		4.979.404.100,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	100	100	100	640.000.000,00	100	704.000.000,00	100	774.400.000,00	100	851.840.000,00	100	937.024.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Persentase pegawai pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Persentase)	0	78,5	79,0		79,5		80		80,5		81		5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
meningkatnya Kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	96	96,5	96,5	251.000.000,00	97	276.100.000,00	97,5	303.710.000,00	98	334.081.000,00	98,5	367.489.100,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan	86,64	87	88	1.680.000.000,00	89	1.848.000.000,00	90	2.032.800.000,00	91	2.236.080.000,00	92	2.459.688.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kompetensinya (Persentase)													N DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	0	20	30	830.000.000,00	40	913.000.000,00	60	1.004.300.000,00	80	1.104.730.000,00	90	1.215.203.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		90.000.000,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		90.000.000,00	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN (Indeks)	72,193	72,693	73,193	50.000.000,00	73,693	60.000.000,00	74,193	70.000.000,00	74,693	70.000.000,00	75,193	90.000.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	0	5	10		15		20		25		30		5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05 - PENELITIAN DAN					836.000.000,00		919.600.000,00		1.011.560.000,00		1.112.716.000,00		1.223.987.600,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGEMBANGAN														
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					625.000.000,00		687.500.000,00		756.250.000,00		831.875.000,00		915.062.500,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan, Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Potensi Unggulan, Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah, dan Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian Pengembangan, Pengkajian dan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	50	50	100	625.000.000,00	100	687.500.000,00	100	756.250.000,00	100	831.875.000,00	100	915.062.500,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penerapan di Daerah														
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	70	70	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	75	75	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan,	0	0	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)													INOVASI DAERAH
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					211.000.000,00		232.100.000,00		255.310.000,00		280.841.000,00		308.925.100,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan, Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Potensi Unggulan, , Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah, dan Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	0	100	211.000.000,00	100	232.100.000,00	100	255.310.000,00	100	280.841.000,00	100	308.925.100,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	0	0	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	0	0	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	0	0	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					18.000.000.000,00		20.000.000.000,00		23.500.000.000,00		25.300.000.000,00		27.000.000.000,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.000.000.000,00		11.000.000.000,00		12.500.000.000,00		13.400.000.000,00		14.000.000.000,00	
Meningkatkan Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	62,10	64	65	10.000.000.000,00	66	11.000.000.000,00	67	12.500.000.000,00	68	13.400.000.000,00	80	14.000.000.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Level)	Berkembang	Berkembang	Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					4.500.000.000,00		5.000.000.000,00		6.000.000.000,00		6.500.000.000,00		7.000.000.000,00	
Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	80	80	80	4.500.000.000,00	80	5.000.000.000,00	80	6.000.000.000,00	80	6.500.000.000,00	80	7.000.000.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
	Manajemen Risiko Indeks (MRI) (Indeks)	1,769	2	2		2		2		3		3		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					3.500.000.000,00		4.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.400.000.000,00		6.000.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Infrastruktur (Infrastructure)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	3.500.000.000,00	Terintegrasi (Integrated)	4.000.000.000,00	Terintegrasi (Integrated)	5.000.000.000,00	Terintegrasi (Integrated)	5.400.000.000,00	Terintegrasi (Integrated)	6.000.000.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Berkembang	Berkembang	Berkembang		Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Terkelola dan Terukur		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					37.853.687.748,00		39.548.322.738,00		40.768.159.650,00		42.260.420.656,00		43.708.537.885,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					34.296.334.642,00		35.658.820.154,00		36.833.820.461,00		38.268.550.574,00		39.656.911.103,00	
Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan dan kebutuhan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	100	100	100	2.231.274.675,00	100	2.565.965.876,00	100	2.950.860.760,00	100	3.393.489.873,00	100	3.902.513.356,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN NASAL
Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan dan kebutuhan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	100	100	100	1.849.747.984,00	100	1.849.747.984,00	100	1.849.747.984,00	100	1.849.747.984,00	100	1.849.747.984,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN MAJE
Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan dan kebutuhan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	100	100	100	3.362.023.200,00	100	3.383.641.200,00	100	3.390.859.200,00	100	3.408.877.200,00	100	3.444.895.200,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN KAUR SELATAN
Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan dan kebutuhan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	90	95	95	1.774.905.626,00	95	1.940.162.859,00	95	1.940.162.859,00	95	2.100.100.265,00	95	2.100.700.265,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TETAP
Pemenuhan jasa penunjang urusan	Tingkat kepuasan pegawai	95	95	95	3.341.462.396,00	95	3.575.409.621,00	95	3.753.568.402,00	96	3.941.236.323,00	97	4.138.297.301,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 -

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan dan kebutuhan	terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)													KECAMATAN KAUR TENGAH
Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan dan kebutuhan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	80	90	90	1.691.503.247,00	90	1.691.503.247,00	90	1.691.503.247,00	90	1.691.503.247,00	90	1.691.503.247,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN LUAS
Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan dan kebutuhan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	100	100	100	2.003.525.886,00	100	2.089.852.179,00	100	2.198.944.786,00	100	2.304.042.023,00	100	2.404.042.023,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN MUARA SAHUNG
Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan dan kebutuhan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	80	80	81	2.086.482.802,00	81	2.086.482.802,00	85	2.086.482.802,00	86	2.086.482.802,00	90	2.086.482.802,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN KINAL
Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan dan kebutuhan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	100	100	100	1.650.479.849,00	100	1.700.000.000,00	100	1.700.000.000,00	100	1.700.000.000,00	100	1.700.000.000,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN LUNGKANG KULE
Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan dan kebutuhan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	95	95	95	1.723.869.826,00	95	1.810.063.317,00	95	1.900.566.483,00	95	1.995.594.807,00	95	2.095.374.548,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN PADANG GUCI HULU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan dan kebutuhan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	95	95	95	3.309.613.598,00	95	3.475.094.278,00	100	3.648.848.992,00	100	3.831.291.442,00	100	4.022.856.014,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN KAUR UTARA
Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan dan kebutuhan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	80	85,20	85,70	1.836.701.025,00	87,65	1.929.177.576,00	88,25	2.025.661.455,00	89,92	2.128.070.053,00	90,10	2.234.688.555,00	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN PADANG GUCI HILIR
Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan dan kebutuhan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	100	100	100	2.448.189.093,00	100	2.570.598.548,00	100	2.699.092.824,00	100	2.834.093.888,00	100	2.975.789.141,00	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN KELAM TENGAH
Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan dan kebutuhan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	90	90	90	3.081.596.868,00	95	3.086.162.100,00	95	3.092.562.100,00	97	3.099.062.100,00	98	3.105.062.100,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN TANJUNG KEMUNING
Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan dan kebutuhan	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (Persentase)	80	80	85	1.904.958.567,00	85	1.904.958.567,00	90	1.904.958.567,00	90	1.904.958.567,00	95	1.904.958.567,00	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN SEMIDANG GUMAY
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHA					1.713.158.164,00		1.820.676.493,00		1.827.311.116,00		1.834.702.370,00		1.842.788.064,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
N DAN PELAYANAN PUBLIK														
Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah (Persentase)	0	0	80	10.000.000,00	81	11.000.000,00	81,50	12.000.000,00	82	12.000.000,00	82,25	13.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN NASAL
Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah (Persentase)	100	100	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN MAJE
Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah (Persentase)	99	99	99	9.200.000,00	100	10.401.000,00	100	11.602.000,00	100	12.803.000,00	100	14.804.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN KAUR SELATAN
Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah (Persentase)	95	96	96	10.375.652,00	96	11.413.217,00	96	11.413.217,00	96	12.554.538,00	96	12.554.538,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TETAP
Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah (Persentase)	100	100	100	3.547.740,00	100	3.725.127,00	100	3.911.383,00	100	4.106.952,00	100	4.312.300,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN KAUR TENGAH
Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah (Persentase)	0	0	85	10.000.000,00	86	10.000.000,00	87	10.000.000,00	88	10.000.000,00	89	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN LUAS
Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan perangkat	0	0	75	20.000.000,00	80	20.000.000,00	85	20.000.000,00	85	20.000.000,00	85	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN MUARA SAHUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pelayanan yang diterima	daerah (Persentase)													
Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah (Persentase)	85	86	86	10.850.419,00	87	10.985.845,00	87	10.988.980,00	89	10.990.900,00	90	11.001.230,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN KINAL
Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah (Persentase)	100	100	100	1.500.000.000,00	100	1.600.000.000,00	100	1.600.000.000,00	100	1.600.000.000,00	100	1.600.000.000,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN LUNGKANG KULE
Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah (Persentase)	0	0	85	10.000.000,00	86	10.000.000,00	87	10.000.000,00	88	10.000.000,00	89	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN PADANG GUCI HULU
Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah (Persentase)	95	95	95	72.586.359,00	95	76.215.678,00	100	80.026.461,00	100	84.027.784,00	100	88.229.172,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN KAUR UTARA
Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah (Persentase)	80	85,20	85,70	6.351.414,00	87,65	6.668.985,00	88,25	7.002.434,00	89,92	7.352.555,00	90,10	7.720.183,00	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN PADANG GUCI HILIR
Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah (Persentase)	90	91	92	13.000.000,00	93	13.000.000,00	94	13.000.000,00	95	13.000.000,00	96	13.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN KELAM TENGAH
Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah (Persentase)	90	90	90	10.879.939,00	95	10.900.000,00	95	11.000.000,00	97	11.500.000,00	98	11.800.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN TANJUNG KEMUNING

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah (Persentase)	80	80	85	6.366.641,00	85	6.366.641,00	90	6.366.641,00	90	6.366.641,00	95	6.366.641,00	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN SEMIDANG GUMAY
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					891.719.129,00		937.195.569,00		950.750.680,00		966.713.397,00		985.414.099,00	
Peningkatan kemandirian, kesejahteraan, partisipasi, dan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes berdasarkan konsep inovasi (Desa/Kelurahan)	0	0	17	20.000.000,00	17	20.000.000,00	17	20.000.000,00	17	20.000.000,00	17	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN NASAL
Peningkatan kemandirian, kesejahteraan, partisipasi, dan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes berdasarkan konsep inovasi (Desa/Kelurahan)	0	0	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN MAJE
Peningkatan kemandirian, kesejahteraan, partisipasi, dan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes berdasarkan konsep inovasi (Desa/Kelurahan)	19	19	19	288.000.000,00	19	291.603.000,00	19	292.806.000,00	19	295.809.000,00	19	301.812.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN KAUR SELATAN
Peningkatan kemandirian, kesejahteraan, partisipasi, dan kapasitas	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes	0	0	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TETAP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan	berdasarkan konsep inovasi (Desa/Kelurahan)													
Peningkatan kemandirian, kesejahteraan, partisipasi, dan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes berdasarkan konsep inovasi (Desa/Kelurahan)	9	9	9	210.000.000,00	9	220.500.000,00	9	231.525.000,00	9	243.101.250,00	9	255.256.312,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN KAUR TENGAH
Peningkatan kemandirian, kesejahteraan, partisipasi, dan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes berdasarkan konsep inovasi (Desa/Kelurahan)	0	0	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN LUAS
Peningkatan kemandirian, kesejahteraan, partisipasi, dan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes berdasarkan konsep inovasi (Desa/Kelurahan)	0	0	7	30.000.000,00	7	30.000.000,00	7	30.000.000,00	7	30.000.000,00	7	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN MUARA SAHUNG
Peningkatan kemandirian, kesejahteraan, partisipasi, dan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes berdasarkan konsep inovasi (Desa/Kelurahan)	85	86	86	15.250.340,00	87	15.250.340,00	87	15.250.340,00	89	15.250.340,00	90	15.250.340,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN KINAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan kemandirian, kesejahteraan, partisipasi, dan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes berdasarkan konsep inovasi (Desa/Kelurahan)	100	100	100	120.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN LUNGKANG KULE
Peningkatan kemandirian, kesejahteraan, partisipasi, dan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes berdasarkan konsep inovasi (Desa/Kelurahan)	95	95	95	16.804.883,00	95	17.645.127,00	95	18.527.383,00	95	19.453.752,00	95	20.426.440,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN PADANG GUCI HULU
Peningkatan kemandirian, kesejahteraan, partisipasi, dan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes berdasarkan konsep inovasi (Desa/Kelurahan)	95	95	95	4.663.906,00	95	4.897.102,00	100	5.141.957,00	100	5.399.055,00	100	5.669.007,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN KAUR UTARA
Peningkatan kemandirian, kesejahteraan, partisipasi, dan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN PADANG GUCI HILIR
Peningkatan kemandirian, kesejahteraan, partisipasi, dan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes berdasarkan konsep inovasi (Desa/Kelurahan)	90	91	92	30.000.000,00	93	30.000.000,00	94	30.000.000,00	95	30.000.000,00	96	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN KELAM TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan kemandirian, kesejahteraan, partisipasi, dan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes berdasarkan konsep inovasi (Desa/Kelurahan)	90	90	90	12.000.000,00	95	12.300.000,00	95	12.500.000,00	97	12.700.000,00	98	12.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN TANJUNG KEMUNING
Peningkatan kemandirian, kesejahteraan, partisipasi, dan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes berdasarkan konsep inovasi (Desa/Kelurahan)	0	0	13	30.000.000,00	13	30.000.000,00	13	30.000.000,00	13	30.000.000,00	13	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN SEMIDANG GUMAY
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					275.688.906,00		326.122.102,00		326.666.957,00		327.124.055,00		327.694.007,00	
Masyarakat yang aman, tertib, dan teratur	Indeks Kesetaraan (Indeks)	3	6	9	150.000.000,00	9	200.000.000,00	9	200.000.000,00	9	200.000.000,00	9	200.000.000,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN LUNGKANG KULE
Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan (Persentase)	0	0	80	10.000.000,00	80	10.000.000,00	82	10.000.000,00	83	10.000.000,00	83	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN NASAL
Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan (Persentase)	0	0	80	10.000.000,00	80	10.000.000,00	80,25	10.000.000,00	80,50	10.000.000,00	81	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN MAJE

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan (Persentase)	0	0	80	10.000.000,00	80	10.000.000,00	83	10.000.000,00	84	10.000.000,00	85	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN KAUR SELATAN
Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan (Persentase)	0	0	85	10.000.000,00	86	10.000.000,00	87	10.000.000,00	88	10.000.000,00	89	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TETAP
Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan (Persentase)	0	0	85	10.000.000,00	86	10.000.000,00	87	10.000.000,00	88	10.000.000,00	89	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN KAUR TENGAH
Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan (Persentase)	0	0	85	10.000.000,00	86	10.000.000,00	87	10.000.000,00	88	10.000.000,00	89	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN LUAS
Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan (Persentase)	0	0	85	10.000.000,00	86	10.000.000,00	87	10.000.000,00	88	10.000.000,00	89	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN MUARA SAHUNG
Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan (Persentase)	85	86	86	6.025.000,00	87	6.025.000,00	87	6.025.000,00	89	6.025.000,00	90	6.025.000,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN KINAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan (Persentase)	0	0	85	5.000.000,00	86	5.000.000,00	87	5.000.000,00	88	5.000.000,00	89	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN PADANG GUCI HULU
Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan (Persentase)	95	95	95	4.663.906,00	95	4.897.102,00	100	5.141.957,00	100	5.399.055,00	100	5.669.007,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN KAUR UTARA
Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan (Persentase)	0	0	85	10.000.000,00	86	10.000.000,00	87	10.000.000,00	88	10.000.000,00	89	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN PADANG GUCI HILIR
Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan (Persentase)	0	0	85	10.000.000,00	86	10.000.000,00	87	10.000.000,00	88	10.000.000,00	89	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN KELAM TENGAH
Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan (Persentase)	90	90	90	10.000.000,00	95	10.200.000,00	95	10.500.000,00	97	10.700.000,00	98	11.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN TANJUNG KEMUNING
Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan (Persentase)	0	0	85	10.000.000,00	86	10.000.000,00	87	10.000.000,00	88	10.000.000,00	89	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN SEMIDANG GUMAY
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGG					378.910.076,00		422.591.322,00		437.627.450,00		456.338.074,00		478.082.159,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Terciptanya wilayah yang kondusif dan aman	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di kecamatan (Persentase)	100	100	100	51.265.252,00	100	58.955.040,00	100	67.798.296,00	100	77.968.040,00	100	89.663.246,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN NASAL
Terciptanya wilayah yang kondusif dan aman	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di kecamatan (Persentase)	100	100	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN MAJE
Terciptanya wilayah yang kondusif dan aman	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di kecamatan (Persentase)	0	0	90	10.000.000,00	92	10.000.000,00	94	10.000.000,00	95	10.000.000,00	96	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN KAUR SELATAN
Terciptanya wilayah yang kondusif dan aman	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di kecamatan (Persentase)	95	96	96	18.085.280,00	96	19.893.808,00	96	19.893.808,00	96	21.883.188,00	96	24.751.408,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TETAP
Terciptanya wilayah yang kondusif dan aman	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di kecamatan (Persentase)	100	100	100	36.867.667,00	100	37.898.986,00	100	38.797.970,00	100	39.700.887,00	100	40.765.533,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN KAUR TENGAH
Terciptanya wilayah yang kondusif dan aman	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di	80	90	90	33.906.466,00	90	33.906.466,00	90	33.906.466,00	90	33.906.466,00	90	33.906.466,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN LUAS

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	kecamatan (Persentase)													
Terciptanya wilayah yang kondusif dan aman	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di kecamatan (Persentase)	100	100	100	26.192.782,00	100	27.502.421,00	100	28.877.542,00	100	30.321.419,00	100	31.837.489,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN MUARA SAHUNG
Terciptanya wilayah yang kondusif dan aman	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di kecamatan (Persentase)	85	86	86	22.842.942,00	87	22.842.942,00	87	22.842.942,00	89	22.842.942,00	90	22.842.942,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN KINAL
Terciptanya wilayah yang kondusif dan aman	Indeks Kesetaraan (Indeks)	20	15	15	22.109.710,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN LUNGKANG KULE
Terciptanya wilayah yang kondusif dan aman	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di kecamatan (Persentase)	95	95	95	23.711.038,00	95	24.896.589,00	95	26.141.419,00	95	27.448.490,00	95	28.820.914,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN PADANG GUCI HULU
Terciptanya wilayah yang kondusif dan aman	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di kecamatan (Persentase)	95	95	95	13.221.750,00	95	13.882.837,00	100	14.576.979,00	100	15.305.828,00	100	16.071.119,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN KAUR UTARA
Terciptanya wilayah yang kondusif dan aman	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di kecamatan (Persentase)	80	85,20	85,70	17.001.100,00	87,65	17.851.155,00	88,25	18.743.712,00	89,92	19.680.898,00	90,10	20.664.943,00	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN PADANG GUCI HILIR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terciptanya wilayah yang kondusif dan aman	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di kecamatan (Persentase)	80	90	90	16.889.776,00	90	17.744.765,00	90	18.632.003,00	95	19.563.603,00	95	20.541.786,00	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN KELAM TENGAH
Terciptanya wilayah yang kondusif dan aman	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di kecamatan (Persentase)	90	90	90	23.100.000,00	95	23.500.000,00	95	23.700.000,00	97	24.000.000,00	98	24.500.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN TANJUNG KEMUNING
Terciptanya wilayah yang kondusif dan aman	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di kecamatan (Persentase)	80	80	85	33.716.313,00	85	33.716.313,00	90	33.716.313,00	90	33.716.313,00	95	33.716.313,00	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN SEMIDANG GUMAY
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					297.876.831,00		382.917.098,00		391.982.986,00		406.992.186,00		417.648.453,00	
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, pengembangan potensi desa, dan terwujudnya masyarakat desa yang berdaya	Persentase hasil fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Persentase)	100	100	100	24.582.878,00	100	28.270.310,00	100	32.510.857,00	100	37.387.486,00	100	42.995.609,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN NASAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, pengembangan potensi desa, dan terwujudnya masyarakat desa yang berdaya	Persentase hasil fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Persentase)	100	100	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN MAJE
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, pengembangan potensi desa, dan terwujudnya masyarakat desa yang berdaya	Persentase hasil fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Persentase)	100	100	100	23.000.000,00	100	24.201.000,00	100	24.602.000,00	100	25.003.000,00	100	25.404.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN KAUR SELATAN
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan	Persentase hasil fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Persentase)	94	98	98	22.868.776,00	98	25.155.653,00	98	25.155.653,00	98	30.940.519,00	98	30.940.519,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TETAP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
keuangan desa yang akuntabel, pengembangan potensi desa, dan terwujudnya masyarakat desa yang berdaya														
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, pengembangan potensi desa, dan terwujudnya masyarakat desa yang berdaya	Persentase hasil fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Persentase)	100	100	100	16.000.000,00	100	17.890.000,00	100	18.987.000,00	100	19.345.000,00	100	20.134.000,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN KAUR TENGAH
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, pengembangan potensi desa, dan terwujudnya masyarakat desa yang berdaya	Persentase hasil fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Persentase)	80	90	90	17.258.677,00	90	17.258.677,00	90	17.258.677,00	90	17.258.677,00	90	17.258.677,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN LUAS

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, pengembangan potensi desa, dan terwujudnya masyarakat desa yang berdaya	Persentase hasil fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Persentase)	100	100	100	14.000.000,00	100	14.000.000,00	100	14.000.000,00	100	14.000.000,00	100	14.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN MUARA SAHUNG
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, pengembangan potensi desa, dan terwujudnya masyarakat desa yang berdaya	Persentase hasil fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Persentase)	85	86	86	16.100.098,00	87	16.100.098,00	87	16.100.098,00	89	16.100.098,00	90	16.100.098,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN KINAL
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan	Indeks Kesetaraan (Indeks)	20	15	15	27.290.738,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN LUNGKANG KULE

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
keuangan desa yang akuntabel, pengembangan potensi desa, dan terwujudnya masyarakat desa yang berdaya														
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, pengembangan potensi desa, dan terwujudnya masyarakat desa yang berdaya					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN PADANG GUCI HULU
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, pengembangan potensi desa, dan terwujudnya masyarakat desa yang berdaya	Persentase hasil fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Persentase)	95	95	95	18.795.498,00	95	19.735.273,00	100	20.722.037,00	100	21.758.139,00	100	22.846.046,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN KAUR UTARA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, pengembangan potensi desa, dan terwujudnya masyarakat desa yang berdaya	Persentase hasil fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Persentase)	80	85,20	85,70	13.044.000,00	87,65	13.696.200,00	88,25	14.381.010,00	89,92	15.100.060,00	90,10	15.855.063,00	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN PADANG GUCI HILIR
	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	90	85,20	85,70		85,80		88,75		89,92		90,10		7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN PADANG GUCI HILIR
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, pengembangan potensi desa, dan terwujudnya masyarakat desa yang berdaya	Persentase hasil fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Persentase)	90	90	90	29.633.645,00	95	31.115.327,00	95	32.671.094,00	97	34.304.647,00	98	36.019.881,00	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN KELAM TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, pengembangan potensi desa, dan terwujudnya masyarakat desa yang berdaya	Persentase hasil fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Persentase)	95	95	95	17.207.961,00	95	17.400.000,00	95	17.500.000,00	95	17.700.000,00	95	18.000.000,00	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN TANJUNG KEMUNING
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, pengembangan potensi desa, dan terwujudnya masyarakat desa yang berdaya	Persentase hasil fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa (Persentase)	80	80	85	18.094.560,00	85	18.094.560,00	90	18.094.560,00	90	18.094.560,00	95	18.094.560,00	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN SEMIDANG GUMAY
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					6.135.000.000,00		6.460.000.000,00		7.285.000.000,00		8.120.000.000,00		8.575.000.000,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					2.480.000.000,00		2.500.000.000,00		2.520.000.000,00		2.550.000.000,00		2.600.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kualitas Layanan dan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	68,75	69	70	2.480.000.000,00	75	2.500.000.000,00	78	2.520.000.000,00	80	2.550.000.000,00	82	2.600.000.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Level)	Berkembang	Berkembang	Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					800.000.000,00		900.000.000,00		1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		1.200.000.000,00	
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	74	75	76	800.000.000,00	77	900.000.000,00	78	1.000.000.000,00	79	1.100.000.000,00	80	1.200.000.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA					950.000.000,00		1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		1.200.000.000,00		1.300.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SERTA BUDAYA POLITIK														
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	74	75	76	950.000.000,00	77	1.000.000.000,00	78	1.100.000.000,00	79	1.200.000.000,00	80	1.300.000.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00	
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	74	75	76	55.000.000,00	77	60.000.000,00	78	65.000.000,00	79	70.000.000,00	80	75.000.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					950.000.000,00		1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		1.200.000.000,00		1.300.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	74	75	76	950.000.000,00	77	1.000.000.000,00	78	1.100.000.000,00	79	1.200.000.000,00	80	1.300.000.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					900.000.000,00		1.000.000.000,00		1.500.000.000,00		2.000.000.000,00		2.100.000.000,00	
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	74	75	76	900.000.000,00	77	1.000.000.000,00	78	1.500.000.000,00	79	2.000.000.000,00	80	2.100.000.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL KESELURUHAN					1154825238669.00		1220709649549.00		1275069863967.00		1339373889652.00		1405609600573.00	

B. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, yang merangkum hasil berbagai program dan kegiatan sebagai wujud dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Sementara itu, penetapan target IKU pembangunan Kabupaten Kaur untuk periode 2025–2030 disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah dari tahun 2025 hingga 2030, serta dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan tantangan yang akan dihadapi dalam lima tahun ke depan hingga tahun 2030. Rincian target tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel IV-2 Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal	TARGET TAHUNAN					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen (%)	4,15	4,3-4,6	4,6-4,8	4,8-5,1	5,1-5,5	5,5-6,0	6,0-6,7
2.	PDRB Perkapita	Ribu (Rp)	37.416	38.300 - 40.320	41.260 - 43.430	43.430 - 46.240	46.240 - 49.220	49.220 – 52.390	52.390 – 55.780
3.	Indeks Gini	Indeks	0,3	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24
4.	Indeks Modal manusia (IMM)	Angka	n/a	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57
5.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,53	72,33	73,14	73,96	74,79	75,63	76,47
6.	Tingkat Kemiskinan	Persen (%)	17,12	16.00	15.62	14.69	13.81	12.99	11,85
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%)	3,71	3.67	3.58	3,42	3,33	3,26	3,18
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat (Indeks)	CC (59,9)	B (61-65)	B (66-70)	BB (71-75)	BB (76-80)	A (81-85)	A (86-90)
9.	Nilai Realisasi investasi Daerah	Rp	499.293.076 .808	610 M	750 M	1 T	1,20 T	1,50 T	1,75T
10.	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	Angka	56,13	57	58,1	59,04	59,98	60,92	61,86

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kaur tahun 2025–2030 disusun sebagai instrumen strategis yang digunakan untuk menilai sejauh mana pembangunan daerah berjalan secara terukur, lintas sektor, dan berorientasi pada hasil nyata. Delapan indikator utama ini menjadi representasi dari prioritas pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi RPJMD, serta menjadi acuan

dalam mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, adaptif, dan akuntabel.

Salah satu indikator yang paling mencerminkan kondisi ekonomi daerah adalah laju pertumbuhan ekonomi. Melalui pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), arah pembangunan ekonomi Kabupaten Kaur diarahkan untuk tumbuh secara stabil dan berkelanjutan. Target peningkatan dari kisaran 4,2–4,6 persen pada tahun 2025 hingga 5,1–6,0 persen pada tahun 2030 menjadi cerminan dari upaya percepatan transformasi ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan lokal.

Selaras dengan itu, PDRB per kapita digunakan untuk melihat rata-rata pendapatan masyarakat sebagai tolok ukur kesejahteraan dan daya beli. Kenaikan nilai dari Rp 38,3–40,32 juta pada 2025 menjadi Rp 52.390 – 55.780 juta di tahun 2030 menunjukkan arah kebijakan yang fokus pada peningkatan produktivitas ekonomi dan pemerataan manfaat pembangunan di seluruh lapisan masyarakat. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga ditunjukkan melalui peningkatan Indeks Modal Manusia. Kenaikan dari angka 0,47 di tahun 2025 menjadi 0,57 pada tahun 2030 menandakan fokus pada pembangunan pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi utama dalam memperkuat daya saing daerah.

Gambaran keadilan sosial tercermin dalam Indeks Gini yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Target penurunan secara bertahap dari 0,29 menjadi 0,24 selama periode perencanaan memperlihatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kaur untuk mewujudkan pemerataan hasil pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat. Dalam aspek sosial, tingkat kemiskinan menjadi indikator penting yang merefleksikan keberhasilan kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Target penurunan dari 17-16,9 persen menjadi 14,2-13,95 persen menunjukkan upaya nyata untuk mengurangi kerentanan ekonomi dan memperluas kesempatan berusaha, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Di sisi tata kelola pemerintahan, indeks reformasi birokrasi merepresentasikan kualitas layanan publik, efisiensi organisasi, serta budaya kerja aparatur negara. Transformasi kelembagaan ditargetkan meningkat dari predikat B pada tahun 2025 menuju A pada 2030, sebagai cerminan dorongan kuat terhadap pemerintahan yang profesional, transparan, dan berbasis teknologi informasi.

Dukungan infrastruktur menjadi salah satu elemen penting dalam mempercepat pembangunan wilayah. Indeks pembangunan infrastruktur ditargetkan naik dari 57,12 persen menjadi 61,86 persen, mencerminkan komitmen untuk membangun infrastruktur yang merata, terintegrasi, dan mampu mendorong konektivitas serta pelayanan dasar masyarakat yang lebih baik. Nilai realisasi investasi daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik minat investor. Peningkatan dari Rp 750 miliar menjadi Rp 1,75 triliun selama periode 2025–2030 merupakan strategi untuk memperkuat basis ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

IKU yang ditetapkan menjadi landasan utama dalam mengawal pelaksanaan RPJMD dan sekaligus menjadi instrumen pengendali pembangunan yang terukur dan terarah. Dalam implementasinya, pencapaian IKU akan diperkuat dan dijabarkan lebih lanjut melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang bersifat sektoral dan teknis. IKD memberikan ukuran yang lebih rinci terhadap kinerja perangkat daerah, sehingga sinergi antara sasaran makro dan operasional dapat terwujud secara konsisten dan berkelanjutan.

Tabel IV-3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1.	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	65,99	66,24	66,49	66,74	66,99	67,24	67,49
2.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	192,16	189,84	186,64	183,88	181,12	178,36	175,6
3.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	95,76	95,76	95,86	95,91	95,96	96,01	96,06
4.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	74,75	76	77,5	79	80	81	82
5.	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Bencana	Persentase	68,39	68,70	68,90	69	69,25	70	75
6.	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	-	33,2	35,2	38,2	39,2	41,2	42,2
7.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
8.	Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan	Dokumen	1	1	2	2	3	3	4
9.	Persentase RTH	Persentase	2,288	2,288	2,298	2,309	2,319	2,330	2,340
10.	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,15	4.3-4.5	4.5-4.8	4.8-5.1	5.1-5.5	5.5-6.0	6.0-6.7
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,71	3,67	3,58	3,42	3,33	3,26	3,18
3.	PDRB Perkapita	Ribu Rupiah	37.416	38300-40320	41260-43430	43430-46240	46240-49220	49220-52390	52390-55780
4.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	%	84,14	84,18	84,48	84,78	85,08	85,38	85,68
5.	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Persentase	3,6	3,66	3,7	3,73	3,77	3,81	3,85
6.	Persentase kontribusi sub sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terhadap PDRB	Persentase	51,4	51,66	51,92	52,17	52,44	52,7	52,96
7.	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	8,81	8,99	9,17	9,35	9,54	9,73	9,92
8.	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%	42,6	44,1	45,6	47,1	48,6	50,1	51,6
9.	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase	14,7	15,5	16,3	17,1	17,9	18,7	19,5
10.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Persentase	81,23	81,33	81,43	81,53	81,63	81,73	81,83
11.	Persentase Rumah Layak Huni	%	58	58	59	60	62	64	66

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
12.	Persentase PPKS yang mendapatkan manfaat pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial	%	88,63	88,8	88,95	89,1	89,25	89,4	89,52
13.	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,45	1,52	1,6	1,68	1,76	1,85	1,93
14.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,63	72,18	72,52	72,97	73,19	73,65	74,11
15.	Indeks Kualitas Air	Indeks	38,17	38,67	38,67	39,17	39,67	40,17	40,67
16.	Indeks Gini	Indeks	0,3	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24
17.	Tingkat Kemiskinan	(%)	17,12	16,60	15,62	14,69	13,81	12,99	11,85
18.	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,5	0,53	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68
19.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	n/a	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
20.	Indeks Desa	Indeks	0,7092	68,00	68,50	68,55	68,60	68,65	68,70
21.	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persentase	16,73	16,78	16,83	16,88	16,93	16,98	17,03
22.	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	n/a	24	25	26	27	28	29
23.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	n/a	202	204	206	208	210	215
24.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	72,97	74,22	74,85	75,48	76,12	76,77	78,08
25.	Indeks Partisipasi Olahraga	Persentase	n/a	25	26	27	28	29	30
26.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,47	8,53	8,65	8,71	8,83	8,95	9,08
27.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	60,5	62,5	64,5	65	67	70	75
28.	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	51,5	54,00	56,50	59,00	61,50	64,00	66,50
29.	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,134	0,22	0,32	0,44	0,56	0,68	0,75
30.	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	47,29	50,19	53,09	55,99	58,89	61,79	64,69
31.	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	59,59	60,6	61,79	62,89	63,99	65,09	66,19
32.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	55,47	56,97	58,47	59,97	61,47	62,97	64,47
33.	Indeks Infrastruktur Dasar	Indeks	0,675	0,825	0,825	0,825	0,825	0,9	1,125
34	Peningkatan Prestasi Olahraga	% Indeks	25	25	26	27	28	29	30
35	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
36	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	2,13	2,13	2,33	2,53	2,73	2,93	3,13
37	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	Angka	60	65	75	80	85	90	100
38	Persentase Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB	%	26	26	26,2	26,4	26,6	26,8	27
39	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	Persentase	96,15	97,25	97,35	97,45	97,55	97,65	98,00
40	Capaian SPM Urusan Pendidikan	Indeks	64,55	64,25	70,00	72,00	75,00	80,00	85,00
41	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	100	100	100	100	100	100	100
42	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang ditetapkan terhadap total pendaftaran	Angka	0	0	37	18,5	12,3	9,25	7,4
43	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persentase	96,15	96,25	96,35	96,45	96,55	96,65	96,85
44	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	0	2	2	4	4	6	6
45	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	61,99	65	68	72	75	79	82
46	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persentase	92,87	93,1	93,5	93,7	94,1	94,5	95,8
47	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
48	Peningkatan produksi perkebunan	Persentase	11	11,2	11,5	12	12,5	12,7	13
49.	Angka Partisipasi MurniÂ (APM)Â SMP	Persentase	77,58	77,78	78,10	78,30	78,50	78,75	78,90
50.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persentase	71,86	72,01	72,20	72,30	72,40	72,50	72,60
51.	Angka Partisipasi Murni (APM)Â Kesetaraan	Persentase	90,06	90,12	90,20	90,25	90,30	90,35	90,50
52.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan	Persentase	4,79	5,00	5,00	10,00	30,00	50,00	60,00
53.	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	70	75	76	77	78	79	80
54.	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Konten Digital	4	4	4	4	4	4	4
55.	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	6.391,27	6.391,27	6.391,27	6.391,27	6.391,27	6.391,27	6.391,27
56.	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persentase	70	60	60	65	70	75	77

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
57.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase	15	15	16	16	17	17	18
58.	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
59.	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	n/a	80	85	90	95	100	100
60.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	n/a	80	85	90	95	100	100
61.	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	n/a	80	85	90	95	100	100
62	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	n/a	80	85	90	95	100	100
63	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
64	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	1,33	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
65	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persentase	43	43	43	45	45	47	47
66	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	Persentase	1	1	1	1	1	1	1
67	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	Indeks	n/a	1	1	1	1	1	1
68	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persentase	10	25	26	27	28	29	30
69	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	50	80	90	100	100	100	100
70	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	n/a	0	0	100	100	100	100
71	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persentase	n/a	50	80	85	85	90	90

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
72	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase	90	90	90	90	90	90	90
73	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	85,00	85,00	85,10	85,20	85,20	85,30	85,30
74	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Persentase	76	80	100	100	100	100	100
75	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Dokumen	1	15	15	15	15	15	15
76	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persentase	n/a	80	85	90	95	100	100
77	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
78	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	69,5	70,1	70,6	71,1	71,6	72,1	72,6
79	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persentase	n/a	0	0	2	0	1	1
80	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persentase	n/a	50	80	85	85	90	90
81	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	75,72	75,85	75,95	76,25	76,50	76,75	77,00
82	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	1.255	1.355	1.400	1.500	1.550	1.600	2.000
83	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	82,8	84,4	85,8	87,1	88,3	89,4	89,9
84	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	35	40	45	50	55	60	65
85	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	60,75	60,90	70,20	70,35	70,50	70,75	70,95
86	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	60	100	100	100	100	100	100
87	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	43,35	43,72	44,09	44,46	44,83	45,20	45,57
88	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	38,26	38,70	40,20	40,60	41,20	41,60	50,10

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
89	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persentase	n/a	0	80	85	85	90	90
90	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	72,52	75,70	75,90	76,10	76,30	76,50	77,70
91	Persentase jumlah atlet berprestasi	Persentase	10	12	14	16	18	20	22
92	Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	Persentase	32,2	32,2	31,7	31,15	31,3	31,1	31,1
93	Iklim Keamanan SD	Nilai	70,00	70,90	71,80	72,70	73,60	74,50	75,40
94	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	34,53	51,05	61,86	76,28	94,30	100	100
95	Iklim Keamanan SMP	Nilai	65,23	66,73	68,23	69,73	71,23	72,73	74,23
96	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	44,99	36,06	37,06	38,06	39,06	40,06	41,06
97	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	56,29	58,79	61,29	63,79	66,29	68,79	71,29
98	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	53,90	56,30	58,70	61,10	63,50	65,90	68,30
99	Indeks Iklim Kebinekaan Sekolah Jenjang SD	Nilai	68,48	69,48	70,48	71,48	72,48	73,48	74,48
100	Indeks Iklim Kebinekaan Sekolah Jenjang SMP	Nilai	68,64	69,64	70,64	71,64	72,64	73,64	74,64
101	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan	%	3,26	4	5	6	7	8	9
102	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	%	60	100	100	100	100	100	100
103	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	0,40	0,40	0,50	0,55	0,60	0,70	0,75
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1.	Indeks Modal Manusia	Angka	-	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57
2.	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	56,13	57	58,1	59,04	59,98	60,92	61,86
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,53	72,33	73,14	73,96	74,79	75,63	76,47

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
4.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,15	13,19	13,23	13,27	13,31	13,35	13,38
5.	Rasio Kewirausahaan	Persentase	4,84	4,96	5,07	5,17	5,28	5,39	5,5
6.	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	72,97	74,22	74,85	75,48	76,12	76,77	78,08
7.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	3,66	3,81	3,99	4,19	4,41	4,64	4,89
8.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	15,9	14,79	13,8	12,5	11,00	10,8	9,5
9.	Nilai Realisasi Investasi Daerah	Rp	499.293.076.808	610.000.000.000	750.000.000.000	1.000.000.000.000	1.200.000.000.000	1.500.000.000.000	1.750.000.000.000
10.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,17	3,25	3,28	3,32	3,36	3,40	3,42
11.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,45	1,47	1,49	1,51	1,53	1,55	1,57
12.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	77,69	79	80	81	82	83	84
13.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persentase	3	3	3	3	3	3	4
14.	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin	Indeks	5	5	5	5	5	5	5
15.	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	20	30	35	40	45	50	55
16.	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	27,61	28	28,50	29	29,25	29,50	30,00
17.	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi	Indeks	21,06	21,25	21,50	22	22,25	23	23,25
18.	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	8	10	10	12	12	15	15
19.	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja	Indeks	24,14	24,25	24,50	25	25,25	25,50	26
20.	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	30	35	37	40	42	45	47
21.	Nilai Produksi Industri	Milyar Rupiah	181,63	182,40	183,45	184,52	185,66	186,69	187,71
22.	Indeks Insfrastruktur Strategis dan Konektivitas Wilayah	Indeks	0,475	0,625	0,625	0,625	0,825	0,9	0,975
23.	Jumlah Produksi Perikanan Olahan dan Pemasaran	Kg	23,20	18,00	18,54	19,10	19,75	20,40	21,10
24.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori/ Nilai	B (61,62)	B (66)	BB (72)	BB (74)	BB (76)	BB (78)	A (80)
25.	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	Rintisan	Rintisan	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Terdefinisi
26.	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	28,52	35	35	40	40	45	50

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
27.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persentase	50	50	60	70	80	90	100
28.	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Persentase	50	65	80	90	100	100	100
29.	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Persentase	N/A	5	10	15	20	25	30
30.	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
31.	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	80	80	90	95	100	100	100
32.	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Persentase	65	70	85	90	100	100	100
33.	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	%	62,70	65	67	69	71	73	75
34	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Persentase	0	80	85	90	95	100	100
35	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	86,64	87	88	89	90	91	92
36	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persentase	0	20	30	40	60	80	90
37	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	98	98,5	99	99,3	99,7	100	100
38	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase	0	50	80	85	85	90	90
39	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase	42	50	50	50	50	50	50
40	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Rintisan	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi
41	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	59,9	60-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,42	2,50	2,58	2,66	2,74	2,82	2,9
3.	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	B (61,62)	B (66)	BB (72)	BB (74)	BB (76)	BB (78)	A (80)
4.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	3,82	3,88	3,94	4	4,06	4,12	4,18
5.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	77,69	79	80	81	82	83	84
6.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Dengan Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian
7.	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	70,72	71	72	73	74	75	76
8.	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	-	-	-	-	-	1,8	2
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	95	95	96	97	98	100	100
10.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	9	9	10	10	10	10	10
11.	Capaian SPM Urusan Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase	90	91	92	93	94	95	95
12.	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan ditetapkan tepat waktu	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	74	75	76	77	78	79	80
14.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	60	61	62	63	64	65	66
15.	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	0,88	0,80	0,75	0,74	0,72	0,70	0,65
16.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	40,45	42,00	45,00	47,00	49,00	51,00	53,00
17.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	67,22	68	70	73	75	78	80
18.	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	15	20	25	30	35	40	45
19.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	Indeks	83,33	84,08	84,5	85	85,5	86	86,5

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
	Layanan Administrasi Kependudukan								
20.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
21.	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
22.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	59,5	60	62	64	66	68	70
23.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	15
24.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	85	86	88	90	92	93	95
25.	Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum	daerah	90	90	90	90	90	90	90
26.	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
27.	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM di Kabupaten	Angka	74	75	76	77	78	79	80
28.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	53,32	55,10	60,20	62,99	65,23	74,82	77,06
29.	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Berkembang	Berkembang	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi
30.	Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase	65,93	69	72	75	77	82	85
31.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	75	75,5	76	76,5	77	77,5	78
32.	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	95,47	99,50	100	100	100	100	100
33.	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
34	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
35	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	%	100	100	100	100	100	100	100
36	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	74	75	76	77	78	79	80
37	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
38	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	77	78	80	82	84	85	87
39	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	1	98	98	98	100	100	100
40	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100
41	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Persentase	75	75,5	76	76,5	77	77,5	78
42	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase	0	30	30	35	40	45	50
43	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap	Persentase	0	0	50	60	65	75	80
44	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
45	Persentase PNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	1	98	98	98	100	100	100
46	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase	60	62	63	64	65	66	67
47	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase	0	0	30	40	50	60	65

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
48	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	100	98	98	98	100	100	100
49.	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	80	80	85	90	80	85	80
50.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
51.	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	0	0	60	65	70	75	80
52.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Infrastruktur (Infrastructure)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)
53.	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	25	50	60	70	80	90	100
54.	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenaga kerjaan	%	0	0	30	35	40	50	60
55.	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	40	45	50	60	60	65	65
56.	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase	0	30	30	35	40	45	50
57.	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	0	80	85	90	95	100	100
58.	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	0	80	85	90	95	100	100
59.	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	60	62	64	66	67	68	70
60.	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	80	82	85	87	90	92	95
61.	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	Persentase	51	51,45	51,90	51,55	51,60	52	53
62	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persentase	60	62	64	65	66	68	70
63	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
64	Indeks Kesetaraan Gender	Indeks	3	6	9	9	9	9	9
65	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	95,51	96,50	96,50	97,02	97,04	97,06	97,08
66	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Persentase	97,93	97,95	98	98,01	98,02	98,03	98,05
67	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
68	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
69	Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori baik	daerah	100	100	100	100	100	100	100
70	Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar*	daerah	100	100	100	100	100	100	100
71	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90	100	100	100	100	100	100
72	Persentase Desa Mandiri (%)	%	90	100	100	100	100	100	100
73	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	74,22	77,19	80,16	83,12	86,09	89,06	92,03
	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	98,57	98,84	99,11	99,38	99,66	99,93	100
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang	Persentase	46,42	54,62	61,11	67,60	74,09	74,86	75,62

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
	berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)								
	Persentasse Toilet sekolah dasar, sekolah menengah pertama dalam kondisi baik	Persentase	0,39	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	2,00
	Persentase ruang kelas sekolah dasar, sekolah menengah pertama dalam kondisi baik	Persentase	0,37	2,00	2,20	2,25	2,30	2,50	3,00
	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
	b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	15,9	14,79	13,8	12,5	11,00	10,8	9,5
	Jumlah kematian ibu	Orang	2	2	2	2	2	2	2
	Persentase Capaian Standar Pelayuanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	96	96	97	97	98	98	100
	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase	0	50	55	60	65	70	75
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persentase	0	60	66	72,6	79,86	87,85	96,63
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	Persentase	0	52	57,2	62,92	69,21	76,13	83,75
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	42,7	44,1	45,6	47,1	64,1	66,1	68,1
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persentase	0	52	57,2	62,92	69,21	76,13	83,75
	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persentase	97	83	84,5	86	87,5	89	90,5
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di	%	1.675	82,07	84,25	87,84	97,25	100,65	102,05

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
	seluruh kabupaten/kota								
	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	%	20	20	60,71	60,92	61,91	62,71	62,71
	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	%	65	20	67,11	67,27	67,35	67,45	67,45
	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	51	35	60	65	70	75	75
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persentase	0	11,43	20	30	40	50	60
	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	%	72,78	72,90	73	73,25	73,50	74	74,50
	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	96,57	96,70	96,75	96,80	96,90	96,95	97
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	96	98	98	98	100	100	100
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	90	91	92	93	94	95	95
	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	60	60	62	63	65	68	69
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Persentase	60	60	62	63	65	66	69
	Persentase (%) gelandangan	Persentase	60	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
	pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya								
	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	80	80	90	95	100	100	100
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	80	80	90	95	100	100	100
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	%	18	20	25	30	35	35	35
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	100	100	100	100	100	100
	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100
	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Bidang Tanah	30	35	40	45	50	60	60
	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	310	35	150	200	250	300	350
	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	78,30	71,85	72,06	72,27	72,48	72,69	72,90
	Indeks Kualitas Air	Indeks	66,67	65,18	65,38	65,58	65,78	65,98	66,18
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	95,75	73,13	73,43	73,73	74,03	74,33	74,63

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	65,99	80,92	80,99	81,06	81,13	81,20	81,27
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	45	50	55	60	65	70	75
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	70	70	72	74	76	78	80
	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	99,78	99,80	99,82	99,84	99,86	99,87	99,99
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	99,05	99,06	99,10	99,20	99,30	99,40	99,50
	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	0	7,10	7,20	7,50	7,90	8,10	8,30
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	65,95	70,56	70,80	80,10	80,20	80,30	80,40
	Perekaman KTP elektronik	%	95,15	95,3	95,5	96	96,5	97	97,5
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	0,33	0,35	0,37	0,39	0,40	0,42	0,43
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	0	0,05	0,07	0,1	0,15	0,2	0,3
	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	18,75	28,57	22,22	18,18	15,38	13,33	11,76
	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	57,14	33,33	33,33	66,67	100	100	100
	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	73,8	73,8	73,8	73,7	73,7	73,6	73,6
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak	%	5,01	5,01	5,00	5,00	4,9	4,9	4,8

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
	terpenuhi (unmet need)								
	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,4	2,4	2,4	2,4	2,39	2,39	2,39
	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemenÂ keselamatan	Persentase	0	0	20	25	30	35	40
	Konektivitas kabupaten/kota	Indeks	0	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,6
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	0	25	30	35	40	45	50
	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	80	99	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100
	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	80	99	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
	(OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo								
	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
	Persentase Pertumbuhan Kelompok Usaha Baru/ Wirausahawan baru	%	2,5	2,5	3	3,5	4	4,5	5
	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	Berkembang	Berkembang	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi
	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	0	80	85	90	95	100	100
	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	0	80	85	90	95	100	100
	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	88,20	88,50	89	89,15	89,35	89,45	89,55
	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	-8,5	3	3,5	4	4,5	4,7	5
	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	% Nilai	19,07	20	21	22	23	24	25
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase	3,26	4	5	6	7	8	9
	Persentase Atlet yang berasal dari Kab/Kota yang masuk PelatdaÂ Provinsi	Persentase	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperolehÂ sertifikat	Persentase	2	5	7	10	12	14	15
	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	1,49	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,5
	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	61,02	63	65	70	75	78	80
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	56,95	60	60	65	70	75	77

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	76,02	50	50	55	60	65	70
	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	8.120	8.350	8.600	8.870	9.150	9.430	9.500
	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	5.970	6.100	6.400	6.700	7.000	7.300	7.500
	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
	Jumlah Produk/Jasa Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan Intelektualnya	Produk	0	0	20	25	30	35	40
	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	7,14	7,25	7,35	7,45	7,60	7,86	8
	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	1,5	2	2,5	2,75	2,8	3	3,1
	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	80	100	80	80	80	80	80
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persentase	33,38	37,11	39	42	45	47	50
	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH								
	Kualifikasi dan Kompentensi SDM PBJ	Skor	50	50	55	60	65	70	75
	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor	90	91	92	93	94	95	96
	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	17,78	20	22	25	28	30	35
	4.02 - SEKRETARIAT DPRD								
	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	83	85	87	89	90	93	95
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	95,47	100	100	100	100	100	100
	5.01 - PERENCANAAN								

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
	Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
	5.02 - KEUANGAN								
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	2,25	2,70	3	3,5	4	4,5	5
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	3,61	3,62	3,63	3,64	3,65	3,67	3,68
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	89,01	89,10	89,30	89,50	89,70	89,90	90
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	31,89	31,70	31,30	30,90	30,70	30,30	30
	Persentase Penurunan SILPA	Persentase	2,05	2	1,8	1,2	1	0,5	0
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	24,37	24,50	25,55	27,10	29	30	35
	5.03 - KEPEGAWAIAN								
	Persentase pegawai pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase	0	78,5	79,0	79,5	80	80,5	81
	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	72,193	72,693	73,193	73,693	74,193	74,693	75,193
	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan telah menjadi bagian dari Program Kegiatan	Persentase	80	85	85	90	95	95	100
	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH								
	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	80	80	80	80	80	80	80
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terkelola dan Terukur

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Indeks	1,769	2	2	2	2	3	3
	Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi	Orang	100	100	100	100	100	100	100
	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Indeks	100	100	100	100	100	100	100
	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	74	75	76	77	78	79	80
	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	74	75	76	77	78	79	80
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	74	75	76	77	78	79	80
	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	74	75	76	77	78	79	80

BAB V. PENUTUP

Sebagai penutup, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029 merupakan pedoman strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi pembangunan, hingga program prioritas yang dirancang untuk menjawab tantangan, mengoptimalkan potensi daerah, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Penyusunan dokumen ini telah dilakukan secara terencana dan sistematis, dengan memperhatikan berbagai aspek: mulai dari kondisi objektif daerah, aspirasi masyarakat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan arah pembangunan wilayah Sumatera.

RPJMD ini juga disusun sebagai instrumen politik pembangunan yang menjembatani visi-misi kepala daerah terpilih dengan agenda pembangunan lima tahunan. Setiap sasaran dan indikator kinerja telah dirancang untuk memastikan bahwa seluruh janji politik kepala daerah dapat terukur dan dapat direalisasikan dalam periode kepemimpinan yang berjalan. Tidak hanya itu, dokumen ini juga mengintegrasikan isu-isu strategis global, nasional, dan regional yang memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas sosial, ketahanan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Kaur.

Keberhasilan implementasi RPJMD ini sangat bergantung pada komitmen dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan, baik eksekutif, legislatif, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, maupun seluruh elemen masyarakat. Diperlukan kerja sama lintas sektor dan sinergi antarlevel pemerintahan untuk mewujudkan transformasi daerah yang inklusif, tangguh, dan

berdaya saing. Dengan semangat gotong royong dan prinsip pembangunan yang partisipatif, diharapkan RPJMD ini mampu menjadi pijakan kuat bagi Kabupaten Kaur dalam membangun masa depan yang lebih baik menjadi daerah yang maju secara ekonomi, adil secara sosial, lestari secara lingkungan, dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya.

Kaur, 27 Oktober 2025

Bupati,

Gusril Pausi, S.Sos, M.A.P